Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7
1.3.1 RPJMN I-8
1.3.2 RPJM Provinsi I-9
1.3.3 RTRW Kota Banda Aceh I-11
1.3.4 RPJPD I-11
1.4 Sistematika Penulisan I-12
1.5 Maksud dan Tujuan I-14
1.5.1 Maksud I-14
1.5.2 Tujuan I-14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik dan Lokasi Wilayah II-1
2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi II-3
2.1.1.3 Kondisi Geomorfologi II-4
2.1.1.4 Kondisi Geologi II-5
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi II-6
2.1.1.6 Kondisi Klimatologi II-10
2.1.1.7 Penggunaan Lahan II-13
2.1.2 Potensi Pengembangan Daerah II-16
2.1.2.1 RTRW Kota Banda Aceh II-16
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-22
2.1.4 Demografi II-28
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-30
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-30
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB II-30
2.2.1.2 Laju Inflasi Kota Banda Aceh II-34
2.2.1.3 PDRB Perkapita II-35

2.2.2 Kesejahteraan Sosial II-36
2.2.2.1 Pendidikan..... II-36
2.2.2.1.1 Angka Melek Huruf..... II-36
2.2.2.1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah..... II-38
2.2.2.1.3 Angka Partisipasi Murni..... II-39
2.2.2.1.4 Angka Partisipasi Kasar..... II-43
2.2.2.1.5 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan..... II-45
2.2.2.2 Kesehatan..... II-48
2.2.2.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi..... II-48
2.2.2.2.2 Angka Usia Harapan Hidup..... II-49
2.2.2.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk..... II-50
2.2.2.3 Kemiskinan..... II-51
2.2.2.3.1 Penduduk Miskin Kota Banda Aceh..... II-51
2.2.2.3.2 Perlindungan Sosial..... II-53
2.2.2.3.4 Kriminalitas..... II-53
2.2.2.3.5 Demonstrasi..... II-54
2.2.3 Seni Budaya dan Olah Raga II-55
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-59
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II-59
2.3.1.1 Pendidikan..... II-59
2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah..... II-59
2.3.1.2 Kesehatan..... II-61
2.3.1.2.1 Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita..... II-61
2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)..... II-63
2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk..... II-64
2.3.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk..... II-65
2.3.1.3 Lingkungan Hidup..... II-66
2.3.1.3.1 Persentase Penanganan Sampah..... II-66
2.3.1.3.1.1 Aspek Pelayanan..... II-69
2.3.1.3.1.2 Aspek Operasional II-70
2.3.1.3.1.3 Wilayah Cakupan Layanan Sampah..... II-71
2.3.1.3.1.4 Retribusi Persampahan II-73
2.3.1.3.1.5 Pencemaran Lingkungan..... II-75

2.3.1.3.2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum II-78
2.3.1.3.3 Persentase luas Pemukiman Yang Tertata II-80
2.3.1.3.4 Sarana dan Prasarana Umum II-81
2.3.1.3.4.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik II-81
2.3.1.3.4.2 Rasio Jaringan Drainase II-82
2.3.1.3.4.3 Rasio Tempat Ibadah II-85
2.3.1.3.4.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi II-87
2.3.1.3.4.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk II-87
2.3.1.3.4.6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk II-89
2.3.1.3.5 Penataan Ruang II-92
2.3.1.3.5.1 Rasio Ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB II-92
2.3.1.3.5.2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum (PJU) II-93
2.3.1.3.5.3 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan II-94
2.3.1.3.6 Perhubungan II-96
2.3.1.3.6.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum II-96
2.3.1.3.6.2 Rasio Izin Trayek II-96
2.3.1.3.6.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum II-99
2.3.1.3.6.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bus II-101
2.3.1.3.7 Perizinan II-102
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-105
2.3.2.1 Pariwisata II-105
2.3.2.2 Pelayanan Informasi dan Teknologi Pemerintah Kota II-106
2.3.2.3 Penanaman Modal II-107
2.3.2.3.1 Jumlah Investor Berskalan Nasional (PMDN/PMA) II-107
2.3.2.4 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) II-107
2.3.2.4.1 Persentase Koperasi Aktif II-107
2.3.2.4.2 Jumlah UkmNon BPR/LKMUKM II-110

2.3.2.4.3 Jumlah BPR/LKM II-110
2.3.2.5 Kependudukan II-114
2.3.2.5.1 Pertumbuhan Penduduk II-114
2.3.2.5.2 Pengelompokan Penduduk II-116
2.3.2.5.2.1 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur II-117
2.3.2.5.2.2 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk /Geografis II-121
2.3.2.5.2.2 Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-122
2.3.2.6 Ketenagakerjaan II-127
2.3.2.6.1 Angkatan Kerja II-127
2.3.2.6.2 Produktivitas Kerja II-128
2.3.2.6.3 Kesempatan Kerja II-130
2.3.2.6.4 Pengangguran II-132
2.3.2.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-133
2.3.2.7.1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan II-133
2.3.2.7.2 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta II-136
2.3.2.7.3 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) II-137
2.3.2.7.4 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur II-137
2.3.2.8 Keluarga Berencana (KB)dan Keluarga Sejahtera (KS) II-138
2.3.2.8.1 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga II-138
2.3.2.8.2 Rasio Akseptor KB II-138
2.3.2.9 Komunikasi dan Informasi II-140
2.3.2.9.1 Jumlah Jaringan Komunikasi II-140
2.3.2.9.2 Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk II-141

2.3.2.9.3 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal II-142
2.3.2.9.4 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal II-142
2.3.2.10 Pertanahan II-144
2.3.2.10.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat II-144
2.3.2.11 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-144
2.3.2.11.1 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) II-144
2.3.2.11.2 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK II-147
2.3.2.11.3 Jumlah PKK Aktif II-149
2.3.2.11.4 Tingkat Pendidikan Aparatur Gampong II-150
2.3.2.11.5 Jumlah LSM Aktif II-154
2.3.2.12 Perpustakaan II-155
2.3.2.12.1 Jumlah Perpustakaan II-155
2.3.2.12.2 Sarana dan Prasana Perpustakaan dan Arsip II-155
2.3.2.12.3 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun II-156
2.3.2.13 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat II-157
2.3.2.13.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk II-157
2.3.2.13.2 Rasio Jumlah Linmas II-157
2.3.2.13.3 Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa II-158
2.3.3 Pelaksanaan Pemerintahan Umum II-160
2.3.3.1 Pemerintahan Gampong II-160
2.3.3.2 Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota II-161
2.3.3.3 Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan II-166
2.3.3.4 Pemuda dan Olah Raga II-167
2.3.3.4.1 Jumlah Organisasi Pemuda II-167
2.3.3.4.2 Jumlah Organisasi Olah Raga II-167
2.3.3.4.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan II-168
2.3.3.4.4 Jumlah Kegiatan Olah Raga II-168
2.4 Aspek Daya Saing II-169
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah II-169
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita) II-169
2.4.1.2 Produktivitas Daerah II-170
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-170

2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah II-170
2.4.2.1.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan II-170
2.4.2.1.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum II-171
2.4.3 Penataan Wilayah II-171
2.4.3.1 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) II-171

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-4
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-6
3.1.2 Neraca Daerah III-10
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-12
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-14
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-15

3.3 Kerangka Pendanaan III-18
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama III-18
3..3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan III-20

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Analisis SWOT IV-1
4.1.1 Kekuatan (Strength) IV-1
4.1.2 Kelemahan (Weakness) IV-1
4.1.3 Peluang (opportunity) IV-2
4.1.4 Ancaman (Threats) IV-2
4.2 Penentuan Alternatif Strategi IV-2
4.2.1 Kekuatan – Peluang (S – O) IV-2
4.2.2 Kekuatan – Ancaman (S – T) IV-3
4.2.3 Kelemahan – Peluang (W – O) IV-3
4.2.4 Kelemahan – Ancaman (W – T) IV-3

4.3 Permasalahan IV-4
4.3.1 Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat untuk Mengamalkan Syariat Islam IV-4
4.3.2 Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal IV-5
4.3.3 Kesempatan Kerja dan Keterampilan Pencari Kerja Masih Terbatas Serta Kurangnya Perlindungan Kerja IV-5
4.3.4 Pemberdayaan Ekoonomi Kerakyatan Masih Rendah IV-6
4.3.5 Kualitas Pendidikan Belum Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) IV-7
4.3.6 Pelayanan Kesehatan Belum Memadai IV-8
4.3.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Belum Memadai IV-8
4.3.8 Peran Serta Masyarakat dan Stakeholder Terkait dalam Pengelolaan Lingkungan Masih Rendah IV-11
4.3.9 Pariwisata, Seni dan Budaya Kurang Berkembang IV-12
4.3.10 Kapasitas Perempuan dan Perlindungan Anak yang Belum Optimal IV-15
4.3.11 Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Belum Optimal IV-16
4.4 Isu Strategis IV-16

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-1

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 Kebijakan Umum Kota Banda Aceh VII-1
7.2 Program Pembangunan Daerah VII-5

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

Daftar Gambar

BAB I

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ---------- I - 6

BAB II

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh ---------- II - 2
Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng di Kota Banda Aceh ---------- II - 3
Gambar 2.3 Peta Kondisi Geologi Kota Banda Aceh ---------- II - 5
Gambar 2.4 Peta Hidrogeologi Kota Banda Aceh ---------- II - 7
Gambar 2.5 Peta Resistivity Pada Kedalaman 5 Meter Dibawah Muka Tanah ---------- II - 8
Gambar 2.6 Peta Hidrologi Kota Banda Aceh ---------- II - 9
Gambar 2.7 Peta RTRW Kota Banda Aceh 2009 – 2029 ---------- II - 14
Gambar 2.8 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh Tahun 2029 ---------- II - 18
Gambar 2.9 Peta Pola Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2029 ---------- II - 19
Gambar 2.10 Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Banda Aceh ---------- II - 20
Gambar 2.11 Peta Wilayah Rawan Bencana Angin Kota Banda Aceh ---------- II - 21
Gambar 2.12 Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kota Banda Aceh ---------- II - 21
Gambar 2.13 Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Kota Banda Aceh ---------- II - 22
Gambar 2.14 Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kota Banda Aceh ---------- II - 22
Gambar 2.15 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh ---------- II - 74

BAB III

Gambar 3.1 Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBDdengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD ---------- III - 2
Gambar 3.2 Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD ---------- III - 3

Daftar Gambar

BAB II

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 27
Grafik 2.2 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Banda Aceh ---------- II - 27
Grafik 2.3 Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2011 ---------- II - 30
Grafik 2.4 Perbandingan TPAK, TPT dan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2011 ---------- II - 30
Grafik 2.5 Laju Inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011---------- II - 31
Grafik 2.6 Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 31
Grafik 2.7 Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh Per Kecamatan Tahun 2011 ---------- II - 33
Grafik 2.8 Rata-rata Lama Pendidikan Penduduk Dewasa Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II – 35
Grafik 2.9 Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2006 – 2011 ---------- II - 46
Grafik 2.10 Kunjungan Wisatawan berdasarkan hunian Hotel Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 94

Daftar Tabel

BAB II

Tabel 2.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh ------ II - 2
Tabel 2.2 Luas Daerah Aliran Sungai yang Melalui Kota Banda Aceh ---------- II - 6
Tabel 2.3 Acuan Penentuan Kisaran Kadar Garam Air Berdasarkan EC dan TDS ---------- II – 8
Tabel 2.4 Rata-Rata Tekanan Udara, Suhu Udara, Kelembaban Nisbi, Curah Hujan Dan Jumlah Hari Hujan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 10
Tabel 2.5 Penggunaan Lahan untuk Kawasan Lindung Kota Banda Aceh ----- II - 13
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan untuk Kawasan Budidaya Kota Banda Aceh----- II - 13
Tabel 2.7 Potensi Ancaman Bencana di Kota Banda Aceh ---------- II - 23
Tabel 2.8 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh---------- II - 25
Tabel 2.9 Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan---------- II - 25
Tabel 2.10 Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2007-2011 ---------- II - 25
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 26
Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh Tahun 2008-2011 ---------- II - 28
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 ---------- II - 29
Tabel 2.14 Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Indonesia (persen) Tahun 2008-2011 ---------- II - 32
Tabel 2.15 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh Tahun 2008-2011 ---------- II - 32
Tabel 2.16 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007-2011 ---------- II - 34
Tabel 2.17 Lamanya Bersekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas ---------- II - 36
Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 37
Tabel 2.19 Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2011/2012 ---------- II - 38
Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 39
Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2011/2012 -- II - 40

Tabel 2.22 Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 -------- II - 41
Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2011/2012 ---------- II - 42
Tabel 2.24 Jumlah Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 43
Tabel 2.25 Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 44
Tabel 2.26 Status Gizi Buruk Balita Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ------- II - 45
Tabel 2.27 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 46
Tabel 2.28 Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Sosial Tahun 2007-2011 ---------- II - 47
Tabel 2.29 Angka Kriminalitas di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 48
Tabel 2.30 Jumlah Demonstrasi di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 -------- II - 49
Tabel 2.31 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 50
Tabel 2.32 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 50
Tabel 2.33 Jumlah Penghargaan Budaya Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 51
Tabel 2.34 Jumlah Karya Budaya yang Diaktualisasikan Kembali Kepada Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 51
Tabel 2.35 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 51
Tabel 2.36 Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 51
Tabel 2.37 Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Bidang Jasa Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 52
Tabel 2.38 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 53
Tabel 2.39 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan Tahun 2011/2012 ---------- II - 53
Tabel 2.40 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II – 54

Tabel 2.41 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2011 ---------- II - 54
Tabel2.42 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 54
Tabel 2.43 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 56
Tabel 2.44 Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 56
Tabel 2.45 Jumlah Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskedes Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 57
Tabel 2.46 Jumlah Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskedes menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 57
Tabel 2.47 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 58
Tabel 2.48 Jumlah Dokter Tahun 2007-2011 ---------- II - 59
Tabel 2.49 Jumlah Dokter menurut Kecamatan Tahun 2011 ---------- II - 59
Tabel 2.50 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 62
Tabel 2.51 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 63
Tabel 2.52 Komposisi Sampah di Kota Banda Aceh ---------- II - 64
Tabel 2.53 Kendaraan dan Peralatan Untuk Mendukung Kegiatan Pengelolaan Sampah ---------- II - 65
Tabel 2.54 Pencemaran Status Mutu Air ---------- II - 68
Tabel 2.55 Tingkat Kebisingan ---------- II - 69
Tabel 2.56 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL ---------- II - 69
Tabel 2.57 Kasus Lingkungan ---------- II - 69
Tabel 2.58 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatka Air Bersih Dan Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 70
Tabel 2.59 Proporsi Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum menurut Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 71
Tabel 2.60 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 70
Tabel 2.61 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2007-2011 ---------- II - 72
Tabel 2.62 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2007-2011 ---------- II - 72
Tabel 2.63 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Menurut Kecamatan Tahun 2007-2011 ---------- II - 73
Tabel 2.64 Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh ---------- II - 75
Tabel 2.65 Kondisi Rumah Pompa Kota Banda Aceh ---------- II - 75
Tabel 2.66 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Tahun 2011 ---------- II - 76
Tabel 2.67 Rasio Tempat Ibadah menurut Kecamatan Tahun 2011 ---------- II - 77
Tabel 2.68 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 78
Tabel 2.69 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk ---------- II - 78
Tabel 2.70 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh ---------- II - 79
Tabel 2.71 Tempat Pemakaman Umum Kota Banda Aceh ---------- II - 80
Tabel 2.72 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap
Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2012 ---------- II - 82
Tabel 2.73 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 83
Tabel 2.74 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 83
Tabel 2.75 Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 85
Tabel 2.76 Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan
Menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 85
Tabel 2.77 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2007-2011 ---------- II - 86
Tabel 2.78 Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 86
Tabel 2.79 Jumlah Halte yang Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 87
Tabel 2.80 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2007-2011 ---------- II - 88
Tabel 2.81 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2007-2011 ---------- II - 90
Tabel 2.82 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 91
Tabel 2.83 Realisasi Izin dan Pendapatan Tahun 2007 - 2011 ---------- II - 92
Tabel 2.84 Data Arus Kunjungan Wisatawan ---------- II - 94
Tabel 2.85 Jumlah Pengaduan, Perusahaan Terverifikasi,
dan Jumlah Personil MIMS ---------- II - 95
Tabel 2.86 Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 96
Tabel 2.87 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2007-2011 ---------- II - 96
Tabel 2.88 Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 --- II - 97

Tabel 2.89 Persentase Koperasi Aktif menurut Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 97
Tabel 2.90 Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 98
Tabel 2.91 Jumlah BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 99
Tabel 2.92 Perkembangan Industri dan Perdagangan Tahun 2007 – 2011 ----- II - 99
Tabel 2.93 Jumlah dan Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011---- II - 100
Tabel 2.94 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 102
Tabel 2.95 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Angka Kelahiran Kasar (CBR), dan Angka Kematian Bayi (IMR) Tahun 2011 --------- II - 103
Tabel 2.96 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 104
Tabel 2.97 Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Di Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2011 ---------- II - 104
Tabel 2.98 Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur di Kota Banda Aceh dari Tahun 2012 – 2016---------- II - 105
Tabel 2.99 Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur di Kota Banda Aceh dari Tahun 2009 – 2011---------- II - 106
Tabel 2.100 Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur di Kota Banda Aceh dari Tahun 2012 – 2016---------- II - 107
Tabel 2.101 Proyeksi Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2011---------- II - 107
Tabel 2.102 Sebaran Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2011---------- II - 108
Tabel 2.103 Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 109
Tabel 2.104 Jumlah Cakupan Kepemilikan KTP Di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan Tahun 2008 – 2011 ---------- II - 110
Tabel 2.105 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah Tahun 2011 ---------- II - 105
Tabel 2.106 Jumlah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 113
Tabel 2.107 Jumlah Penduduk Peserta KB Di Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan Tahun 2011 ---------- II - 114
Tabel 2.108 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2007–2011---------- II - 114
Tabel 2.109 Pelatihan dan Bimbingan yang Telah diberikan Kepada Masyarakat kota Banda Aceh Tahun 2007-2011---------- II - 116
Tabel 2.110 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 117
Tabel 2.111 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II – 118
Tabel 2.112 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 120
Tabel 2.113 Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Kesehatan dan Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 121
Tabel 2.114 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Tahun 2007 – 2011---------- II - 122
Tabel 2.115 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011---------- II - 122
Tabel 2.116 Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Banda Aceh Tahun 2011 ---------- II - 122
Tabel 2.117 Rasio KDRT yang Didampingi Tahun 2009 – 2011 ---------- II - 123
Tabel 2.118 Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2009 – 2011 ------ II - 123
Tabel 2.119 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 124
Tabel 2.120 Rasio Akseptor KB Di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011--------- II - 124
Tabel 2.121 Jumlah Penyuluh KB Di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011------- II - 125
Tabel 2.122 Jaringan Komunikasi Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 --------- II - 125
Tabel 2.123 Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2007 - 2011 ---------- II - 126
Tabel 2.124 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 127
Tabel 2.125 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2007 – 2011---------- II - 128
Tabel 2.126 Pengembangan & Pemberdayaan KIG (Kelompok Informasi Gampong) dan Rasio Jumlah KIG di Tingkat Kecamatan ---------- II - 128
Tabel 2.127 Pelaksanaan Diseminasi Inf. &Pendistribusian Inf Nasional --------- II - 129
Tabel 2.128 Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 129
Tabel 2.129 Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ------- II - 130
Tabel 2.130 Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ------- II - 132
Tabel 2.131 PKK Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 133
Tabel 2.132 Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 134
Tabel 2.133 Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011---------- II - 137
Tabel 2.134 Jumlah Ormas, OKP Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 137
Tabel 2.135 Jumlah Perpustakaan Tahun 2007-2011---------- II - 138
Tabel 2.136 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2007-2011---------- II - 139
Tabel 2.137 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2007-2011 ---------- II - 139

Tabel 2.138 Rasio Jumlah Linmas Kota Banda Aceh Per 10.000 Penduduk Tahun 2007-2011 ---------- II - 140
Tabel 2.139 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2007-2011 ---- II - 141
Tabel 2.140 Rekapitulasi Regulasi Pemerintahan Mukim dan Gampong Tahun 2007-2011 ---------- II - 142
Tabel 2.141 Daftar Qanun Kota Banda Aceh yang Ditetapkan Pada Periode 2007 – 2011 ---------- II - 144
Tabel 2.142 Rasio Jumlah Tapal Batas Gampong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 ---------- II - 146
Tabel 2.143 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Anggaran dan Jumlah Objek Pemeriksaan Serta Ratio Pembinaan/Obrik dari Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 147
Tabel 2.144 Jumlah Pegawai dan Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasan dari Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 147
Tabel 2.145 Jumlah Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2007 - 2011 ---------- II - 147
Tabel 2.146 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 148
Tabel 2.147 Jumlah Organisasi Olahraga Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 148
Tabel 2.148 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 149
Tabel 2.149 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2007 – 2011---------- II - 149
Tabel 2.150 Angka konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 150
Tabel 2.151 Produktivitas Per Sektor---------- II - 151
Tabel 2.152 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2007 – 2011 ---- II - 152
Tabel 2.153 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 152
Tabel 2.154 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2007 – 2011 ---------- II - 153

BAB III

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011 ---------- III - 8
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Banda Aceh ---------- III - 11
Tabel 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur --------- III - 15
Tabel 3.4 Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh ---------- III - 16
Tabel 3.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh (Persen) ---------- III - 17

Tabel 3.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Banda Aceh ------- III - 17
Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ---------- III - 19
Tabel 3.8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh ---------- III - 21
Tabel 3.9 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh---------- III - 22
Tabel 3.10 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah------ III - 25
Tabel 3.11 Proyeksi Sumber Dana Bagi Hasil Migas dan OTSUS Tahun 2013 - 2017 ---------- III - 27

Comment [U1]: Catatan : Tahun 2018 – 2020 dihilangkan saja bila tidak perlu
Angka-angka tersebut diproyeksi dengan trend
Bila terjadi perubahan ketentuan pada dana otsus proyeksi boleh digunakan yang sebelumnya

BAB VI

Tabel 6.1 Strategi dan arah kebijakan Kota Banda Aceh ---------- VI - 1

BAB VIII

Tabel 8.1 Rekapitulasi SKPD dan Pendanaan Tahun 2013 - 2017---------- VIII – 1
Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banda Aceh ---------- VIII -3

BAB IX

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Banda Aceh ---------- IX - 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan tuntutan dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penyusunan RPJM Daerah ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu pendekatan politik dan aspiratif. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan dan penawaran rencana pembangunan, dan rakyat memilih serta menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan aspiratif dimaksudkan bahwa RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh 2012 - 2017. Sesuai dengan Pasal 76 dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD

kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Kota Banda Aceh juga memperhatikan hasil evaluasi RPJM Kota Banda Aceh tahun 2007 - 2012, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2027 serta memperhatikan RPJM Aceh 2012 - 2017.

RPJM Kota Banda Aceh juga menjadi pedoman bagi SKPD di dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan diacu untuk menyusun Rencana Kinerja SKPD.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peraturan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana *(sense of ownership)* menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu *(integrated)*, terukur *(measurable)*, dapat dilaksanakan *(aplicable)* dan berkelanjutan *(sustainable)*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan
    - Nomor : 28 Tahun 2010
    - Nomor : 0199/M PPN/04/2010
    - Nomor : PMK 95/PMK 07/2010

    tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 tahun 2012 Tentang RPJMA 2012-2017, Lembaran Daerah Nomor 121 Tahun 2012;
30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);
31. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
32. Surat Keputusan Walikota Nomor 252 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJM Kota Banda Aceh merupakan satu kesatuan bagian dari perencanaan secara menyeluruh, yaitu sistem perencanaan nasional. Oleh karenanya, sebagai bagian yang terintegrasi, RPJM Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan bagian dari perencanaan jangka panjang Kota Banda Aceh (2009 – 2029) harus berpedoman pada RPJP Kota Banda Aceh 2007 – 2027 dan RTRW Tahun 2009 – 2029. Artinya, di dalam penyusunan RPJMD, setiap program yang disusun hatus mempedomani visi, misi dan program yang telah disusun di dalam RPJP Kota Banda Aceh. Selain itu, agar tidak terjadinya tumpang tindih perancanaan dan kesemrawutan di dalam pencapaian tujuan RPJM, juga perlu mempedomani RTRW Kota Banda Aceh dengan melihat semua aspek kebijakan di dalam penggunaan ruang, serta arah pengembangan wilayah. Di samping itu, sebagai bagian integrasi nasional, RPJM Kota juga harus memperhatikan RPJMN 2010 – 2014, karena terkait dengan agenda-

agenda pembangunan nasional secara keseluruhan untuk mencapai visi dan misi secara menyuluruh, disamping juga harus memperhatikan RPJM Aceh 2012 – 2017untukmencapai visi dan misi provinsi serta program-program yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

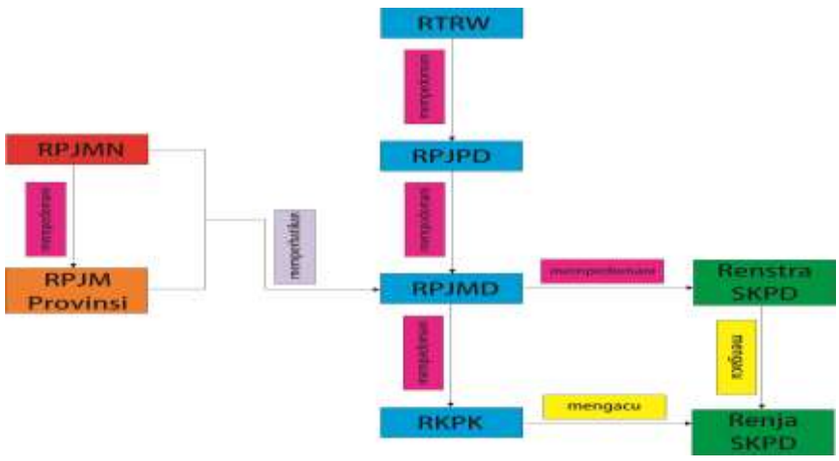

Dalam RPJMD Kota Banda Aceh dijabarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD yang selanjutnya dijabarkan kedalam RKPK.

1.3.1. RPJMN

RPJMD tidak terlepas dari RPJMN yang harus menjadi perhatian utama bagi penyusunan perencanaan nasional di daerah. Dalam RPJMN 2010 – 2014 ditetapkan kerangka visi Indonesia 2014 adalah : **"Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan"** Kerangka visi tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut :

Kesejahteraan Rakyat Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Untuk mencapai Visi Indonesia tersebut, maka pemerintah menetapkan Misi Pembangunan tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan Indonesia yang sejahtera
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Untuk lebih mempermudah dalam implementasi dan mengukur tingkat keberhasilan, maka visi dan misi pemerintah tersebut dijabarkan lagi secara lebih operasional kedalam sebelas prioritas nasional, yaitu : (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

1.3.2. RPJM Povinsi

Pemerintahan Aceh dalam RPJMD 2012 – 2017 menetapkan visi **“Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri**

Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MOU Helsinki".

Visi yang ditetapkan tersebut bermakna :

Bermartabat, adalah terciptanya kondisi masyarakat Aceh yang memiliki peradaban tinggi, akhlak mulia, cerdas, berwawasan luas, taat hukum, sehat sesuai dengan standar kehidupan serta terwukudnya Pemerintahan Aceh yang mampu melaksanakan kewenangan khusus dan istimewa yang dimilikinya.

Sejahtera, adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang layak baik materil maupun spirituil yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

Berkeadilan, adalah terwujudnya pembangunan yang adil, merata, partisipatif dan proporsional sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah berlandaskan azas manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Mandiri, adalah terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui lima misi pembangunan Aceh, yaitu :

1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana UUPA dalam rangka mewujudkan Aceh yang bermartabat.
2. Memperkuat hubungan antara Pemerintahan Aceh dengan semua stakeholder dalam rangka konsolidasi perdamaian.
3. Menerapkan Dinul Islam dan peradaban Aceh dalam segala segi kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
5. Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Membangun ekonomi Aceh yang kuat, adil dan maju dengan meningkatkan nilai tambah produk dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

1.3.3. RTRW Kota Banda Aceh

RTRW Kota Banda Aceh memiliki tujuan penataan ruang kota untuk mewujudkan ruang kota sebagai kota jasa yang Islami, tamaddun, modern, dan berbasis mitigasi bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh kebijakan dan strategi penataan ruang kota meliputi :

b. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota
c. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota, dan
d. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota

Dalam RTRW Kota Banda Aceh sampai pada tahun 2029 pengembangan wilayah fungsional kota diarahkan menjadi empat Wilayah Pengembangan, meliputi 1) Wilayah Pengembangan PK Lama yang meliputi wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan; 2) Wilayah Pengembangan PK Baru meliputi wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga (sport centre), terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), perdagangan dan jasa serta pergudangan; 3) Wilayah Pengembangan Keutapang meliputi wilayah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru dan sebagian Banda Raya berfungsi sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata; 4) Wilayah Pengembangan Ulee Kareng meliputi wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain yang komplementer dengan kedua kegiatan tersebut.

1.3.4. RPJPD

Dalam RPJPD ditetapkan Visi Pembangunan Kota Banda Aceh **"Terwujudnya Banda Aceh Sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami"**.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh tersebut ditempuh melalui tujuh misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.
3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas.
5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.
6. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas.
7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami.

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 merupakan RPJMD periode kedua dalam RPJD Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2027. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan Kota Banda Aceh diharapkan menjadi kota yang penduduknya mempunyai peradaban yang tinggi, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Di dalam bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang terkait, hubungan antar dokumen, sistematika, serta maksud dan tujuan dari pentingnya penyusunan dukumen RPJM ini.

Di dalam Bab II yang menjelaskan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan tentang berbagai aspek-aspek daerah yang terkait dengan geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum dan aspek daya saing yang dimilikin oleh Kota Banda Aceh.

Di dalam Bab III dijelaskan tentang Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dengan menjelaskan bagaimana kinerja keuangan di masa lalu serta kebijakan-kebijakan pengelolaannya, serta kerangka pendanaan.

Di dalam Bab IV dijelaskan Analisis Isu-isu Strategis, yaitu isu-isu yang menjadi trend serta berkembang dengan pesat di dalam waktu-waktu terakhir, serta isu-isu yang berkembang secara nasional dan internasional, atau juga merupakan isu menjadi perhatian Wali Kota atau Wakil Wali Kota. Di sini dijelaskan juga apa permasalah yang dihadapai dengan isu-isu tersebut.

Di dalam Bab V diuraikan dan disajikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Di dalam Bab VI diuraikan strategi-strategi yang ditempuh untuk pencapaian tujuan program dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap prgram yang telah disusun.

Di dalam Bab VII, diuraikan tentang kebijakan-kebijakan umum yang ditempuh untuk setiap program yang telah disusun, serta program-program pembangunan Kota Banda Aceh.

Di dalam Bab VIII dijelaskan tentang indikasi anggaran menurut SKPD penanggung jawab setiap tahunnya.

Di dalam Bab IX dijelaskan tentang penetapan indikator kinerja daerah dari setiap program pembangunan yang telah disusun.

Didalam Bab X dijelaskan tentang pedoman transisi dan kaedah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa RPJM Kota ini penting untuk menjadi pedoman di dalam penyusunan RKPD dan APBD, serta pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di tahun pertama. Di samping itu juga ditegaskan tentang pentingnya manjadikan RPJM ini sebagai pedoman dasar di dalam pelaksanaan pembangunan yang konsisten.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Banda Aceh 2012 – 2017 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD ini menjadi dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang sejalan dengan visi dan misi Walikota Banda Aceh untuk menyelenggarakan setiap tahap pembangunan secara periodik tahunan selama lima tahun baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD adalah menciptakan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program pembangunan guna menjamin penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta mencapai tujuan akhir pembangunan menciptakan masyarakat kota yang sejahtera.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karateristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar baik secara alamiah maupun ekonomis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi.

Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi aset bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang nasional maupun internasional.

Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30′ – 05°35′ LU dan 95°30′ – 99°16′ BT, yang terdiri dari sembilan kecamatan, 70 desa dan 20 Gampong dengan luas wilayah keseluruhan ± 61,36 km² (lihat **Tabel 2.1.** dan **Gambar 2.1.**).

Tabel 2.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan
di Kota Banda Aceh

No.	KECAMATAN	LUAS	
		(Km²)	Persentase
1.	Kec. Meuraxa	7,258	11,83
2.	Kec. Baiturrahman	4,539	7,40
3.	Kec. Kuta Alam	10,047	16,37
4.	Kec. Syiah Kuala	14,244	23,21
5.	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02
6.	Kec. Banda Raya	4,789	7,80
7.	Kec. Kuta Raja	5,211	8,49
8.	Kec. Lueng Bata	5,341	8,70
9.	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16
JUMLAH		**61,359**	**100,00**

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2011, BPS Kota Banda Aceh.

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

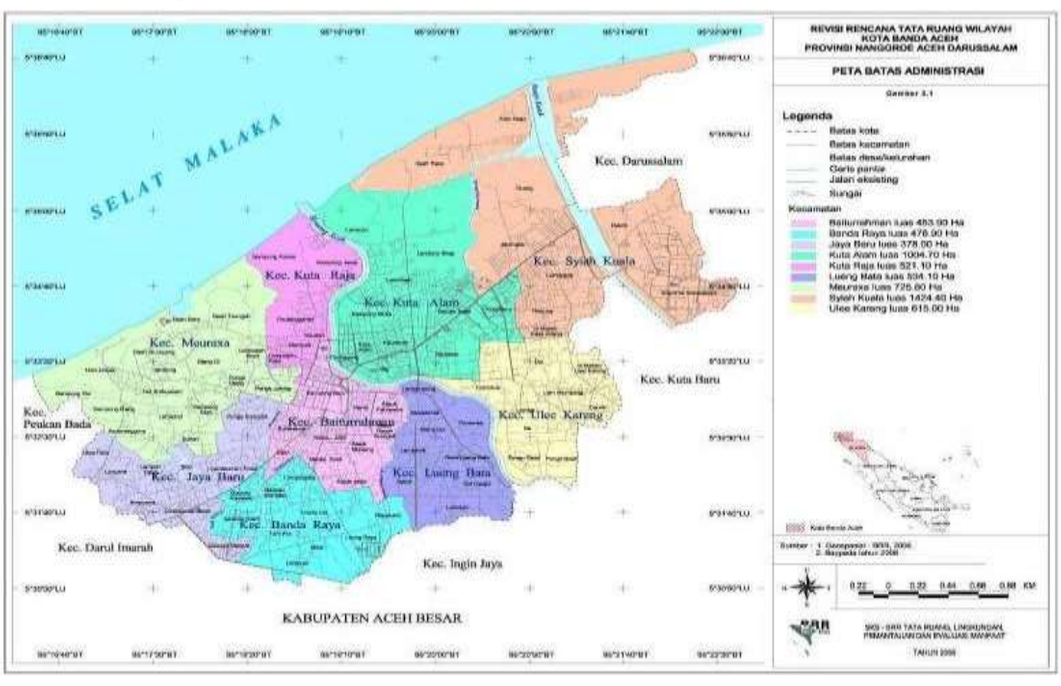

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2 - 8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70 persen wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah barat dan timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.

Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah timur dan selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut.

Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.2.**

Gambar 2.2.
Peta Kemiringan Lereng di Kota Banda Aceh

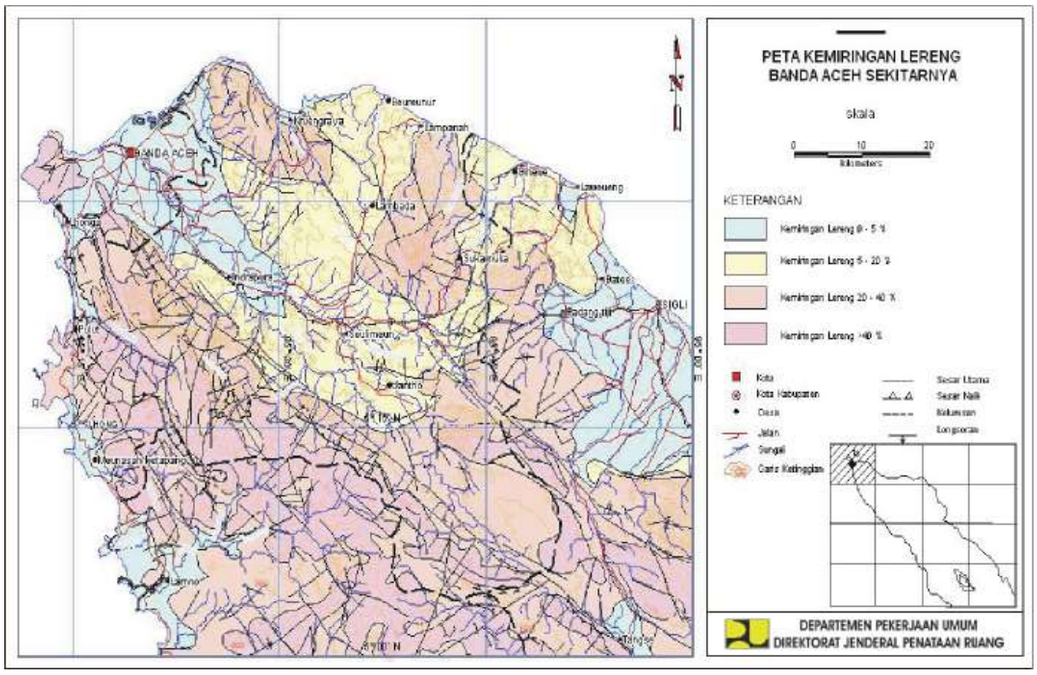

2.1.1.3. Kondisi Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (di bagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam.

Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi pedataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa.

Daerah pedataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh

bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/koluvial dari daerah sekitarnya.

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (Semangko Fault). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor.

Kota Banda Aceh terletak diantara dua patahan (sebelah timur – utara dan sebelah barat – selatan kota). Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, berumur holosen hingga Pra-Tersier, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu : Alluvium; Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik); Batuan Tersier (sedimen dan volkanik); serta Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier.

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota. Sehingga sesungguhnya Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak Pilosen, membentuk suatu Graben, sehingga dataran Banda Aceh ini merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya. Lebih jelasnya kondisi geologi ini dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Peta Kondisi Geologi
Kota Banda Aceh

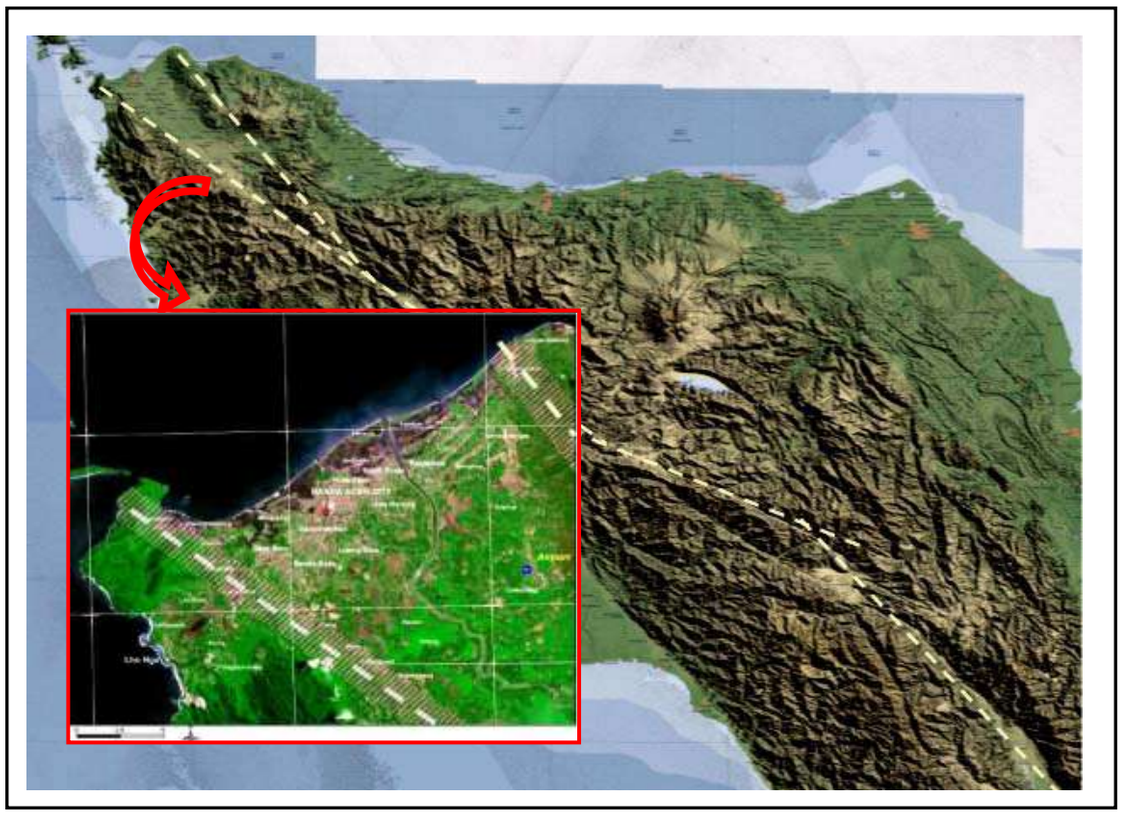

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, yang juga mencakup Kecamatan Lueng Bata, Ulee Kareng, Banda Raya. Tabel 2.2 dan Gambar 2.4 menjelaskan nama-nama sungai dan luas daerah alirannya.

Tabel 2.2
Luas Daerah Aliran Sungai yang Melalui Kota Banda Aceh

No.	Nama Sungai	Luas Daerah Aliran (Km²)
1	Krueng Aceh	1.712,00
2	Krueng Daroy	14,10
3	Krueng Doy	13,17
4	Krueng Neng	6,55
5	Krueng Lhueng Paga	18,25
6	Krueng Tanjung	30,42
7	Krueng Titi Panjang	7,80

Sumber: URRP Banda Aceh City, JICA. 2005

Mengacu pada Peta Hidrogeologi Lembar 0421 Banda Aceh (Sumatera) Skala 1:250.000 yang disusun oleh Soetrisno S. Tahun 1993 diterbitkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan (DGTL) Bandung **Gambar 2.4**, menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh mempunyai kecenderungan tersusun oleh akifer air tanah berlapis banyak dengan keterusan rendah hingga sedang, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik. Komposisi litologi dan kelulusannya terdiri dari kerikil, pasir, sebagian setengah padu, serta lumpur. Kelulusan litologi-litologi itu bervariasi dari sedang hingga tinggi. Arah aliran air tanah mempunyai kecenderungan tegak lurus ke arah pantai. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengontrol sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh yaitu DAS Krueng Aceh.

Gambar 2.4.
Peta Hidrogeologi Kota Banda Aceh

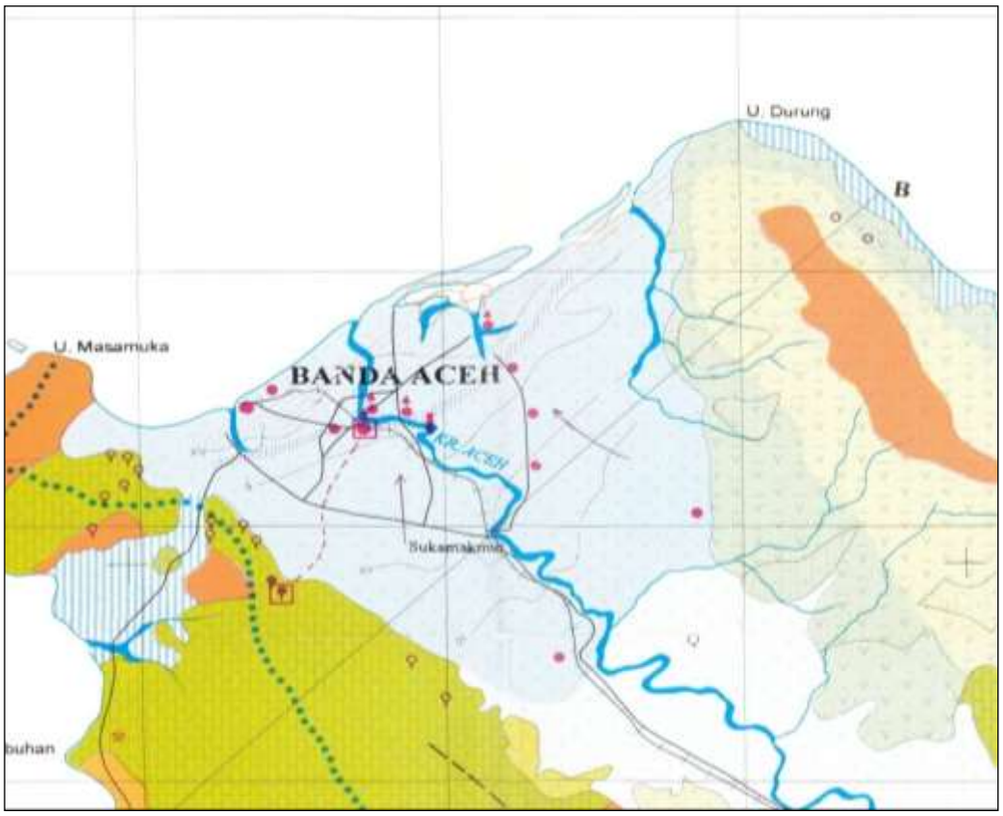

(Sumber: DGTL)

Kondisi air tanah tersebut mengalami perubahan yang sangat mendasar akibat bencana 26 Desember 2004. Kajian air tanah Kota Banda Aceh setelah bencana telah dilakukan oleh BGR (*Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources*, *Hannover*) yang menitikberatkan pada kadar garam air tanah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian BGR tersebut disajikan dalam **Gambar 2.5.**

Gambar 2.5.
Peta Resistivity Pada Kedalaman 5 Meter Dibawah Muka Tanah

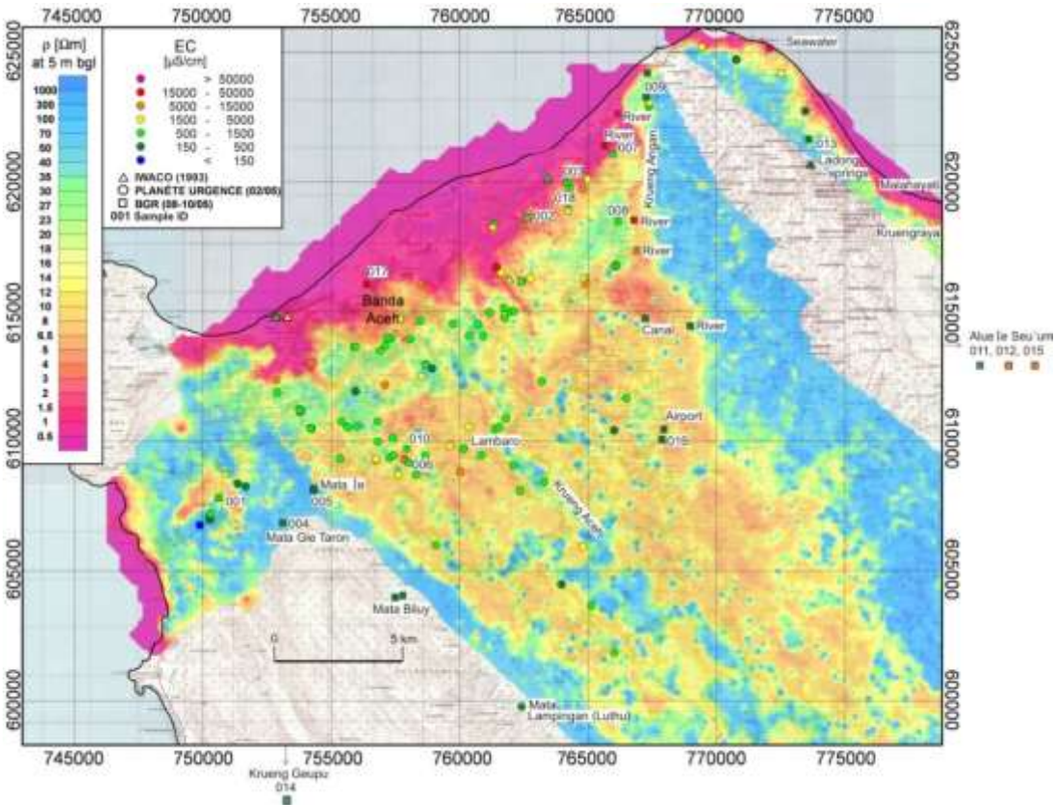

(Sumber: BGR, 2006)

Penentuan *salinity range* (kisaran kadar garam air) didasarkan pada *Specific Electrical Conductivity (EC)* dan *Total Dissolved Solids (TDS)* yang diturunkan dari analisis kation dan anion pada sampel air. Secara umum, kadar garam kisaran EC and TDS yang digunakan pada laporan BGR itu dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3
Acuan Penentuan Kisaran Kadar Garam Air Berdasarkan EC dan TDS

KADAR GARAM KISARAN	EC [µS/CM]	TDS [MG/L]
Air Tawar	Up to 1500	Up to 1000
Air Payau	> 1500 – 15,000	>1000 – 10,000
Air Asin	> 15,000	> 10,000

Sumber : (BGR/Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 2006)

Kondisi tatanan air tanah Kota Banda Aceh pasca bencana yang memperlihatkan penyebaran air asin, air payau dan air tawar dapat dilihat pada Gambar 2.6. Air asin dan air payau termasuk

kategori air yang tidak layak untuk dikonsumsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES N0. 907 tahun 2002 mengenai Air Minum dimana salah satu parameternya yakni Klorida maksimum yang diijinkan 250 mg/l dan Total Padatan Terlarut *(Total Dissolved Solids)* maksimum yang diijinkan adalah 1000 mg/l.

Gambar 2.6.
Peta Hidrologi Kota Banda Aceh

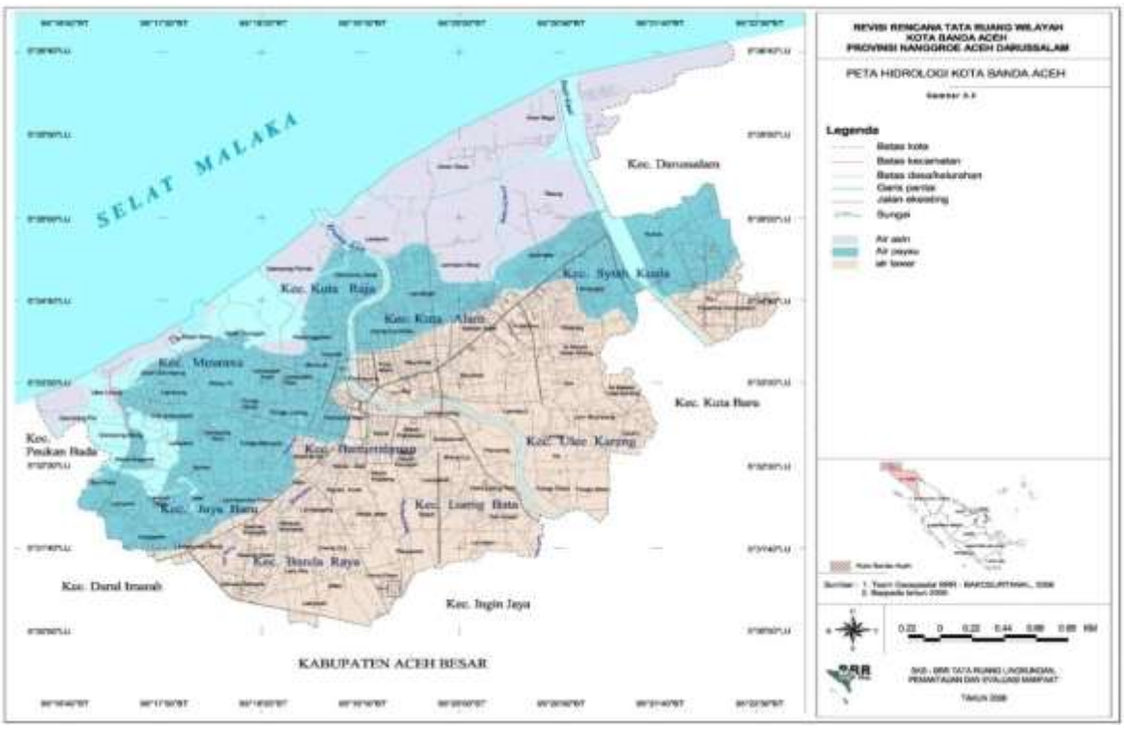

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan data klimatologi untuk wilayah Kota Banda Aceh yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Blang Bintang tahun 2011, menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,5°C hingga 27,5°C, dengan kisaran antara 18,0°C sampai 37,0°C, dengan tekanan antara 108-102 milibar.

Curah hujan Kota Banda Aceh per tahun berkisar antara 1.039 mm – 1.907 mm, dengan curah hujan rata-rata per tahun 1.592 mm. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Oktober dan Nopember yaitu 20 – 21 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Pebruari dan Maret yaitu 2 – 7 hari.

Kelembaban udara berkisar antara 75 persen hingga 87 persen. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Juni. Sementara kecepatan angin di wilayah ini bertiup antara 2 – 28 knots.

Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100%. Dari hasil perbandingan didapatkan nilai Q sebesar 100%, berarti tipe iklim pada kawasan penelitian termasuk iklim tipe E (iklim agak kering).

Kondisi tersebut menyebabkan sering terjadinya bencana, seperti banjir genangan, banjir di daerah pinggiran pantai dan dengan kecepatan angin seperti tersebut di atas, kadang-kadang menimbulkan angin topan seperti yang terjadi pada tahun 2011 yang lalu, demikian juga dengan musim kering, akibatnya sering terjadi kebakaran terutama pada batang ilalang.

Tabel 2.4
Rata-Rata Tekanan Udara, Suhu Udara, Kelembaban Nisbi, Curah Hujan Dan
Jumlah Hari Hujan Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

TAHUN	BULAN	TEKANAN UDARA RATA-RATA	SUHU UDARA RATA-RATA	KELEMBABAN NISBI RATA-RATA	CURAH HUJAN	JUMLAH HARI HUJAN
2011	Januari	1009.4	26.0	82.0	152.5	15
	Februari	1009.6	26.2	84.0	82.3	14
	Maret	1009.4	26.2	84.0	223.5	17
	April	1009.5	26.8	82.0	142.3	13
	Mei	1009.3	27.6	78.0	58.8	11
	Juni	1008.7	28.5	68.0	19.8	5
	Juli	1008.8	27.7	73.0	55.6	8
	Agustus	1009.4	27.3	76.0	62.8	8
	September	1010.1	26.6	78.0	136.8	13
	Oktober	1009.4	26.7	79.0	41.8	16
	November	1009.3	26.2	83.0	168.1	11
	Desember	1009.3	26.4	83.0	123.4	19
	RATA-RATA	1009.4	26.9	79.2	105.6	13
2010	Januari	1011.3	26.8	84.0		
	Februari	1010.6	27.8	81.0		
	Maret	1010.7	27.4	83.0		
	April	1010.0	27.8	84.0		
	Mei	1008.0	28.4	81.0		
	Juni	1009.4	27.8	79.0		
	Juli	1009.2	27.5	79.0		
	Agustus	1009.1	27.7	77.0		

TAHUN	BULAN	TEKANAN UDARA RATA-RATA	SUHU UDARA RATA-RATA	KELEMBABAN NISBI RATA-RATA	CURAH HUJAN	JUMLAH HARI HUJAN
	September	1009.4	27.1	81.0		
	Oktober	1008.9	27.5	76.0		
	November	1008.9	26.0	87.0		
	Desember	1008.5	26.2	85.0		
	RATA-RATA	1009.5	27.3	81.4		
2009	Januari	1010.9	25.4	84.0		
	Februari	1009.8	26.1	81.0		
	Maret	1009.7	26.3	84.0		
	April	1009.1	27.5	80.0		
	Mei	1008.2	27.5	78.0		
	Juni	1009.1	28.2	69.0		
	Juli	1009.1	28.3	69.0		
	Agustus	1009.4	27.2	76.0		
	September	1009.8	27.3	74.0		
	Oktober	1010.1	26.8	78.0		
	November	1009.6	26.2	85.0		
	Desember	1010.3	26.4	86.0		
	RATA-RATA	1009.6	26.9	78.7		
2008	Januari	1012.3	26.4	88.0		
	Februari	1011.5	26.5	87.0		
	Maret	1011.0	27.0	86.0		
	April	1010.5	27.6	85.0		
	Mei	1009.7	28.0	87.0		
	Juni	1010.1	27.7	80.0		
	Juli	1010.5	27.0	79.0		
	Agustus	1010.6	26.9	76.0		
	September	1010.0	26.1	79.0		
	Oktober	1011.4	26.1	85.0		
	November	1011.1	26.3	88.0		
	Desember	1011.8	26.5	89.0		
	RATA-RATA	1010.9	26.8	84		
2007	Januari	1012.3	26.4	88.0		
	Februari	1011.5	26.5	87.0		
	Maret	1011.0	27.0	86.0		
	April	1010.5	27.6	85.0		
	Mei	1009.7	28.0	87.0		
	Juni	1010.1	27.7	80.0		
	Juli	1010.5	27.0	79.0		
	Agustus	1010.6	26.9	76.0		
	September	1010.0	26.1	79.0		
	Oktober	1011.4	26.1	85.0		
	November	1011.1	26.3	88.0		

TAHUN	BULAN	TEKANAN UDARA RATA-RATA	SUHU UDARA RATA-RATA	KELEMBABAN NISBI RATA-RATA	CURAH HUJAN	JUMLAH HARI HUJAN
	Desember	1011.8	26.5	89.0		
	RATA-RATA	**1010.9**	26.8	84		

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2008 s/d 2012

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Data dan informasi penggunaan lahan dalam suatu wilayah akan memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan lahan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan, mengatur, menertibkan, dan mengendalikan kegiatan pembangunan. Pengaruh bencana Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah mengakibatkan kerusakan parah pada wilayah Kota Banda Aceh khususnya pada kawasan pesisirnya. Kondisi tersebut telah mempengaruhi pola penggunaan lahan di Kota Banda Aceh di masa yang akan datang, yang cenderung berkembang ke arah bagian Timur dan Selatan wilayah kota.

Berdasarkan kondisi Kota Banda Aceh pasca tsunami tersebut hingga saat ini secara umum dapat dilihat pola penggunaan lahannya yang terdiri dari kawasan terbangun seluas ± 2.600 Ha atau 42,37 persen dan kawasan non terbangun atau berupa ruang terbuka seluas ± 3.536 Ha atau 57,63persen. Kawasan terbangun meliputi permukiman, perkantoran baik pemerintah maupun swasta, pelayanan umum, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pelabuhan, rekreasi dan wisata, sedangkan ruang terbuka meliputi taman, hutan kota, kawasan lindung, kuburan, rawa-rawa, dan tambak atau areal genangan. Adapun lebih jelasnya pola penggunaan lahan ini secara rinci dapat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6 dan Gambar 2.7.

Kawasan terbangun ini merupakan faktor yang menimbulkan bangkitan lalu lintas, baik dari permukiman menuju perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kegiatannya lainnya, begitu juga sebaliknya dari kawasan aktivitas kegiatan menuju ke kawasan permukiman.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung Kota Banda Aceh

TAHUN	PEMANFAATAN	KAWASAN LINDUNG						Total Luas Kawasan Lindung
		Sempadan Pantai	*Hutan Bakau*	*Ruang Terbuka*	*Hutan Kota*	*Taman Kota*	*Cagar Budaya*	
2012	Jumlah	49.27	2.28	201	8.18	16.29	15.67	2110.46
	Persentase	0.80	0.04	32.	0.13	0.27	0.26	34.39
2011	Jumlah	49.27	2.28	204	6.18	16.29	15.67	2138.46
	Persentase	0.80	0.04	33.	0.10	0.27	0.26	34.85
2010	Jumlah	49.27	8.28	204	0.18	16.29	15.67	2134.46
	Persentase	0.80	0.13	33	0	0.27	0.26	34.79
2009	Jumlah	49.3	8.28	205	0.18	16.29	15.67	2146.46
	Persentase	0.80	0.13	33.	0	0.27	0.26	34.98
2008	Jumlah	49.27	8.28	206	0.18	16.29	15.67	2158.46
	Persentase	0.80	0.13	33.	0	0.27	0.26	35.18

Sumber : Dinas PU 2012

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Budidaya Kota Banda Aceh

TAHUN	**PEMANFAATAN**	**KAWASAN BUDIDAYA**									**Total Luas Kawasan Budidaya**
		Permukiman	**Perdagangan & Jasa**	**Perkantoran**	**Pariwisata**	**Perikanan**	**Pelayanan Umum**	**Pertanahan & Keamanan**	**Pelabuhan**	**Air**	
2012	**Jumlah (Ha)**	**2351.**	**135**	**137**	**20.**	**3.6**	**387.**	**61.**	**24.**	**903.**	**4025.**
	Persentase	**38.32**	**2.2**	**2.2**	**0.3**	**0.0**	**6.32**	**1.0**	**0.4**	**14.7**	**65.61**
2011	**Jumlah (Ha)**	**2346.**	**131**	**135**	**20.**	**3.6**	**387.**	**61.**	**24.**	**903.**	**4013.**
	Persentase	**38.23**	**2.1**	**2.2**	**0.3**	**0.0**	**6.31**	**1.0**	**0.4**	**14.7**	**65.41**
2010	**Jumlah (Ha)**	**2340.**	**126**	**134**	**20.**	**3.6**	**386.**	**61.**	**24.**	**903.**	**4001.**
	Persentase	**38.15**	**2.0**	**2.1**	**0.3**	**0.0**	**6.31**	**1.0**	**0.4**	**14.7**	**65.21**
2009	**Jumlah (Ha)**	**2335.**	**122**	**132**	**20.**	**3.6**	**386.**	**61.**	**24.**	**903.**	**3989.**
	Persentase	**38.06**	**1.9**	**2.1**	**0.3**	**0.0**	**6.30**	**1.0**	**0.4**	**14.7**	**65.02**
2008	**Jumlah (Ha)**	**2329.**	**117**	**131**	**20.**	**3.6**	**385.**	**61.**	**24.**	**903.**	**3977.**
	Persentase	**37.97**	**1.9**	**2.1**	**0.3**	**0.0**	**6.29**	**1.0**	**0.4**	**14.7**	**64.82**

Sumber : Citra 2011

Gambar 2.7.
Peta RTRW Kota Banda Aceh 2009 - 2029

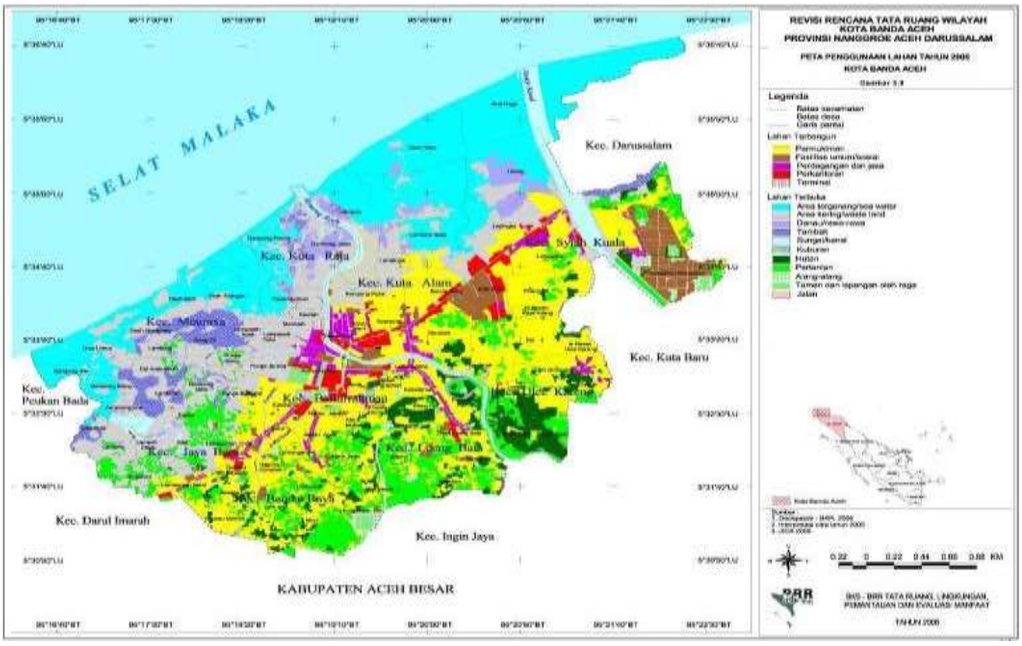

Dari hasil pengamatan di lapangan, pembangunan perumahan baru kondisi sesudah bencana gempa dan tsunami di kawasan prioritas umumnya adalah rumah kavling sedang (antara 200-500 m²), kavling besar (di atas 500 m²) dan bahkan ada pembangunan rumah dengan ukuran kavling sangat besar (di atas 1.000 m²) yakni di Gampong Batoh (sekitar Jl. Fajar Harapan).

Pembangunan rumah umumnya dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat pada lahan kosong di antara kelompok rumah-rumah yang ada atau pada kawasan baru dengan cara mengurug lahan pertanian (lahan basah atau sawah) karena sebagian lahan di kawasan prioritas (Kecamatan Baiturrahman) masuk dalam klasifikasi ”Inland Depression Zone”, yakni ketinggian permukaan tanahnya lebih rendah dari kawasan sekitarnya dan sebagian tergenang air. Cara pembangunan kavling per kavling tersebut menyebabkan tidak terintegrasinya pola aliran drainase yang dapat mengakibatkan terjadinya genangan/banjir.

Selain itu, pembangunan rumah-rumah baru tersebut juga berdampak pada terbentuknya ketidakberaturan jaringan jalan lingkungan permukiman setempat karena masing-masing rumah/kelompok rumah membuat jalan akses masing-masing (jalan ke rumah/kelompok rumah ini dinamai ”Lorong”). Pembangunan jalan/lorong tersebut sebagian besar tidak dilengkapi dengan saluran drainase. Dengan demikian langkah-langkah penting dalam

upaya penataan perlunya ditetapkan ruas-ruas jalan kolektor, jalan utama lingkungan dan jalan lingkungan sehingga terbentuk pola hirarki jaringan jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase.

2.1.2. Potensi Pengembangan Daerah

2.1.2.1. RTRW Kota Banda Aceh

Sebelum terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, Banda Aceh sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan melalui Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2003 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010.

Pengaruh gelombang tsunami telah menyebabkan sebagian besar (60%) wilayah kota mengalami kehancuran terutama pada kawasan-kawasan yang berada pada radius 5 km dari garis pantai.

Pasca tsunami, aktivitas pembangunan berjalan dengan pesat, baik yang dilakukan kegiatan rehab/rekon oleh BRR, Pemerintah Daerah, lembaga donor, pihak swasta maupun perorangan. Dalam hal ini kegiatan pembangunan tersebut cenderung berjalan tanpa mengikuti ketentuan penataan ruang yang telah ditetapkan, atau telah terjadinya pergeseran fungsi ruang sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2003.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sebagai pedoman dalam mengarahkan kegiatan pembangunan di Kota Banda Aceh, Pemerintah telah menyiapkan Blue Print Tata Ruang yang disahkan melalui Perpres Nomor 30 Tahun 2005. Mengingat muatan teknis yang terkandung dalam Blue Print tersebut lebih bersifat makro lingkup wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, dan agar produk rencana tata ruang tersebut lebih dapat menjadi pedoman operasional kegiatan pembangunan di lapangan, maka Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dukungan dan kerjasama dengan BRR, JICA, GTz dan Departemen PU telah menyelesaikan draft RTRW Kota Banda Aceh pasca tsunami.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti UU No. 24 Tahun 1992,

maka setiap daerah harus melakukan revisi terhadap RTRW yang telah dimiliki agar direncanakan untuk jangka waktu 20 tahun dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RTRWN (PP No. 26 tahun 2008). Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tersebut bahwa sebelum dilakukannya pengesahan atau penerbitan perda (qanun) RTRW harus terlebih dahulu mendapat **"persetujuan substansi"** dari Menteri Pekerjaan Umum.

Untuk memenuhi maksud tersebut, Kota Banda Aceh telah menyelesaikan Qanun (perda) Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Proses pengesahan qanun RTRW Kota Banda Aceh tersebut sudah telebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan substansi dari **Gubernur Aceh sesuai dengan surat Nomor : 032/55564 tanggal 28 Juli 2009** dan rekomendasi dari **Departemen PU Nomor : HK.01.03-Dr/496 tanggal 3 September 2009**.

Pengembangan Banda Aceh menurut RTRWN Tahun 2008-2027, meliputi :

- Berdasarkan rencana struktur ruang pada RTRWN Tahun 2008-2027, bahwa Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai **PKW** (Pusat Kegiatan Wilayah).
- Sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban oleh Kota Banda Aceh yang salah satunya adalah sebagai ibukota Provinsi Aceh, maka pada RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 diusulkan menjadi **PKN** (Pusat Kegiatan Nasional) yaitu berupa **PKNP.** Penetapan ini juga sejalan dengan draft RTRW Aceh Tahun 2012-2032.
- Berdasarkan draft RTRW Aceh Tahun 2010-2030, bahwa Banda Aceh termasuk dalam **Wilayah Pengembangan (WP) Basajan**, yang menyangkut Banda Aceh-Sabang-Jantho.

Muatan materi yang terkandung dalam RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, terdiri dari:

1. **Isue Strategis yang Berkaitan dengan Penataan Ruang Kota Banda Aceh,** meliputi :

Faktor *historis* (sejarah), bahwa Kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh yang ditandai dengan peninggalan sejarah (*heritage*), seperti kawasan Gampong Pande sebagai pusat kerajaan, makam-makam raja, taman Putroe Phang, Gunongan, Pinto Khop, Kerkhof, Taman Sari, Kawasan Blang Padang (monumen pesawat pertama RI dan bekas stadion Kutaraja), Krueng Aceh sebagai tempat sarana transportasi, dan sebagainya.

Secara geografis merupakan ibukota Provinsi Aceh, dengan fungsi pelayanan pemerintahan, perdagangan & jasa, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Kota Banda Aceh merupakan kota hirarki I di Provinsi Aceh, dengan wilayah pelayanan Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

Selain itu Banda Aceh juga berfungsi sebagai pusat keagamaan (Islamic Centre) di Provinsi Aceh, pusat pengembangan wisata yang berbasis masyarakat dan budaya Islami, dan pusat pengembangan pendidikan yang berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi kota yang merangsang tumbuhnya aktivitas pembangunan pada kawasan baru yang selama ini diperuntukkan sebagai kawasan non komersial dan jasa. Konsep penataan Kota Banda Aceh ke depan berbasis pada program "Water Front City" terutama pada kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Mitigasi bencana, dengan pengembangan ruang ke depan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dengan menyediakan ruang (space) sebagai jalur, areal maupun bangunan penyelamatan penduduk ke tempat yang lebih aman apabila kemungkinan terjadinya bencana gempa dan tsunami.

2. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang Kota Banda Aceh sebelumnya menunjukkan "pola radial simetris", hal ini terlihat dari pemusatan kegiatan dengan konsentrasi kepadatan di pusat kota, dimana kegiatan tersebut memanjang hampir linier mengikuti pola jaringan jalan utama, dan relatif radial dengan Masjid Raya Baiturrahman dan

sekitarnya sebagai pusat utama yang diperkuat oleh keberadaan Pasar Aceh dan Pasar Peunayong.

Pusat utama ini didukung oleh beberapa sub pusat pelayanan seperti Ulee Kareng, Kawasan Kampus Darussalam, Lampulo, Beurawe, Lueng Bata, Peuniti, Neusu, Seutui, dan Keutapang, serta Ulee Lheu dengan kegiatan pelabuhan dan wisatanya.

Pusat utama dan sub pusat pelayanan ini menjadi daya tarik bagi sistem pergerakan atau perangkutan di Kota Banda Aceh. Interaksi pusat dan sub pusat memberikan dampak yang cukup besar terhadap bangkitan lalu-lintas kota, karena pada pusat dan sub pusat tersebut didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, restoran dan aktivitas lainnya dengan karakteristik yang berbeda. Keberadaan sub pusat pelayanan menjadi perangsang tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman di sekitarnya, sehingga hal ini menjadi faktor tumbuhnya bangkitan lalu lintas.

Sesuai dengan strategi pengembangan Kota Banda Aceh RTRW 2002-2010 yang memadukan antara pengembangan *"multi-center"* dan *"linear-growth"*,

Kota Banda Aceh direncanakan dikembangkan dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu :

a. WP Pusat Kota Lama

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, dengan pusat di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong.

Gambar 2.8.
Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh Tahun 2029

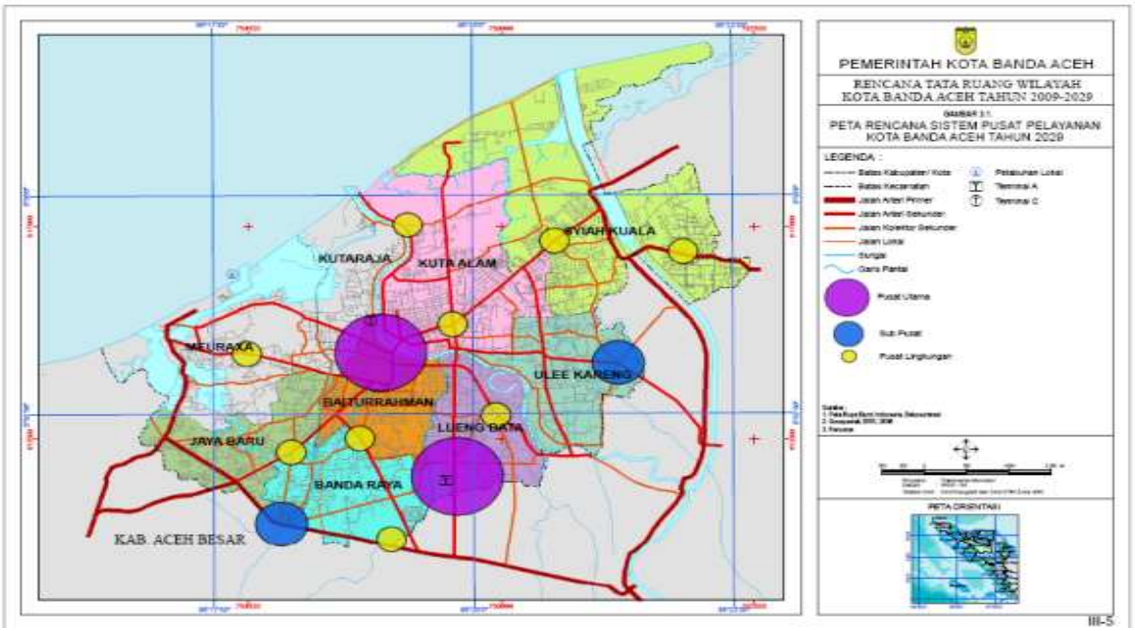

b. WP Pusat Kota Baru

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata, dengan pusat di Batoh dan Lamdom.

c. WP Keutapang

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru, dengan pusat di Keutapang.

d. WP Ulee Kareng

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, dengan pusat di Ulee Kareng.

3. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang direncanakan di Kota Banda Aceh terdiri dari Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana, dan Ruang Terbuka Hijau.

Gambar 2.9.
Peta Pola Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2029

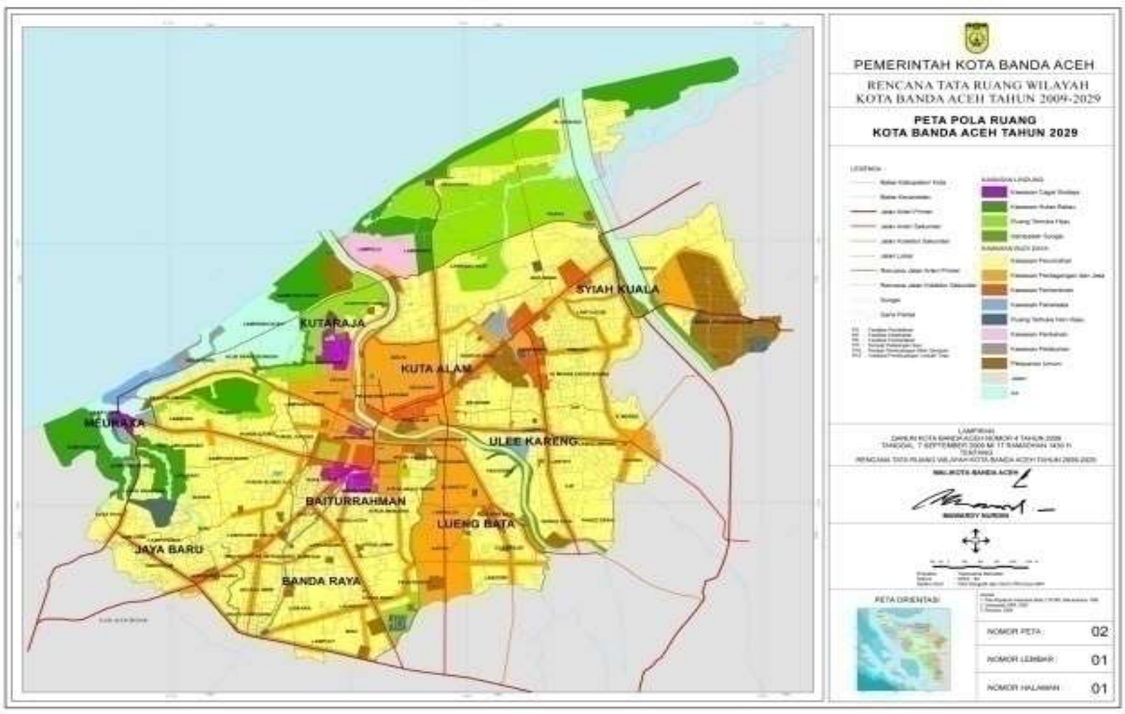

b. Kawasan Budidaya

Klasifikasi peruntukan kawasan budidaya di Kota Banda Aceh meliputi Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan Tambak dan Perikanan Tangkap, Kawasan Pusat Olahraga, Kawasan Pelayanan Umum, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Ruang Terbuka Non Hijau

4. Rencana Kawasan Strategis, meliputi :

- Kawasan Pusat Kota Lama (Pasar Aceh, Peunayong dan sekitarnya).
- Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya.
- Kawasan Pusat Kota Baru dan sekitarnya.
- Kawasan *Water Front City*
- Kawasan Perikanan Samudera
- Kawasan Heritage Gampong Pande, Peunayong dan Neusu
- Kawasan Wisata Tsunami (Museum Tsunami, PLTD Apung, kuburan massal korban tsunami dan Mesjid Baitul Rahim di Ulee Lheue).
- Kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng

Gambar 2.10.
Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Banda Aceh

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi topografis Kota Banda Aceh yang bersifat dataran rendah memiliki bentang yang sangat luas berpotensi rawan bencana gempa dan tsunami, banjir genangan, gelombang pasang, angin puting beliung, kekeringan, dan abrasi.

Kota Banda Aceh sesuai dengan data indeks rawan bencana Indonesia termasuk rangking 15 (lima belas) dengan klas rawan bencana tinggi. Bencana alam gempa bumi yang berkekuatan 8,5 SR terakhir terjadi pada tanggal 11 April 2012 dengan korban 1 orang meninggal dunia serta menimbulkan kepanikan dengan adanya isu tsunami. Untuk lebih jelasnya wilayah rawan bencana dapat dilihat pada Peta di bawah ini:

Gambar 2.11.
Peta Wilayah Rawan Bencana Angin Kota Banda Aceh

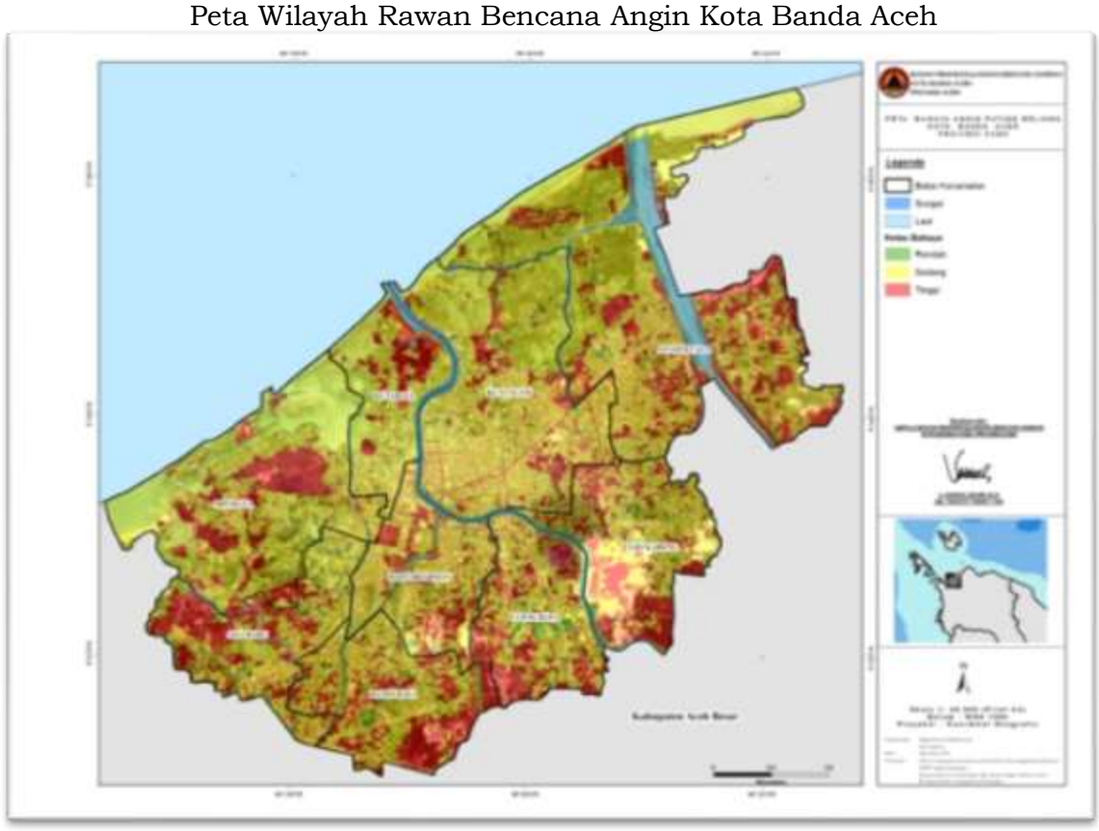

Gambar 2.12.
Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kota Banda Aceh

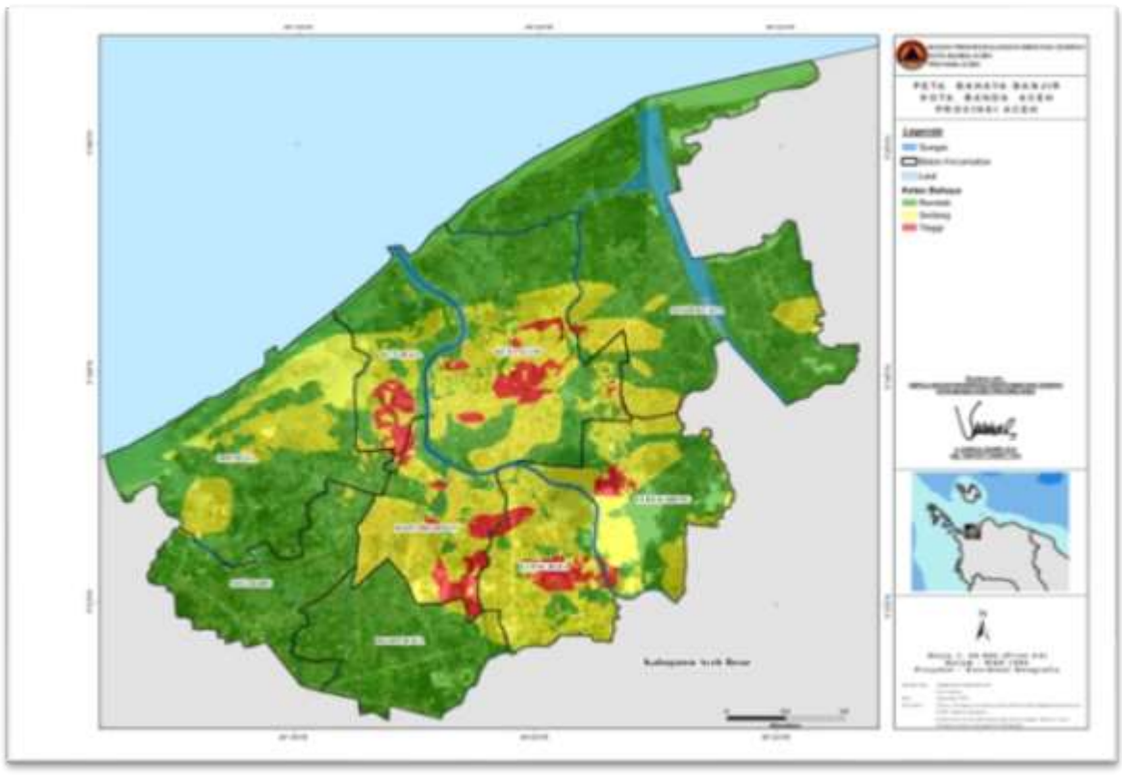

Gambar 2.13.
Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Kota Banda Aceh

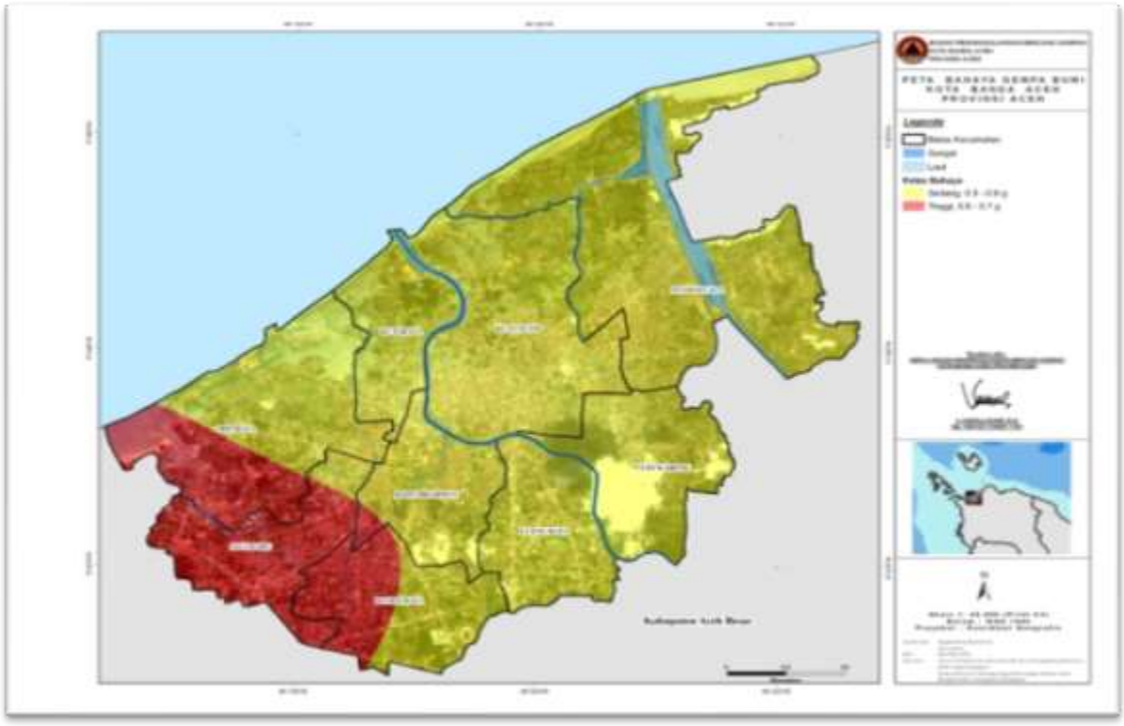

Gambar 2.14.
Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kota Banda Aceh

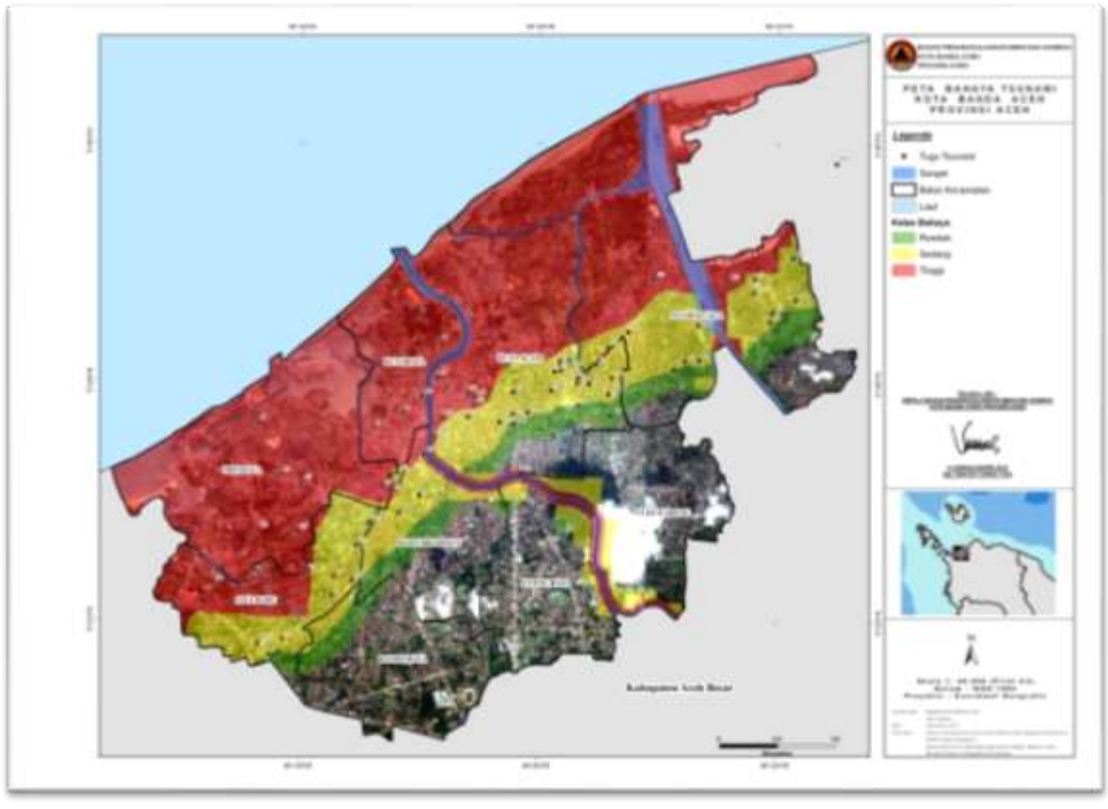

Potensi ancaman bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Potensi Ancaman Bencana Di Kota Banda Aceh

Bencana Geologi

NO	Jenis Ancaman			
	Tsunami	**Gunung berapi**	**Gempa**	**Tanah longsor**
	Kecamatan			
1 2 3 4 5 6	Meuraxa Syiah kuala Jaya Baru Kuta Alam Baiturrahman Kuta Raja		1. Meuraxa 2. Syiah kuala 3. Jaya Baru 4. Kuta Alam 5. Baiturrahman 6. Kuta Raja 7. Banda Raya 8. Ulee Kareng 9. Lueng Bata	

Bencana Hidrometeorologi

No	Jenis Ancaman				
	Bajir genangan	**Angin puting beliung**	**Abrasi erosi**	**Gelombang pasang**	**Kekeringan**
	Kecamatan				
1 2	Lueng Bata Bandar Raya	1. Syiah Kuala 2. Baiturahman 3. Kuta Alam 4. Jaya Baru 5. Banda Raya 6. Meuraxa	1. Meraxa 2. Kuta raja 3. Kuta Alam 4. Syiah kuala	1. Jaya baru 2. Meraxa 3. Kuta raja 4. Kuta Alam 5. Syiah kuala 6. Bandar Raya	Semua kecamatan

Bencana Sosial

No	Jenis Ancaman			
	Kebakaran	**Konflik**	**Kejadian Luar Biasa**	**Kegagalan Tehnologi**
	Kecamatan			
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Meuraxa Syiah kuala Jaya Baru Kuta Alam Baiturrahman Kuta Raja Ulee Kareng Banda Raya Lueng Bata	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	1. Kuta Raja 2. Lueng Bata 3. Syiah Kuala

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

Salah satu upaya pengurangan risiko bencana, bahwa di Kota Banda Aceh terdapat 4 (empat) Escape Building yaitu di Alue Deah, Deah Gelumpang, Lambung dan Gampong Pie. Dari empat Escape Building tersebut, tiga diantaranya dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh, hanya satu Escape Building yaitu yang terletak di gampong Pie yang pada saat sekarang dipergunakan oleh TDMRC Unsyiah (Pusat Kajian Bencana Gempa dan Tsunami).

Escape Building tersebut telah di sosialisasikan dimana pada saat bencana dipergunakan sebagai gedung penyelamatan, dan pada saat tidak terjadi bencana boleh dimanfaatkan oleh masyarakat seizin BPBD.

Selain pembangunan escape building dalam rangka pengurangan risiko bencana (PRB) dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah penyelenggara penanggulangan bencana serta peningkatan kapasitas, partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lain dalam pengurangan risiko bencana melalui kegiatan pencegahan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dan bahaya kebakaran serta penanganan pada saat bencana dan pasca bencana melalui kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Selain rawan terhadap bencana alam Kota Banda Aceh juga rawan terhadap bencana non alam seperti bencana kebakaran, penanggulangan bahaya kebakaran saat ini wilayah cakupan layanannya selain Kota Banda Aceh juga melayani sebagian wilayah Aceh Besar. Adapun permasalahan yang dihadapi saat ini, dalam menjalankan tugas penanganan bencana kebakaran tentunya dibutuhkan anggota/personil yang memadai, saat ini tenaga/personil relatif kurang memadai. Apabila diperhitungkan sesuai standar maka untuk 1 (satu) unit armada Pemadam Kebakaran dibutuhkan 6 (enam) orang anggota/personil. Tahun 2009 kondisi armada Pemadam Kebakaran seluruhnya 12 (dua belas) unit. 12 (dua belas) unit armada Pemadam Kebakaran dikali 6 anggota /unit = 72 orang, sedangkan untuk pelaksanaan tugas siaga piket sekurang-kurangnya harus ada 3 sift yaitu regu masuk, regu lepas, dan regu siaga/bantu, sehingga menjadi 72 orang (12 unit

armada Pemadam Kebakaran) dikali 3 sift (regu) menjadi 216 orang, kalau dilihat dari kenyataan sekarang jumlah anggota/personil armada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan tugas`siaga piket sebanyak 82 orang, yang berarti kekurangan anggota/personil Badan Penanggulangan Bencana 216 – 82 = 134 orang anggota/personil.

Pembangunan gedung di Kota Banda Aceh, baik perkantoran, pertokoan maupun perumahan dan perhotelan sudah mencapai empat tingkat bahkan sampai lima tingkat, sehingga dengan armada yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini yang tidak memiliki tangga hidrolik akan menyulitkan upaya-upaya pemadaman kebakaran pada gedung-gedung berlantai lima ke atas.

Hydran kota yang tersedia masih kurang sehingga menjadi dalam melakukan pengisian air kembali pada saat menanggulangi kebakaran, sehingga dibutuhkan beberapa unit mobil supply dalam mengatasi hal tersebut.

Pasca tsunami pertambahan alat transportasi dalam wilayah Kota Banda Aceh meningkat tajam, sehingga terjadi kemacetan di mana-mana lebih-lebih di jalan umum apalagi pada jam-jam sibuk dapat dibayangkan betapa waktu dibutuhkan untuk mencapai titik sasaran kebakaran. Kondisi pelayanan dan kasus kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.8 s.d Tabel 2.10.

Tabel 2.8
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kota Banda Aceh

Wilayah Manajemen Kebakaran (km^2)	Luas Kota Banda Aceh (km^2)	Persentase (%)
7,5	61,36	12,22

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

Tabel 2.9
Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

Kasus di WMK Yg Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK (Tahun 2007-2011)	Persentase (%)
74	496	14,92

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

Tabel 2.10
Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2007 - 2011

No	Jenis Kebakaran	2007	2008	2009	2010	2011	Ket
1	Bangunan Perkantoran Pemerintah/Swasta	9	3	2	33	7	
2	Perumahan/pemukiman penduduk.	30	28	36	31	39	
3	Hutan/ ilalang/ semak bulukar	89	46	57	35	51	
	JUMLAH	**128**	**77**	**95**	**99**	**97**	

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

2.1.4. Demografi

Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 61,36 Km^2 didiami penduduk sebanyak 228.562 jiwa yang terdiri dari 117.732 jiwa penduduk laki-laki dan 110.830 jiwa penduduk perempuan pada tahun 2011. Kota Banda Aceh mengalami pertambahan penduduk sebesar 5.116 jiwa atau sekitar 0,02 persen dari penduduk pada tahun 2010. Tetapi Jumlah penduduk pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebanyak 219.659 menjadi 217.918 pada tahun 2008 dan menurun lagi menjadi 212.241 pada tahun 2009, hal ini disebabkan berakhirnya rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Banda Aceh sebagian penduduk yang dahulunya bekerja di Kota Banda Aceh berpindah kembali ke daerah asalnya.

Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kuta Alam dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kuta Raja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 2.11

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2011

No.	Kecamatan *District*	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meuraxa	12 677	12 494	12 189	16 484	16 861
2	Jaya Baru	20 138	20 658	20 127	22 031	22 535
3	Banda Raya	21 376	20 907	20 352	20 891	21 369
4	Baiturrahman	35 980	36 124	35 153	30 377	31 073
5	Lueng Bata	22 562	22 025	21 437	23 592	24 132
6	Kuta Alam	43 940	43 792	42 664	42 217	43 184
7	Kuta Raja	8 068	8 076	7 890	10 433	10 672
8	Syiah Kuala	34 012	33 433	32 564	34 850	35 648
9	Ulee Kareng	20 906	20 409	19 865	22 571	23 088
	Jumlah *Total*	**219 659**	**217 918**	**212 241**	**223 446**	**228 562**

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2012

Jumlah penduduk laki-laki secara umum lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex rasio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2011 untuk setiap 106 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Kota Banda Aceh memiliki komposisi dominan pada penduduk kelompok umur muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20–24 tahun yaitu sebanyak 38.077 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 27.095 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 23.815 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini,

Grafik 2.1

Piramida Penduduk Kota Banda Aceh, 2011

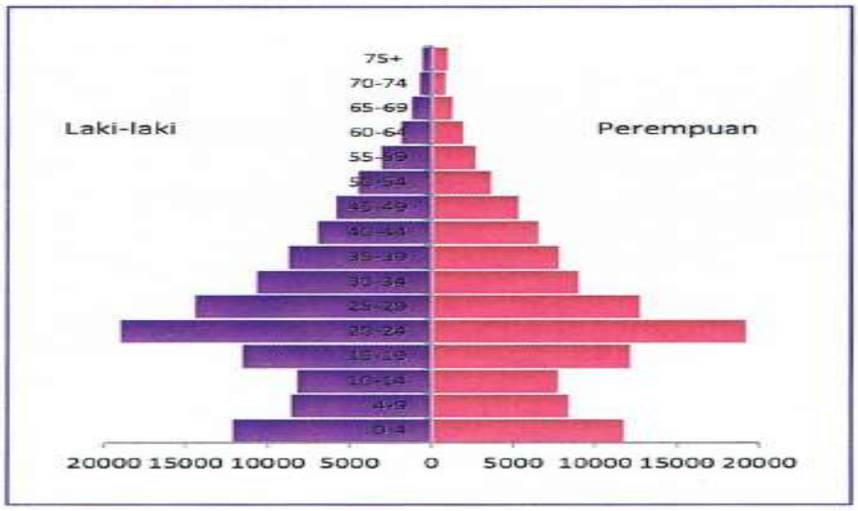

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2012

Kepadatan penduduk kota Banda Aceh mencapai 3.725 jiwa per km^2. Penduduk terpadat berada pada kecamatan Baiturrahman yang mencapai 6.844 jiwa per km^2, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kuta Raja dengan kepadatan penduduk sebesar 2.084 jiwa per km^2 (lihat Grafik 2.2).

Grafik 2.2

Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Banda Aceh, 2011

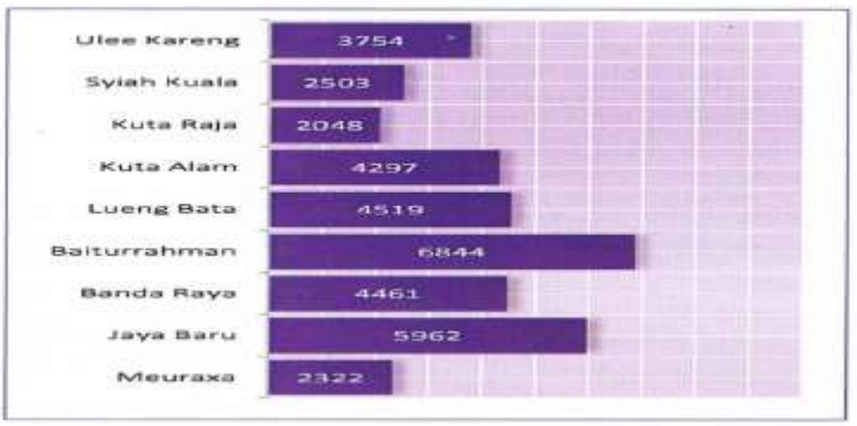

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2012

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Untuk melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, baik

menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2011

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2007	4.346.371,64	25,88	2.584.966,28	19,00
2	2008	5.354.160,76	23,19	2.730.636,38	5,64
3	2009	6.502.124,76	21,44	2.885.586,85	5,68
4	2010	7.734.842,61	19,42	3.056.186,08	5,94
5	2011	8.992.047,65	15,80	3.241.173,56	6,02

Sumber : BPS Kota Banda Aceh 2012

Data Tabel 2.12 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dari 25,88 persen pada tahun 2007 menjadi 15,80 persen pada tahun 2011. PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh tingkat inflasi, untuk itu digunakan sebagai petunjuk adalah pertumbuhan riil PDRB atas dasar harga konstan 2000. PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2007 sebesar 19,00 persen, mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2008 sebesar 5,64 persen dan mengalami kenaikan hingga 6,02 persen pada tahun 2011.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.13

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011

No	Sektor	Atas Dasar Harga Berlaku (%)					Atas dasar Harga Konstan 2000 (%)				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	2,92	2,55	2,31	2,13	2,02	3,95	3,82	3,71	3,58	3,53
2	Pertambangan dan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Penggalian										
3	Industri Pengolahan	2,32	2,17	2,11	2,04	1,95	2,09	2,14	2,21	2,25	2,25
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,55	0,57	0,62	0,70	0,78	0,38	0,41	0,42	0,45	0,49
5	Bangunan/ Konstruksi	6.81	8,08	0,96	9,00	9,05	6,06	6,13	6,18	6,21	6,24
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	26,31	26,33	25,11	23,12	22,73	20,99	21,03	21,57	22,17	22,79
7	Pengangkutan dan Komunikasi	21,90	24,25	26,65	30,50	32,66	16,00	15,98	16,34	16,71	17,08
8	Keuangan, Persewaaan dan Jasa perusahaan	3,35	3,66	3,78	3,81	3,86	2,37	2,36	2,36	2,38	2,40
9	Jasa-jasa	35,83	32,38	30,45	28,68	26,98	48,16	48,13	47,21	46,25	45,25

Sumber : BPS Kota Banda Aceh 2012

Tabel 2.13 memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan konstribusi terbesar terhadap total PDRB Kota Banda Aceh.

PDRB atas dasar harga konstan 2000 sektor jasa-jasa mengalami trend penurunan dari 48,16% tahun 2007 menjadi 45,25% tahun 2011, sektor pengangkutan dari 16,00% tahun 2007 turun sedikit pada tahun 2008 menjadi 15,98% kemudian naik hingga tahun 2011 menjadi 17,08% , sektor perdagangan, hotel dan restoran trend naik dari 20,99% tahun 2008 menjadi 22,79% tahun 2011.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Kota Banda Aceh yang lebih tinggi dari Kabupaten Aceh Besar dan kota Sabang, Data PDRB Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.3

Grafik 2.3

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota, 2011

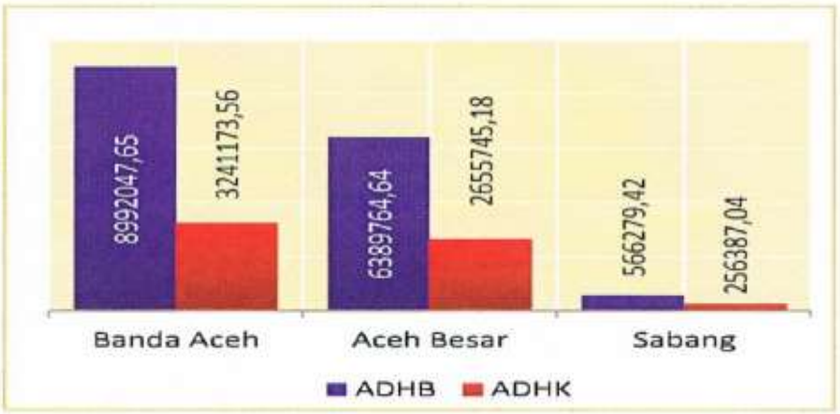

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Perbandingan beberapa indikator terpilih lainnnya untuk Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang menunjukkan perbedaan yang variatif. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh menduduki peringkat tertinggi di Provinsi Aceh, yaitu sebesar 78,00, sedangkan Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar masing-masing berada pada urutan ketiga sebesar 76,47 dan keenam sebesar 73,83. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Banda Aceh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang. Sejalan dengan hal tersebut Tingkat Pengangggguran Terbuka (TPT) di Kota Banda Aceh paling tinggi dibandingkan dua kabupaten/kota tetangganya ini. TPAK, TPT dan IPM Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang dapat dilihat pada Grafik 2.4.

Grafik 2.4

Perbandingan TPAK, TPT, dan IPM Kabupaten/Kota, 2011

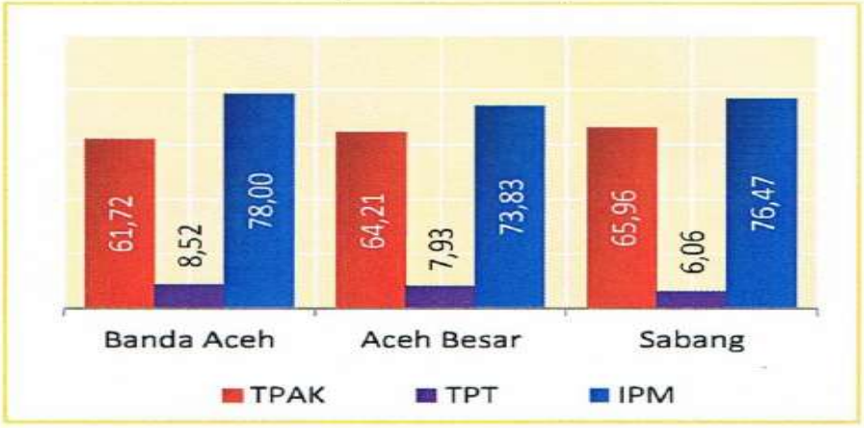

Sumber: BPS Provinsi Aceh

2.2.1.2. Laju Inflasi Kota Banda Aceh

Inflasi menjadi tolak ukur kestabilan perekonomian di suatu daerah. Laju inflasi tahun 2011 lebih rendah disbanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,32 persen. Dalam lima tahun terakhir, laju inflasi Kota Banda Aceh menunjukkan besaran yang fluktuatif. Tingkat inflasi tertinggi selama tahun 2011 terjadi pada bulan Agustus sebesar 1,87 persen dan deflasi terendah terjadi pada bulan Maret sebesar -1,9 persen. Inflasi tertinggi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga sandang, dimana inflasi sandang pada bulan Maret mencapai 6,42 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.5 dan grafik 2.6.

Grafik 2.5

Laju Inflasi Kota Banda Aceh, 2007-2011

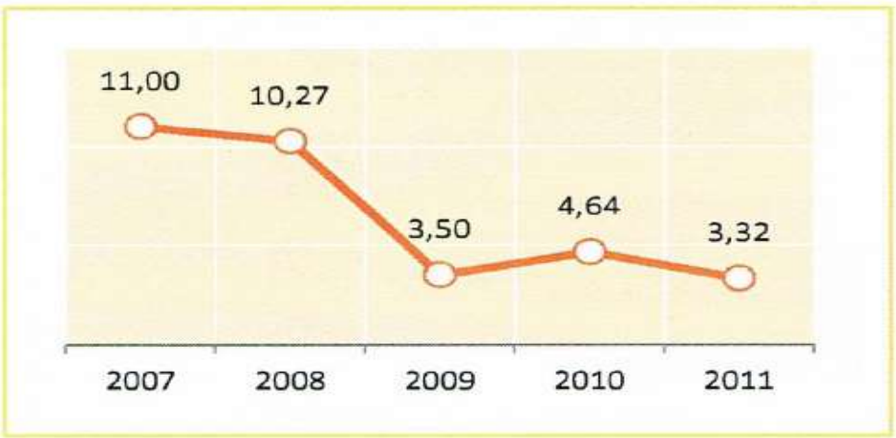

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

Grafik 2.6

Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh, 2011

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi	1,74	0,47	-1,9	-0,2	-0,4	0,47	1,16	1,89	-1	-0,3	0,52	0,91

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2012

Dampak krisis global pada tahun 2008 menyebabkan inflasi secara rata-rata nasional termasuk Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe mencapai titik tertinggi selama empat tahun terakhir. Setelah itu, inflasi mengalami fluktuasi dengan pola menurun pada tahun 2009, kemudian meningkat pada tahun 2010 karena faktor kenaikan barang dan jasa di pasar dunia dan kembali menurun pada tahun 2011.

Inflasi Kota Lhokseumawe selalu di atas Kota Banda Aceh selama tahun 2008- 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan barang secara umum di Lhokseumawe lebih tinggi bila dibandingkan di Kota Banda Aceh. Kondisi ini salah satunya disebabkan lebih stabilnya pasokan barang ke pasar-pasar di Kota Banda Aceh, sehingga permintaan barang dapat terpenuhi dan inflasi berada pada posisi lebih rendah (lihat Tabel 2.14).

Tabel 2.14
Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Indonesia (persen) tahun 2008-2011

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Banda Aceh	10,27	3,50	4,64	3,32
2	Lhokseumawe	13,78	3,96	7,19	3,55
3	Provinsi Aceh	11,92	3,72	5,86	3,43
4	Nasional	11,06	2,78	6,96	3,79

Sumber : Aceh Dalam Angka 2012

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Pertumbuhan perekonomian yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggi bagi masyarakat oleh karena mungkin perkembangan penduduknya juga cukup tinggi. Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau yang lebih tinggi kualitasnya.

Tabel 2.15
PDRB per Kapita Kota Banda Aceh, 2008 - 2011

Tahun	ADHB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	ADHK 2000 (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	26,157	17,65	13,340	0,89
2009	30,343	16,00	13,466	0,95
2010	34,752	14,53	13,682	1,60
2011	39,342	13,21	14,181	3,65

Sumber : PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2011

Berdasarkan Tabel 2.15, sepanjang kurun waktu 2008-2011 pertumbuhan PDRB perkapita Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku mengalami penurunan. Pada tahun 2011 PDRB perkapita sebesar 39,34 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 34,75 juta rupiah, maka mengalami penurunan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari 14,53 persen menjadi 13,21 persen. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000, tahun 2008-2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 2000 sebesar 14,18 juta rupiah. Sedangkan tahun 2010 sebesar 13,68 juta rupiah. Hal ini berarti terjadi peningkatan nilai PDRB Perkapita dari 1,60 persen tahun 2010 menjadi 3,65 persen pada tahun 2011.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf

Literasi atau melek huruf merupakan modal penduduk dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dengan kemampuan membacanya. Penduduk yang memiliki literasi berada pada usia 15 tahun keatas. Kota Banda Aceh memiliki tingkat melek huruf yang tinggi mencapai 99,13 persen, sedangkan sisanya 0,87 persen masih dalam kategori buta huruf. Penduduk dalam kategori buta huruf diperkirakan merupakan usia tua yang kemungkinan sulit mendapatkan pelayanan pendidikan dimasa lampau.

Grafik 2.7
Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh Per-Kecamatan
Tahun 2011

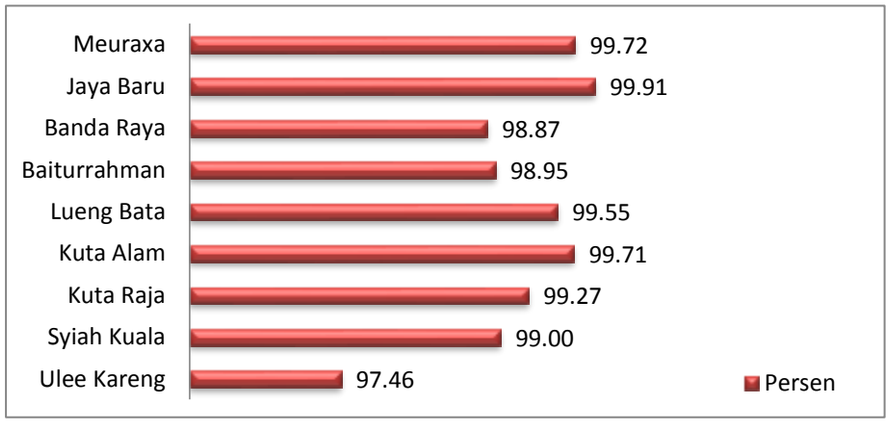

Sumber : Buku IPM Kota Banda Aceh 2011

Gambar 2.15 menunjukkan rata-rata angka melek huruf per-kecamatan berada pada posisi 99,16 persen. Kecamatan Jaya Baru memiliki angka melek huruf tertinggi sebesar 99,91 persen, sedangkan kecamatan Ulee Kareng merupakan kecamatan dengan angka melek huruf terendah sebesar 97,46 persen.

Perkembangan angka melek huruf mengalami peningkatan dari 99,6 persen pada tahun 2007 dan mencapai target 100 persen pada tahun 2010. Kondisi ini merupakan suatu pencapaian atas usaha Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memajukan sektor pendidikan baik formal maupun non formal. Kota Banda Aceh dapat mempertahankan pencapaian ini dengan terus memfokuskan diri pada program-program peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan memberikan jaminan kemudahan akses pendidikan bagi semua lapisan penduduk. Tabel berikut menunjukkan perkembangan angka melek huruf di Kota Banda Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2011Kota Banda Aceh

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	179.898	182.321	185.283	188.962	192.818
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun	180.676	182.963	185.749	188.962	192.818

	keatas					
3	Angka melek huruf	99,6%	99,6%	99,7%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kota Banda Aceh mencapai 12,04 tahun atau sudah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun atau tamat SMA sederajat. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di seluruh kecamatan sudah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun.

Grafik 2.8
Rata-rata lama Pendidikan Penduduk Dewasa
Di Kota Banda Aceh Tahun 2011

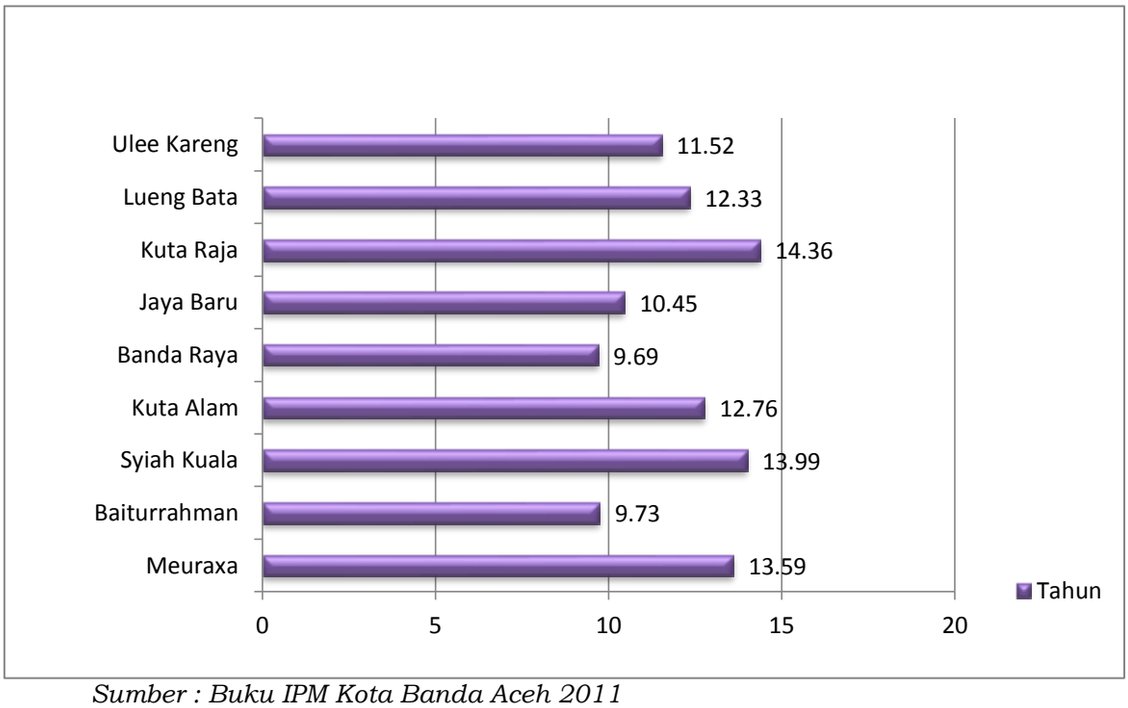

Sumber : Buku IPM Kota Banda Aceh 2011

Grafik 2.8 menunjukkan angka tertinggi rata-rata lama pendidikan penduduk dewasa berada pada kecamatan Kuta Raja dengan angka 14,36 tahun atau sudah menamatkan pendidikan tinggi diploma 2, dan terendah pada kecamatan Banda Raya dengan angka 9,69 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target nasional rata-rata 12 tahun. Tidak tercapainya angka rata-rata lama sekolah sesuai target mengakibatkan tidak efisiennya pendanaan

pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan Kota Banda Aceh masih belum cukup baik untuk mengkatkan kualitas dan pelayanan yang maksimal bagi penduduk kota. Angka tertinggi lama sekolah terjadi pada SD yang kelas awal (1,2 dan 3) yang tinggal kelas, kondisi ini diakibatkan 9 persen siswa yang masuk SD tidak melalui TK, kemudian daya serap siswa dalam menerima pembelajaran juga masih terbatas. Tabel berikut menunjukkan lama sekolah berdasarkan jenjang pendidikan dan kelas.

Tabel 2.17
Lamanya Bersekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas

Jenjang	Kelas	Jumlah tahun bersekolah (kumulatif)
SD	1	1,07
	2	2.04
	3	3.03
	4	4.01
	5	5.00
	6	6.02
SMP	1	7.00
	2	8.00
	3	9,02
SMA	1	10.00
	2	11.00
	3	12.03

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa setiap jenjang pendidikan masih ditamatkan dengan masa yang melebihi dari seharusnya yang berdampak pada ketidakefisienan di dalam tata kelola pendidikan di Kota Banda Aceh.

2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. APM di Kota Banda Aceh untuk tingkat SD 114,99 persen lebih dipengaruhi oleh anak diluar usia sekolah. Penyebaran

sekolah untuk jenjang SD/MI sampai sekolah menengah sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota. Sedangkan untuk SMA/SMK juga tersebar di Kota Banda Aceh dan mudah dijangkau dan berada di setiap kecamatan.

Para lulusan jenjang SD/MI pada umumnya dapat melanjutkan ke SMP/MTSN sejalan kebijakan Pemerintah tentang Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang Pendidikan yang terbebas dari hambatan biaya untuk 12 tahun dengan pendidikan universal dengan program subsidi BOSDA dan beasiswa bagi keluarga miskin.

Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Banda AcehTahun 2007 – 2011

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	20.043	20.362	20.459	21.004	21.821
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.428	19.812	19.835	17.981	18.977
1.3.	APM SD/MI	93,54	102,78	103,15	116,81	114,99
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	9.774	9.262	9.282	9.688	9.096
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	15.707	11.473	11.623	10.226	10.791
2.3.	APM SMP/MTs	62,53	80,73	79,86	94,74	84,29
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	11.029	9.703	10.682	10.541	10.078
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	17.8383	14.556	14.108	13.231	13.965
3.3.	APM SMA/MA/SMK	61,83	66,66	75,72	79,67	72,17

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Angka Partisipasi Murni yang masih rendah menujukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh juga belum mampu meningkatkan kinerja aparaturnya di dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. APM yang rendah mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang belum mampu mengenyam pendidikan karena masih harus bekerja untuk mencari nafkah, sehingga harus meninggalkan bangku sekolah. Sementara kebutuhan untuk pendidikan masih membutuhkan biaya yang besar.

Tabel 2.19
Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh
Tahun 2011/2012

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK		
		Jumlah Siswa Usia 7-12 th Bersekolah di SD/MI	Jumlah Penduduk usia 7-12 th	APM	Jumlah Siswa Usia 13-15 th Bersekolah di SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	APM	Jumlah Siswa Usia 16-18 th Bersekolah di SMA/MA/ SMK	Jumlah Penduduk Usia 16-18th	APM
1	Kuta Alam	5.029	3.525	142,67	3.291	1.998	164,71	4138	2.607	158,73
2	Kuta Raja	1.282	687	186,61	278	388	71,65	297	531	55,93
3	Syiah Kuala	2.463	2.507	98,24	655	1.616	40,53	1031	2.426	42,50
4	Ulee Kareng	1.980	2.114	93,66	528	1.182	44,67	153	1.414	10,82
5	Baiturrahman	4.296	3.073	139,80	1.508	1.667	90,46	735	2.046	35,92
6	Lueng Bata	1.293	2.088	61,93	1.116	1.201	92,92	312	1.525	20,46
7	Meuraxa	1.091	1.137	95,95	886	613	144,54	688	791	86,98
8	Banda Raya	1.684	2.015	83,57	626	1.105	56,65	2379	1.328	179,14
9	Jaya Baru	2.703	1.831	147,62	208	1.021	20,37	345	1.297	26,60
	Jumlah	**21.821**	**18.977**	**114,99**	**9096**	**10791**	**84,29**	**10.078**	**13.965**	**72,17**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

2.2.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa menunjukkan ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tercatat, ternyata APK tertinggi di Kota Banda Aceh terdapat di tingkat SD yaitu 136,48 persen dan yang terendah di tingkat SMA yaitu 107,65 persen. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut ditambah dengan siswa lain penduduk luar Kota Banda Aceh yang bersekolah di Kota Banda Aceh. Berikut tabel penjelasan perkembangan APK Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2011.

Tabel 2.20
Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar(APK)
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 – 2011

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSD/MI	23.593	24.349	24.824	25.344	25.899
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.428	19.812	19.835	17.981	18.977
1.3.	APK SD/MI	110,10	122,90	125,15	140,95	136,48
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMP/MTs	12.157	12.528	12.831	12.782	12.709
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	15.707	11.473	11623	10.226	10791
2.3.	APK SMP/MTs	77,40	109,20	110,39	125,00	117,77
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMA/MA/SMK	14.223	13.936	14.550	14.639	15.034
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	17.838	14.556	14.108	13.231	13.965
3.3.	APK SMA/MA/SMK	79,73	95,74	103,13	110, 64	107,65

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.21
Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh
Tahun 2011/2012

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa Bersekolah di SD/MI	Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	APK	Jumlah Siswa Bersekolah di SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	APK	Jumlah Siswa Bersekolah di SMA/MA/ SMK	Jumlah Penduduk Usia 16-18th	APK
1	Kuta Alam	5.914	3.525	167,77	4.213	1.998	210,86	5.984	2.607	229,54
2	Kuta Raja	1.510	687	219,80	466	388	120,10	559	531	105,27
3	Syiah Kuala	2.999	2.507	119,63	990	1.616	61,26	1.546	2.426	63,73
4	Ulee Kareng	2.393	2.114	113,20	809	1.182	68,44	261	1.414	18,46
5	Baiturrahman	5.081	3.073	165,34	2.170	1.667	130,17	1.067	2.046	52,15
6	Lueng Bata	1.534	2.088	73,47	1.674	1.201	139,38	730	1.525	47,87
7	Meuraxa	1.218	1.137	107,12	1.168	613	190,38	1.076	791	136,03
8	Banda Raya	1.965	2.015	97,52	919	1.105	83,17	3.282	1.328	247,14
9	Jaya Baru	3.285	1.831	179,41	300	1.021	29,38	529	1.297	40,79
	Jumlah	**25.899**	**18.977**	**136,48**	**12.709**	**10.791**	**117,7**	**15.034**	**13.965**	**107,65**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

2.2.2.1.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Rasio guru murid belum mencapai standar 19 : 1 sedangkan SNP 28 : 1, artinya di setiap satuan jenjang pendidikan terjadi kelebihan guru 742 orang dari jumlah guru 3.359 orang namun di sisi lain masih terjadi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu terutam guru produktif pada SMK dan guru TIK, sementara guru yang berlebih seperti guru kelas pada SD 214 orang dan guru mata pelajaran seperti IPA, Matematika, Agama dan lain-lain. Untuk mengatasi kelebihan guru melaksakan alih fungsi pada mata pelajaran tertentu dan mutasi secara merata di samping pengangkatan sebagai pengawas sekolah dan kepala sekolah.

Kualitas SDM dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan. Angka yang ditamatkan belum tercapai 100 persen artinya setiap jenjang pendidikan belum mampu meluluskan siswanya 100 persen karena daya serap siswa masih rendah yang diakibatkan oleh masih terbatasnya sarana pembelajaran dan masih ada kompetensi guru belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berikut tabel penjelasan perkembangan APT Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2011.

Tabel 2.22
Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah siswa Lulusan di jenjang pendidikanSD/MI	3559	3795	3517	5913	4003
1.2.	Jumlah Siswa Tkt. VI	3563	3796	3522	3661	4073
1.3.	APT SD/MI	99,89	99,97	99,86	98,09	98,28
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah siswa lulusan di jenjang SMP/MTs	3650	3573	9417	3951	4102
2.2.	Jumlah siswa Tkt. III	1339	3874	4225	4038	4116
2.3.	APT SMP/MTs	93,28	92,23	98,21	97,85	99,65
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	Jumlah siswa Lulusan di jenjang SMA/MA/SMK	4181	4002	4267	4006	4453
3.2.	Jumlah Tkt Siswa III	4516	4391	4506	4287	4475
3.3.	APT SMA/MA/SMK	92,58	91,14	94,70	93,07	99,50

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Berdasarkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) menurut kecamatan, angka yang tidak mencapai 100 persen di semua jenjang yaitu Jenjang SD/MI, SMP/MTsN maupun SMA/SMK yaitu Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Meuraxa, sedangkan yang mencapai 100 persen di semua jenjang yaitu kecamatan Syiah Kuala. Berikut tabel penjelasan perkembangan APT menurut kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2011 - 2012.

Tabel 2.23
Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)
menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2011/2012

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa Kelulusan di SD/MI	Jumlah Siswa tkt. VI	APT	Jumlah Siswa Kelulusan di SMP/MTs	Jumlah Siswa Tkt. III	APT	Jumlah Siswa Kelulusan di SMA/MA/ SMK	Jumlah Siswa Tkt. III	APT
1	Kuta Alam	1.026	1.026	100,00	1.369	1.371	99,85	1993	1.996	99,85
2	Kuta Raja	206	207	99,52	176	179	98,32	99	106	93,40
3	Syiah Kuala	368	368	100,00	279	279	100,00	465	465	100,00
4	Ulee Kareng	295	362	81,49	237	237	100,00	70	70	100,00
5	Baiturrahman	776	776	100,00	718	718	100,00	371	376	98,67
6	Lueng Bata	272	272	100,00	468	469	99,79	227	227	100,00
7	Meuraxa	229	231	99,13	395	398	99,25	347	352	98,58
8	Banda Raya	302	302	100,00	354	354	100,00	738	740	99,73
9	Jaya Baru	529	529	100,00	106	111	95,50	143	143	100,00
	Jumlah	**4003**	**4073**	**98,28**	**4102**	**4116**	**99,66**	**4453**	**4475**	**99,50**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Kualitas pendidikan bila dilihat dari Angka Pendidikan yang ditamatkan, secara rata-rata menunjukkan masih belum sempurna, walaupun beberapa kecamatan telah menunjukkan angka yang sempurna. Belum tercapainya 100 persen APT menunjukkan masih rendahnya kualitas sebagian anak didik, sehingga harus menamatkan pendidikannya lebih dari masa yang seharusnya.

2.2.2.2. Kesehatan

2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi di Kota Banda Aceh sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup, bila dibandingkan target pencapaian MDGs untuk Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 32 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015, maka dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah. Walaupun demikian, AKB di Kota Banda Aceh harus tetap dipantau karena angka ini adalah angka yang dilaporkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.

Tabel 2.24
Jumlah Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kota Banda Aceh Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun 2011	Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun 2011	AKB	AKHB
Kuta Alam	4	856	$\frac{5}{1000}$	$\frac{995}{1000}$
Kuta Raja	-	202	$\frac{0}{1000}$	$\frac{1000}{1000}$
Syiah Kuala	3	709	$\frac{4}{1000}$	$\frac{996}{1000}$

Ulee Kareng	2	468	$\frac{4}{1000}$	$\frac{996}{1000}$
Baiturrahman	2	682	$\frac{3}{1000}$	$\frac{997}{1000}$
Lueng Bata	3	486	$\frac{6}{1000}$	$\frac{994}{1000}$
Meuraxa	-	366	$\frac{0}{1000}$	$\frac{1000}{1000}$
Banda Raya	4	419	$\frac{10}{1000}$	$\frac{990}{1000}$
Jaya Baru	2	396	$\frac{5}{1000}$	$\frac{995}{1000}$

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi menunjukkan pelayanan di bidang kesehatan masih belum baik. Ini mengindikasikan kualitas pelayanan minimal belum cukup memuaskan di dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Pelayanan yang baik dan optimal ini juga ditentukan oleh tersedianya berbagai fasilitas penunjang baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

2.2.2.2.2. Angka Usia Harapan Hidup

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu, kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Tabel 2.25
Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB)
Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Kematian Bayi	20	33	16	15	20
2.	Jumlah kelahiran Hidup Bayi	3.508	4.048	4.163	4.412	4.584
3.	Ratio (AKB)	5	8	5	4	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Angka kematian bayi di Kota Banda Aceh pada Tahun 2011 masih sama dengan tahun 2010 sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan AKB 2007 adalah sebesar 5 per 1000 kelahiran hidup, AKB 2008 meningkat menjadi 8 per 1000 kelahiran hidup,

AKB 2009 kembali menurun sama dengan AKB Tahun 2007 yaitu sebesar 5 per 1000 kelahiran hidup sedangkan AKB pada Tahun 2010 menurun menjadi sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk mengubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB. Secara nasional, target pencapaian MDGs untuk AKB adalah 32 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015. Kondisi ini telah dicapai oleh Kota Banda Aceh bahkan sejak Tahun 2007. Walaupun demikian, AKB di Kota Banda Aceh harus tetap dipantau karena angka ini adalah angka yang dilaporkan.

2.2.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan padanan istilah underweight (gizi kurang) dan severely underweight (gizi buruk). Target MDG'S di tahun 2015, angka kurang gizi (gizi buruk dan gizi kurang) adalah 0,18 (18%). Untuk Kota Banda Aceh persentase gizi buruk di akhir tahun 2011 hanya 0,013 (1,3%). Selama lima tahun persentase gizi buruk hanya dibawah 1 persen yaitu tahun 2007sebesar 0,43 persen dan thn 2011 hanya 0,013 persen.

Tabel 2.26
Status Gizi Buruk Balita
Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Balita	21.046	26.764	18.012	18.012	23.815
2	Jumlah Balita Gizi Buruk	90	99	70	85	3
3	Rasio	0.43	0.37	0.39	0.47	0.013

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

2.2.2.3. Kemiskinan

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang layak bagi setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai budaya setempat.

Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Oleh sebab itu kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi : terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.

2.2.2.3.1. Penduduk Miskin Kota Banda Aceh

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan Makanan (GKM) dan garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Banda Aceh dari tahun 2007 s/d tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Garis Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin
Kota Banda Aceh Tahun 2007 S.D 2011

Tahun	Pengeluaran Per kapita sebulan (Rp)			Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk Miskin (Jiwa)
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
2007	327.729	387.342	715.071	346.750	14.519
2008	399.959	649.802	1.049.761	362.992	20.832
2009	578.097	621.911	1.199.998	414.172	19.014
2010	537.460	600.744	1.138.204	435.195	20.534
2011	552.121	768.987	1.321.108	*)	20.753

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

Presentase penduduk miskin Kota Banda Aceh dari tahun 2006 s/d tahun 2011 dapat terlihat dengan jelas pada grafik 2.9.

Grafik 2.9
Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh tahun 2006 - 2011

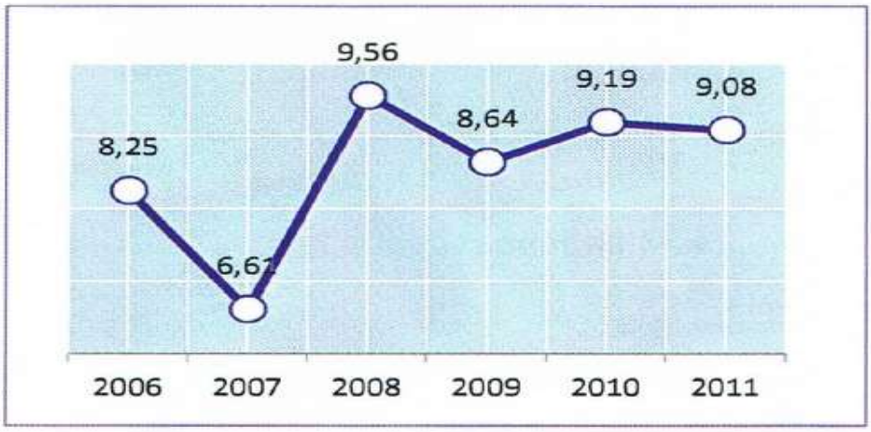

Sumber : BPS Provinsi Aceh

Berdasarkan Tabel 2.27 dan Grafik 2.9 dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk miskin Kota Banda Aceh dari tahun 2006 s/d 2011 secara fluktuatif mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini dikarenakan penurunan dan peningkatan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain ; pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan perekonomian daerah serta sumber daya alam yang ada.

Persentase penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2008 dan terendah terdapat pada tahun 2007, hal ini sangat dipengaruhi dengan pertumbuhan perekonomian yang signifikan pada tahun 2007 karena adanya banyak lapangan pekerjaan yang

berasal dari BRR, NGO dan LSM baik lokal maupun asing yang melaksanakan program pemulihan pasca tsunami tahun 2004, sedangkan pada tahun 2008 telah terjadi penurunan lapangan pekerjaan karena telah selesainya program NGO serta LSM dalam pemulihan pasca tsunami tahun 2004 lalu.

2.2.2.3.2. Perlindungan Sosial

Beberapa kecenderungan permasalahan sosial, dibarengi dengan terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, maka persoalan yang dihadapi sampai saat ini di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut: 1) masih terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat; 2) masih minimnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS; 3) masih banyaknya jumlah PMKS baik secara kualitas maupun secara kuantitas, antara lain, kemiskinan, kecacatan, ketunasusilaan, keterlantaran, korban bencana/bencana alam; 4) serta belum efektifnya penanganan bencana baik yang bersifat prefentif, tanggap darurat maupun rehabilitatif. Perkembangan jumlah penduduk rawan sosial Kota Banda Aceh Tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Sosial
Tahun 2007–2011

Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011
Rumah Tangga Miskin	Jiwa	-	1.567	-	-	9.308
Gelandangan dan pengemis	Jiwa	21	33	37	42	51
Penyandang Cacat	Jiwa	509	509	509	509	507

Sumber: Dinsosnaker dan BPS Kota Banda Aceh 2011.

2.2.2.3.3. Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Banda Aceh menunjukkan deteksi terhadap perkembangan Kamtibmas di daerah. Semakin rendahnya angka kriminalitas menunjukan stabilitas keamanan dan

kenyamanan dalam Wilayah Kota Banda Aceh dapat terkendali dan terpelihara.

Adapun angka kriminalitas yang terjadi di Kota Banda Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 secara rinci terdapat dalam Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Angka Kriminalitas Di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Jenis Kriminal	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah kasus Narkoba	31	45	57	65	80
2	Jumlah kasus Pembunuhan	3	2	1	1	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	9	7	3	1	3
4	Jumlah kasus Penganiayaan	16	56	25	17	10
5	Jumlah kasus Pencurian	72	103	82	60	15
6	Jumlah kasus Penipuan	23	51	15	13	8
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang					
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	154	265	183	157	118
9	Jumlah Penduduk	219.659	202.774	220.073	223.446	244.724
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	7	13	8	7	5

2.2.2.3.4. Demonstrasi

Demontrasi merupakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat di depan umum bagi setiap masyarakat untuk menyikapi terhadap perkembangan kebijakan pemerintahan , pembangunan dan hal-hal lainnya. Bentuk Orasi dan unjuk rasa diatur dalam Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 1998.

Demonstrasi yang terjadi di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh dapat berupa demonstrasi yang mengungkapkan perasaan tidak setuju atau tidak senang terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Adapun jumlah Demonstrasi yang terjadi di Kota Banda Aceh, sesuai Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Jumlah Demonstrasi di Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Bidang Politik	9	7	4	5	17
2	Ekonomi	11	9	3	3	13
3	Kasus pemogokan kerja					
4	Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa	20	16	7	8	30

2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh. Dapat dikatakan bahwa industri pariwisata Kota Banda Aceh saat ini memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik yang kompetitif.

Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di Kota Banda Aceh telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Keanekaragaman budaya didukung oleh kreatifitas seni dan keramahtamahan masyarakat, membuat Kota Banda Aceh mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Secara goegrafis, Kota Banda Aceh juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi obyek wisata yang terjangkau dan mudah ditempuh.

Potensi pariwisata juga didukung oleh adanya beberapa situs *heritage* tsunami, pluralisasi Kota Banda Aceh dapat dilihat dari banyaknya pendatang dari berbagai suku bangsa di Indonesia maupun beberapa suku keturunan yang berasal dari India, Cina, Arab, dan lain-lain dengan berbagai kepentingan seperti pelajar, mahasiswa, dan usahawan. Kehadiran mereka dimungkinkan membentuk berbagai akulturasi budaya. Keberadaan merekaselain sebagai pasar yang potensial sekaligus juga merupakan alat promosi yang baik bagi pariwisata Kota Banda Aceh. Kekhasan budaya yang didukung dengan pelaksanaan syariat Islam akan menjadi salah satu

produk wisata yang menarik yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.

Tabel 2.31
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Capaian Pembangunan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	63	67	75	73	75
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0	0	0	0	0
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	42	44	46	46	46
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0	0	1	1	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Akan tetapi, pelaksanaan syariat islam yang menyeluruh belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya pelanggaran syariah di tempat-tempat wisata. Pelanggaran ini lebih disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran para wisatawan untuk mengamalkannya. Hal ini menjadi suatu pertanda masih perlunya peningkatan kesadaran bagi warga Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran di dalam pengamalan syariat Islam. Tidak hanya itu, pelanggaran syriat islam juga terjadi pada pendangkalan aqidah yang terjadi di dalam masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.

Tabel 2.32
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Meuraxa	6	0	1	0
2	Baiturrahman	13	0	3	0
3	Kuta Alam	19	0	33	0
4	Syiah Kuala	6	0	2	0
5	Kuta Raja	4	0	2	0
6	Ulee Kareng	3	0	1	1
7	Lueng Bata	5	0	1	0

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
8	Banda Raya	12	0	1	0
9	Jaya Baru	7	0	2	0
	Jumlah	**75**	**0**	**46**	**0**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.33
Jumlah Penghargaan Budaya
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Seni	-	-	8	-	2
2	Pemberdayaan Generasi Muda	-	-	-	-	2

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.34
Jumlah Karya Budaya Yang Diaktualisasikan Kembali Pada Masyarakat
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Seni Tari	40	42	45	50	50
2	Sanggar Tari	95	82	94	100	75

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.35
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Gedung Kesenian	5	4	4	4	4
2	Sanggar Seni	82	87	94	97	100
3	Gelanggang Renang	0	0	0	0	0
4	Arena Permainan	3	3	3	4	6
5	Panti Pijat	4	6	8	10	12
6	Taman Rekreasi	7	7	7	7	7
7	Jasa Impresariat & Promotor	0	0	0	0	7
8	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi & Pameran	0	0	0	0	8

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.36
Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Situs Cagar Budaya	35	39	39	39	39
2	Cagar Budaya	16.435	16.691	16.691	16.691	16.691

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.37
Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Bidang Jasa Pariwisata
Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Usaha Jasa Perjalanan Wisata	31	31	27	62	65
2	Tenaga Kerja Usaha jasa Perjalanan Wisata	190	191	147	247	246
3	Usaha Jasa makanan dan minuman	180	201	223	246	174
	Restauran	38	48	51	62	25
	Rumah Makan	115	120	130	139	113
	Cafe	27	33	42	45	36
4	Tenaga Kerja Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1080	1206	1338	1476	1044
5	Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi	36	40	43	43	43
	Hotel Bintang	17	17	22	22	22
	Hotel Non Bintang	19	23	21	21	17
6.	Tenaga Kerja Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi	962	896	946	946	760
7	Usaha Jasa Daya Tarik Wisata	59	59	59	59	59
	Peninggalan Sejarah dan Purbakala	36	36	36	36	36
	Objek Ziarah	20	20	20	20	20
	Museum	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	20043	20362	20459	21004	21821
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21428	19812	19853	17891	18977
1.3.	APS SD/MI	100,07	100,97	100,97	100,85	100,87
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	9774	9262	9282	9688	9096
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	15707	11473	11623	10266	10791
2.3.	APS SMP/MTs	100,61	100,24	100,25	100,06	100,19

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.39
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Banda Aceh menurut kecamatan
Tahun 2011/2012

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah murid Usia 7-12 thn	Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	APS	Jumlah Murid Usia 13-15 thn	Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	APS
1	Kuta Alam	5029	3525	99,07	3291	1998	100,61
2	Kuta Raja	1282	687	99,54	278	388	100,40
3	Syiah Kuala	2463	2507	100,02	655	1616	99.47
4	Ulee Kareng	1980	2114	100,07	528	1182	100,24
5	Baiturrahman	4296	3073	99,72	1508	1667	100,11
6	Lueng Bata	1293	2088	100,61	1116	1201	100.08
7	Meuraxa	1091	1137	100,04	886	613	99,69
8	Banda Raya	1684	2015	100,20	262	1105	100.77
9	Jaya Baru	2703	1831	100,68	208	1021	99.91
	Jumlah Total	**21821**	**18977**	**100,87**	**7025**	**15967**	**100,19**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.40
Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah
Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	111	92	92	92	92
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21428	19812	19835	17981	21821
1.3.	Rasio	193	215	216	195	237
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	36	36	37	37	38
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	15707	11473	11623	10226	9096
2.3.	Rasio	436	319	314	276	239

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2011

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	Rasio
1	**2**	**3**	**4**	**5=3/4**	**6**	**7**	**8=6/7**
1	Kuta Alam	17	3525	207	10	3291	200
2	Kuta Raja	6	687	115	4	278	97
3	Syiah Kuala	14	2507	179	2	655	808
4	Ulee Kareng	8	2114	264	3	528	394
5	Baiturrahman	16	3073	192	6	1508	278
6	Lueng Bata	5	2088	418	5	1116	240
7	Meuraxa	9	1137	126	3	886	204
8	Banda Raya	7	2015	288	2	262	553
9	Jaya Baru	10	1831	183	3	208	340
	Jumlah	**92**	**18977**	**206**	**38**	**7025**	**284**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.42
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	1247	1340	1386	1380	1342
1.2.	Jumlah Murid	23593	23593	24349	24824	23342
1.3.	Rasio	19	18	18	18	19
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1046	1116	1146	1096	1059
2.2.	Jumlah Murid	12157	12528	12831	12782	12709
2.3.	Rasio	**12**	**11**	**11**	**12**	**12**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Apabila diperhatikan dari rasio penduduk terhadap murid dan rasio murid terhadap guru, telah menunjukkan kondisi yang ideal untuk Kota Banda Aceh. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh telah relatif baik.

2.3.1.2. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif serta peningkatan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya menjadi upaya penanggulangan kemiskinan.

Arah pembangunan kesehatan di Kota Banda Aceh secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, dan lingkungan sehat, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan.

2.3.1.2.1. Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu adalah unit yang berasal dari masyarakat, untuk masyarakat dan dilaksanakan pula oleh masyarakat. Sesuai standar nasional, idealnya 1 posyandu melayani 100 balita. Keadaan rasio posyandu terhadap balita di Kota Banda Aceh, tahun 2011 adalah 0,005; maknanya adalah 1 posyandu untuk melayani 210 balita. Bila dibandingkan dengan standar nasional masih sangat kurang. Dari jumlah balita 23.815 Kota Banda Aceh selayaknya memiliki 238 posyandu. Namun hal ini belum dapat diwujudkan karena masih kurangnya peran serta masyarakat terhadap keberadaan posyandu,

hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan posyandu dan partisipasi kader yang sangat minim di tiap bulannya.

Meskipun jumlah posyandu masih relatif rendah, masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai berbagai pilihan akses pelayanan kesehatan karena terdapat banyak fasilitas kesehatan di daerah ini. Hal ini disebabkan oleh posisi Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sehingga fasilitas pelayanan kesehatan tersedia. Dengan tingkat pendapatan yang relatif baik, masyarakat mampu mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Tabel 2.43
Jumlah Posyandu dan Balita
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Posyandu	110	112	112	112	113
2.	Jumlah Balita	21.046	26.764	18.012	18.012	23.815
3.	Rasio	1:191	1: 238	1: 160	1: 160	1 : 210

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tabel 2.44
Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh
Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Kecamatan Ulee Kareng	9	2235	1:248
2	Kecamatan Syiah Kuala	11	2963	1:269
3	Kecamatan Kuta Raja	6	1535	1:140
4	Kecamatan Kuta Alam	15	4131	1:275
5	Kecamatan Lueng Bata	10	2258	1:226
6	Kecamatan Baiturrahman	18	2870	1:159
7	Kecamatan Banda Raya	10	2192	1:219
8	Kecamatan Jaya Baru	16	2911	1:182
9	Kecamatan Meuraxa	18	2721	1:151
	Jumlah	**113**	**23.815**	**1:211**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.43 dan 2.44 dapat disimpulkan bahwa dari sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, hampir semua wilayah kecamatan memiliki jumlah posyandu yang belum cukup. Rata-rata satu posyandu melayani 200 lebih balita, kecuali wilayah Kecamatan Meuraxa, Kuta Raja, Jaya Baru dan Baiturrahman setiap posyandu melayani kurang dari 200 balita.

Rasio jumlah bayi per posyandu yang masih tinggi mengindikasikan belum maksimalnya pemerintah Kota Banda Aceh di dalam memberikan pelayanan kepada penduduk kota. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasa anggaran maupun keterbatasan tenaga medis atau non medis yang tersedia. Hal ini juga ditunjukkan oleh rasio jumlah penduduk per dokter yang masih sangat tinggi.

2.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Tabel 2.45
Jumlah Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Puskesmas	10	11	11	11	11
2.	Jumlah Pustu, Polindes/ poskesdes	31	57	59	59	60
3.	Jumlah Penduduk	219.659	202774	220.073	223.516	244.724
4.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 21.965	1 : 18.434	1 : 20.006	1 : 20.319	1 : 22.247
5.	Rasio Pustu,Polindes/ poskesdes per desa/gampong	34,44%	63,33%	65,55%	65,55%	66,66%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di tingkat puskesmas, idealnya adalah satu puskesmas melayani 20.000 masyarakat. Keadaan di Kota Banda Aceh, pada tahun 2011 tiap

satu puskesmas rata-rata melayani 22.247 masyarakat. Keadaan ini dapat dianggap sudah memenuhi standar.

Tabel 2.46
Jumlah Puskesmas, Pustu, Polindes/poskesdes menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh
Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu		Polindes/Poskesdes	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Kec.Ulee Kareng	24.248	1	1:24.248	2	1:12.124	8	1:3031
2	Kec.Syiah Kuala	34.568	2	1:17.284	3	1:11.523	6	1:5761
3	Kec.Kuta Raja	11.774	1	1:11.774	2	1:5887	0	0
4	Kec.Kuta Alam	47.970	2	1:23.945	3	1:23.985	1	1:47.970
5	Kec.Lueng Bata	24.321	1	1:24.321	2	1:12.161	3	1:8107
6	Kec.Baiturrahman	36.163	1	1:36.163	2	1:18.082	3	1:12.054
7	Kec.Banda Raya	22.896	1	1:22.896	2	1:11.448	6	1:3816
8	Kec.Jaya Baru	24.675	1	1:24.675	4	1:6169	3	1:8225
9	Kec.Meuraxa	18.109	1	1:18.109	5	1:3622	5	1:3622
	Jumlah	**244.724**	**11**	**1:22.248**	**25**	**1:9789**	**35**	**1:6992**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Dari 11 puskesmas, 25 pustu, 35 polindes, dan satu rumah sakit di Kota Banda Aceh saat ini digunakan untuk melayani lebih kurang 244.724 jiwa penduduk Kota Banda Aceh. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.44 dan 2.45. Keberadaan sumber daya kesehatan ditujukan untuk peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan serta efektifitas penggunaan terutama jumlah tenaga medis yang ada pada setiap puskesmas dan rumah sakit.

Sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan, di tiap satu desa selayaknya memiliki satu sarana pelayanan kesehatan (dapat pustu, polindes atau poskesdes). Kota Banda Aceh memiliki 90 desa dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan di luar Puskesmas dan Rumah sakit sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 60 unit (66,6%). Berarti kekurangannya sekitar 30 unit lagi (33,4%).

2.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Standar untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah 1 rumah sakit untuk 10.000 penduduk, keadaan di tahun 2011 untuk wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan keadaan 1 rumah

sakit memberi pelayanan kesehatan untuk 40.787 penduduk. Keadaan ini menunjukkan kekurangan rumah sakit untuk wilayah Kota Banda Aceh, namun kekurangan ini telah tercukupi dengan adanya 12 rumah sakit swasta yang tersebar di Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2011.

Tabel 2.47
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	2	2	2	2	2
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	2	2	2	2	2
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	6	6	6
6.	Jumlah Penduduk	219.659	202.774	220.073	223.516	244.724
7.	Rasio	1 : 36.609	1 : 33.795	1 : 36.678	1 : 37.252	1 : 40.787

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

2.3.1.2.4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Standar nasional adalah satu orang dokter diperuntukkan untuk memberi pelayanan kesehatan kepada 2.500 penduduk. Keadaan di Kota Banda Aceh di tahun 2011, satu orang dokter melayani 3.088 penduduk, ini menunjukkan ketimpangan, di mana jumlah dokter ternyata masih sangat kurang untuk wilayah Kota Banda Aceh. Seharusnya dengan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 244.724 jiwa, maka diperlukan jumlah dokter 97 orang, sedangkan yang ada sekarang adalah 74 orang, berarti masih kurang 23 orang dokter lagi.

Tabel 2.48
Jumlah Dokter Tahun 2007 s.d 2011
Kota Banda Aceh

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Dokter	70	76	63	51	74
2	Jumlah Penduduk	219.659	202.774	220.073	223.516	244.724
3	Rasio	1 : 3.137	1 : 2.668	1 :3.493	1 : 4.382	1 : 3.307

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tabel 2.49
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kec.Ulee Kareng	24.248	3	1:8083
2	Kec.Syiah Kuala	34.568	6	1:5761
3	Kec.Kuta Raja	11.774	3	1:3925
4	Kec.Kuta Alam	47.970	6	1:7995
5	Kec.Lueng Bata	24.321	4	1:6080
6	Kec.Baiturrahman	36.163	9	1:4018
7	Kec.Banda Raya	22.896	3	1:7632
8	Kec.Jaya Baru	24.675	2	1:12.338
9	Kec.Meuraxa	18.109	2	1:9055
	Jumlah	**244.724**	**38**	**1:6440**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Pada Tabel 2.49 menunjukkan penyebaran dokter di lingkungan pemerintahan Kota Banda Aceh yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Jika dilihat berdasarkan penyebaran tenaga medis di tiap kecamatan, maka dapat dilihat bahwa dokter paling kurang terdapat di Kecamatan Jaya Baru, di mana satu orang dokter memberikan pelayanan kesehatan untuk 12.337 penduduk.

2.3.1.3. Lingkungan Hidup

2.3.1.3.1. Persentase Penanganan Sampah

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh pada tahun 2010 memiliki total penduduk sebanyak 223.446 jiwa, tersebar di sembilan kecamatan dan 90 gampong. Jika rata-rata timbulan sampah adalah 0.7 kg/kapita, maka Banda Aceh memproduksi sampah sekitar 156

ton/hari. Dari 156 ton/hari produksi sampah di Kota Banda Aceh, 78 persen produksi sampah sudah dapat terangkut ke TPA Gp. Jawa yang berasal dari gampong, jalan protokol, pasar, sekolah, rumah sakit/puskesmas, terminal/pelabuhan, hotel, rumah makan/restoran dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan sisanya 17 persen sudah di daur ulang (baik pengelolaannya oleh dinas maupun oleh swasta), dan 5 persen lagi masih di bakar/dikubur oleh masyarakt, terutama di wilayah gampong.

Keberhasilan dalam pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah ketersediaan berbagai sumber daya dalam hal kualitas dan kuantitas, sedangkan faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta kondisi fisik kota yang semakin berkembang dengan segala dinamikanya.

Dalam hal sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan, material, dan manejemen, secara umum Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Kota Banda Aceh telah memilikinya. Dengan sumber daya yang dimiliki sekarang DK3 telah mampu memberikan tingkat pelayanan persampahan, sebagai berikut :

Pelayanan Sampah Terangkut : 78 %
Luas Wilayah Pelayanan : 82 %
Jumlah Penduduk Terlayani : 80 %
Jumlah Desa yang terlayanai : 100 % (90 gampong)
Frekwensi pelayanan : 1-7 hari sekali
Jumlah Gampong yang diberikan : 50 gampong
Pelayanan secara “door to door”dan membayar retribusi sampah

Disisi lain DK3 masih menghadapi banyak tantangan dan persoalan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk, ekonomi, budaya, dan pembangunan fisik kota, yaitu :

- Timbulan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Volume sampah rata-rata yang dihasilkan sekarang, sebesar 680 m^3/hari.

- Potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal dikembangkan secara sistematis yang terintegrasi dengan pola pelayanan DK3.
- Perilaku warga masyarakat membuang sampah secara sembarangan sehingga munculnya TPS-TPS liar di banyak tempat, sedangkan pewadahannya masih sangat terbatas.
- Biaya pengelolaan sampah masih didominasi oleh subsidi APBK sebesar 87%, sedangkan pembayaran retribusi dari warga masyarakat masih sangat rendah, yaitu 13 %, akan tetapi kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain Aceh dan di Indonesia pada umumnya.
- Sulitnya memperoleh lahan untuk lokasi-lokasi TPS, karena penolakan oleh warga masyarakat.
- Belum berfungsinya penegakan hukum, yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Keindahan.
- Dalam hal-hal tertentu/khusus, masih dirasakan keterbatasan kualitas personil.
- Keterbatasan lahan lokasi TPA dalam hal kelayakan geografis dari aspek kualitas lingkungan.

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh perlu terus melakukan upaya-upayan untuk peningkatan cakupan pelayanan hingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hal ini ditempuh dengan penambahan armada dan perluasan kawasan yang dilayani secara “door to door”. Hal ini tentunya terkait juga dengan upaya peningkatan penerimaan retribusi di sektor rumah tangga, namun demikian pelayanan sampah dengan kontainer masih akan terus dilakukan. Untuk pelayanan dengan kontainer akan diupayakan untuk pengalihan titik kontainer dari pusat kota dan jalan-jalan protokol ke wilayah pinggiran.

Disamping itu juga akan dilakukan upaya pengurangan jumlah TPS liar di jalan-jalan utama baik di kota maupun di gampong baik dengan sosialisasi dan gotong royong serta berkoordinasi dengan pihak gampong dan kecamatan. Sampah-

sampah yang selama ini dibuang ke TPS liar dapat dialihkan ke kontainer terdekat.

2.3.1.3.1.1. Aspek Pelayanan

Pengumpulan sampah secara *door-to-door* merupakan sistem pengumpulan sampah yang dilakukan secara regular, terjadwal dan terjamin. Sistem ini hanya bisa diterapkan di kawasan pemukiman di mana infrastruktur jalan baik jalan utama maupun lorong memungkin dilalui oleh armada sampah.

Tingkat pelayanan dengan sistem ini sangat tergantung pada jadwal pengangkutan, yaitu saat kapan sampah tersebut diangkut (misalnya : dipagi hari atau di sore hari), frekwensi pengumpulan (misalnya : sekali, dua kali atau tiga kali per minggu). Mungkin ada yang beranggapan bahwa semakin sering frekwensi pengangkutannya akan semakin baik, akan tetapi frekwensi yang tinggi juga akan berdampak pada biaya. Semakin sering truk sampah lewat maka akan semakin menimbulkan gangguan (kebisingan, emisi) dan dapat mengganggu orang yang lalu lalang di jalan tersebut. Disamping itu tiap kali sampah diangkut pasti ada sampah yang tertinggal dipinggir trotar jalan.

Kebersihan dari sistem operasional pengumpulan sampah juga sangat tergantung pada bagaimana sampah ditempatkan di titik pengumpulan, dan karena tidak ada ketentuan tentang hal ini, maka sudah bisa dipastikan akan ditemui beragam cara orang mengemas sampah, misalnya: dimasukkan dalam kantong plastik, dimasukkan dalam tong plastik/logam, dimasukkan dalam kotak, dan sebagainya. Sebenarnya dengan menetapkan standar pengemasan sampah akan mempermudah proses pengumpulan sehingga secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan.

Sistem pengumpulan ini akan lebih baik lagi bila sampah ditempatkan di tempat tepat di depan rumah sehingga pemilik rumah secara tidak langsung merasa dilibatkan dan bertanggung jawab dalam proses tersebut dan dan diharapkan mau membersihkan sisa sampah yang tidak disengaja tertinggal sedikit.

Tabel 2.50
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah sampah yang ditangani	530	545	550	565	580
2	Jumlah volume produksi sampah	680	690	700	710	720
3	Persentase	78%	79%	79%	80%	81%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 2.51
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh
Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Sampah yang ditangani (m^3/hari)	Jumlah Volume Produksi Sampah (m3/hari)	Persentase
1	Baiturrahman	99	100	99
2	Kuta Alam	148	150	99
3	Lueng Bata	62	67	93
4	Jaya Baru	23	66	35
5	Banda Raya	51	63	81
6	Kuta Raja	15	29	53
7	Meuraxa	19	49	39
8	Ulee Kareng	43	63	68
9	Syiah Kuala	69	93	74

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

2.3.1.3.1.2. Aspek Operasional

Bila aliran sampah ke TPS terlalu besar, penggunaan kontainer perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan. Hal penting yang perlu disadarai bahwa penempatan kontainer perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan berkonsultasi dengan masyarakat setempat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar keberadaan kontainer dapat diterima:

- Tersedianya areal yang memungkinkan truk bermanuver saat meletakkan dan mengangkat kontainer

- Kondisi tanah yang memadai, akan lebih baik dilengkapi dengan landasan yang dibeton
- Tidak merusak/mengganggu pandangan
- Bila penuh dapat ditukar dengan cepat (tidak meluber)
- Tidak disalah gunakan
- Dilakukan pembersihan secara berkala pada lokasi titik kontainer dan memasukkan sampah yang tercecer di luar ke dalam kontainer

Titik kontainer harus dipilih di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, baik untuk membuang langsung atau menggunakan jasa pengumpul swasta. Keberadaan kontainer diharapkan bisa menjadi penunjang dari sistem pengumpulan rumah tangga, ataupun sebaliknya, sehingga dalam hal ini sistem pengumpulan menjadi perpaduan antara door-to-door dan sistem kontainer.

Pengangkutan dengan sistem door-to-door umumnya truk masuk ke TPA sekali setiap shift (4 jam) sehingga dalam sehari 2 trip. Sedangkan dengan sistem kontainer rata-rata setiap armroll truck mengangkat kontainer ke TPA sebanyak 7-10 trip per hari.

Sistem kontainer umunya hanya menggunakan 2 tenaga kerja (1 orang supir dan 1 orang kernek), sedangkan sistem door-to-door dengan menggunakan truk membutuhkan 4 orang tenaga kerja (1 supir dan 3 kernek). Apabila digunakan pick up/becak cukup hanya menggunakan 2 orang tenaga kerja.

2.3.1.3.1.3. Wilayah Cakupan Layanan Sampah

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota saat ini memberikan pelayanan pengangkutan sampah di semua jalan protokol dan semua gampong dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Tabel 2.49 menunjukkan informasi tentang wilayah gampong yang dilayani oleh DK3. Adapun pengumpulan sampah di gampong sudah termasuk juga penanganan sampah di jalan-jalan protokol atau jalan utama yang secara administratif juga masuk dalam wilayah gampong. Meskipun demikian ada 2 gampong yaitu

Deah Raya dan Alue Naga, meskipun sudah dilayani, namun sampah yang ada di sana relatif sedikit karena jumlah penduduk yang sedikit. Di samping itu masyarakat di kedua gampong tersebut cenderung untuk menimbun sendiri sampah di lahan mereka dan ada juga yang membawa sampah ke kontainer terdekat.

Untuk memudah pelaksanaan pekerjaan di lapangan, DK3 membagi wilayah berdasaran Zona, sehingga lebih memudahkan pengawasan. Adapun zona dibagi dalam 3 zona yang terdiri atas Zona I (Meuraksa, Banda Raya, Jaya Baru), Zona II (Syiah Kuala, Ulee Kareng dan Kuta Alam, Zona III (Baiturrahman, Kutaraja dan Lueng Bata). Setiap zona tersebut dipimpin oleh satu orang Manager Zona yang membawahi 3 manager kecamatan.

Komposisi sampah di kota Banda Aceh berdasarkan hasil audit sampah yang pernah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Tabel 2.52
Komposisi Sampah di Kota Banda Aceh

Komposisi	Persentase (%)
Makanan (organik)	39.5
Kertas/kerdus	15.6
Plastik	12.5
Botol plastik	1.4
Kebun	8.4
Kayu	4.0
Logam (besi)	0.9
Logam (non-besi)	1.7
Kaca	2.2
Tekstil	2.6
Kulit dan karet	2.7
Keramik	1.5
Ban bekas	1.6
Konstruksi/Material bongkaran	3.9
Lain-lain	1.4

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 2.53
Kendaraan dan Peralatan Untuk Mendukung Kegiatan Pengelolaan Sampah

No	Peralatan	Jumlah	Tujuan Operasional	Kondisi Saat Ini
1.	Dump Truk	34 unit	Pengangkutan sampah/1 unit untuk operasional landfill	Baik
2.	Compactor	4 unit	Pengangkutan sampah	Baik
3.	Pick Up	17 unit	Pengangkutan sampah	Baik
4.	Becak	30 unit	Pengangkutan sampah	Baik
5.	Armroll	6 unit	Pengangkutan Kontainer	Baik
6.	Bulldozer	3 unit	Operasional landfill	Baik
7.	Excavator	3 unit	Operasional landfill	Baik
8.	Mobil siram	1 unit	Operasional landfill	Baik
9.	Wheel Loader	2 unit	Composting di landfill	Baik
10	Mobile Waste Shredding Machine	1 unit	Composting dilandfill	Baik
11.	Kontainer	60 unit	Pengumpulan sampah	Baik/rusak ringan
12.	Mesin Potong Rumput	19 unit	Pengumpulan sampah	Baik
13.	Mower	2 unit	Pemeliharaan Taman Kota	Baik

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

2.3.1.3.1.4 Retribusi Persampahan

Pelayanan retribusi persampahan sudah berjalan sejak tahun 2007 yang dulunya difasilitasi oleh UNDP-TRWMP. Pada awal program ini berjalan, hanya beberapa desa yang menjadi lokasi pilot project retribusi gampong. Seiring dengan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh DK3 maka dalam beberapa tahun terakhir ini pengutipan retribusi sampah hampir di seluruh desa (90 desa) dalam wilayah Kota Banda Aceh. Dari 90 desa tersebut hanya 50 desa sudah mendapat pelayanan pengangkutan sampah "door-to-door". Dari 50 desa yang sudah dilayani "door-to-door" baru 45 desa yang membayar retribusi sampah. 45 desa yang membayar retribusi sampah, rata-rata baru 30% rumah tangga yang membayar retribusi sampah.

Pada saat ini, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota terus berbenah untuk meningkat pelayanan kepada masyarakat yaitu

dengan adanya penambahan armada kenderaan seperti becak, mobil pick-up dan truck sehingga akan mengoptimalkan pengangkutan sampah.

Dari tahun ke tahun target penerimaan retribusi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan 1,1 mliyar penerimaan retribusi baik untuk komersil maupun gampong. Tahun pertama, target penerimaan tercapai 100 persen. Pada tahun selanjutnya targetnya terus ditingkatkan namun belum mencapai 100 persen. Pada tahun 2012 sampai dengan bulan juni baru mencapai 49 persen dari 3,5 milyar di targetkan.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini :

- Masyarakat masih menganggap sampah itu harus diambil setiap hari, padahal yang lebih penting adalah diambil tepat waktu sesuai dengan jadwal yang dijanjikan (bisa saja setiap 2 hari sekali atau seminggu 3 kali)
- Masih ada petugas yang tidak konsisten untuk memberikan pelayanan sesuai jadwal yang disepakati (petugas lalai, truk/becak rusak, dsb))
- Masih banyak sampah yang tidak dikemas dengan baik dan tidak dibawa ke tempat yang mudah diambil oleh petugas
- Masih ada masyarakat yang merasa tidak perlu membayar retribusi sampah karena sampah tidak diambil langsung ke rumah, padahal rumah yang bersangkutan tidak dapat dilalui oleh kendaraan DK3 dan sampah bisa dibuang ke lokasi kontainer terdekat dan akhirnya juga diangkut oleh truk DK3.
- Masih terbatasnya tenaga lapangan yang melakukan pengutipan sehingga tidak mampu menjangkau semua desa yang ada di Kota Banda Aceh.

Untuk memaksimalkan pengutipan retribusi sampah, Pemko Banda Aceh merencakan pengalihan pengutipan yang selama ini dilakukan oleh DK3 akan dilakukan oleh pihak desa langsung.

Hal ini mengacu pada Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 88 tahun 2012 tentang Pengalihan Pengutipan Retribusi Gampong.

2.3.1.3.1.5 Pencemaran Lingkungan

Laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan semakin meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Rantai kerusakan tersebut menjalar dan meluas ke sungai, danau, pantai, pesisir dan laut. Pencemaran air dan udara khususnya di wilayah padat penduduk telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hayati. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik.

Salah satu faktor strategis yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah karena portofolio kebijakan, rencana dan program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan cenderung terlepas atau terpisah dari KRP pembangunan wilayah dan sektor, tidak menyatu atau tidak terintegrasi.

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada Pemerintah Kota Banda Aceh, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah Kota Banda Aceh yang terkait erat dengan permasalahan lingkungan di Kota Banda Aceh, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.

Adapun jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota (Permen LH No. 20/2008) diprioritaskan pada :

- Pencegahan pencemaran air
- Pencegahan pencemaran udara
- Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berikut disajikan data kualitas air untuk beberapa lokasi khususnya parameter yang melebihi baku mutu kualitas air.

Tabel 2.54
Pencemaran Status Mutu Air

No.	Lokasi Sampling / Parameter	Thn 2007		Thn 2008		Thn 2009		Thn 2010		Thn 2011		Baku Mutu (PP 82/2001)	
		DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD
Krueng Aceh													
1.	Belakang PLTD	8,02	-	8,1	-	-	-	6,12	-	6,35	-	3	6
2.	Jembatan Sp. Surabaya	10,67	-	7,8	-	-	-	3,9	6,2			3	6
3.	Jbtn Peunayong	7,59	-	6,8	-	-	-	6,4	14,7	4,20	12,6	3	6
Krueng Daroy													
1.	Depan SMA 7	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	3	6
2.	Blkng Mesjid At-Taqwa Setui	-	-	-	-	-	-	3,10	6,5			3	6
3.	Jbtn Neusu	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	6,90	3	6
4.	Jbtn Peuniti	-	-	7,1	-	-	-	3,9	6,3	4,25	6,9	3	6
5.	Jbtn POM	-	-	-	-	-	-	3,2	-			3	6
6.	Jbtn Geuceu Komplek	-						3,12	-			3	6
7.	Jbtn Setui	-						5,47	11,8	3,30	7,12	3	6
Krueng Doy													
1.	Jbtn Blower							5,41	11,9			3	6
2.	Jbtn Samping RRI							6,10	13,4			3	6
3.	Jbtn Lampaseh							6,37	13,6			3	6
Krueng Lueng Paga													
1.	Stadion Harapan Bangsa	-	-	7,1	-	-	-					3	6
2.	Jbtn Ateuk	-	-	5,3	-	-	-					3	6

No.	Lokasi Sampling / Parameter	Thn 2007		Thn 2008		Thn 2009		Thn 2010		Thn 2011		Baku Mutu (PP 82/2001)	
		DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD
	Jawo												
3.	Jbtn Sp Sby Kecil	-	-	-	-	-	-					3	6
Krueng Lamnyong													
1.	Sp. Mesra, Jeulingke	5,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
2.	Jbtn Lamnyong	6,65	-	-	-	-	-	6,2	11,0	-	-	3	6

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Berikut disajikan data tentang tingkat kebisingan dari hasil pemantauan dan analisa yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh.

Tabel 2.55
Tingkat Kebisingan

No.	Lokasi	Baku Mutu	Hasil Uji
1.	Pembangunan Pasar Aceh (Jl. Diponegoro)	60 dBA	65,9 dBA
2.	RS Meutia (Jl. Cut Meutia)	60 dBA	61,8 dBA
3.	RS Ibu dan Anak (Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim)	60 dBA	62,4 dBA
4.	RS Q-Medical Center (Jl. Tgk. Daud Beureuh)	60 dBA	59,3 dBA

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Berikut disajikan data tentang pengawasan lingkungan yang pernah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.56
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

No	Usaha/Kegiatan	Th 2007	Th 2008	Th 2009	Th 2010	Th 2011
1.	Rumah Sakit	10	10	1	13	11
2.	Bengkel	194	-	-	-	-
3.	Tahu/Tempe	-	19	-	-	5
4.	PLTD Lueng Bata	-	1	1	-	1
5.	Rumah Potong Hewan	-	-	1	-	-
6.	Tanggul Air Asin Lampaseh	-	-	1	-	-
7.	Hotel/Penginapan	-	-	-	-	4
8.	Laundry	-	-	-	-	3
9.	Restoran/Cafe	-	-	-	-	4
10.	SPBU	-	-	-	-	5

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Berikut disajikan data tentang kasus-kasus lingkungan yang pernah ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.57
Kasus Lingkungan

No	Jenis Kasus	Th 2008	Th 2009	Th 2010	Th 2011
1.	Pencemaran air		4		
2.	Pencemaran udara	2	3	-	-
3.	Kebisingan	-	1	2	2
4.	Pencemaran tanah	-	-	-	-
5.	Pengelolaan Lingkungan hidup	-	-	1	4

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

2.3.1.3.2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan manusia akan air bersih sangat tinggi dan kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci dan lain-lain. Kebutuhan masyarakat akan air bersih terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh berkerjasama dengan PDAM telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Penduduk
Kota Banda Aceh Tahun 2007 -. 2011

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses air Bersih	78,530	108,785	140,850	166,095	190,070
2	Jumlah penduduk	219,659	217,918	212,241	223,446	228,562
3	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	35.75	49.9	66.4	74.3	83.16

Sumber : PDAM Kota Banda Aceh

Tabel 2.59
Proporsi Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses Air Minum	Persentase
1	Meuraxa	16,861	10,280	60.97
2	Jaya Baru	22,535	14,620	64.88
3	Banda Raya	21,369	13,880	64.95
4	Baithurrahman	31,073	25,820	83.09
5	Leung Bata	24,132	21,080	87.35
6	Kuta Alam	43,184	44,690	103.49
7	Kuta Raja	10,672	9,870	92.49
8	Syiah Kuala	35,648	31,590	88.62
9	Ulee Kareng	23,088	18,240	79.00
Total		**228,562**	**190,070**	
Rata-rata (%)				**83.16**

Sumber : PDAM Kota Banda Aceh

Tabel 2.60
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No.	Sumber Air Bersih	2007	2008	2009	2010	2011
1	Leding (Perpipaan)	15.706	21.757	28.170	33.219	38.014
2	Sumur Lindung	-	-	-	-	-
3	Sumur tidak Terlindung	-	-	-	-	-
4	Mata Air Terlindung	-	-	-	-	-
5	Mata Air Tidak Terlindung	-	-	-	-	-
6	Sungai	-	-	-	-	-
7	Danau/Waduk	-	-	-	-	-
8	Air Hujan	-	-	-	-	-
9	Air Kemasan	-	-	-	-	-
10	Lainnya	-	-	-	-	-
11	Total jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	15.706	21.757	28.170	33.219	38.014
12	Jumlah Rumah Tangga	46.570	48.572	50.752	52.752	54.572
13	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih (11/12)	33.73	44.79	55.51	62.97	69.66

Sumber : PDAM Kota Banda Aceh

2.3.1.3.3. Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata

Untuk mendukung terbangunnya permukiman yang layak huni dan dapat mendorong tumbuh kembang wilayah itu sendiri, diperlukan beberapa sarana dan prasarana pendukung yang dapat diwujudkan melalui :

- Pembangunan jalan utama dalam kawasan permukiman terbangun
- Pembangunan saluran air hujan/drainase
- Pembangunan jaringan distribusi air minum
- Pembangunan sistem pengolahan air limbah
- Kelayakan huni suatu rumah akan mempengaruhi kondisi perumahan di kawasan tersebut.

Pada suatu lingkungan permukiman keberadaan sarana dan prasarana merupakan ukuran standar kelayakan, artinya lingkungan permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana (utilitas) yang memadai cenderung akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan. Hal ini cukup beralasan seperti keberadaan jalan-jalan penghubung ke daerah sekitar maupun ke pusat kota akan terjadi kemudahan akses interaksi dengan lingkungan permukiman sekitarnya maupun ke kawasan-kawasan utama pada daerah perkotaan. Disisi lain keberadaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan permukiman akan memacu pula peningkatan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi.

Tabel 2.61
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Luas area permukiman tertata (Ha)	1.442	1.482	1.523	1.564	1.605
2.	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	Persentase (%)	23,48	24,14	24,80	25,47	26,14

Sumber : Dinas PU Kota Banda Aceh

Kebutuhan akan perumahan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Meskipun demikian, dengan melihat perkembangan tingkat daya beli masyarakat yang cenderung fluktuatif serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingginya harga rumah (nilai lahan), maka diperkirakan kemampuan masyarakat menengah kebawah untuk membeli rumah akan menurun. Untuk itu telah dilakukan upaya antisipasi, yaitu dengan pengembangan rumah susun sewa (Rusunawa).

Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di kota Banda Aceh dimulai sejak tahun 2009 dan saat ini sudah ada yang

beroperasi. Rumah susun tersebut keseluruhan sebanyak 2 x 196 unit (2 x 2 blok) terletak di Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh.

2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

2.3.1.4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Saat ini total panjang jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh adalah 707,343. Panjang jalan dengan kondisi baik sampai tahun 2011 sepanjang 705,233 Km, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak adalah 2,110 Km.

Tabel 2.62
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kondisi Baik	192,510	531,127	634,457	659,860	705,233
2.	Kondisi Sedang Rusak	114,110	67,114	-	-	-
3.	Kondisi Rusak	181,323	109,102	72,886	47,483	2,110
4.	Kondisi Rusak Berat	-	-	-	-	-
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	487,943	707,343	707,343	707,343	707,343

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Tabel 2.63
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011

No.	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan secara keseluruhan
1	Kecamatan Banda Raya	68,383	-	0,171	-	68,554
2	Kecamatan Baiturrahman	63,340	-	0,410	-	63,750
3	Kecamatan Jaya Baru	85,412	-	0,408	-	85,820
4	Kecamatan Kuta Alam	94,501	-	-	-	94,501
5	Kecamatan Kuta Raja	58,236	-	-	-	58,236
6	Kecamatan Lueng Bata	74,210	-	0,349	-	74,559

No.	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan secara keseluruhan
7	Kecamatan Meuraxa	87,530	-	0,372	-	87,902
8	Kecamatan Syiah Kuala	75,330	-	-	-	75,330
9	Kecamatan Ulee Kareng	98,291	-	0,400	-	98,691
	Jumlah	**705,233**	**-**	**2,110**	**-**	**707,343**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

2.3.1.4.2. Rasio Jaringan Drainase

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pemeliharaan jaringan drainase merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan drainase kota agar dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Pengertian pemeliharaan adalah semua pekerjaan rutin dan berulang yang diperlukan untuk memelihara suatu fasilitas sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan.

Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai, dengan topografi yang berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut. Secara hidrolis Kota Banda Aceh menerima banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut, berhubung kondisi topografi yang relatif datar maka banjir ini tidak dapat dibuang dengan gravitasi.

Untuk itu dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan perlu pertimbangan seperti : pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut, dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (receiving waters) khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pumping station karena aliran secara gravitasi sudah tidak mungkin dilakukan secara optimal.

Pada tahun 2005 melalui Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir Kota Banda Aceh dan Pengaman Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Aceh melaksanakan SID Drainase Induk Kota Banda Aceh dan melakukan Review Master Plan Drainase Kota

Banda Aceh dengan membagi wilayah pengaliran air menjadi 8 zona drainase seluas 4.706 Ha.

Gambar 2.15
Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh

Kondisi drainase pada saat itu adalah terjadinya sedimentasi, sampah, dinding saluran yang colaps dan menutup saluran, penyempitan dimensi saluran dan gorong-gorong, hambatan akibat bangunan lain seperti pipa PDAM, tiang listrik, tiang telepon, sisa-sisa bekesting dan sebagainya serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menyebabkan air tergenang disepanjang saluran dan menjadi tempat berkembangnya nyamuk serta menimbulkan bau yang tidak sedap, pada gilirannya akan mengganggu kesehatan. Sedimentasi, sisa-sisa bangunan, sampah dan tumbuh-tumbuhan diperkirakan hampir 70 persen dari panjang saluran.

Pemeliharaan saluran drainase sangat diperlukan agar fungsi sistem drainase menjadi lebih efektif. Dengan pemeliharaan yang baik maka dapat mengurangi dampak banjir atau genangan. Pemeliharaan drainase yang dilakukan pada saat itu belum

menunjukkan hasil yang maksimal dikarenakan belum tersedianya data base saluran yang baik dan terorganisir sehingga akan berakibat dengan kebutuhan besaran dana yang diperlukan untuk setiap tahunnya. Pemeliharaan sistem drainase sampai dengan saat ini sekitar 71 persen yang telah tertangani.

Tabel 2.64
Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh

No	Tahun	Panjang Saluran (Km)	Panjang Penanganan (Km)	Kondisi Baik (Km)	Kondisi Rusak (Km)	Kondisi Rusak Berat (Km)
1	2007	138,79	15,00	35,99	102,80	12,40
2	2008	141,39	-	50,99	90,40	-
3	2009	165,3	62,50	113,49	51,81	-
4	2010	172,3	7,00	120,49	51,81	-
5	2011	186,6	91,00	175,50	11,10	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh juga memiliki sembilan rumah pompa yang sangat diperlukan khususnya apabila munculnya musim penghujan bersamaan dengan pasang purnama**,** karena kondisi aliran pada tempat tersebut saat pasang purnama sudah merupakan aliran balik (back water). Tanpa stasiun pompa aliran air sudah stagnan dan khususnya pada lokasi genangan permanen dalam drainase, sehingga kelebihan air tidak dapat dikurangi dan dikhawatirkan di musim kemarau akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Tabel 2.65
Kondisi Rumah Pompa Kota Banda Aceh

No.	Lokasi	Kecamatan	Kondisi	Zona	Jumlah Mesin	Kapasitas
1	Lampaseh P2.1	Kuta Raja	Baik	II	4	180 m^3/dt
2	Kp. Pande P2.2	Kuta Raja	Baik	II	2	180 m^3/dt
3	Punge Jurong P2.3	Meuraxa	Baik	II	2	180 m^3/dt
4	Peunayong P3.1	Kuta Alam	Baik	III	2	0,5 m^3/jam
5	Tgk. Diblang P3.2	Kuta Alam	Baik	III	2	0,5 m^3/jam
6	Lampulo P3.3	Kuta Alam	Baik	III	4	0,5 m^3/jam
7	Peuniti P4.1	Baiturrahman	Sedang Dikerjakan	IV	2	180 m^3/dt

No.	Lokasi	Kecamatan	Kondisi	Zona	Jumlah Mesin	Kapasitas
8	Panteriek	Lueng Bata	Sedang Dikerjakan	VI	2	180 m^3/dt
9	Jeulingke P5.2	Syiah Kuala	Baik	V	2	0,5 m^3/jam

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

2.3.1.4.3. Rasio Tempat Ibadah

Tabel 2.66
Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk
Kota Banda Aceh
Tahun 2011

No	Bangunan Tempat Ibadah	Tahun 2011		
		Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
1.	Mesjid	103	220.582	1:2.142
2.	Gereja	3	1.255	1:418
3.	Kuil	1	39	1:39
4.	Kelenteng	1	2.755	1:2.755
	Jumlah	**108**		

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Rasio Tempat Ibadah menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh
Tahun 2011

NO	Kecamatan	Mesjid			Gereja			Pura			Vihara			Kelenteng			Lain-lain		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Kecamatan Meuraxa	9	16.320	1:1813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kecamatan Jaya Baru	6	22.077	1:3680	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kecamatan Banda Raya	5	20.821	1:4164	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
4.	Kecamatan Baiturrahman	22	30.038	1:1365	-	229	-	-	-	-	-	4	-	-	218	-	-	-	-
5.	Kecamatan Lueng Bata	5	23.347	1:4669	-	100	-	-	-	-	-	2	-	-	266	-	-	-	-
6.	Kecamatan Kuta Alam	23	39.449	1:1715	3	629	1:210	-	-	-	-	4	-	1	2.052	1:2052	-	-	-
7.	Kecamatan Kuta Raja	8	10.781	1:1348	-	132	-	-	-	-	1	29	1:29	-	199	-	-	-	-
8.	Kecamatan Syiah Kuala	18	35.189	1:1955	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kecamatan Ulee Kareng	7	22.560	1:3223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**103**	**220.582**	**1:2142**	**3**	**1.255**	**1:418**	**-**	**-**	**-**	**1**	**39**	**1:39**	**1**	**2.755**	**1:2755**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2012

2.3.1.4.4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Dalam upaya mengurangi efek limbah baik dari perumahan/permukiman maupun perdagangan/jasa telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan dalam upaya memenuhi mengurangi efek pengolahan limbah yang tidak benar. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah di Kota Banda Aceh. Jumlah rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Banda Aceh terus meningkat dengan persentasenya seperti tercantum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.67

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	44.498	46.560	48.705	50.144	50.562
2.	Jumlah rumah tinggal	46.570	48.572	50.752	52.752	54.572
3.	Persentase	90,39	90,49	91,99	92	92,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

2.3.1.4.5. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tabel 2.68
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Banda Aceh
Tahun 2011

No	Uraian	Tahun 2011		
		Jumlah	Luas (m^2)	Daya Tampung
1.	Tempat pemakaman umum (TPU)	143	324.102	162.051
2.	Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	448	200.193	100.097
3.	Tempat pemakaman khusus (TPK)	1	15.000	7.500
4.	Lain-Lain	-	-	-
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	592	539.295	269.648
6.	Jumlah penduduk (jiwa)	223.446	-	-
7.	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)	**725**	-	-

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Tabel 2.69
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh
Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tempat Pemakaman Umum (TPU)		Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)		Tempat Pemakaman Khusus (TPK)		Lain-Lain		Jumlah Total		Rasio TPU persatuan penduduk
			Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Tmpt Pemakaman	Daya tampung	
1.	Kuta Alam	42.217	25	29.475	26	5.203	-	-	-	-	51	34.678	**698**
2.	Baiturrahman	30.377	9	9.483	71	9.341	1	15.000	-	-	81	26.324	**312**
3.	Syiah Kuala	34.850	23	17.283	43	7.421	-	-	-	-	66	24.704	**496**
4.	Ulee Kareng	22.571	11	10.057	46	8.686	-	-	-	-	57	18.743	**446**
5.	Lueng Bata	23.592	11	8.565	54	31.235	-	-	-	-	65	39.800	**363**
6.	Banda Raya	20.891	10	21.122	84	15.801	-	-	-	-	94	36.923	**1011**
7.	Jaya Baru	22.031	15	12.959	52	4.825	-	-	-	-	67	17.784	**588**
8.	Kuta Raja	10.433	11	40.529	22	9.175	-	-	-	-	33	49.704	**3885**
9.	Meuraxa	16.484	28	12.578	50	8.411	-	-	-	-	78	20.989	**763**
	Jumlah	**223.446**	**143**	**162.051**	**448**	**100.097**	**1**	**7.500**	**-**	**-**	**592**	**269.648**	**725**

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Tabel 2.70
Tempat Pemakaman Umum Kota Banda Aceh

No	Uraian	Ukuran	Luas	Status Tanah	Ket.
1	Kuburan Kota Baro	95 x 70	6.650 M2	Wakaf	
2	Kuburan Keudah	103 x 97	9.991 M2	Wakaf	
3	Kuburan Beurawe	124 x 20	2.480 M2		
4	Kuburan Peulanggahan	41 x 32	1.312 M2	Wakaf	
5	Kuburan Mulia	115 x 93	10.995 M2	Wakaf	
6	Kuburan Setuy	138 x 41	5.658 M2	Wakaf	
7	Kuburan Massal Kampung Pande	57 x 35	1.995 M2		Tsunami
8	Kuburan Massal Ulhee lehu	60 x 26	1.560 M2		Tsunami
9	Kuburan Tanah Bahagia		3.200 M2		
10	Kuburan Kherkoft		7.450 M2		Tentara Belanda

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

2.3.1.4.6. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan penduduk

Sejak Januari 2009, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gp. Jawa yang merupakan satu-satunya TPA di Kota Banda Aceh yang dibangun dengan standard Sanitary Landfill sudah mulai beroperasi yang berarti sejak saat itu praktek open dumping sudah dihentikan karena hal ini mengacu dengan Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Untuk melakukan operasional TPA dengan sistem sanitary landfill, TPA Gp. Jawa dilengkapi dengan 3 unit bulldozer (2 aktif, 1 standby), 2 unit excavator. Untuk penutupan harian (*daily cover*) setiap tahunnya disediakan 5.000 m3 tanah timbun yang didatangkan dari luar Kota Banda Aceh. Di samping itu TPA Gp. Jawa merupakan TPA terpadu di mana kegiatan pengomposan dan pemilahan barang-barang yang bisa di-daur ulang (*recyclable material*) dilakukan di TPA. Bahkan sejak 1 Pebruari 2012 jembatan timbang di TPA Gp. Jawa sudah mulai dioperasikan, di mana sebelumnya volume sampah yang masuk TPA hanya diestimasi

dengan tingkat akurasi yang rendah, tetapi dengan adanya jembatan timbang, berat volume sampah yang masuk TPA sudah dapat dihitung dengan akurat.

Saat ini setiap kendaraan pengangkut sampah yang masuk dan keluar TPA, harus masuk ke jembatan timbang untuk dihitung berat sampah yang diangkut. Sampah sampah organik yang berupa daun, ranting pohon, pohon diturunkan di unit pengomposan di mana sampah-sampah organik tersebut akan diangkut dengan loader dan dimuat ke mesin pencacah (*Mobile Waste Shredding Machine*) dengan kapisitas 16 ton/jam. Sedangkan sampah non organic yang memiliki nilai ekonomis diturunkan di unit daur ulang (*recycling*). Recyclable material seperti plastic gelas/botol dijual kepada pengumpul di TPA untuk diolah lebih lanjut di Pabrik Plastik Mini Panteriek yang dikelola oleh DK3. Sedangkan bahan-bahan daur ulang jenis lainnya seperti kertas, kardus, kaleng, dan berbagai jenis logam lainnya dikumpulkan dan dijual ke pedangan pengumpul yang ada di sepanjang jalan akeses menuju TPA Gp. Jawa.

Setelah semua recyclable material, baik organik maupun non organik dipisahkan, baru sampah sisanya dibuang ke sel sampah. Dengan demikian sebagian sampah sudah masuk ke landfill sudah dapat dikurangi, sehingga akan sangat membantu dalam memperpanjang umur TPA.

Dalam waktu dekat TPA Gampong Jawa akan mengoperasikan Transfer Station yang pada saat ini sedang dalam masa penyelesaian. Transfer statition ini diperkirakan selesai dalam tahun ini dan akan langsung dioperasikan. Transfer station ini berfungsi sebagai tempat pemilahan sampah sebelum diangkut ke TPA Blang Bintang. Ke depan akan dikaji potensi gas metan yang ada dalam sel sampah untuk dikembangkan menjadi *waste to energy*.

Kawasan TPA Gampong Jawa juga dilengkapi dengan fasilitas Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dibangun oleh Unicef dan JICA. Dengan adanya fasilitas ini, limbah tinja yang ada di Kota Banda Aceh sudah terkelola dengan baik. Fasilitas ini merupakan satu tempat pengolahan limbah tinja yang ada di Provinsi Aceh.

Tujuan pengolahan limba tinja sendiri adalah untuk mengurangi tingkat pencemaran yang disebabkan oleh limbah tinja, mengingat limbah tinja sangat berbahaya bagi lingkungan khususnya kualitas air.

Manfaat dari pengolahan limbah tinja ini dapat diperoleh dari hasil olahan yang dihasilkan. Lumpur hasil pengolahan, dapat digunakan untuk pembuatan kompos (budidaya pertanian). Selain itu, dapat digunakan untuk meningkatkakan kualitas lingkungan, khusunya kualitas air (perairan).

Selain itu, dalam kawasan TPA Gampong Jawa memiliki Workshop Perbengkelan berstandar internasional. Workshop ini dibangun oleh UNDP melalui program TRWMP. Workshop DK3 melakukan kegiatan pemeliharaan semua kenderaan operasional baik perbaikan ringan sampai berat. Tenaga mekanik yang dimiliki oleh Workshop DK3 sudah diberikan training tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berstandar international. Bengkel ini sendiri direncanakan akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dapat memberikan kontribusi dari segi pendapatan asli daerah.

Tabel 2.71
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	TPS		
			Jumlah Kontainer	Jumlah Daya Tampung (kubik)	Rasio
1	Banda Raya	21.369	23	54,5	1:929
2	Jaya Baru	22.535	11	31,5	1:2049
3	Meuraxa	16.861	13	24,5	1:1297
4	Kuta Alam	43.184	21	61,5	1:2056
5	Syiah Kuala	35.648	12	38	1:2971
6	Ulee Kareng	23.088	7	13	1:3298
7	Lueng Bata	24.132	13	37	1:1856
8	Baiturrahman	31.073	35	87,5	1:888
9	Kuta Raja	10.672	5	10	1:214
Jumlah		**228.562**	**130**	**357,5**	**1:1758**

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kota Banda Aceh

2.3.1.5. Penataan Ruang

2.3.1.5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang/Tata Kota dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Bangunan Umum mempunyai beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- Ketersediaan sarana dan prasarana fisik bangunan umum yang memadai.
- Meningkatkan kualitas prasarana fisik bangunan umum baik secara struktural maupun arsitektural
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fisik bangunan umum yang ramah terhadap penyandang cacat (aksesibilitas penyandang cacat)

Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan agar sesuai RTRW dilakukan kegiatan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang meliputi :

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Sosialisasi Tata Ruang/Tata Bangunan
- Penataan Bangunan
- Pemutihan IMB Dalam Kawasan Kota Banda Aceh
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Bangunan Umum
- Penyusunan Rencana Tata Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya menyebabkan peningkatan penggunaan lahan. Banyak ruang terbuka berubah menjadi kawasan terbangun. Keberadaan ruang terbuka hijau harus diperhatikan agar kondisi kota tetap indah, sehat dan nyaman. Perkembangan rasio RTH di kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	1.809,30	1.809,30	1.809,30	1.809,30	1.809,30
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	552,24	588,26	644,28	690,3	736,32
3.	Luas wilayah	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	3,28	3,07	2,80	2,62	2,45

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Tabel 2.73
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau
1.	Kec. Kuta Alam	1005	193,6	193,6	100
2.	Kec. Kuta Raja	521	241	241	100
3.	Kec. Jaya Baru	378	9,9	9,9	100
4.	Kec. Banda Raya	454	4,6	4,6	100
5.	Kec. Lueng Bata	534	4,3	4,3	100
6.	Kec. Ulee Kareng	615	5,7	5,7	100
7.	Kec. Syiah Kuala	1424	312,6	312,6	100
8.	Kec. Meuraxa	726	425,5	425,5	100
9.	Kec. Baiturrahman	479	35,5	35,5	100
	RTH Tibang, Lambung dan Rusunawa	-	14	14	100
	Jumlah	**6136**	**1250,6**	**1250,6**	**100**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

2.3.1.5.2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Ruang Terbuka Hijau *(Green Openspaces)* adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana

lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau *(Green Openspaces)* di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.

Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 persen dari luas wilayah. Kota Banda Aceh Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 20 persen dari luas kota. Pemko Banda Aceh melalui DK3 Banda Aceh terus memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk dimanfaatkan untuk penghijauan terutama daerah-daerah perkotaan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, DK3 berkerjasama dengan pihak desa untuk mendata semua lahan pemakaman umum untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang akan ditanami dengan pohon penghijauan.

Selain penataan taman dan ruang terbuka hijau, DK3 juga melakukan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) terutama untuk jalan-jalan umum baik di gampong maupun di perkotaan.

Sampai saat ini jumlah lampu yang telah terpasang di Kota Banda Aceh hampir mencapai 7.000 unit yang tersebar diseluruh banda aceh. Perencanan ke depan dilakukan program meterisasi yaitu pemasangan meteran semua lampu terutama yang ada di jalan protokol guna mencegah pemborosan pembayaran listrik.

2.3.1.5.3. Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Pengawasan pemanfaatan ruang selama ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Adapun bentuk bangunan yang ditegur terdiri dari :

- Bangunan yang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB.
- Bangunan yang didirikan tanpa IMB dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh.

- Bangunan yang didirikan di atas tanah negara dan di atas saluran atau sarana umum yang merupakan milik pemerintah.

Tahapan teguran meliputi :

Surat teguran I dan teguran II, yaitu berupa perintah penghentian pekerjaan dan pengurusan IMB, serta dapat berupa peringatan pembongkaran bangunan yang menyimpang dari ketentuan penataan ruang dan bangunan. Surat teguran III, yaitu berupa surat perintah pembongkaran.

Kegiatan pengawasan ini berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pemilik bangunan yang mengurus IMB serta meningkatkan PAD Kota Banda Aceh.

Tabel 2.74
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	34.684	35.356	35.887	36.801	37.563
2.	Jumlah Bangunan	57.247	58.448	59.641	61.112	62.449
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	60,6%	60,5%	60,2%	60,2%	60,1%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Tabel 2.75
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh
menurut Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Rasio bangunan ber-IMB
1.	Kuta Alam	12.462	7.103	57%
2.	Kuta Raja	2.814	1.971	70%
3.	Jaya Baru	6.213	3.914	63%
4.	Banda Raya	4.857	2.963	61%
5.	Lueng Bata	5.976	3.575	60%
6.	Ulee Kareng	5.683	3.564	63%
7.	Syiah Kuala	9.322	5.395	58%
8.	Meuraxa	5.734	3.727	68%
9.	Baiturrahman	9.388	5.351	65%
	Jumlah	**62.449**	**37.563**	**57%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

2.3.1.6. Perhubungan

2.3.1.6.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2.76
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah penumpang Bis	133,756	146,000	394,200	662,721	526,623
3.	Jumlah penumpang ASDP	110,490	168,753	186,485	207,586	198,234
5.	Total Jumlah Penumpang	244,246	314,753	580,685	870,307	724,857

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.77 tampak bahwa jumlah penumpang meningkat dari tahun 2007 – 2010. Peningkatan terjadi karena masih ada kegiatan rehab rekon yang manjadi daya tarik bagi masyarakat luar untuk datang ke Banda Aceh terutama para pekerja yang terlibat langsung dengan proses rehab rekon. Sedangkan tahun 2011 terjadi penurunan penumpang pada terminal AKAP/AKDP karena menurunnya aktifitas rehab rekon dan masyarakat sudah banyak yang memiliki kendaraan pribadi untuk berpergian.

2.3.1.6.2. Rasio Izin Trayek

Yang dimaksud dengan izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Saat ini Kota Banda Aceh telah melayani 10 rute trayek untuk angkutan kota, 3 buah perusahan, total jumlah armada 354 unit dan 4 rute trayek untuk angkutan Damri dengan 12 unit armada. Rasio izin trayek yang dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 2.78

Tabel 2.77
Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Izin Trayek perkotaan	588	496	360	339	322
2.	Izin Trayek perdesaan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Izin Trayek	588	702	662	798	632
4.	Jumlah penduduk	219659	217918	212241	223446	228562
5.	Rasio Izin Trayek	0.0027	0.0023	0.0017	0.0015	0.0014

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.78 tampak pada tahun 2011 terjadi penurunan pemberian izin trayek. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi untuk beraktivitas, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan kota menurun drastis maka dengan sendirinya angkutan kota tersebut berangsur-angsur berkurang karena angkutan tersebut sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan operasionalnya dalam melayani trayek tersebut.

Tabel 2.78
Jumlah Halte Yang Di Layani Angkutan Umum Dalam Trayek
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Halte	38	38	38	38	**36**
	Jumlah	**38**	**38**	**38**	**38**	**36**

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.79 tampak bahwa jumlah halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek dari tahun 2007 – 2009 tetap dan stabil, pada tahun 2011 terjadi pengurangan jumlah halte pada Jl. T. Nyak Arief sebanyak 2 unit karena terjadi pembangunan saluran baru pada jalan tersebut, namun halte – halte yang telah ada hanya berada pada jalur – jalur utama trayek angkutan umum yaitu pada Jl. Tgk. Daud Beureueh 12 Unit, Jl. T. Nyak Arief 6 Unit, Jl. Chik Ditiro 2 Unit, Jl. Tgk. Imuem Lueng Bata 3, Jl. T. Umar 8 Unit, Jl. Cut Nyak Dhien 4 Unit, Jl. ST. Iskandar Muda 1 Unit dan Jl. T. Angkasah 1 Unit. Dari data tersebut masih terdapat jalur yang

dilayani trayek angkutan umum yang belum tersedia halte seperi trayek ke Ulee Kareng, Lampeunerut dan Ulee Lheue.

Tujuan perekayasaan halte kendaraan penumpang umum adalah :

- menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas;
- menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum
- menjamin kepastian keselamatan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang; memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan umum atau bus.

Tabel 2.79
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Rambu	917 Unit	967 Unit	1017 Unit	1067 Unit	1368 Unit
2.	Jumlah Marka	1340 M^1	1552 M^1	1750 M^1	2235 M^1	19396 M^1
3.	Jumlah Traffic Light	16 Titik	16 Titik	16 Titik	16 Titik	16 Titik

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Tabel 2.80 memperlihatkan bahwa jumlah fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2007 – 2011 bertambah. Jumlah rambu lalu lintas setiap tahun terus bertambah (termasuk yang direhab) yang terdiri rambu tiang tunggal, rambu RPPJ dan Rambu Type F. Jumlah marka setiap tahun terus bertambah (termasuk yang dilakukan pengecatan kembali untuk marka yang telah pudar) yang terdiri marka putus – putus, marka lambang, marka utuh, marka chevpron, marka zebra cross, marka pita penggaduh dan marka yellow box. Jumlah traffic light dari tahun ke tahun tetap, namun setiap tahun terdapat titik trafic light yang dilakukan pergantian baru atau rehab. Selanjutnya perlu dilakukan perawatan, peremajaan dan pergantian secara berkala fasilitas perlengkapan jalan yang berada di Kota Banda Aceh

Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan

pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

2.3.1.6.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Uji berkala untuk angkutan umum dilakukan secara periodik 6 bulan sekali.

Data jumlah kir angkutan umum di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.81. Dari Tabel 2.81 terlihat bahwa jumlah kir kendaraan di Kota Banda Aceh terjadi penurunan terutama pada tahun 2011, hal ini memungkinkan karena kendaraandapat melalukan uji kir pada daerah lain.

Tabel 2.80
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Angkutan Umum	2007			2008			2009			2010			2011		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	617	1,141	92.46	712	1,362	95.65	436	791	90.71	357	599	83.89	477	645	67.61
2	Mobil bus	896	1,601	89.34	820	1,437	87.62	968	1,613	83.32	980	1,660	84.69	1,187	1,679	70.72
3	Mobil barang	4,032	7,010	86.93	3,185	6,298	98.87	4,025	7,240	89.94	4,012	7,165	89.29	4,167	9,333	111.99
4	Kereta gandengan															
5	Kereta tempelan															
	Jumlah	**5545**	**9752**	**87.94**	**4717**	**9097**	**96.43**	**5429**	**9644**	**88.82**	**5349**	**9424**	**88.09**	**5831**	**11657**	**99.96**

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

2.3.1.6.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelaksanaan pembangunan di sektor perhubungan, Kota Banda Aceh telah memiliki satu unit terminal penumpang terpadu type A melayani trayek AKAP dan AKDP jurusan Barat-Selatan yang terletak di Jln DR. Mr. Tgk.H.Mohd. Hasan Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata dengan fasilitas yang memadai dibangun secara bertahap oleh satker BRR (pelaksanaan pembangunan tahun 2006 s/d 2008), dan juga memiliki satu unit terminal AKDP jurusan Timur – tenggah yang terletak di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, terminal Angkutan Kota, untuk kepentingan terminal Mobar Kota Banda Aceh sampai saat ini masih dalam pengawasan dan pengendalinan Dinas Perhubungan, Komintel Aceh.

Kota Banda Aceh juga memiliki satu unit Pelabuhan Penyeberangan ASDP yang terletak di pantai Ulee Lheue Jalan Iskandar muda Gampung Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa untuk melayani transportasi pengebarangan dengan aktivitas keberangkatan dari Banda Aceh ke Sabang dan Banda Aceh ke Pulo Aceh atau sebaliknya yang merupakan bantuan UNDP Pasca Tsunami, telah berfungsi secara maksimal dan telah berjalan lancar dalam melayani masyarakat.

Pengguna jasa transportasi terus meningkat baik dari masyarakat domestik maupun mancanegara. Oleh sebab itu kita terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana serta fasilias penunjang lainnya yang memadai melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (tahun 2002 sampai tahun 2017), kondisi fasilitas transportasi dalam Kota Banda Aceh diperlihatkan pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah pelabuhan ASDP	1	1	1	1	**1**
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	**-**
3.	Jumlah terminal bis	2	2	2	2	**2**
	Jumlah	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

2.3.1.7. Perizinan

Sejak berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2007 sampai dengan sekarang terjadi kenaikan pengurusan perizinan usaha dan pendapatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2007 sampai dengan 2011 izin yang telah dikeluarkan oleh KPPTSP sebanyak 56.481 lembar, sementara untuk pendapatan sebesar Rp.14.400.890.083,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.82

Realisasi Izin dan Pendapatan Tahun 2007 S/D 2011

No	Jenis Perizinan	Jumlah Yang Telah Dicapai									
		Perizinan (Lbr)					Retribusi (Rp.)				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	Izin Gangguan (HO)	420	572	604	661	606	221.602.325	258.148.150	441.703.740	400.435.220	371.460.225
2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	3694	4976	5843	5511	5137	316.500.000	427.775.000	484.795.000	517.950.000	493.150.000
3	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	213	269	1132	239	362	143.000.000	203.000.000	928.500.000	168.000.000	289.500.000
4	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1392	1615	1561	1409	1321	174.525.000	197.550.000	184.840.000	168.650.000	161.775.000
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1607	1446	1493	1405	1325	88.350.000	89.450.000	84.400.000	77.210.000	75.425.000
7	Izin Usaha Kesehatan (IUKES)	18	72	134	132	122	1.275.000	5.500.000	10.725.000	10.475.000	9.825.000
8	Izin Pariwisata	12	61	80	92	113	-	-	-	-	-
9	Izin Usaha Angkutan / Izin Trayek	7	7	9	9	14	600.000	1.490.000	4.895.000	2.220.000	12.830.000
10	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	38	334	236	388	345	174.380.900	1.433.111.700	1.063.969.000	1.994.914.457	2.019.721.920
11	Izin Reklame	136	943	933	1077	1279	-	-	-	-	541.141.946

No	Jenis Perizinan	Jumlah Yang Telah Dicapai									
		Perizinan (Lbr)					Retribusi (Rp.)				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
12	Izin Galian Jalan	2	2	7	1	3	-	-	-	-	-
13	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni & Budaya	37	37	69	68	91	-	-	-	-	-
14	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tanda Daftar Industri (TDI)	52	72	64	51	69	4.100.000	4.225.000	4.050.000	3.075.000	5.375.000
16	Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)	-	-	-	1450	3346	-	-	-	38.325.000	85.900.000,-
	J U M L A H	**7746**	**10304**	**11805**	**12493**	**14133**	**1.124.333.225**	**2.620.249.850**	**3.208.948.240**	**3.381.254.677**	**4.066.104.091**

Sumber : KPPTSP Kota Banda Aceh

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pariwisata

Tabel 2.83
Data Arus Kunjungan Wisatawan

No	Kunjungan Wisatawan	Manca Negara	Nusantara	Jumlah
1	Tahun 2007	9,940	82,743	92,683
2	Tahun 2008	6,960	129,657	136,617
3	Tahun 2009	4,820	157,891	162,711
4	Tahun 2010	4,065	138,305	142,370
5	Tahun 2011	4,264	159,439	163,703
	T o t a l			**698,084**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Grafik 2.10

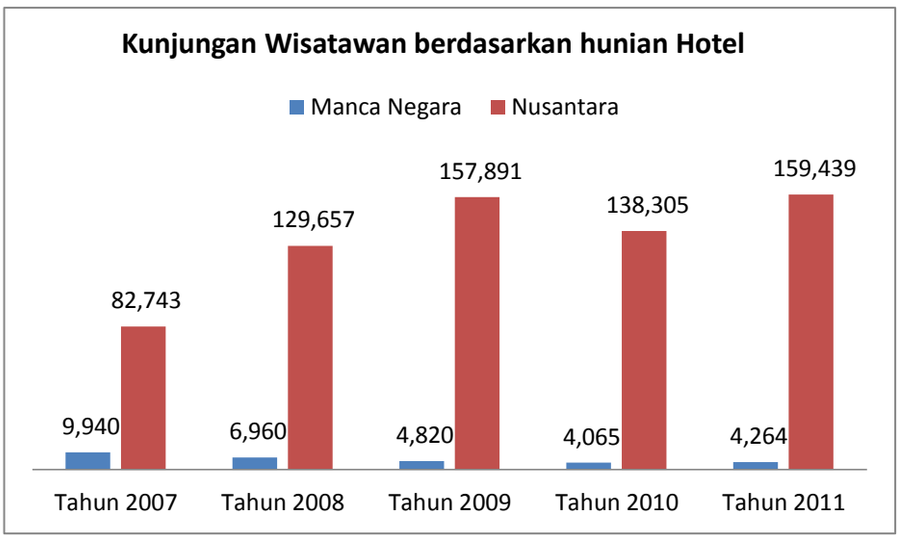

Jumlah arus kunjungan wisatawan per tahun di peroleh dari data hunian tamu Hotel/wisma/Losmen yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Hal ini berkaitan erat dengan dicanangkannya tahun kunjungan wisata "Visit Banda Aceh Year 2011".

Jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun 2007 sebanyak 9.940 orang sangat tinggi dibanding tahun-tahun setelahnya. Hal ini terjadi karena selama masa 2007 sampai dengan

2009 di Kota Banda Aceh masih dalam tahap rehab/Rekon Pasca Tsunami tahun 2004 lalu. Banyak terdapat pekerja asing baik di NGO maupun organisasi pemerintah lainnya yang bekerja di wilayah Kota Banda Aceh dan Propinsi Aceh. Telah terjadi peningkatan kunjungan wisatawan asing dari tahun 2010. Wisatawan asing yang berkujung sebagian besar berasal dari wilayah ASEAN, ini berarti Banda Aceh telah menjadi destinasi wisata dunia.

Data tersebut hanya berdasarkan angka hunian namun banyak wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh yang tidak menginap di hotel ada juga menginap di tempat keluarga, seperti pada masa libur anak-anak sekolah. Kemudian juga ada yang tidak menginap, untuk tempat yang akan ke sabang, mereka memanfaatkan waktu satu hari untuk city tour di Banda Aceh sebelum berangkat ke Sabang, diperkirakan wisatawan yang tidak menginap sekitar 40 persen dari wisatawan yang menginap di hotel.

2.3.2.2. Pelayanan Informasi dan Teknologi Pemerintah Kota

Dari sisi pelayanan umum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tidak seluruh bagian yang berada pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Di Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan pelayanan umum yang dilakukan berupa sms gateway dan proses verifikasi (pendaftaran perusahaan baru untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa) kepada vendor/rekanan.

Gambaran aspek pelayanan umum (sms gateway) tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.84
Jumlah Pengaduan, Perusahaan Terverifikasi, dan Jumlah Personil MIMS

Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Perusahaan (Buah)	Jumlah Personil MIMS (orang)
2007	-	-	12
2008	-	6	10
2009	2198	181	10
2010	1217	563	10
2011	1736	1074	8
2012	873	1091	7

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh
Note : Jumlah personil MIMS berkurang karena terjadi proses mutasi pegawai

2.3.2.3. Penanaman Modal

2.3.2.3.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.85
Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total	Nilai Investasi (Juta)
2007	Jumlah Investor	130		**130**	130.260
2008	Jumlah Investor	103		**103**	103.020
2009	Jumlah Investor	77		**77**	77.023
2010	Jumlah Investor	36		**36**	36.023
2011	Jumlah Investor	40		40	20.469

Sumber : KPPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2012

Tabel 2.86
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2007 s.d 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	6.990	10.732	11.271	10.746	14.840
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	147	184	218	1.665	3.324
3	Rasio daya serap tenaga kerja	47	58	51	6	4

Sumber : Dinsosnaker Kota Banda Aceh Tahun 2012

2.3.2.4. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

2.3.2.4.1. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi selama 5 tahun terakhir dari tahun 2007 sampai dengan 2011 di Kota Banda Aceh mengalami pertambahan yang sangat pesat hal ini terlihat dari data di atas. Selanjutnya pertambahan jumlah koperasi tersebut telah meningkatkan jumlah anggota koperasi, simpanan wajib dan sukarela koperasi di dalam menambah permodalan koperasi yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga keberadaan koperasi di Kota Banda Aceh telah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi di Kota Banda Aceh ini terlihat dari perkembangan koperasi aktif di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.87
Persentase Koperasi Aktif Banda Aceh Tahun 2007 – 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Koperasi Aktif	334	353	378	396	413
2	Jumlah Koperasi	727	746	774	789	799
3	Persentase Koperasi Aktif	46 %	48 %	49 %	50 %	52 %

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2012

Tabel 2.88
Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Baiturrahman					
	Jumlah koperasi aktif	97	103	114	118	122
	Jumlah koperasi	186	192	203	205	206
	Persentase koperasi aktif	52,15%	53,65%	56,16%	57,56%	59,22%
2	Kuta Alam					
	Jumlah koperasi aktif	96	100	101	106	109
	Jumlah koperasi	230	234	235	240	240
	Persentase koperasi aktif	41,74%	42,74%	42,98%	44,17%	45,42%
3	Meuraxa					
	Jumlah koperasi aktif	11	13	13	13	14

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
	Jumlah koperasi	26	28	28	28	29
	Persentase koperasi aktif	42,31%	46,43%	46,43%	46,43%	48,27%
4	Syiah Kuala					
	Jumlah koperasi aktif	57	60	62	66	68
	Jumlah koperasi	140	143	146	151	153
	Persentase koperasi aktif	40,71%	41,96%	42,47%	43,71%	44,44%
5	Lueng Bata					
	Jumlah koperasi aktif	17	18	20	23	26
	Jumlah koperasi	42	43	45	47	50
	Persentase koperasi aktif	40,48%	41,86%	44,44%	48,94%	52%
6	Banda Raya					
	Jumlah koperasi aktif	15	17	20	20	21
	Jumlah koperasi	28	30	33	33	34
	Persentase koperasi aktif	53,57%	56,67%	60,61%	60,61%	61,76%
7	Jaya Baru					
	Jumlah koperasi aktif	14	14	17	18	19
	Jumlah koperasi	26	26	29	30	30
	Persentase koperasi aktif	53,85%	53,85%	58,62%	60%	63,33%
8	Ulee Kareng					
	Jumlah koperasi aktif	19	20	23	23	25
	Jumlah koperasi	26	27	30	30	32
	Persentase koperasi aktif	73,08%	74,07%	76,67%	76,67%	78,12
9	Kuta Raja					
	Jumlah koperasi aktif	8	8	8	9	9
	Jumlah koperasi	23	23	25	25	25
	Persentase koperasi aktif	34,78%	34,78%	32%	36%	36%
	Total Persentase koperasi aktif	**48,07%**	**49,56%**	**51,15%**	**51,90%**	**54,28%**

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2012

Persentase koperasi aktif di Kota Banda Aceh tahun 2007, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Ulee Kareng, dengan persentase sebesar 73,08 persen, tahun 2008 sebesar 74,07 persen, tahun 2009 sebesar 76,67 persen, tahun 2010 sebesar 76,69 persen dan tahun 2011 sebesar 78,13 persen, trendnya semakin meningkat setiap tahunnya. Sedangkan kecamatan yang terendah adalah Kecamatan Kuta Raja dengan koperasi aktif hingga tahun 2011 hanya sebesar 36 persen.

2.3.2.4.2. Jumlah UKM Non BPR/LKMUKM

Perkembangan Usaha Kecil Menengah di Kota Banda Aceh pasca tsunami mengalami pertambahan yang sangat tinggi. Para UKM tersebut bergerak di sektor perdagangan, industri kecil, aneka jasa dan jasa pelayanan lainya sedangkan Lembaga Keuangan Perkreditan (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (Baitul Qiradh) yang berbadan hukum koperasi yang menangani perkreditan dan pembiayaan di Kota Banda Aceh sangat terbatas sehingga UKM-UKM tersebut tidak dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Tabel 2.89
Jumlah UKM Non BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah seluruh UKM	5083	5236	5324	5481	5801
2	Jumlah BPR/LKM	17	21	23	23	23
3	Jumlah UKM Non BPR/LKM	5083	5236	5324	5481	5801

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2012

2.3.2.4.3. Jumlah BPR/LKM

Peran serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kota Banda Aceh sebagai sebuah lembaga keuangan telah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku ekonomi lemah, di mana pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tanpa peraturan yang ketat, tetapi permasalahan yang timbul sekarang permodalan lembaga keuangan mikro sangat terbatas sedangakan para UMKM yang membutuhkan modal di LKM tidak dapat ditangani baik.

Untuk lebih jelasnya jumlah BPR/ LKM dari Tahun 2007 – 20011 dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.90
Jumlah BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah BPR	2	2	2	2	2
2	Jumlah LKM	15	19	21	21	21
3	Jumlah BPR dan LKM	17	21	23	23	23

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2012

Sehubungan dengan perkembangan industri kecil di Kota Banda Aceh, yang dilakoni berbagai ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri maka perkembangan tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan pengusaha di Kota Banda Aceh. Namun untuk bisa diakui oleh pasar hasil dari para perajin ini, perlu diberikan pemahaman / pemantapan tentang kewirausahaan, sehingga hasil yang dilakukan oleh para perajin tersebut akan menunjukkan kualitas yang lebih baik dan diakui peredarannya di pasaran, karena pada kenyataannya industri-industri yang ada di Banda Aceh, sampai saat ini sangat membutukan pembinaan yang sangat serius dan dukungan dari pihak pemerintah. Untuk lebih jelasnya perkembangan Industri dan perdagangan tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.91
Perkembangan Industri dan Perdagangan Kota Banda Aceh
Tahun 2007–2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah perusahaan industri	70	72	63	73	73
2	Jumlah sentra industri	5	6	6	7	8
3	Tenaga kerja industri	3651	7164	7378	7780	7992
4	Jumlah industri informal	1707	1883	2016	2294	2390

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2012

Perkembangan pasar di Kota Banda Aceh pada tahun 2012 berjumlah 13 unit yang tersebar di seluruh Kota Banda Aceh tetapi sentra utama perdagangan masing berada di Pasar Aceh dan Peunayong sehingga pada wilayah tersebut menumpuhnya para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Banda Aceh, dari 13 pasar tersebut ada beberapa pasar yang perlu perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan sehingga dengan berfungsinya pasar

secara optimal maka keberadaan pedagang kaki lima dapat teratasi dengan baik, yang dapat memberikan kenyamanan bagi para pembeli di Kota Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya perkembangan pasar dapat dilihat pada Tabel 2.93.

Tabel 2.92

Jumlah dan Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Nama Pasar	2007		2008		2009		2010		2011	
		Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi
1	Pasar Aceh	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik
2	Pasar Kp. Baru	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik
3	Pasar Peuniti	1	Rsk brt	1	Rsk brt	1	Rsk brt	1	Rsk brt	1	Rsk brt
4	Pasar Ikan Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik
5	Pasar Daging Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik
6	Pasar Bumbu Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik
7	Pasar Sayur dan Buah Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik
8	Pasar Rex Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik
9	Pasar Lamyong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik
10	Pasar Batoh	-	-	-	-	-	-	1	baik	1	Baik
11	Pasar Unggas Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik
12	Pasar Ulee Kareng	-	-	-	-	-	-	1	baik	1	Baik
13	Pasar Setui	1	Krg baik	1	Krg baik	1	Krg baik	1	Krg baik	1	Krg baik

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2012

2.3.2.5. Kependudukan

2.3.2.5.1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan dan pengurangan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.

Pertumbuhan penduduk selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik migrasi dari luar maupun ke luar Kota Banda Aceh. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan dan penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam ke luar.

Beberapa komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah :

a. Faktor Penambah
    1) Kelahiran (fertilitas);
    2) Migrasi Masuk (migrasi)
b. Faktor Pengurang
    1) Kematian (Mortalitas)
    2) Migrasi keluar (emigrasi)

Dari jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 219.659 jiwa pada tahun 2007 dan 244.724 jiwa pada tahun 2011 maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh adalah sebesar 2,2 persen rata-rata per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tersebut masih tergolong normal selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Namun laju pertumbuhan penduduk tersebut harus dapat dikendalikan oleh Pemerintrah Kota Banda

Aceh pada masa yang akan datang guna menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari padatnya penduduk kota, yaitu munculnya berbagai masalah sosial ekonomi ekonomi seperti kemiskinan, kriminalitas, permukiman kumuh dan lain-lain sebagainya.

Pada tahun 2011, jumlah penduduk yang masuk ke Kota Banda Aceh sebesar 6.480 jiwa dengan rasio 2,64 persen, sedangkan penduduk yang keluar Kota Banda Aceh sebanyak 6.348 jiwa dengan rasio sebesar 2,59 persen. Hal ini berarti penduduk yang masuk ke Kota Banda Aceh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar Kota Banda Aceh.

Tabel 2.93
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	2007-2011
1	Baiturrahman	40.989	36.124	35.153	32.973	36.163	1,9
2	Kuta Alam	43.746	43.792	42.664	45.584	47.970	1,9
3	Jaya Baru	15.317	20.658	20.127	21.882	24.675	10
4	Ulee Kareng	27.936	20.409	19.865	22.387	24.248	- 2,8
5	Lueng Bata	23.083	22.025	21.437	21.806	24.321	1,1
6	Kuta Raja	4.639	8.076	7.890	10.479	11.774	20,0
7	Banda Raya	29.363	20.907	20.127	20.927	22.896	- 4,9
8	Meuraxa	3.719	12.494	12.189	15.456	18.109	37,2
9	Syiah Kuala	30.867	33.433	32.564	32.022	34.568	2,3
	JUMLAH	**219.659**	**217.918**	**212.016**	**223.516**	**244.724**	**2,2**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dapat dilihat pada Tabel 2.94 bahwa laju pertumbuhan penduduk yang paling besar adalah di Kecamatan Meuraxa sebesar 37,2 persen dari jumlah penduduk tahun 2007 sebesar 3.719 jiwa berkembang menjadi 18.109 jiwa pada tahun 2011. Hal ini kemungkinan terjadi karena kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan yang terdekat dengan pusat kota dan merupakan salah satu kawan wisata yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik, di kawasan tersebut

terdapat 3 (tiga) objek wisata terbesar yaitu Wisata Tsunami yaitu Kuburan Massal, Mesjid Baiturrahim dan Wisata Laut Pantai Ulee Lheue yang mempunyai pemandangan yang sangat bagus di kala pagi dan sore hari.

Sementara itu laju pertumbuhan penduduk yang mengecil terdapat di Kecamatan Banda Raya sebesar – 4,9 persen, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2007 sebasar 29.363 jiwa, dan pada tahun 2011 terjadi penurunan pertumbuhan penduduk menjadi 22.896 jiwa. Hal ini terjadi karena adanya mobilitas penduduk yang tersebar ke beberapa kecamatan yang berada di dekat pusat kota dan menjadi sentral bisnis baru seperti Kecamatan Meuraxa, Kuta Alam, Ulee Kareng dan Lueng Bata, sehingga terjadi penurunan penduduk yang signifikan.

Laju pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi dengan angka kelahiran (fertilitas) dan angka kematian (mortalitas). Berikut ini hasil perhitungan laju pertumbuhan penduduk yang dituangkan dalam angka kelahiran kasar (CBR), angka kematian kasar (CDR) dan angka kematian bayi (IMR).

Tabel 2.94
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Angka Kelahiran Kasar (CBR), dan Angka Kematian Bayi (IMR) di Kota Banda Aceh Tahun 2011

No	Fertilitas/Mortalitas	2007	2008	2009	2010	2011
1	Angka Kelahiran Hidup	3508	4048	4163	4412	4584
2	Angka Kematian Bayi (IMR)	20	33	15	15	20
3	Rasio Angka Kematian Bayi (IMR)	5	8	5	4	4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

2.3.2.5.2. Pengelompokan Penduduk

Jumlah penduduk dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis data yang diperlukan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, antara lain pengelompokan data penduduk berdasarkan sex rasio (data terpilah) yang sangat bermanfaat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis gender, pengelompokkan data penduduk berdasarkan umur yang dapat

bermanfaat dalam perencanaan kebutuhan pangan, sandang dan papan, pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan.

2.3.2.5.2.1. Pengelompokkan penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Kota Banda Aceh yang memiliki 9 kecamatan dan 90 Gampong, pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk laki-laki sebesar 126.817 jiwa dan perempuan sebesar 117.907 jiwa, yang dapat dirinci berdasarkan kecamatan sesuai Tabel 2.96.

Tabel 2.95
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2011

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
Baiturrahman	18. 682	17.481	36.163	107
KutaAlam	24.982	22.988	47.970	109
Meuraxa	9.748	8.361	18.109	109
Syiah Kuala	17.693	16.875	34.568	105
Lueng Bata	12.523	11.798	24.321	106
Kuta Raja	6.363	5.411	11.774	118
Banda Raya	11.569	11.327	22.896	102
Jaya Baru	12.858	11.817	24.675	117
UleeKareng	12.399	11.849	24.248	105
Jumlah Total	126.817	117.907	244.724	108

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Tabel 2.96 menggambarkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh bila dilihat secara sex ratio lebih banyak penduduk laki-lakinya bila dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu 126.817 penduduk laki-laki dan 117.907 penduduk perempuan pada tahun 2011 dengan rasio 108, yang artinya bahwa pada setiap seratus jumlah penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki.

Berikut ini disajikan data penduduk laki-laki tahun 2009 - 2011 berdasarkan pengelompokkan umur.

Tabel 2.96
Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur
Di Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2011

Kelompok Umur	2009	2010	2011
0-4	9.275	10.762	11.930
5-9	8.898	9.139	10.826
10-14	8.056	8.279	8.948
15-19	9.445	9.124	9.469
20-24	15.030	14.042	13.874
25-29	15.365	14.968	16.546
30-34	12.052	12.161	13.521
35-39	9.662	9.596	10.966
40-44	7.373	7.626	8.309
45-49	6.201	6.268	6.982
50-54	4.768	5.198	5.514
55-59	3.402	3.542	3.918
60-64	2.109	2.159	2.335
65-69	1.379	1.556	1.713
70-74	819	942	996
75+	785	876	970
Jumlah	**114.619**	**116.238**	**126817**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Penduduk laki-laki di Kota Banda Aceh yang terbesar jumlahnya berada pada umur 20 s/d 34 tahun yaitu kelompok umur 20 – 24 tahun pada tahun 2009 berjumlah 15.030 jiwa, tahun 2010 sebanyak 14.0942 jiwa dan tahun 2011 sebesar 13.874 jiwa; kelompok umur 25 – 29 tahun pada tahun 2009 sebesar 15.365, tahun 2010 sebesar 14.968 dan tahun 2011 sebesar 16.546 jiwa; kelompok umur 30 – 34 tahun pada tahun 2009 berjumlah 12.052 jiwa, tahun 2010 sebesar 12.161 jiwa dan tahun 2011 sebesar 13.521 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk laki-laki terkecil berada pada kelompok umur 70 – 74 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh rata-rata usia harapan hidupnya adalah berkisar pada umur 50 tahun ke bawah.

Tabel 2.97
Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur
di Kota Banda Aceh dari Tahun 2012 – 2016

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
0-4	13.301	13.015	12.735	12.461	12.192
05-Sep	12.070	11.811	11.556	11.308	11.064
Okt-14	9.977	9.762	9.552	9.346	9.145
15-19	10.557	10.330	10.108	9.890	9.677
20-24	15.469	15.136	14.810	14.491	14.179
25-29	18.448	18.051	17.662	17.282	16.910
30-34	15.075	14.751	14.433	14.122	13.818
35-39	12.227	11.963	11.706	11.454	11.207
40-44	9.264	9.065	8.870	8.679	8.492
45-49	7.785	7.617	7.453	7.293	7.136
50-54	6.148	6.015	5.886	5.759	5.635
55-59	4.368	4.274	4.182	4.092	4.004
60-64	2.603	2.547	2.493	2.439	2.386
65-69	1.910	1.869	1.829	1.789	1.751
70-74	1.110	1.087	1.063	1.040	1.018
75+	1.081	1.058	1.035	1.013	991
Jumlah	**141.394**	**138.351**	**135.372**	**132.458**	**129.607**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Tabel 2.98 menunjukkan bahwa dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk 2,2 persen per tahun maka proyeksi jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2012 sebesar 141.394 jiwa atau naik sebesar 14.577 jiwa dari tahun 2011. Pada tahun 2016, proyeksi jumlah penduduk laki-laki terbanyak terdapat pada umur 25-29 tahun sebesar 18.448 jiwa, sedangkan jumlah terkecil sebesar 129.607 jiwa di mana komposisi penduduk umur 75 tahun ke atas yaitu berjumlah 1.018 jiwa.

Tabel 2.98
Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2011

Kelompok Umur	2009	2010	2011
0-4	8737	10073	11248
5-9	8634	8703	10368
10-14	7374	7746	8453
15-19	8532	8203	8551
20-24	15437	14192	13942
25-29	14054	14109	16135
30-34	9961	10142	11380
35-39	8329	8377	9374
40-44	6930	7004	7767
45-49	5345	5669	6379
50-54	3814	4239	4504

55-59	2823	2831	3276
60-64	2028	2110	2233
65-69	1338	1493	1683
70-74	1006	1104	1147
75+	1112	1283	1467
Jumlah	**105.454**	**107.278**	**117.907**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Sama halnya dengan penduduk laki-laki, penduduk perempuan di Kota Banda Aceh yang terbesar jumlahnya juga berada pada umur 20 s/d 34 tahun yaitu kelompok umur 20 – 24 tahun pada tahun 2009 berjumlah 15.437 jiwa, tahun 2010 sebesar 14.192 jiwa dan tahun 2011 sebesar 13.942 jiwa; kelompok umur 25 – 29 tahun pada tahun 2009 sebesar 14.054, tahun 2010 sebesar 14.109 dan tahun 2011 sebesar 16.135 jiwa; kelompok umur 30 – 34 tahun pada tahun 2009 berjumlah 9.961 jiwa, tahun 2010 sebesar 10.142 jiwa dan tahun 2011 sebesar 11.380 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan terkecil berada pada kelompok umur 70 – 74 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh rata-rata usia harapan hidupnya adalah berkisar pada umur 50 tahun ke bawah.

Tabel 2.99
Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
di Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2016

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
0-4	12.541	12.271	12.007	11.748	11.495
05-Sep	11.560	11.311	11.067	10.829	10.596
Okt-14	9.425	9.222	9.023	8.829	8.639
15-19	9.534	9.329	9.128	8.931	8.739
20-24	15.545	15.210	14.883	14.562	14.249
25-29	17.990	17.602	17.224	16.853	16.490
30-34	12.688	12.415	12.148	11.886	11.630
35-39	10.452	10.227	10.006	9.791	9.580
40-44	8.660	8.473	8.291	8.113	7.938
45-49	7.112	6.959	6.809	6.663	6.519
50-54	5.022	4.914	4.808	4.704	4.603
55-59	3.653	3.574	3.497	3.422	3.348
60-64	2.490	2.436	2.384	2.332	2.282
65-69	1.876	1.836	1.797	1.758	1.720
70-74	1.279	1.251	1.224	1.198	1.172
75+	1.636	1.600	1.566	1.532	1.499
Jumlah	**131.460**	**128.630**	**125.861**	**123.152**	**120.501**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Pertumbuhan penduduk perempuan, di sisi lain, tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan penduduk laki-laki. Proyeksi jumlah penduduk perempuan pada tahun 2012 sebesar 131.460 jiwa atau naik sebesar 13.553 jiwa dari tahun 2011. Pada tahun 2016, proyeksi jumlah penduduk perempuan sebesar 120.501 jiwa. Dengan komposisi penduduk perempuan terbanyak terdapat pada umur 25-29 tahun yaitu sebesar 17.990 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk perempuan terkecil adalah pada umur 70-74 tahun yang berjumlah 1.172 jiwa pada tahun 2016.

Tabel 2.100
Proyeksi Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2011

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
Baiturrahman	18.682	1.7481	36.163	107
KutaAlam	24.982	22.988	47.970	109
Meuraxa	9.748	8.361	18.109	109
Syiah Kuala	17.693	16.875	34.568	105
Lueng Bata	12.523	11.798	24.321	106
Kuta Raja	6.363	5.411	11.774	118
Banda Raya	11.569	11.327	22.896	102
Jaya Baru	12.858	11.817	24.675	117
UleeKareng	12.399	11.849	24.248	105
Jumlah Total	**126.817**	**117.907**	**244.724**	**108**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

2.3.2.5.2.2.Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk/ Geografis

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 2124.724 jiwa yang tersebar dalam 9 kecamatan. Kecamatan Kuta Alam dengan luas wilayah 10.05 km2 adalah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 47.970 jiwa. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Baiturrahman sebesar 36.163 jiwa dan Kecamatan Syiah Kuala sebesar 34.568 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada pada Kecamatan Kuta Raja sebesar 11.774 jiwa. Lihat Tabel 2.102.

Tabel 2.101
Sebaran Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan (%)
1	Kecamatan Baiturrahman	36.163	4,54	7.97
2	Kecamatan KUta Alam	47.970	10,05	4.77
3	Kecamatan Meuraxa	18.109	7,26	2.49
4	Kecamatan Syiah Kuala	34.568	14,24	2.43
5	Kecamatan Lueng Bata	24.321	5,34	4.55
6	Kecamatan Kuta Raja	11.774	5,21	2.26
7	Kecamatan Banda Raya	22.896	4,79	4.78
8	Kecamatan Jaya Baru	24.675	3,78	6.53
9	Kecamatan Ulee Kareng	24.248	6,15	3.94
Jumlah se-Kota Banda Aceh		**244.724**	**61,36**	**3.64**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Jumlah penduduk terpadat berada di Kecamatan Baiturrahman dengan tingkat kepadatan sebesar 7,97 persen kemudian diikuti dengan Kecamatan Jaya Baru 6,53 persen dan Kecamatan Kuta Alam. Sedangkan penduduk terjarang berada di Kecamatan Kuta Raja yaitu sebesar 2,26 persen.

2.3.2.5.2.3.Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Kota Banda Aceh memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik bila dibandingkan dengan penduduk di kabupaten lain dalan Provinsi Aceh, Jumlah penduduk terbanyak umumnya telah dapat menamatkan pendidikannya pada tingkat SMA yaitu sebesar 89.906 jiwa, hal ini terlihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2.102
Penduduk Lima Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Kota Banda Aceh Tahun 2011

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Tidak punya ijazah SD	32.218	31.304	63.522	
2	SD/MI sederajat	8.028	91.36	17.164	
3	SMP	13.694	13.695	27.389	
4	SMA	50.230	39.676	89.906	
5	Perguruan tinggi	22.648	24.095	46.743	
Jumlah		**126.818**	**117.906**	**244.724**	

Tabel 2.103
Jumlah Cakupan Kepemilikan KTP Di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan
Tahun 2008 - 2011

Kecamatan	Cakupan Kepemilikan KTP											
	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011		
	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP
Baiturrahman	30.538	31.529	31.270	34.198	24.781	24.578	32.973	23.418	23.226	36.163	25.985	25.772
Kuta Alam	39.446	40.243	39.933	45.944	34.135	33.872	45.584	33.386	33.129	47.970	34.836	34.568
Meuraxa	11.396	12.081	11.984	14.250	10.098	10.017	15.456	10.591	10.506	18.109	12.085	11.988
Syiah Kuala	32.192	27.996	27.775	31.230	23.813	23.625	32.022	24.012	23.822	34.568	25.678	25.475
Lueng Bata	22.371	17.735	17.598	20.527	14.586	14.474	21.806	15.309	15.191	24.321	16.959	16.828
Kuta Raja	7.495	8.944	8.877	10.262	7.606	7.549	10.479	7.558	7.501	11.774	7.899	7.840
Banda Raya	20.733	18.485	18.332	20.527	14.296	14.177	20.927	14.399	14.279	22.896	15.631	15.501
Jaya Baru	17.253	19.032	18.884	21.785	15.528	15.407	21.882	15.273	15.154	24.675	16.973	16.841
Ulee Kareng	21.350	20.092	19.927	21.350	14.877	14.755	22.387	15.426	15.300	24.248	16.661	16.524
Jumlah	**202.774**	**196.137**	**194.581**	**220.073**	**159.720**	**158.454**	**223.516**	**159.372**	**158.109**	**244.724**	**172.707**	**171.338**
Rasio Penerbitan KTP	**99.21 %**			**99.21 %**			**99.21 %**			**99.21 %**		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dalam rangka menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun satu unit pelayanan publik terpadu pada KPPTSP yang bertempat di Gedung Balai Kota. Selain untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, juga masyarakat diberikan kenyamanan dan keamanan di dalam mendapatkan dan menunggu pelayanan yang diberikan. Dalam gedung pelayanan publik tersebut selain pelayanan perizinan dan non perizinan, juga diberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Pelayanan dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 16 jenis pelayanan yang antara lain adalah pelayanan kartu keluarga (KK), Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pelayanan Akta Kelahiran. Dalam Tabel 2.105 disajikan data penduduk berdasarkan kepemilikan KTP, KK dan Akta Kelahiran pada tahun 2011.

Tabel 2.104
Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh
Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah
Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan						
		KTP		KK		Akta Kelahiran		Akta Nikah
		Sdh	Blm	Sdh	Blm	Sdh	blm	
1	Baiturrahman	25.772	213	10.235	0	12.993	23.166	2366
2	Kuta Alam	34.568	268	13.556	0	17.139	30.826	1524
3	Meuraxa	11.988	97	5.910	0	6.522	11.588	948
4	Syiah Kuala	25.475	203	9.925	0	12.557	22.007	2222
5	Lueng Bata	16.828	131	6.524	0	9.319	15.000	1540
6	Kuta Raja	7.840	59	3.685	0	4.108	7.692	672
7	Banda Raya	15.501	130	6.213	0	8.937	13.955	1754
8	Jaya Baru	16.841	132	6.844	0	8.933	15.738	2664
9	Ulee Kareng	16.524	137	6.524	0	9.418	14.826	1618
Jumlah		**171.338**	**1.369**	**69.416**	**0**	**89.926**	**154.795**	**15.308**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.105 dapat dilihat beberapa poin penting, yaitu kepemilikan KTP bagi penduduk yang wajib KTP sudah sangat baik, di mana dari jumlah wajib KTP sebesar 171.338 jiwa, hanya 1.369 jiwa yang belum memiliki atau mengurus KTP. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) juga sudah sangat baik, Hal ini menunjukan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya KK dan mau mengurus KK nasional sebagai pengganti dari KK merah yang keluaran lama.

Pada bidang pencatatan sipil, penduduk yang sudah mengurus akta kelahiran sebesar 89.926 jiwa dan yg belum mengurus akta kelahiran diperkirakan berjumlah 64.869 jiwa. Besarnya jumlah penduduk yang belum meiliki akta kelahiran disebabkan adanya sebagian besar penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana di tempat kelahirannya dan ada pula penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran namun belum tercatat pada Sistem Informatika Administrasi Kependukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (Akseptor KB) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.105
Jumlah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

Jenis-jenis Akta	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran									
	2007		2008		2009		2010		2011	
	Jlh Penduduk	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jlh Penduduk	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jlh Penduduk	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jlh Penduduk	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jlh Penduduk	Kepemilikan Akta Kelahiran
Akta Kelahiran	219.659	13.049	202.774	25.164	220.073	33.578	33.578	41.663	244.724	62.168
Jumlah	219.659	13.049	202.774	25.164	220.073	33.578	33.578	41.663	244.724	62.168
Rasio	**5.94 %**		**12.41 %**		**15.26 %**		**18.64 %**		**25.40 %**	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Tabel 2.106
Jumlah Penduduk Peserta KB Di Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan
Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Peserta KB		
		PUS	Peserta KB	Anmed Neet
1	Meuraxa	2.518	1.201	1.317
2	Jaya Baru	2.755	1.731	1.024
3	Banda Raya	2.832	1.645	1.187
4	Baiturrahman	3.801	2.091	1.710
5	Lueng Bata	2.983	1.798	1.185
6	Kuta Alam	6.136	4.394	1.742
7	Kuta Raja	1.456	677	779
8	Syah Kuala	3.394	1.869	1.525
9	Ulee Kareng	2.924	1.707	1.217
Jumlah		**28.799**	**17.113**	**11.686**

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota B anda Aceh

2.3.2.6. Ketenagakerjaan

2.3.2.6.1. Angkatan Kerja *(labor force)*

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan harus menjadi prioritas dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran yang cenderung semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh lima tahun terakhir sejak 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2.107
Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2011

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	**ANGKATAN KERJA**	**33.811**	**105.820**	**103.018**	**90.840**	**104.602**
	Bekerja	31.136	93.730	92.947	80.335	95.686
	Pengangguran	2.675	12.090	10.071	10.505	8.916
2	**BUKAN ANGKATAN KERJA**	**19.648**	**57.136**	**60.689**	**78.472**	**64.888**
	Sekolah	-	25.936	24.592	41.643	25.756
	Mengurus Rumah Tangga	-	31.200	27.046	28.956	30.828
	Lainnya	-	4.992	9.051	7.873	8.304
3	**TPAK (Tingkat**	63,3	63,0	62,9	53,7	61,7

	Partisipasi Angkatan Kerja)					
4	**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)**	7,9	11,4	9,8	11,6	8,5

Sumber: BPS Aceh Tahun 2012

Dari Tabel 2.108 dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terjadi fluktuasi sejak tahun 2007 – 2011, Demikian pula halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terjadi fluktuasi. Namun secara persentasi pada tahun 2011, tingkat pengangguran terbuka Banda Aceh sebesar 8,5 %, terjadi penurunan dibandingkan pada Tahun 2010 sebesar 11,6 masih di atas rata-rata tingkat pengangguran terbuka Provinsi Aceh yaitu sebesar 7,43 persen. Hal ini disebabkan antara lain tingginya arus urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, dan masih rendahnya keahlian dan keterampilan pencari kerja sehingga sangat menyulitkan dalam mendapatkan kesempatan kerja.

Perkembangan ketenagakerjaan saat ini ditandai dengan tingginya jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan karena Kota Banda Aceh bukan merupakan kota industri, melainkan sebagai kota pendidikan dan jasa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan arah dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia agar dapat menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian hidup serta dapat menyediakan lapangan kerja baru yang dapat menampung angkatan kerja yang ada.

2.3.2.6.2. Produktivitas Kerja

Produktifitas kerja adalah kemampuan karyawan/pekerja dalam berproduksi dibandingkankan dengan input yang digunakan, seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan produksi pelaku usaha sangat diperlukan peningkatan produktifitas tenaga kerja di suatu daerah. Dengan produktivitas pekerja yang tinggi maka dapat dipastikan pendapatan

perkapita penduduk akan tinggi juga. Hal ini sangat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah.

Untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ketrampilan, sikap dan etika kerja, motivasi, tingkat penghasilan, teknologi, gizi dan kesehatan. Dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja ini pemerintah Kota Banda Aceh melului Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai pelatihan dan bimbingan wirausaha bagi pemuda putus sekolah, remaja putri dan ibu rumah tangga. Adapun pelatihan dan bimbingan teknis dan non teknis yang diberikan bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang nantinya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain.

Adapun pelatihan dan bimbingan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dalam peningkatan produktifitas dan mengurangi angka pengangguran sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2.108
Pelatihan dan Bimbingan yang Telah diberikan
Kepada Masyarakat kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

No	Jenis Pelatihan	Tahun					Sumber Dana
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Pelatihan Tata Rias	16 org	-	-	-	-	APBN
2	Operator Komputer	41 org	30 org	25 org	53 org	-	APBN/APBD/Donatur
3	Processing /Pengolahan	16 org	-	-	-	-	APBN
3	Pelatihan Menjahit	45 org	25 org				APBD/Donatur
4	Teknisi Las Listrik	20 org	-	-	-	-	APBD
5	Teknisi Sepeda Motor	-	63 org				PMI
6	Teknisi Kapal Boat	-	16 org				PMI
7	Teknisi Instalasi Pipa	-	20 org				PMI
8	Pertukangan Bangunan Kontrukusi	-	10 org		20 0rg		PMI/Donatur
9	Teknisi Meubel	-	15 0rg	-	-	-	PMI
10	Pengolahan ikan menjadi Abon	-	-	20 org	-	-	APBN
11	Pengolahan rumput laut menjadi minuman segar, pembuatan nugget	-	-	-	20 0rg	-	APBN
11	Teknisi Instalasi	-	20 org	-	20 org	-	APBD/PMI

	Listrik						
12	Teknisi Komputer	-	-	-	31 org	-	APBN
13	Teknisi Handphone	-	-	-	17 org	-	APBD
14	Teknisi Cooling System	-	-	-	20 org	-	Donatur
15	Desain Grafis/Sablon	-	-	-	-	20 org	APBN
	Jumlah	**138 org**	**199 org**	**45 org**	**181 org**	**20 org**	

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari berbagai macam pelatihan dengan jumlah orang yang telah dilatih sejak tahun 2007-2011 sebanyak 583 orang. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut anggaran bersumber dari anggaran APBN Dana Tugas Pembantuan, APBK Kota Banda Aceh, APBD Provinsi Aceh dan donatur-donatur yang peduli terhadap produktifitas Tenaga Kerja di kota Banda Aceh yaitu PMI Kota Banda Aceh dan PT. Tolan Tiga Indonesia.

2.3.2.6.3. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah peluang pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan guna mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri beserta keluarganya. Hal yang mempengaruhi secara langsung terhadap kesempatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Sehingga untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah dengan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia kerja dari semua tingkat pendidikan. Dengan bertambahnya kesempatan kerja dari tahun ke tahun dapat diproyeksikan dengan perkembangan jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dari tahun 2008 s/d tahun 2011 di Kota Banda Aceh yang terdapat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.109
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kota Banda Aceh Tahun 2008 s/d 2011

Thn	Lapangan Usaha							
	Pertanian	Industri Pengolahan	Bangunan	Perdagangan Restoran & Hotel	Angkutan Pergudangan Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	Jasa Kemasyarakatan	Dll
2008	2232	3596	7955	22055	7932	2994	46998	440
2009	250	144	2364	13023	-	108	77058	-
2010	485	216	2542	13569	-	213	62501	809
2011	2926	4563	7539	28490	3824	6598	41370	376

Sumber : BPS Kota Banda Aceh Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 2.110 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Banda Aceh bekerja pada sektor perdagangan, restoran dan hotel. Hal ini diakibatkan minimnya lapangan usaha industri yang tersedia di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi. Seiring berkembanganya kota Banda Aceh menuju kota Madani membuat beberapa sektor lapangan usaha berkembangan dengan pesat seperti sektor jasa bidang perdagangan, restoran dan perhotelan. Ini ditandai dengan semakin besarnya tenaga kerja yang tertampung pada sektor ini. Dimana setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan sampai 109,9% jika dibandingkan tahun 2010. Pada sektor asuransi dan usaha persewaan tahun 2010 penyerapan tenaga kerja sebanyak 213 orang dan pada tahun 2011 penyerapan tenaga kerjanya mencapai 6.598 orang. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap pada berbagai sektor usaha pada tahun 2011 membuat kesempatan kerja semakin besar dan angka pengangguran semakin kecil. Akan tetapi, pertumbuhan kesempatan kerja ini tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi, baik pertumbuhan penduduk alami, maupun arus urbanisasi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pengangggguran yang relatif tinggi. Ini tentu mempunyai korelasi yang positif bagi meningkatnya kriminalitas di ibukota. Oleh karenanya pemerintah kota harus mengantisipasi untuk menekan angka

kriminalitas, penduduk miskin dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.2.6.4. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi selain inflasi dan ketimpangan neraca pembayaran. Pengangguran menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi momok yang menakutkan bagi setiap negara. Tinnginya angka pengangguran disebabkan besarnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Iklim investasi yang sehat dan kemudahan-kemudahan birokrasi bagi pengusaha yang ingin menanamkan modalnya serta terciptanya keamanan yang kondusif sangat mendukung terciptanya investasi dalam mengurangi angka pengangguran yang terus bertambah.

Perkembangan angka pengangguran di Kota Banda Aceh dari tahun 2007 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2.110
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Penganguran Terbuka (TPT)
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

Tahun	Pengangguran (Orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2007	2.675	7,9
2008	12.090	11,4
2009	10.071	9,8
2010	10.505	11,6
2011	8.916	8,5

Sumber : BPS Aceh Tahun 2012

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah pengangguran yang sunguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2007 jumlah pengangguran di Banda Aceh sebanyak 2.675 orang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,9%. Pada tahun 2008 terjadi lonjakan pengangguran dikota Banda Aceh Sebesar 351,9 % atau sebanyak 12.090 jika dibandingkan Tahun 2007 hal ini disebabkan banyaknya NGO baik dari luar dan dalam negeri yang mengakhiri masa kerjanya di Kota Banda Aceh pasca tsunami tahun 2004.

Pada tahun 2009 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun sebesar 9,8% dengan jumlah pengangguran berjumlah 10.071 orang menurun sebesar 16,7% jika dibandingkan tahun 2008. Seiring dengan berakhirnya masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BBR) di Provinsi Aceh pada tanggal 16 April 2009, terjadi lonjakan jumlah pengangguran pada tahun 2010 sebesar 4,3% dengan TPT sebesar 11,6 %. Dan pada akhir tahun 2011 tingkat pengangguran di Banda Aceh menurun menjadi 8.916 orang dengan TPT sebesar 8,5% ini berarti terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 15,1% jika dibandingkan dengan tahun 2010.

2.3.2.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.7.1. Persentase Pertisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon II pada tahun 2011 sebanyak 2 orang, eselon III 29 orang, dan eselon IV 158 orang, jumlah pekerja perempuan di pemerintah sebanyak 4079 orang sedangkan total pekerja perempuan 16.638 orang jika kita lihat secara persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 24,52 persen, hal ini dapat diambil kesimpulan jumlah pekerja perempuan di pemerintah masih memiliki persentase yang kecil, hal ini karena minat perempuan dan peluang perempuan masih di sektor non pemerintah. Jika dibandingkan dengan total pekerja di pemerintah baik laki-laki dan perempuan, perempuan memiliki persentase sebesar 65,39 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112 menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon II sangat kecil perbandingan nya dengan jumlah laki-laki. Keadaan tersebut berlangsung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, walaupun pada tahun 2011 sudah terdapat perempuan yang menduduki eselon II namun persentasenya

sangat kecil. Hal ini tentu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang sudah memprakarsai peningkatan pemberdayaan perempuan di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.111
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007		2008		2009		2010		2011	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	30	0	26	2	26	2	26	2	26	**2**
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III & IV				180		180		185	351	187
3	Pegawai di pemerintah (Pemko Banda Aceh)				3.556		4.231		4.028	1.831	4.079
	Total Pegawai dipemerintah Kota Banda Aceh	**5.027**	**2.456**	**2.842**	**3.738**	**2.278**	**4.413**	**2,296**	**4.215**	**2.208**	4.268
	Persentase Pegawai perempuan Pemko	**67,18%**	**32,82%**	**43,19%**	**56,81%**	**34,05%**	**65,95%**	**35,26%**	**64,74%**	**34,1%**	**65,90%**
4	Jumlah pekerja perempuan		18.598		17.894		14.533		16.339		16.638
5	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah		13,21%		20,89%		30,36%		25,80%		25,65%

Sumber: BKPP & Kantor PP & KB Kota Banda Aceh

Tabel 2.112
Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga
Kesehatan dan Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2011

No	Uraian	TAHUN									
		2007		2008		2009		2010		2011	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Dokter	3	23	3	22	3	21	3	21	3	21
2	Drg	5	5	5	5	3	4	3	4	3	4
3	S1 Keperawatan	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
4	Akper	5	26	5	26	5	25	5	25	5	25
5	Akbid	0	45	0	45	0	45	0	43	0	43
6	Bidan	0	60	0	60	0	59	0	57	0	57
7	SPK	10	25	10	25	7	25	7	25	7	25
8	SKM	11	43	11	42	10	43	10	43	9	43
9	GIZI	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
10	Apoteker	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
11	Akfar	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
12	SMF	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16
13	AAK	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
14	SMAK	1	14	1	14	1	14	1	14	1	14
15	AKG	1	10	1	13	1	13	1	13	1	13
16	AKZI	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
17	APIKES	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
18	AKL	5	9	5	9	5	9	5	9	5	9
19	ATEM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	SPPH	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
21	SPRG	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
22	SPAG	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
23	Perkarya Kes	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
24	KPAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	S2	5	13	4	13	4	13	4	13	4	13
26	S1	9	7	9	7	7	7	7	7	7	7
27	D3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
28	SMA	9	7	9	7	8	7	8	7	8	6
29	SMP	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
30	SD	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh

Tabel 2.113
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah perempuan di lembaga Legislatif	2	2	1	1	1
2	Jumlah Anggota Legislatif	30	30	30	30	30
3	Rasio perempuan di lembaga Legislatif	6,7%	6,7%	3,3%	3,3%	3,3%

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh

Minimnya jumlah perempuan terdapat pula pada lembaga legislatif. Dari jumlah anggota DPRK sebanyak 30 orang, perempuannya hanya satu orang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau 3,3 persen.

2.3.2.7.2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Pekerja perempuan di lembaga swasta adalah pekerja perempuan yang tidak bekerja di lembaga pemerintah atau sektor formal lainnya. Pada tahun 2011 jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 144 orang. Hal ini karena banyaknya lembaga swasta pada tahun 2011 mengalami penurunan juga salah satunya karena habisnya masa kerja lembaga swasta tersebut di Kota Banda Aceh. Jika dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta juga memiliki kontribusi yang sangat kecil hanya 0,87 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2.114
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	1289	1360	1365	1375	1444
2	Jumlah pekerja perempuan	5234	5835	5894	6124	6258
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	24,63	23,31	23,16	22,45	23,07

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota B anda Aceh

Tabel 2.115
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Banda Aceh
Tahun 2011

No	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	Jumlah pekerja perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta
1	**1444**	**6258**	**23,07**

Sumber: Kantor PP&KB Kota Banda Aceh

2.3.2.7.3. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terdata dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami peningkatan dari 9 kasus pada tahun 2009 terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 31 kasus dan jika dilihat dari rasio KDRT pada tahun 2011 meningkat menjadi 0,071.

Tabel 2.116
Rasio KDRT yang Didampingi Kota Banda Aceh
Tahun 2009 - 2011

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah KDRT	9	19	31
2	Jumlah Rumah Tangga	37.099	42.072	43.509
3	Jumlah Penanganan Kasus KDRT	9	19	31
4	Rasio KDRT	0,024	0,045	0,071
5	Rasio Penaganan Kasus KDRT	100%	100%	100%

Sumber: Kantor PP&KB Kota Banda Aceh

2.3.2.7.4. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Jumlah pekerja di bawah umur yang berusia 5 – 14 tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2011 terus mengalami penurunan dari 374 orang pada tahun 2009 menjadi 198 orang pada tahun 2011. Jika dilihat dari persetanse jumlah tenaga kerja di bawah umur juga mengalami penurunan hingga pada tahun 2011 menjadi 0,48 persen. Hal ini disebabkan karena semakin baiknya pembinaan terhadap anak di bawah umur melalui pembinaan pendidikan dan pembinaan keluarga anak-anak tersebut. Keadaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.118.

Tabel 2.117
Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Kota Banda Aceh
Tahun 2009 - 2011

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun	374	310	198
2	Jumlah Pekerja	36.333	40.849	41.595
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	**1,03**	**0,76**	**0,48**

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

2.3.2.8. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

2.3.2.8.1. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Dari Tabel 2.119 dapat diperoleh rata-rata jumlah anak per keluarga, pada tahun 2009 dan 2010 sebanyak satu anak per keluarga tetapi pada tahun 2011 meningkat menjadi dua anak per keluarga. Salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana adalah menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga. Dari data tersebut rata-rata jumlah anak per keluarga terjadi peningkatan, maka program keluarga berencana perlu melakukan strategi yang lebih tepat dengan cara menekan laju kelahiran.

Tabel 2.118
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah anak	141.282	152.232	152.232	157.489	144.844
2	Jumlah keluarga	39.245	41.144	41.144	44.997	45.264
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,6	3,7	3,7	3,5	3,2

Sumber: Kantor PP & KB Kota Banda Aceh

2.3.2.8.2. Rasio Akseptor KB

Jumlah akseptor KB dari tahun 2009 sampai dengan 2011 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 berjumlah 16.922

akseptor menjadi 18.140. Hal ini tentu saja, kerja keluarga berencana menunjukkan hasil yang signifikan, juga diikuti dengan peningatan pasangan usia subur pada tahun 2011 menjadi 28.799 pasangan. Jika dilihat dari rasio akseptor KB mengalami nilai yang berfluktuasi hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2011 banyaknya pasangan usia subur yang baru menikah.

Tabel 2.119
Rasio Akseptor KB Di Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah akseptor KB	10.495	14,599	16.922	18.323	18.140
2	Jumlah pasangan usia subur	22.415	25.061	27.867	28.555	28.799
3	Rasio akseptor KB	46,82	58,25	60,72	64,17	62,99

Sumber: Kantor PP & KB Kota Banda Aceh

Tabel 2.120
Jumlah Penyuluh KB Di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Baiturrahaman	2	2	2	2	2
2	Kuta Alam	2	2	2	2	2
3	Kuta Raja	1	1	1	1	1
4	Meuraxa	1	1	1	1	2
5	Jaya Baru	2	2	2	2	2
6	Lueng Bata	1	1	1	1	2
7	Ulee Kareng	2	2	2	1	1
8	Jaya Baru	2	2	2	2	1
9	Banda Raya	2	2	2	2	2
Jumlah		**15**	**15**	**15**	**14**	**13**
Rasio PL KB Per Wil. Kerja		**1:6**	**1 : 6**	**1 : 6**	**1:6**	**1:5**

Sumber: Kantor PP & KB Kota Banda Aceh

Namun secara keseluruhan per tahunnya terdapat peningkatan persentase pasangan usia subur yang mengikuti program KB. Peningkatan tersebut diharapkan akan lebih besar lagi apabila jumlah penyuluh KB dapat direkrut kembali untuk dilatih. Rasio yang diharapkan agar jumlah penyuluh KB pada satu wilayah kerja, rasionya adalah 1 : 3 yaitu dalam tiga desa harus memiliki satu orang tenaga fungsional penyuluh KB.

2.3.2.9. Komunikasi dan Informasi

2.3.2.9.1. Jumlah Jaringan Komunikasi

Tabel 2.121
Jaringan Komunikasi Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2011
1	Jumlah jaringan telepon genggam	32	70
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	Tidak terdaftar	
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	32	70

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.122 terlihat bahwa pada tahun 2007 jaringan telepon seluler terdapat 32 BTS, namum seiring meningkatnya pemakaian telepon seluler maka para pengusaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi (provider) menambah BTS nya sehingga pada tahun 2011 telah berjumlah 70 BTS.

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2008 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (Information Technology) dengan kapasitas yang sangat terbatas. Untuk pengembangannya maka pada tahun 2010 telah diupayakan penguatan infrastruktur IT-nya yaitu dengan bantuan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) 2010. Saat ini telah tersedia 12 unit komputer yang ditempatkan di ruangan khusus yang dinamakan INTERNET ROOM dengan jaringan internet yang terkoneksi ke Dishubkomintel Aceh (Gedung eks. BPDE NAD).

Dalam rangka meningkatkan informasi dan komunikasi Bidang Kominfo Kota Banda Aceh akan melakukan langkah-langkah strategis. Pertama, memperluas jaringan informasi sebagai upaya publikasi informasi publik yaitu dengan melakukan kerjasama penyebarluasan informasi publik yang dituangkan dalam MoU dengan 3 (tiga) SKPD (Disdukcapil, Dinkes dan Disperindagkop) dan lembaga lain. Kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, menyangkut pemasukan jaringan telepon kabel ke terminal penumpang. Ketiga, peningkatan SDM bidang TIK (teknologi informasi dan komunikasi) melalui pelatihan bagi pegawai

2.3.2.9.2. Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk

Untuk penyampaian informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat kepada publik Pemerintah Kota Banda Aceh telah mejalih hubungan kerja sama dengan media massa lokal dan membina warnet yang beroperasi dalam Kota Banda Aceh. Rasio wartel/warnet disajikan dalam Tabel 2.123.

Tabel 2.122
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2007 - 2011

No	Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Jumlah Penduduk	219.659	217.918	212.241	223.446	228.562
2	Jumlah Wartel	12	7	4	2	0
3	Jumlah warnet	48	53	62	75	70
4	Rasio wartel	0,05	0,055	0,018	0,008	0
5	Rasio warnet	0,22	0,24	0,29	0,33	0,30

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Pada tahun 2007 jumlah Wartel di Kota Banda Aceh sebanyak 12 unit usaha, namun seiring dengan kemajuan dan perkembangan TIK maka pengusaha jasa wartel mulai berkurang karena masyarakat telah beralih menggunakan telepon seluler, sehingga kondisi saat ini usaha di bidang jasa telekomunikasi (wartel) sudah tidak beroperasi lagi. Demikian juga halnya dengan pengelola jasa warnet, di mana pada tahun 2007 hanya berjumlah 48 unit usaha, namun di mana perkembangan IT dan minat masyarakat dalam penggunaan IT sangat tinggi maka para pengusaha yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi khususnya warnet juga bertambah sesuai dengan tuntutan masyarakat, usaha yang bergerak di bidang internet meningkat pada tahun 2011 telah berjumlah 70 unit usaha.

2.3.2.9.3. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Semakin banyak jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Jumlah surat kabar terbitan nasional yang masuk ke Kota Banda Aceh setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2007 hanya 2 (dua) jenis surat kabar dan pada tahun 2011 telah mencapai 7 (tujuh) jenis surat kabar. Sementara surat kabar terbitan lokal semakin berkurang. Pada tahun 2007 terdapat 5 (lima) jenis surat kabar dan pada tahun 2011 tinggal 3 (tiga) jenis surat kabar, namun berita yang berbentuk tabloit terbitan lokal berjumlah 7 (tujuh) unit terbitan.

Tabel 2.123
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 – 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	2	3	5	7	7
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	5	5	4	4	3
3	Total jenis surat kabar (1+2)	7	8	9	11	10

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

2.3.2.9.4. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Target SPM yang ditetapkan sebesar 100%

dalam bidang penyiaran Radio/TV local telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pertumbuhan penyiaran radio lokal di Kota Banda Aceh pada tahun 2007 hanya berjumlah 5 (lima) penyiaran. Pada tahun 2011 bertambah menjadi 18 penyiaran. Penyiaran radio nasional dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 hanya satu yaitu Radio republik Indonesia. Pada tahun 2009 terdapat 1 (satu) stasiun televisi lokal yang telah mulai melakukan penyiaran yaitu Televisi Aceh. Pada tahun 2011 bertambah menjadi 2 (dua) stasiun yaitu Televisi Aceh dan Kuta Raja TV. Penyiaran televisi nasional pada tahun 2007 hanya 2 (dua) penyiaran dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 6 (enam) penyiaran.

Tabel 2.124
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penyiaran radio lokal	5	7	11	13	18
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	0	0	1	1	2
4	Jumlah penyiaran TV nasional	2	2	4	6	6

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Tabel 2.125
Pengembangan & Pemberdayaan KIG (Kelompok Informasi Gampong)
Rasio Jumlah KIG di Tingkat Kecamatan

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah KIG	9	6	3	3	3
2	Rasio KIG	100%	67%	1%	1%	1%

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Tabel 2.126
Pelaksanaan Diseminasi Inf. &Pendistribusian Inf Nasional

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Target	Ket
1	Media massa	12	12	12	12	12	12/thn	sesuai
2	Media online (Website)	-	48	55	60	76	365/thn	Belum tercapai
3	Media tradisional	2	2	1	1	-	12/thn	Belum tercapai

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Target	Ket
	pertunjukan rakyat							
4	Media interpersonal	3	3	2	2	2	12/thn	Belum tercapai
5	Media luar ruang	12	12	12	12	12	12/thn	sesuai

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

2.3.2.10. Pertanahan

2.3.2.10.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel 2.127
Luas Lahan Bersertifikat di Kota Banda Aceh
Tahun 2009 - 2011

No	Uraian	2009	2010	2011
1.	Luas wilayah daratan			
2.	Luas tanah bersertifikat HGB (m^2)	19.849.031	19.938.611	20.175.757
3.	Luas tanah bersertifikat HGU (m^2)	2.562	2.562	2.562
4.	Luas tanah bersertifikat HM (m^2)	23.824.124	26.026.483	27.948.076
5.	Luas tanah bersertifikat HP (m^2)	6.005.663	6.175.072	6.246.286
6.	Luas tanah bersertifikat HPL (m^2)	-	3.933	3.933

Sumber: Badan Pertanahan Nasional

2.3.2.11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.11.1. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang

pembangunan, misalnya kelompok pemuda/karang taruna, remaja mesjid dan lain-lain. Jumlah Kelompok binaan LPM dalam Kota Banda Aceh dari tahun 2007 s/d 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2.128
Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011

No	Kecamatan	2008			2009			2010			2011		
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM
1	**2**	**6**	**7**	**8=7/6**	**9**	**10**	**11=10/9**	**12**	**13**	**14=13/12**	**15**	**16**	**17=16/15**
1	Baiturrahman	10	10	1,00	10	14	1,40	10	16	1,60	10	18	1,80
2	Kuta Alam	11	11	1,00	11	14	1,27	11	18	1,64	11	21	1,91
3	Meuraxa	16	16	1,00	16	20	1,25	16	21	1,31	16	22	1,38
4	Syiah Kuala	10	10	1,00	10	12	1,20	10	14	1,40	10	19	1,90
5	Lueng Bata	9	9	1,00	9	12	1,33	9	15	1,67	9	18	2,00
6	Kutaraja	6	6	1,00	6	8	1,33	6	10	1,67	6	10	1,67
7	Banda Raya	10	10	1,00	10	12	1,20	10	15	1,50	10	18	1,80
8	Jaya Baru	9	9	1,00	9	11	1,22	9	13	1,44	9	14	1,56
9	Ulee Kareng	9	9	1,00	9	12	1,33	9	13	1,44	9	15	1,67
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	**90**	**90**	**1,00**	**90**	**115**	**1,28**	**90**	**135**	**1,50**	**90**	**155**	**1,72**

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.129 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kelompok binaan LPM di Kota Banda Aceh, yang pada tahun 2008 sebesar 1 kelompok per gampong, meningkat menjadi 1,72 kelompok per gampong pada tahun 2011.

2.3.2.11.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP. PKK Kecamatan sampai TP.PKK Gampong. Selanjutnya TP. PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Jumlah Kelompok PKK Dusun dan Dasawisma adalah sesuai dengan jumlah dusun dan dasawisma yang ada di gampong. Jumlah Kelompok binaan PKK dalam Kota Banda Aceh dari tahun 2007 s/d 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.130.

Dari Tabel 2.130 terlihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK terus meningkat dari tahun 2007 s/d tahun 2011. Pada tahun 2011 jumlah Kelompok Binaan PKK dalam Kota Banda Aceh sebesar 2.186 kelompok terdiri dari 368 kelompok PKK Dusun dan 1.818 kelompok Dasa Wisma. Jumlah Tim Penggerak PKK di kecamatan terdiri dari TP.PKK Kecamatan dan TP. PKK Gampong di wilayah masing-masing kecamatan.

Tabel 2.129
Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011

No	Kecamatan	2007			2008			2009			2010			2011		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1	Baiturrahman	11	408	7,09	11	408	37,09	11	414	37,64	11	414	37,64	11	417	37,91
2	Kuta Alam	12	246	0,50	12	262	21,83	12	284	23,67	12	304	25,33	12	308	25,67
3	Meuraxa	17	160	9,41	17	160	9,41	17	160	9,41	17	160	9,41	17	160	9,41
4	Syiah Kuala	11	347	1,55	11	345	31,36	11	345	31,36	11	345	31,36	11	347	31,55
5	Lueng Bata	10	139	3,90	10	139	13,90	10	145	14,50	10	145	14,50	10	145	14,50
6	Kutaraja	7	108	5,43	7	108	15,43	7	108	15,43	7	108	15,43	7	108	15,43
7	Banda Raya	11	161	4,64	11	221	20,09	11	229	20,82	11	229	20,82	11	229	20,82
8	Jaya Baru	10	196	9,60	10	206	20,60	10	206	20,60	10	210	21,00	10	210	21,00
9	Ulee Kareng	10	183	8,30	10	262	26,20	10	262	26,20	10	262	26,20	10	262	26,20
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	**99**	**1.948**	**9,68**	**99**	**2.111**	**21,32**	**99**	**2.153**	**21,75**	**99**	**2.177**	**21,99**	**99**	**2.186**	**22,08**

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

2.3.2.11.3. Jumlah PKK Aktif

Berdasarkan pembinaan, jumlah PKK aktif meningkat setiap tahun, karena dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG. Jumlah PKK Aktif dari tahun 2007 s/d 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2.130
PKK Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah TP. PKK	99	99	99	99	99
2	Jumlah TP. PKK tidak aktif	76	67	56	46	37
3	Jumlah TP. PKK aktif (1-2)	23	32	43	53	62
4	Persentase	23,23	32,32	43,43	53,54	62,63

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.131 terlihat bahwa persentase PKK Aktif pada tahun 2007 sebesar 23,23 persen meningkat menjadi 62,23 persen pada tahun 2011.

2.3.2.11.4. Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Gampong

Tabel 2.131
Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Gampong
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 – 2011

No.	KECAMATAN	SD					SMP					SMA					Diploma/Sarjana				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	**Kec. Baiturrahman**																				
1	Keuchik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0
3	Kaur	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	34	34	34	37	37	15	15	15	12	12
4	Kadus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	32	32	32	32	9	9	9	9	9
	Jumlah I	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**80**	**80**	**80**	**85**	**85**	**30**	**30**	**30**	**25**	**25**
II	**Kec. Kuta Alam**																				
1	Keuchik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	6	7	7	7	6	5
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	4	4	4	4	4
3	Kaur	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	38	38	38	41	41	16	16	16	13	13
4	Kadus	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	31	31	31	31	31	17	17	17	17	17
	Jumlah II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**80**	**80**	**80**	**84**	**85**	**44**	**44**	**44**	**40**	**39**
III	**Kec. Meuraxa**																				
1	Keuchik	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	9	9	9	10	11	6	6	6	5	4
2	Sekretaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6

No.	KECAMATAN	SD					SMP					SMA					Diploma/Sarjana				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Desa																				
3	Kaur	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	51	51	51	51	51	21	21	21	21	21
4	Kadus	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40	40	40	40	40	10	10	10	10	10
	Jumlah III	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**110**	**110**	**110**	**111**	**112**	**43**	**43**	**43**	**42**	**41**
IV	**Kec. Syiah Kuala**																				
1	Keuchik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
3	Kaur	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	18	18	18	18	18	23	23	23	23	23
4	Kadus	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	12	12	12	12	12	18	18	18	18	18
	Jumlah IV	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**39**	**39**	**39**	**39**	**39**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**
V	**Kec. Lueng Bata**																				
1	Keuchik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3
3	Kaur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36	36	36	9	9	9	9	9
4	Kadus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	2	2	2	2	2
	Jumlah V	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
VI	**Kec. Kutaraja**																				
1	Keuchik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
3	Kaur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	16	18	18	13	13	13	11	11

No.	KECAMATAN	SD					SMP					SMA					Diploma/Sarjana				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	Kadus	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	20	21	21	21	21	5	4	4	4	4
	Jumlah VI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**43**	**44**	**44**	**48**	**48**	**23**	**22**	**22**	**18**	**18**
VII	**Kec. Banda Raya**																				
1	Keuchik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	8	3	3	3	3	2
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	2	2	2	2	2
3	Kaur	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	33	33	33	33	33	15	15	15	15	15
4	Kadus	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	26	26	26	26	26	10	10	10	10	10
	Jumlah VII	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**74**	**74**	**74**	**74**	**75**	**30**	**30**	**30**	**30**	**29**
VIII	**Kec. Jaya Baru**																				
1	Keuchik	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	Kaur	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	35	35	35	35	35	7	7	7	7	7
4	Kadus	2	2	2	2	2	9	9	9	9	9	25	25	25	25	25	3	3	3	3	3
	Jumlah VIII	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**69**	**69**	**69**	**69**	**68**	**17**	**17**	**17**	**17**	**18**
IX	**Kec. Ulee Kareng**																				
1	Keuchik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3
3	Kaur	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	29	29	29	29	29	15	15	15	15	15
4	Kadus	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	19	19	19	19	19	6	6	6	6	6

No.	KECAMATAN	SD					SMP					SMA					Diploma/Sarjana				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Jumlah IX	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**58**	**58**	**58**	**59**	**59**	**29**	**29**	**29**	**28**	**28**
	Jumlah TOTAL	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**51**	**51**	**51**	**51**	**52**	**632**	**633**	**633**	**648**	**650**	**284**	**283**	**283**	**268**	**266**

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Tingkat Pendidikan aparatur gampong dalam Kota Banda Aceh didominasi oleh tingkatan SMA. Pada tahun 2011 tingkat pendidikan aparatur gampong secara persentase adalah SD 1,63 persen, SMP 5,28 persen, SMA 66,06 persen dan Diploma/S1 sebesar 27,03 persen.

2.3.2.11.5. Jumlah LSM yang Aktif

Organisasi lembaga swadaya masyarakat diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1985, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk beperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakat dapat berbentuk, LSM, Yayasan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya. Adapun LSM yang terdaftar dan aktif di Kota Banda Aceh sesuai dengan Tabel 2.133.

Tabel 2.132
Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011.

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah LSM terdaftar	15	9	7	37	26
2	Jumlah LSM tidak aktif					
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	15	9	7	37	26

Tabel 2.133
Jumlah Ormas, OKP
Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Ormas	23	13	21	17	25
2	OKP	8	3	5	3	2
3	Yayasan	3	6	7	27	9
4	NGO Asing	7	65	51	17	5
	Jumlah	**105**	**87**	**84**	**74**	**41**

2.3.2.12. Perpustakaan

2.3.2.12.1. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan baik milik pemerintah daerah maupun lainnya pada tahun 2007 sebanyak 13 perpustakaan. Kemudian adanya peningkatan hingga tahun 2011 menjadi 49 perpustakaan (pemda+non pemda). Adapun terbentuknya perpustakaan tersebut tidak terlepas dari bantuan baik perpustakaan nasional maupun bantuan dari donatur asing. Akan tetapi, jumlah perpustakaan yang ada saat ini belum memenuhi target seperti yang diharapkan, karena keberadaan perpustakaan di gampong belum seluruhnya merata. Oleh karena itu diharapkan di setiap gampong mempunyai perpustakaan yang sesuai dengan standarisasi perpustakaan gampong.

Tabel 2.134
Jumlah Perpustakaan Tahun 2007-2011
Kota Banda Aceh

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	12	21	31	39	44
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	1	2	3	4	5
3	Total Perpustakaan (1+2)	**13**	**23**	**34**	**43**	**49**

Sumber: Kantor Perpustakaan dan assip Kota Banda Aceh

2.3.2.12.2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Arsip:

Saat ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh memiliki satu buah gedung yang khusus melayani bidang perpustakaan, yaitu perpustakaan yang berlokasi di Taman Sari Banda Aceh. Adapun kendala saat ini, yaitu gedung pustaka yang sudah tersedia perlu dibenahi dan diperhatikan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung dan koleksi perpustakaan yang masih kurang memadai seperti koleksi buku perpustakaan (translasi) alih aksara (tranliterasi) dan tidak tersedianya SDM yang profesional.

Hingga saat ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh belum memiliki gedung yang khusus untuk penyimpanan dan pemeliharaan arsip- arsip yang kian bertambah dari hari ke hari. Pelaksanaan, penyimpanan dan pemeliharaan Kearsipan saat ini masih berbaur dengan pelaksanaan perpustakaan.

Mulai tahun 2007 sampai saat ini telah tersedia tiga unit mobil perpustakaan keliling. Adapun mobil-mobil tersebut diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh, SIKIB dan bantuan Masyarakat Kota Augsburg Jerman. Adapun kendala yang dihadapi saat ini adalah, kurangnya koleksi buku pada mobil pustaka keliing, sehingga para pembaca mulai mulai merasa jenuh.

2.3.2.12.3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.135
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	876	953	1213	3502	4356
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	475	489	801	1320	1705
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	**1351**	**1432**	**2014**	**4822**	**6061**

Sumber: Kantor Perpustakaan dan assip Kota Banda Aceh

2.3.2.13. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2.3.2.13.1. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Tabel 2.136
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah polisi pamong praja	83	93	139	170	133
2	Jumlah penduduk	219.659	217.918	212.241	223.446	228.562
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	3,7	4,3	6,6	7,6	6,06

Sumber: Kantor Sapol PP & WH Kota Banda Aceh

2.3.2.13.2. Rasio jumlah Linmas

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Adapun Rasio Jumlah Linmas sesuai Tabel 2.138.

Tabel 2.137
Rasio Jumlah Linmas Kota Banda Aceh Per 10.000 Penduduk
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Linnmas	1,420	1,420	1,240	1,240	1,240
2	Jumlah penduduk	219.659	202.774	220.073	223.516	244.724
3	Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk	64	70	56	55	55

Sumber: Kesbangpolinmas Kota Banda Aceh

2.3.2.13.3. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa

Dalam menjaga situasi dan kondisi suatu daerah perlu adanya Satuan Linmas dan perangkatnya maka setiap daerah perlu adanya pos siskamling Gampong untuk pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu ketrentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Tabel 2.138
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

NO	Kecamatan	2007			2008			2009			2010			2011		
		Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio
1	Kuta Alam	40	11	3,6	40	11	3,6	42	11	3,8	43	11	3,9	43	11	3,9
2	Meuraxa	26	16	1,6	26	16	1,6	28	16	1,7	29	16	1,8	29	16	1,8
3	Baiturrahman	32	10	3,2	32	10	3,2	33	10	3,3	35	10	3,5	35	10	3,5
4	Banda Raya	18	10	1,8	18	10	1,8	20	10	2,2	20	10	2,0	20	10	2,0
5	Kutaraja	13	6	2,1	13	6	2,1	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5
6	Ulee Kareng	10	9	1,1	10	9	1,1	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3
7	Lueng Bata	14	9	1,5	14	9	1,5	16	9	1,8	18	9	2,0	18	9	2,0
8	Syiah Kuala	30	10	3,0	30	10	3,0	30	10	3,0	32	10	3,2	32	10	3,2
9	Jaya Baru	23	9	2,5	23	9	2,5	21	9	2,3	23	9	2,5	23	9	2,5
	Jumlah	**206**	**90**	**2,28**	**206**	**90**	**2,28**	**217**	**90**	**2,2**	**227**	**90**	**2,5**	**227**	**90**	**2,5**

Sumber: Kesbangpolinmas Kota Banda Aceh

2.3.3. Pelaksanaan Pemerintahan Umum

2.3.3.1. Pemerintahan Gampong

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pembenahan dan pembinaan pemerintahan sejak dari tingkat yang terendah yaitu dimulai dari pemerintahan gampong. Dalam rangka menciptakan pemerintahan gampong yang baik, tertib administrasi dan berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan gampong dari berbagai aspek kepemerintahan.

Tabel 2.139
Rekapitulasi Regulasi Pemerintahan Mukim dan Gampong
Tahun 2007 - 2011

No	Regulasi	2007	2008	2009	2010	2011
1	Qanun tentang Pemerintahan Mukim	0	0	0	0	0
2	Qanun tentang Pemerintahan Gampong	0	0	0	0	0
3	Qanun tentang TPG (Qanun Kota Banda Aceh 6/2005)	1	1	1	1	1
4	Qanun tentang Reusam Gampong (Qanun Kota Banda Aceh 7/2005)	1	1	1	1	1
5	Qanun tentang Keuangan Gampong (Qanun Kota Banda Aceh 8/2005)	1	1	1	1	1
6	Qanun tentang Tata Cara Pencalonan Geuchik	0	0	0	0	0
7	Qanun tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan Gampong (Qanun Kota Banda Aceh 10/2005)	1	1	1	1	1
8	Qanun tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong.	0	0	0	0	0
	Jumlah	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Sumber : Bagian Hukum Setdako Banda Aceh

2.3.3.2. Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kota

Pemerintah kecamatan sebagai unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk dapat bekerja secara professional di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun didalam menjalankan kegiatan rutinnya sehari-hari. Di samping harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kecamatan juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau Gampong (PP 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 ayat 1 point F).

Pemerintahan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh telah memiliki kewenangan dalam pembinaan pemerintah gampong, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pertauran Walikota Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat, sehingga sangat besar pengaruh/andil Kecamatan dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan Gampong, diantaranya dalam Penyusunan Reusam Gampong, administrasi pelayanan gampong, pembinaan aparatur gampong, dan sebagai perantara/fasilitasi kepada SKPD terkait pemenuhan kebutuhan gampong.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pada tingat kota maupun kecamatan dan gampong maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tabel 2.140
Daftar Qanun Kota Banda Aceh yang Ditetapkan Pada Periode 2007 – 2011

Tahun	Jumlah Program Legislasi Daerah	Pihak Eksekutif			Usul Inisiatif DPRK	Yang Telah Ditetapkan Menjadi Qanun			Rasio Qanun yang Ditetapkan
		Atas Usulan Eksekutif	Yang Disampaikan ke DPRK	Yang Tidak Disampaikan		Usul Eksekutif	Usul Inisiatif DPRK	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007	16	16	16	-	-	16	-	16	100 %
2008	21	16	16	-	5	3	-	3	14,28 %
2009	31	30	30	-	1	6	-	6	19,45 %
2010	36	30	28	2	6	7	1	8	23,53 %
2011	39	35	33	2	4	15	2	17	45,94 %

Sumber : Bagian Hukum Setdako Banda Aceh

Dalam rangka memberikan pedoman dan payung hukum pelaksanaan pemerintahan, Tim Legislasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada setiap tahun membahas dan menyampaikan rancangan qanun kepada DPRK, yang terus meningkat jumlahnya yaitu tahun 2007 sebanyak 16 rancangan qanun, tahun 2008 sebanyak 21, tahun 2009 sebanyak 31, tahun 2010 sebanyak 36 dan tahun 2011 sebanyak 39 rancangan qanun.

Rancangan qanun hasil inisiatif DPRK pada tahun 2008 ada 5 rancangan qanun, tahun 2009 sebanyak 1 (satu) rancangan qanun, tahun 2010 sebanyak 6 (enam) rancangan qanun dan tahun 2011 sebanyak 4 (empat) rancangan qanun.

Dari jumlah rancangan qanun yang diajukan kepada DPRK, yang mampu dibahas dan ditetapkan pertahunnya adalah sebanyak 16 qanun pada tahun 2007 atau 100 persen penyelesaiannya, pada tahun 2008 3 qanun dari 21 rancangan qanun yang disampaikan atau 14,28 persen, tahun 2009 sebanyak 6 qanun dari 31 rancangan qanun yang disampaikan atau 19,45 persen; tahun 2010 sebanyak 8 qanun dari 36 rancangan qanun yang disampaikan ke DPRK atau 23,53 persen dan tahun 2011 sebanyak 11 qanun dari 39 rancangan qanun yang disampaikan ke DPRK atau 45,94 persen. Rendahnya penyelesaian pembahasan dan penetapan qanun tersebut membawa dampak yang tidak baik terhadap kinerja legislatif dan eksekutif dipandangan masyarakat.

Tabel 2.141
Rasio Jumlah Tapal Batas Gampong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Kecamatan	2007			2008			2009			2010			2011		
		Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio	Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio	Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio	Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio	Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kuta Alam	0	11	0.00 %	0	11	0.00%	0	11	0.00%	2	11	18.18 %	3	11	27.27 %
2	Kutaraja	0	6	0.00 %	0	6	0.00%	0	6	0.00%	2	6	33.33 %	1	6	16.67 %
3	Jaya Baru	0	9	0.00 %	0	9	0.00%	0	9	0.00%	0	9	0.00%	1	9	11.11 %
4	Syiah Kuala	0	10	0.00 %	0	10	0.00%	0	10	0.00%	1	10	10.00 %	2	10	20.00 %
5	Lueng Bata	0	9	0.00 %	0	9	0.00%	0	9	0.00%	0	9	0.00%	1	9	11.11 %
6	Ulee Kareng	0	9	0.00 %	0	9	0.00%	0	9	0.00%	0	9	0.00%	2	9	22.22 %
7	Banda Raya	0	10	0.00 %	0	10	0.00%	0	10	0.00%	0	10	0.00%	0	10	0.00%

No	Kecamatan	2007			2008			2009			2010			2011		
		Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio	Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio	Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio	Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio	Jml Tapal Batas	Jumlah Gampong	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Meuraxa	0	16	0.00 %	0	16	0.00%	0	16	0.00%	0	16	0.00%	0	16	0.00%
9	Baiturrahman	0	10	0.00 %	0	10	0.00%	0	10	0.00%	0	10	0.00%	0	10	0.00%
Total Rasio Kota		**0**	**90**	**0.00 %**	**0**	**90**	**0.00%**	**0**	**90**	**0.00%**	**5**	**90**	**5.56%**	**10**	**90**	**11.11 %**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setdako Banda Aceh.

2.3.3.3. Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan

Tabel 2.142
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Anggaran dan Jumlah Objek Pemeriksaan Serta Ratio Pembinaan/Obrik dari Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah pembinaan dan pengawasan	191	87	157	160	93
2	Jumlah anggaran pembinaan dan pengawasan	461.310.000	559.825.000	684.540.000	604.750.000	331.610.000
3	Jumlah objek pemeriksaan	260	260	260	265	265
4	Ratio pembinaan/ obrik (%)	73,46	33,46	60,38	60,38	35,09

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

Tabel 2.143
Jumlah Pegawai dan Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasan dari Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah pegawai	45	51	51	47	42
2	Jumlah auditor dan JFP2UPD	5	5	5	13	12
3	Ratio per-Tahun (%)	11,11	9,8	9,8	27,66	28,57

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

Tabel 2.144
Jumlah Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah rekomendasi BPK	104	29	21	74	51
2	Jumlah penyelesaian	90	25	20	65	45
3	Ratio penyelesaian (%)	86,54	86,21	95,24	87,84	88,24
4	Jumlah rekomendasi BPKP	-	22	-	2	-
5	Jumlah penyelesaian	-	22	-	2	-
6	Ratio penyelesaian (%)	-	100	-	100	-
7	Jumlah rekomendasi inspektorat Aceh	39	10	13	26	-
8	Jumlah penyelesaian	39	10	7	25	-
9	Ratio penyelesaian (%)	100	100	53,85	96,15	-
10	Jumlah rekomendasi	250	400	349	385	307

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
	Inspektorat kota					
11	Jumlah penyelesaian	250	400	349	382	288
12	Ratio penyelesaian (%)	100	100	100	99,22	93,81

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

2.3.3.4. Pemuda dan Olah Raga

2.3.3.4.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Tabel 2.145
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kuta Alam	10	10-	13	13	14
2	Lueng Bata	4	5	6	6	7
3	Kuta Raja	9	9	11	11	12
4	Syiah Kuala	9	9	9	9	9
5	Baiturrahman	9	11	12	13	14
6	Meraxa	3	3	3	3	3
7	Banda Raya	1	1	1	2	2
8	Jaya Baru	5	5	4	5	5
	Jumlah	**53**	**56**	**62**	**64**	**67**

Sumber : Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh

2.3.3.4.2. Jumlah Organisasi Olah raga

Tabel 2.146
Jumlah Organisasi Olahraga Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kuta Alam	28	28	28	28	31
2	Kuta Raja	0	0	0	0	0
3	Syiah Kuala	0	0	1	0	0
4	Ulee Kareng	2	2	2	2	2
5	Baiturrahman	1	1	1	1	1
6	Lueng Bata	0	0	0	0	0
7	Meuraxa	0	0	0	0	0
8	Banda Raya	0	0	0	3	4
9	Jaya Baru	0	0	0	0	0
	Jumlah	**31**	**31**	**32**	**34**	**38**

Sumber : Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh

2.3.3.4.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Tabel 2.147
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kuta Alam	0	0	1	0	1
2	Kuta Raja	0	0	0	0	0
3	Syiah Kuala	0	0	0	0	0
4	Ulee Kareng	0	0	0	0	0
5	Baiturrahman	0	0	0	0	0
6	Lueng Bata	0	0	0	0	0
7	Meuraxa	0	0	0	0	0
8	Banda Raya	0	0	0	0	0
9	Jaya Baru	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**

Sumber : Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh

2.3.3.4.4. Jumlah Kegiatan Olah Raga

Tabel 2.148
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kuta Alam	3	3	5	6	6
2	Kuta Raja	0	0	0	0	0
3	Syiah Kuala	1	0	6	0	0
4	Ulee Kareng	0	0	1	4	5
5	Baiturrahman	1	1	1	1	1
6	Lueng Bata	0	0	0	0	0
7	Meuraxa	0	0	0	0	0
8	Banda Raya	3	3	3	5	2
9	Jaya Baru	0	0	0	0	0
	Jumlah	**8**	**7**	**16**	**16**	**14**

Sumber : Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh

Jumlah organisasi kepemudaan yang relatif banyak, belum menunjukkan perannya yang berarti di dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi langsung atau tidak langsung yang dilakukan. Jumlah kegiatan kepemudaan yang sangat rendah menunjukkan bukti untuk itu. Hanya kegiatan-kegiatan olah raga saja yang menjadi perhatian mereka. Sementara kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, pengembangan masyarakat miskin atau kegiatan pembangunan lainnya belum menunjukkan indikasi yang berarti.

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Tabel 2.149
Angka konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Total Pengeluaran Rumah Tangga	157.071.780,789	228.761.817,598	254.688.775,518	254.327.354,430	301.955.086,696
2	Jumlah Rumah Tangga	45.120	54.480	54.020	55.027	56.287
3	Rasio (No.1/ No.2)	1: 3481	1: 4199	1: 4715	1: 4622	1: 5365

Berdasarkan Tabel 2.150 terlihat total pengeluaran rumah tangga di Kota Banda Aceh menunjukkan trend menanjak (mengalami peningkatan) dalam periode 2007 – 2011. Pada tahun 2010 terjadi sedikit koreksi, dimana total pengeluaran rumah tangga mengalami penurunan dari Rp. 254.688.755,518,- pada tahun 2009 menjadi Rp. 254.327.354.430,- sehingga menyebabkan pengeluaran rata-rata rumah tangga juga mengalami penurunan dari Rp. 4.714.713,- ditahun 2009 menjadi Rp. 4.621.865,-.

Selama periode tahun 2007 – 2011 rasio (rata-rata) pengeluaran rumah tangga meningkat dari Rp. 3.481.201,- menjadi Rp. 5.364.562,- atau meningkat sebesar 54,10 persen.

2.4.1.2. Produktivitas Total Daerah

Tabel 2.150
Produktivitas Per Sektor
Kota Banda Aceh

No	Sektor	2007		2008		2009		2010		2011	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	**PDRB**	**2,585**	**19,00**	**2,730**	**5,64**	**2,886**	**5,68**	**3,057**	**5,94**	**3,241**	**6,02**
1.1	Pertanian	0,102	1,27	0,104	2,32	0,106	2,46	0,109	2,41	0,114	4,47
1.2	Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Industri Pengolahan	0,054	6,50	0,058	8,00	0,064	9,00	0,069	8,00	0,073	6,00
1.4	Listrik,Gas & Air bersih	0,009	31,77	0,011	13,14	0,012	9,46	0,014	14,10	0,016	13,66
1.5	Konstruksi	0,156	8,00	0,167	6,80	0,178	6,60	0,189	6,44	0,202	6,56
1.6	Perdagangan, Hotel & Restoran	0,542	7,31	0,574	5,84	0,622	8,39	0,678	8,88	0,738	8,97
1.7	Pengangkutan & Komunikasi	0,413	7,46	0,436	5,54	0,472	8,07	0,510	8,32	0,552	8,20
1.8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	0,061	8,35	0,064	5,30	0,068	5,57	0,072	6,60	0,078	7,12
1.9	Jasa-jasa	1,245	35,15	1,314	5,56	1,362	3,66	1,413	3,78	1,466	3,74

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Aksibilitas Daerah

2.4.2.1.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.151
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Panjang Jalan	487,943	707,343	707,343	707,343	707,343
2	Jumlah Kendaraan	88,947	112,054	135,754	146,186	150,572
3	Rasio	5.49	6.31	5,21	4.84	4,70

Sumber : Dishubkominfo Banda Aceh

Panjang jalan di Kota Banda Aceh sejak tahun 2008 tidak lagi terjadi peningkatan. Hal ini karena tidak tejadi perluasan lahan Kota

Banda Aceh. Oleh karena itu, jumlah kenderaan yang semakin meningkat, menjadikan rasio panjang jalan per kendaraan semakin pendek. Bila kondisi ini tidak diantisipasi segera, maka sekitar 10 tahun ke depan, dengan perkembangan seperti saat ini, maka akan terjadi kemacetan total di Kota Banda Aceh.

2.4.2.1.2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode satu tahun, dapat dilihat pada Tabel 2.153.

Tabel 2.152
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah orang	Orang	135.251	146.000	394.200	662.721	526.623
2	Jumlah Barang	Ton	102.300	108.000	108.720	109.800	111.600

Sumber : Dishubkominfo Banda Aceh

Dilihat dari perkembangan jumlah orang dan jumlah barang yang diangkut, menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan fasilitas transportasi dari waktu ke waktu, baik dari fasiltas moda transpor maupun terminal barang dan orang.

2.4.3. Penataan Wilayah

2.4.3.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 2.153
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Realisasi RTRW	50	50	100	100	100
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100
3	Rasio (1/2)	50%	50%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Banda Aceh

Tercapai nilai ketaatan peruntukan dan realisasi RTRW menunjukkan bahwa ketaatan hukum warga kota Banda Aceh telah meningkat. Artinya, kesadaran hukum masyarakat telah semakin baik.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban tersebut mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan *(money follow function)*.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 memberikan gambaran mengenai arah kebijakan keuangan dengan melihat potensi keuangan yang dimiliki dan kebutuhan terhadap pendanaan pembangunan. Dalam penjabarannya gambaran pengelolaan keuangan daerah akan dituangkan dalam APBD sebagai instrumen operasionalisasi pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun

waktu 5 tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategik dengan anggaran, dapat dilihat dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kota Banda Aceh mengandung makna bahwa:

1) Arah belanja APBD Kota Banda Aceh digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan.
2) Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun, hubungan strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat dalam Gambar 3.2.

Gambar 3.2

Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD

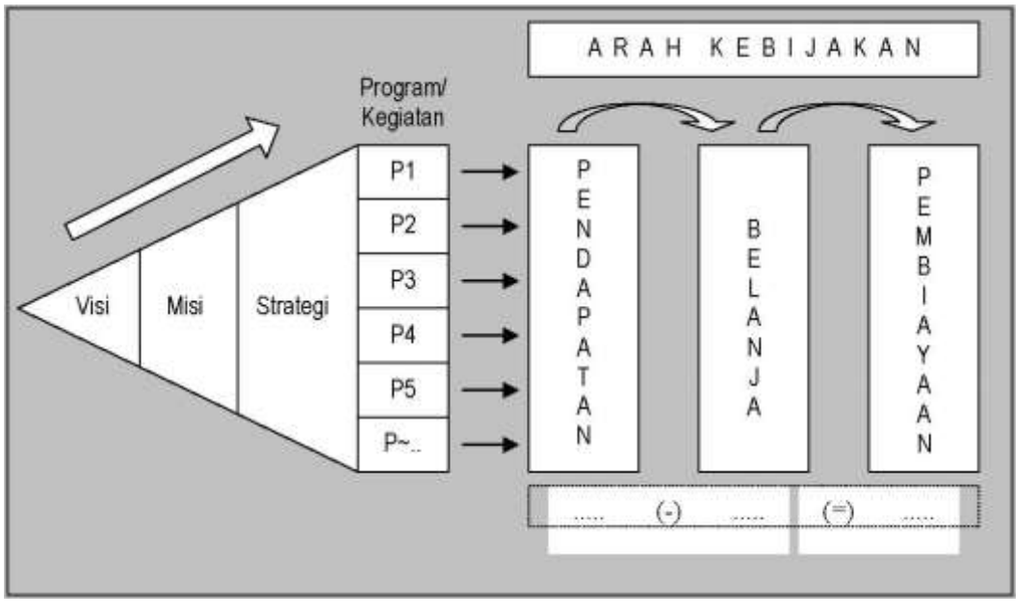

Gambar 3.2 menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kota Banda Aceh, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategik dan tidak memiliki nilai tambah *(non value-added)* diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka

kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007-2011 memberikan gambaran trend yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,03% walaupun pada masa itu Kota Banda Aceh masih pada tahap pemulihan pasca tsunami dan terjadi kenaikan BBM. Bencana gempa dan tsunami yang melanda Kota Banda Aceh pada 26 Desember 2004 secara langsung membawa kerusakan dahsyat pada kehidupan dan infrastruktur kota. Namun

dalam masa pemulihan pasca bencana terjadi perubahan ekonomi yang besar di Kota Banda Aceh dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang dijalankan terutama infrastruktur. Hal ini berdampak pada pergerakan perekonomian dari sektor bangunan/konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini membawa dampak signifikan pada perkembangan ekonomi makro karena struktur pendukung ekonomi daerah Kota Banda Aceh yang berbasis pada sektor tertier.

Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah sebagai pijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan. Sehingga setiap pengeluaran pembangunan akan mampu diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah.

Perkiraan pendapatan daerah yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya sebagaimana dimaksudkan dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 akan sangat membantu proses perencanaan secara maksimal dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.

Era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah agar secara bertahap mampu melepaskan ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah sebagai modal utama pembangunan daerah. Daerah yang tidak mampu mencapai nilai PAD-nya minimal 10 persen dari nilai APBD-nya akan sulit berkembang, bahkan diindikasikan akan mengalami kebangkrutan. Pada kenyataannya angka minimal tersebut sangat sulit diwujudkan karena minimnya potensi PAD masing-masing daerah. Kinerja pelaksanaan APBD Kota Banda Aceh sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 digunakan sebagai dasar dalam rencana RPJMD Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejak tahun 2007 sampai 2011 Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil meningkatkan PAD-nya dari sekitar Rp. 30,8 miliar menjadi Rp. 85,5 miliar. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kota Banda Aceh yang dinilai telah mampu mengelola potensi PAD dengan baik walaupun potensi PAD tersebut belum dapat digali sepenuhnya. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal daerah sehingga besaran dana daerah yang bisa digunakan secara bebas sesuai dengan kebutuhan daerah dalam satu tahun anggaran akan semakin besar, sehingga kebutuhan dasar masyarakat yang terkait dengan program prioritas akan dapat dipenuhi.

Selama ini sebagian besar pendapatan daerah harus dipergunakan untuk pembelanjaan yang tidak dapat dihindari (mandatory budget) seperti belanja pegawai atau gaji PNS dan juga terdapat pendapatan yang bersifat earmarked atau belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus berusaha untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi yang ada melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD. Sehingga dengan adanya peningkatan PAD, maka akan semakin memperbesar ruang fiskal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan belanja publik.

Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pada Tahun 2007 realisasi dana perimbangan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp. 391,2 miliar lebih dan pada tahun 2011 sebesar Rp.481,6 miliar lebih, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 persen. Dan pada tahun 2011 Sekitar 66,94 persen dari total realisasi penerimaan pendapatan daerah masih bersumber dari dana

perimbangan. Ini juga menunjukkan kalau Pemerintah Kota Banda Aceh juga masih sangat tergantung kepada anggaran dari pemerintah pusat.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang sumber pendapatannya bersumber dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi khusus dan Pendapatan Yang Sah Lainnya dari tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan trend terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2007 realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 44,26 miliar dan pada tahun 2011 menjadi Rp. 152,35 miliar.

Selama kurun waktu 2007 – 2011, target dan realisasi belanja APBK Banda Aceh menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 realisasi belanja daerah meningkat dari tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 23,79 persen. Dan selama kurun waktu lima tahun tersebut rata-rata proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah sebesar 65,74 persen dan proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 34.26 persen. Anggaran belanja tidak langsung, dipergunakan untuk belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Sedangkan anggaran belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing–masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Kota Banda Aceh yang harus dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi Pendapatan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 - 2011

No	Uraian	2007 (Rp.)	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**466.404.069.537**	**470.177.893.188**	**500.500.210.649**	**577.316.651.310**	**719.615.023.954**	**9.45**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	**30.859.032.422**	**43.097.704.361**	**49.482.544.620**	**52.265.729.802**	**85.560.389.620**	**26.57**
1.1.1	Pajak Daerah	15.812.025.530	25.518.334.146	27.468.807.297	27.994.909.379	33.549.809.961	29.24
1.1.2	Retribusi Daerah	6.930.661.811	8.644.628.092	11.400.912.918	12.042.079.377	14.797.836.701	22.01
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	769.657.037	719.261.211	720.441.012	655.113.816	483.671.741	-6.50
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.346.688.044	8.215.480.912	9.892.383.393	11.573.627.230	27.727.071.217	34.27
1.1.5	Zakat	-	-	-	-	9.002.000.000	100
1.2	**Dana Perimbangan**	**391.278.298.463**	**396.335.582.439**	**399.485.099.269**	**405.815.604.335**	**481.699.960.314**	**5.00**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.341.298.460	50.691.267.439	45.436.719.269	56.390.722.335	45.583.255.314	1.94
1.2.2	Dana Alokasi Umum	308.839.000.003	307.002.315.000	313.120.380.000	328.073.282.000	406.480.305.000	4.32
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.098.000.000	38.642.000.000	40.928.000.000	21.351.600.000	29.636.400.000	2.04

No	Uraian	2007 (Rp.)	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**44.266.738.652**	**30.744.606.388**	**51.532.566.760**	**119.235.317.173**	**152.354.674.020**	**39.24**
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	1.767.168.451	100
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.642.553.498	9.939.042.010	10.619.281.874	7.715.715.195	9.427.990.469	-6.09
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11.377.713.930	5.149.638.000	-	-	12.725.400.000	10,59
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya	14.882.006.677	-	-	-	-	-100
1.3.6	Pendapatan Yang Sah Lainnya	3.364.464.547	15.655.926.378	40.913.284.886	111.519.601.978	128.434.115.100	5.40

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu tahun 2007 s/d 2011 mengalami trend positif, yaitu mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 9,45 persen. Di tahun-tahun mendatang tentunya Pemerintah Kota Banda Aceh akan lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan khususnya dari Pendapatan Asli Daerah melalui antara lain law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, meningkatkan koordinasi dan sistem informasi yang sinergis di bidang pendapatan diantara SKPD terkait, mengadakan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, melaksakan peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan eksitensifikasi menggunakan data potensi akurat, valid dan terpercaya.

Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya untuk merevisi qanun, memangkas peraturan, dan prosedur perijinan yang berbelit-belit yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta mengefektifkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial, meningkatkan efisiensi dalam pemungutannya, serta menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya untuk melakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan-penerimaan yang ditetapkan untuk Kota Banda Aceh dan memberikan data konkrit. Namun demikian, beberapa sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan telah dialokasikan ke setiap daerah sesuai dengan formulasi terukur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3.1.2. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Banda Aceh

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**	**42.66**
1.1	**ASET LANCAR**	**-0.08**
1.1.1	Kas	-35.25
1.1.2	Piutang	581.62
1.1.3	Persediaan	213.09
1.2	**ASET TETAP**	**44.55**
1.2.1	Tanah	32.30
1.2.2	Peralatan dan mesin	98.74
1.2.3	Gedung dan Bangunan	62.26
1.2.4	Jalan,irigasi, dan jaringan	65.79
1.2.5	Aset tetap lainnya	297.20
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	137.90
1.2.7	Dst.....	-
1.3	**ASET LAINNYA**	**-11.63**
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	-
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-
1.3.3	Kemitraan dengan pihak kedua	-
1.3.4	Aset tak berwujud	-
1.3.5	Aset lain-lain	-11.63
	JUMLAH ASET DAERAH	**42.66**
2	**KEWAJIBAN**	**-**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**-**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.1	Utang Perhitungan pihak ketiga	-
2.1.2	Utang muka dari kas Daerah	-
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	-
2.1.4	Dst.....	-
3	**EKUITAS DANA**	**42.83**
3.1	**EKUITAS DANA LANCAR**	**5.68**
3.1.1	SILPA	-47.72
3.1.2	Cadangan piutang	581.62
3.1.3	Cadangan persediaan	213.09
3.1.4	Pendapatan yang ditangguhkan	5.980.24
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**43.64**
3.2.1	Diinvestasikan dalam asset tetap	44.55
3.2.2	Diinvestasikan dalam asset lainnya	-11.77
3.2.3	Dst.....	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	42.83

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari provinsi. Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus

diupayakan pada sumber PAD, mengingat *controllability*-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan daerah adalah antara lain :

a. Meningkatkan penyuluhan pajak/restribusi kepada masyarakat.
b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
d. Merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f. Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang lalai.
g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi PAD secara rutin.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2012-2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu : dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur daerah maka kebijakan umum belanja daerah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung adalah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan PNS di jajaran Pemko Banda Aceh melalui Peningkatan Tunjangan Prestasi Kerja, di samping gaji yang diterima setiap bulannya.

b. Peningkatan Belanja Langsung ditujukan pada peningkatan pelayanan publik, peningkatan SDM, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan serta peningkatan pengamalan Syariat Islam.
c. Melakukan penghematan dan efisiensi yang tinggi dengan mengurangi jumlah kepanitiaan suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, belanja modal aparatur dan belanja–belanja lain yang kurang prioritas, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.
d. Anggaran belanja dialokasikan untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan, yang diprioritaskan pada program/kegiatan, dengan terlebih dahulu melihat dan mempertajam indikator kinerja yang terukur dan pencapaian program yang jelas.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2007-2011, rata-rata presentase proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah adalah 28,88 persen. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan rata-rata belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan

program dan kegiatan periode tahun 2007-2011 adalah 71,12 persen, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Berikut penjelasan Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh pada Tabel 3.5.

Tabel 3.3
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp.)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2009	404.271.654.798	556.062.366.232	72,70
2	Tahun 2010	451.856.268.873	602.909.980.933	74,95
3	Tahun 2011	514.563.918.505	764.013.118.850	67,37

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

Dari Tabel 3.5 dapat kita lihat bahwa belanja aparatur di Pemerintah Kota Banda Aceh masih sangat tinggi, hal ini disebabkan Pemerintah Pusat menaikkan gaji pegawai setiap tahunnya, di samping itu juga Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahunnya menaikkan tambahan penghasilan PNS untuk menaikkan kesejahteraan PNS.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK. Surplus APBK terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sementara defisit APBK terjadi bila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, diutamakan untuk membiayai pembayaran pokok utang, penyertaan modal (invenstasi) daerah pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau pendanaan jaminan sosial. Sementara dalam hal APBK diperkirakan defisit, pembiayaan diutamakan untuk menutup defisit yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan baik penerimaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Penetapan angka pembiayaan sangat mempengaruhi jumlah alokasi belanja yang dianggarkan dalam APBK, sehingga dari penerimaan SiLPA dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan. Namun karena anggaran pendapatan Kota Banda Aceh dalam setiap tahunnya selalu defisit, maka kita tidak pernah dapat menyisihkan dana untuk saving (transfer ke dana cadangan), sehingga sumber dana yang dapat diperoleh dari pembiayaan hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya. Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun Tahun 2009-2011 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.4
Defisit Riil Anggaran
Kota Banda Aceh

No	Uraian	2009	2010	2011
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	500.500.210.649	577.316.651.310	719.615.023.954
2	Belanja Daerah	555.362.366.232	601.559.980.933	761.313.118.850
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	700.000.000	1.350.000.000	2.700.000.000
	Defisit Riil	**(55.562.155.583)**	**(25.593.329.623)**	**(44.398.094.896)**

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada Tabel 3.7.

Tabel 3.5
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Banda Aceh (persen)

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2009	2010	2011
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	53,13	53,54	36,54
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2009-2011. Gambaran tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.6
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Banda Aceh

No	Uraian	2009		2010		2011	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
1	Jumlah SILPA	13.651.721.837	46,25	13.826.878.213	101,28	21.386.489.168	131,82
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-894.330.380	-3,03	-538.882.971	-3,95	5.318.188.403	-32,78
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-18.726.215.801	-63,43	8.506.331.536	62,31	-2.764.655.257	-17,04
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-11.421.269.338	-38,69	-19.909.056.352	-145,84	-33.124.749.829	-204,17
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	38.993.537.356	132,09	24.418.486.000	178,87	46.860.206.983	288,83
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai Akhir Tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0
7	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

Dari Tabel 3.8 terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir (2009-2011), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Anggaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang sifatnya wajib dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, apabila tidak dilaksanakan maka pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan di Kota Banda Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pengeluaran wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama adalah belanja gaji dan tunjangan bagi PNS, belanja

penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja honorarium non PNS (tenaga honorer dan kontrak), Belanja listrik, telepon, dan air. Di dalam pembiayaan daerah juga terdapat pengeluaran yang bersifat wajib, yaitu pembayaran pokok utang, dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban membayar utang kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini kepada World Bank untuk pembangunan Pasar Aceh. Untuk lebih jelasnya mengenai besaran pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.7
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Banda Aceh

No	Uraian	Tahun 2009 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)	Tahun 2011 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**303.361.067.035**	**349.973.637.046**	**404.666.062.014**	**14.60**
1	Gaji dan Tunjangan	236.184.310.641	244.060.391.736	273.155.484.390	9.73
2	Tambahan Penghasilan PNS	65.239.971.701	104.001.245.310	129.598.577.624	26.84
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRK serta KDH/WKDH	1.936.784.693	1.912.000.000	1.912.000.000	-1.75
4	Belanja Bunga	-	-	-	-
5	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
B	**Belanja Langsung**	**53.248.465.740**	**50.359.971.738**	**73.519.660.647**	**10.68**
1	Honorarium Non PNS	38.121.120.000	35.566.169.500	37.256.608.721	-2.45
2	Belanja Jasa Kantor (air+listrik+telf)	14.490.845.740	14.763.802.238	17.518.846.926	17.73
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	636.500.000	30.000.000	940.000.000	32
4	Belanja Penunjang Pendidikan	0	0	17.804.205.000	100
C	**Pembiayaan Pengeluaran**	**700.000.000**	**0**	**2.000.000.000**	**65**
1	Pembayaran Pokok Utang	700.000.000	0	2.000.000.000	65
	Total (A+B+C)	**357.309.532.775**	**400.333.608.784**	**480.185.722.661**	**14.24**

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai dengan tahun 2011. Sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2017 mendatang seperti disajikan di Tabel 3.10. Untuk proyeksi rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah 2012-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Banda Aceh

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013 (Rp.)	**Tahun 2014 (Rp.)**	**Tahun 2015 (Rp.)**	**Tahun 2016 (Rp.)**	**Tahun 2017 (Rp.)**
1	Pendapatan	892.785.194.394	982.063.713.833	1.080.270.085.217	1.188.297.093.738	1.307.126.803.112
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0
	Total Penerimaan	892.785.194.394	982.063.713.833	1.080.270.085.217	1.188.297.093.738	1.307.126.803.112
	Dikurangi :					
4	Belanja dan pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	585.857.566.414	644.443.323.055	708.887.655.361	779.776.420.897	857.754.062.987
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	**306.927.627.980**	**337.620.390.778**	**371.382.429.856**	**408.520.672.841**	**449.372.740.125**

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

Tabel 3.9

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kota Banda Aceh

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
I	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan**	**306.927.627.980**	**337.620.390.778**	**371.382.429.856**	**408.520.672.841**	**449.372.740.125**
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I		-	-	-	-
II.a	Belanja Langsung	366.327.353.550	402.960.088.905	443.256.097.796	487.581.707.575	536.339.878.333
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi :			-	-	-
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	85.741.504.049	94.315.654.453	103.747.219.900	114.121.941.888	125.534.136.077
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-
II	**Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)**	**280.585.849.501**	**308.644.434.452**	**339.508.877.896**	**373.459.765.687**	**410.805.742.255**
	Sisa kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	**26.341.778.479**	**28.975.956.326**	**31.873.551.960**	**35.060.907.155**	**38.566.997.870**
	Rencana alokasi Pengeluaran prioritas II			-	-	-
III.a	Belanja Tidak langsung	527.506.740.844	580.257.414.928	638.283.156.421	702.111.472.063	772.322.619.270
	Dikurangi :			-	-	-

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
III.b	Belanja Tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	503.723.939.215	554,096,333,137	609,505,966,450	670,456,563,095	737,502,219,405
III	**Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)**	**23.782.801.629**	**26.161.081.792**	**28.777.189.971**	**31.654.908.968**	**34.820.399.865**
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	**2.558.976.850**	**2.814.874.535**	**3.096.361.989**	**3.405.998.187**	**3.746.598.005**

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah derah dalam membiayai :

a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicate) kepala daerah seperti penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanganan kemiskinan serta implementasi amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti prioritas bidang pendidikan 20 (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, kegiatan yang memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan Daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Banda Aceh

No	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prioritas I	31.39%	280.585.849.501	31.39%	308.644.434.452	31.39%	339.508.877.896	31.39%	373.459.765.687	31.39%	410.805.742.255
2	Prioritas II	2.66%	23.782.801.629	2.66%	26.161.081.792	2.66%	28.777.189.971	2.66%	31.654.908.968	2.66%	34.820.399.865
3	Prioritas III	65.95%	589.465.443.264	65.95%	648.411.987.590	65.95%	713.253.186.351	65.95%	784.578.504.984	65.95%	863.036.355.482
	Total	**100%**	**893,834,094,394**	**100%**	**983,217,503,834**	**100%**	**1,081,539,254,218**	**100%**	**1,189,693,179,639**	**100%**	**1.308.662.497.603**

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2012

Penerimaan sah lainnya yang dapat dijadikan sumber pembiayaan atau sumber pendanaan pembangunan Kota Banda Aceh adalah dana bagi hasil migas dan dana otonomi khusus. Untuk periode tahun 2013 hingga 2017, kedua sumber dana tersebut dapat diproyeksi sebagaimana tercantum di dalam Tabel 3.11.

Proyeksi ini dilakukan dengan melihat trend dari kedua sumber pendanaan tersebut selama lima tahun terakhir. Dana Bagi Hasil Migas secara umum tidak menunjukkan perubahan yang signikan selama lima tahun yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh semakin menipisnya hasil produksi minyak dan gas (migas). Sementara untuk Dana Otonomi Khusus diperkirakan akan terjadi kenaikan yang signifikan, bila tidak terjadi perubahan kebijakan untuk itu.

Pembiayaan pembangunan Kota Banda Aceh juga dapat dilakukan dengan pinjaman daerah sebagai penerimaan lain yang sah. Namun pinjaman ini baru dapat dilakukan bila Kota Banda Aceh memiliki kemampuan untuk membayarkan pinjaman di masa yang akan datang. Perhitungan DSCR (Debt Service Coverage Ratio) yang didasarkan pada perhitungan pendapatan daerah dan kewajiban pinjaman daerah (rencana pendapatan yang akan datang, Tabel 3.8 dan Tabel 3.9) masih di atas 2,5, maka Kota Banda Aceh masih memungkinkan untuk melakukan pinjaman, sepanjang total pinjaman masih pada batas-batas kemampuan daerah dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, besarnya pinjaman yang dapat dilakukan juga harus berpedoman pada rasio utang terhadap PDRB Kota Banda Aceh (Debt to PDRB Ratio) yang paling aman, yaitu sekitar 10 hingga 20 persen dari PDRB Kota Banda Aceh.

Berpedoman pada PDRB tahun 2011 (Tabel 2.9 dan 2.12), maka Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melakukan pinjaman total, termasuk pinjaman yang telah ada berkisar Rp 324.117.356.000 hingga Rp 648.234.712.000. Akan tetapi, realisasi pinjaman dapat lebih kecil lagi bila DSCR yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh di masa yang akan datang semakin kecil.

Tabel 3.11
Proyeksi Sumber Dana Bagi Hasil Migas dan OTSUS
Tahun 2013 - 2017

Sumber Dana	2013	2014	2015	2016	2017
MIGAS	8.880.265.500,00	8.798.810.587,07	8.803.179.410,60	8.807.548.234,13	8.811.917.057,66
OTSUS	85.552.246.792,00	86.318.134.347,93	92.854.664.060,82	99.391.193.773,71	105.927.723.486,59
Jumlah	94.432.512.292,00	95.116.944.935,00	101.657.843.471,42	108.198.742.007,83	114.739.640.544,25

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012 - 2017. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan.

4.1 Analisis SWOT

4.1.1 Kekuatan (Strengths)

1. Adanya regulasi yang mendukung
2. Tersedianya sistem teknologi informasi menuju *e-government*
3. Tingginya komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Adanya peninggalan situs sejarah dan budaya peninggalan masa lalu serta objek wisata
5. Letak geografis yang strategis
6. Adanya dukungan dari pihak legislatif/DPRK

4.1.2. Kelemahan (Weakness)

1. Kualitas SDM belum optimal
2. Lemahnya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi.
3. Kurangnya sosialisasi program pembangunan
4. Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai
5. Kurang terintegrasinya syariat Islam dalam kebijakan pembangunan
6. Masih kurang sinergisnya program generasi muda.
7. Tidak tersedianya data yang lengkap dan akurat
8. Kurangnya pelaksanaan pengarusutamaan gender

4.1.3. Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya fasilitas kredit dari LKM/perbankan
2. Adanya dukungan masyarakat, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan syariat Islam
3. Adanya kerjasama ekonomi antar daerah, nasional dan internasional
4. Adanya dukungan program dari pemerintah atasan
5. Kondisi daerah yang kondusif
6. Sikap masyarakat yang membuka diri

4.1.4. Ancaman (Threats)

1. Rendahnya minat investor
2. Tingginya arus urbanisasi dan globalisasi
3. Daerah rawan bencana
4. Rendahnya daya saing
5. Adanya paham aliran sesat/pendangkalan aqidah

4.2 Penentuan Alternatif Strategi

4.2.1 Kekuatan-Peluang (S-O)

1. Menerapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam
2. Memanfaatkan dukungan masyarakat dan legislatif untuk melaksanakan program-program pembangunan.
3. Penerapan regulasi yang mendukung kerjasama ekonomi antar daerah, nasional dan internasional.
4. Pemanfaatan sistem teknologi informasi terhadap jaringan pemasaran produk lokal.
5. Pemanfaatan keterbukaan masyarakat dalam mempromosikan objek-objek wisata.
6. Pemanfaatan letak geografis yang strategis untuk meningkatkan kerjasama antar daerah.

4.2.2 Kekuatan – Ancaman (S-T)

1. Penerapan regulasi dan sistem teknologi informasi untuk menarik investasi.
2. Mempromosikan letak geografis yang strategis untuk menarik minat investor untuk berinvestasi.
3. Memanfaatkan sistem teknmologi informasi untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Pemanfaatan dukungan legislatif dan pemerintah untuk memberantas paham aliran sesat.
5. Penerapan regulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

4.2.3 Kelemahan – Peluang (W-O)

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk mendukung program-program pemerintah.
2. Pemanfaatan dukungan masyarakat terhadap syariat Islam.
3. Mengoptimalkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan
5. Meningkatkan skala usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UKM

4.2.4 Kelemahan – Ancaman (W–T)

1. Meningkatkan sumber daya manusia
2. Peningkatan daya saing komoditas unggulan
3. Peningkatan pelayanan dan perizinan terpadu yang mendukung perdagangan, jasa, dan investasi
4. Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas studi kebencanaan
5. Pemantapan pemahaman dan pelaksanaan syariat islam serta social budaya

4.3. Permasalahan

Sebagaimana telah digambarkan di dalam Bab II, baik berupa data maupun indikasi, ada beberapa permasalahan Kota Banda Aceh yang perlu dikemukakan secara eksplisit dan ini merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan sebagai hasil dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakansebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan syariat islam
2. Tata kelola pemerintahan belum optimal.
3. Kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja masih terbatas serta kurangnya perlindungan kerja
4. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah
5. Kualitas pendidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
6. Pelayanan kesehatan belum memadai
7. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan belum memadai
8. Peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan masih rendah
9. Pariwisata, seni dan budaya kurang berkembang
10. Kapasitas perempuan dan perlindungan anak yang belum optimal
11. Peran generasi muda dalam pembangunan belum optimal

4.3.1 Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Untuk Mengamalkan Syariat Islam

Setiap aktivitas masyarakat selalu membawa nilai nilai agama (Islam), sehingga terbangun tata kehidupan masyarakat yang islami berdasarkan pengamalan Syariat Islam secara benar yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh belum maksimal, oleh karena itu masih diperlukannya

pembekalan Syari'at Islam kepada semua elemen masyarakat, baik pemerintah, kelompok pemuda dan perempuan, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, gampong-gampong, dan memutuskan penyebaran aliran sesat,

Selain itu juga perlu dilakukan dakwah ke gampong-gampong dan musyawarah agama yang membahas berbagai persoalan keagamaan, serta mengembangkan program diniyah di semua jenjang pendidikan. Hal lain yang akan dilaksanakan yaitu membentuk muhtasib gampong, da'i dan da'iyah perkotaan, dan membentuk halaqah tahfizh Al-Qur'an di masjid-masjid dalam Kota Banda Aceh.

4.3.2 Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Tata kelola kepemerintahan baik dalam pelayanan, pengelolaan keuangan, pengelolaan infrastruktur, informasi dan konsultasi masih perlu ditingkatkan mengacu pada prinsip prinsip *good governace* sehingga keberadaan pemerintahan kota lebih dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus meningkatkan pemanfaatan IT dalam akses birokrasi pemerintahan *(e-goverment),* dan membuka ruang partisipasi masyarakat dan konsultasi publik dalam pemerintahan.

4.3.3 Kesempatan Kerja Dan Keterampilan Pencari Kerja Masih Terbatas Serta Kurangnya Perlindungan Kerja

Penempatan pencari kerja yang terdaftar di Kota Banda Aceh sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja di Kota Banda Aceh sangat terbatas sehingga pencari kerja tidak dapat seluruhnya tertampung bekerja berdasarkan tingkat pendidikan dan keterampilan mereka. Selain itu terbatasnya kesempatan kerja juga dipengaruhi dengan keadaan wilayah Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang tingkat urbanisasi sangat tinggi sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah pencari kerja yang ingin bekerja di Kota Banda Aceh. Pencari kerja yang belum bekerja akhirnya menjadi pengangguran. Untuk menurunkan jumlah pengangguran

maka perlu meningkatkan kesempatan kerja. Untuk meningkatkan kesempatan kerja diperlukan informasi lowongan pekerjaan yang mudah dan terarah serta penyediaan lapangan usaha mandiri bagi pencari kerja sesuai bakat dan minatnya. Selain itu juga dapat dilakukan peningkatan kualitas pencari kerja dengan pembekalan pelatihan ketrampilan sehingga pencari kerja akan memiliki nilai plus dalam memperoleh pekerjaan sehingga akan menurunkan jumlah pengangguran. Dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma kerja, norma Jamsostek dan norma keselamatan & kesehatan kerja sangat rendah. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan sehingga terciptanya tertib administrasi ketenagakerjaan di perusahaan serta harmonisnya hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha di perusahaan dalam wilayah Kota Banda Aceh.

4.3.4 Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Masih Rendah

Pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial meliputi keterpaduan antara pertumbuhan dan pemerataan dengan menggunakan prinsip pertumbuhan berkelanjutan dan mandiri dengan pendekatan multisektoral serta kerjasama seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku pembangunan sehingga memberi dampak pada pengentasan kemiskinan.

Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan katagori sedang di Indonesia pasca musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada tahun 2004 melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat dan menjadi kota harapan serta tumpuan bagi masyarakat Aceh pada umumnya dan Kota Banda Aceh pada khususnya untuk mencari kehidupan dan penghidupan sehingga banyak masyarakat

Aceh diluar Kota Banda Aceh maupun luar Aceh yang pada awalnya hanya sebagai pendatang telah berubah menjadi penduduk Kota Banda Aceh hal ini dapat kita lihat dari peningkatan jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini mencapai kira-kira 220.000 jiwa. Hal ini tentunya member dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh yang kurang baik, karena 80 persen para pendatang tesebut mecari pekerjaan di Banda Aceh sementara mereka tidak memiliki keahlian ataupun keterampilan apapun sehingga mereka menjadi pengangguran dan peningkatan penduduk miskin. Untuk itu Pemerintah Kota Banda Aceh perlu memberdayakan dan membudayakan masayarakat untuk mengangkat harkat dan martabatnya dari kondisi sekarang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan/keterbelakangan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan sebagai upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat.

4.3.5 Kualitas Pendidikan Belum Sesuai Dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Masyarakat Banda Aceh harus menjadi masyarakat yang cerdas berwawasan luas dan memiliki pendidikan yang baik. Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani serta dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memajukan kehidupannya secara benar sesuai dengan nilai nilai seni dan budaya keaceh-an yang Islami sehingga dapat hidup secara bermartabat. Untuk itu masih diperlukannya pengembangan pendidikan, yaitu; Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; Peningkatan Tatakelola, Akuntabilitas, Pencitraan Publik; dan Penerapan Pendidikan Islami, sehingga dicapai akses layanan pendidikan yang berkualitas melalui; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisifasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, (APS), Angka Melek Huruf, dan Rasio siswa dan guru.

4.3.6 Pelayanan Kesehatan Belum Memadai

Jika ditinjau dari pencapaian MDG's dan SPM Bidang Kesehatan, pencapaian target pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh sudah menunjukkan pencapaian realisasi yang relatif sudah baik, di mana untuk AKB (Angka Kematian Bayi), AKI (angka kematian ibu) dan ratio gizi buruk Balita untuk Kota Banda Aceh telah dicapai.

Namun bila dilihat dari kualitas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh SDM kesehatan dan yang telah diterima oleh masyarakat, ternyata masih terdapat beberapa hal yang dirasakan belum optimal pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah dijalankan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu adanya kebijakan pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan rekruitmen pegawai, padahal untuk tenaga kesehatan khususnya tenaga medis masih kurang jumlahnya bila dibandingkan dengan ratio jumlah penduduk yang harus diberikan pelayanan kesehatannya; terdapat beberapa regulasi daerah di sektor kesehatan yang masih belum berjalan dengan baik penerapannya; keterlambatan penginputan dan pengolahan data kesehatan yang ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat guna; terdapat regulasi di tingkat pusat dalam hal ini petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) penggunaan dana kesehatan yang bersumber dari pusat terlalu kaku dan kurang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Kota Banda Aceh dan yang terakhir adalah masih sangat terbatasnya anggaran kesehatan khususnya yang diperuntukkan untuk pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

4.3.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Belum Memadai

Kondisi jalan di Kota Banda Aceh sekarang cukup baik namun ada 25 persen umur jalan sudah di atas lima tahun karenanya perlu pemeliharaan rutin dan berkala untuk menjaga kondisi jalan mantap. Sedangkan akibat bertambahnya jumlah

penduduk dan aktivitasnya menyebabkan timbulnya kawasan pusat kegiatan baru yang membutuhkan aksesibilitas jalan yang menghubungkan kawasan pusat kegiatan baru dengan CBD. Jalan arteri dan sekunder yang ada mulai mendekati titik puncak dan untuk mengatasinya perlu penambahan jaringan jalan baru dan fly over.

Drainase makro Kota Banda Aceh telah selesai dibangun tahun 2011 untuk menjaga kondisi agar tetap berfungsi maksimal perlu dilakukan pemeliharaan dalam operasionalnya. Sedangkan drainase mikro masih sangat dibutuhkan disebagian besar wilayah Banda Aceh. Masalah untuk pengadaan drainase mikro adalah ketersediaan lahan yang kurang.

Rumah tinggal bersanitasi di Kota Banda Aceh sudah baik dalam arti setiap rumah telah memiliki WC dan septictank namun diperkirakan masih banyak jenis septictank tersebut tidak kedap sehingga merusak air tanah. Selain itu dengan perkembangan penduduk yang terus bertambah dan jumlah bangunan yang padat sistem septictank skala setempat sudah tidak memadai lagi sehingga dibutuhkan septictank skala kawasan.

Cakupan pelayanan air bersih di Banda Aceh terus ditingkatkan namun masalah yang ada sekarang adalah masih adanya pipa diameter > 200 mm yang berumur diatas 30 tahun.

Peningkatan pengendalian tata ruang terus dilakukan namun masih banyak juga kendala seperti kurangnya sosialisasi IMB, tidak adanya sanksi terhadap bangunan tanpa IMB, belum semua masyarakat memahami tentang Qanun RTRW dan kurangnya ketaatan dalam mengurus IMB.

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banda Aceh belum tercapai sesuai target. Hambatan terbesar untuk pemenuhan target luas RTH sesuai dengan RTRW adalah ketersediaan lahan.

Pengolahan persampahan di Kota Banda Aceh terus meningkat namun masih ada beberapa kendala yaitu kurangnya fasilitas dan lahan untuk pengembangan kawasan industri pengolahan sampah, kurangnya armada yang standar untuk pelayanan persampahan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah pada sumbernya dan masih rendahnya SDM

bidang persampahan terutama di TPA dan Instalasi Pengolah Limbah Terpadu (IPLT).

Upaya meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum masih terkendala dengan kurangnya armada dan SDM serta tingginya biaya rekening Penerangan Jalan Umum (PJU). Rekening PJU ditagih PLN dengan perhitungan Flat (P33, P32) sehingga tidak terukur dengan tepat, untuk mengatasinya dibutuhkan pemasangan KWH meter PJU.

Faktor utama yang dihadapi oleh BPBD Kota Banda Aceh dalam menghadapi bencana Khususnya kebakaran adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal untuk memberikan bantuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan masyarakat dan kurangnya prasarana jalan yang memadai untuk akses mobil pemadam kebakaran.

Dalam kondisi saat ini untuk menunjang kegitan operasional pemadam kebakaran BPBD sangat membutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat melalui pembentukan Tim BALAKAR (Barisan suka rela kebakaran) yang akan direkrut dari masyarakat dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh yang berada dalam 9 Kecamatan dari 90 Gampong/ Desa. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kewaspadaan terhadap ancaman bahaya kebakaran perlu diadakan pendidikan balakar agar dapat menekan dan meminimalisir jumlah bencana kebakaran yang terjadi. Untuk mendukung kelancaran dan pelayanan yang optimal maka BPBD memerlukan sarara dan prasarana yang mendukung seperti lebar jalan yang memungkinkan kenderaan pemadam memasuki kawasan kebakaran dan perlu membentuk pos-pos pembantu dan penambahan mobil pemadam kebakaran untuk menjangkau wilayah manajemen kebakaran.

Pada pelaksanaan pemantauan maupun pengawasan, untuk mendapatkan hasil yang optimal diperlukan adanya suatu analisis data yang berkaitan erat dengan hasil sampling data di lapangan. Namun permasalahannya sampai saat ini Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh belum memiliki tenaga laboran yang diperuntukan khusus untuk menganalisa/sampling data dari lapangan. Sehingga kita tidak bisa melakukan analisa data secara rutin/berkala, begitu

pula bila ada permasalahan berupa kasus pencemaran baik air, udara maupun limbah yang muncul dalam masyarakat kita tidak dapat langsung action ke lapangan untuk melakukan sampling/analisa data dari sumber pencemaran. Selain itu kebutuhan akan adanya Pos Pengaduan Masyarakat dan PPLH (Polisi Penyidik Lingkungan Hidup) juga dirasakan sangat perlu untuk saat ini. Banyaknya kasus lingkungan yang tidak terakomodir karena tidak adanya sarana/tempat pengaduan bagi masyarakat, sehingga kasus baru akan terungkap bila telah terekspose oleh media. Dan sayangnya kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum karena kita tidak memiliki PPLH yang dapat menangani lebih lanjut permasalahan tersebut.

4.3.8 Peran Serta Masyarakat Dan Stakeholder Terkait Dalam Pengelolaan Lingkungan Masih Rendah

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk pengelolaan lingkungan hidup bila peran masyarakat dan stakeholder masih kurang maka semua itu tidak akan pernah mencapai hasil optimal. Kesadaran masayarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan masih rendah, hal ini mungkin juga disebabkan oleh kurangnya *policy* dari *stakeholder*. Sosialisasi yang masih kurang dan belum adanya penerapan *reward and punishment*, membuat masyarakat masih menganggap permasalahan lingkungan bukanlah permasalahan utama. Masih banyaknya pemrakarsa kegiatan/usaha yang belum maksimal dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan bahkan ada yang belum memiliki dokumen lingkungan. Pencemaran lingkungan acap kali terjadi oleh limbah-limbah padat dan cair yang dibuang langsung ke lingkungan tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu. Kesadaran dan tanggung jawab akan pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup sangat perlu ditumbuhkan dalam diri masyarakat mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Kurangnya sosialisasi di gampong-gampong baik oleh geuchik dan para tuha peut serta instansi terkait mengenai pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan juga merupakan

sebab yang tidak dapat diabaikan. Peran para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat mengambil kebijakan yang selalu berpihak kepada lingkungan juga sangat diperlukan. Sementara itu yang tak kalah pentingnya adalah peran sekolah yang sampai saat ini dirasakan masih belum optimal, sehingga sangat diharapkan untuk ke depannya agar semua sekolah di Banda Aceh dapat menjadi sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dengan senantiasa melibatkan seluruh warga sekolah untuk ikut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya

4.3.9 Pariwisata, Seni dan Budaya Kurang Berkembang

Kota Banda Aceh memiliki peranan yang panjang dalam perjalanan sejarah baik sebagai pusat Kesultanan Aceh, penghubung umat Islam Asia Tenggara, pusat Kesenian dan hasil kerajinan rakyat dengan Kuta Dalam Darud Dunia. Bahkan berdasarkan data tahun 2011 terdapat 30 situs dan benda cagar budaya peninggalan sejarah, namun kegiatan seni budaya daerah masih belum optimal dapat tergambar dengan belum lengkapnya data dan informasi yang mengungkapkan nilai-nilai situs dan benda cagar budaya yang ada.

Pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kesenian dan Kebudayaan daerah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih belum dapat secara optimal meningkatkan persentase kunjungan wisatawan nusantara khususnya dan mancanegara secara berkesinambungan per-tahunnya. Meskipun telah mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara 15 persen, seyogyanya pencanangan tahun kunjungan wisata Kota Banda Aceh dan berlakunya Visa On Arrival di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkesinambungan per-tahunnya, meningkatkan durasi waktu lama kunjungan, meningkatkan tingkat hunian hotel dan pada akhirnya masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pelestarian nilai dan sistem budaya yang telah dilakukan melalui sektor usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam mengembangkan pariwisata, seni budaya daerah merupakan elemen penting yang harus dipertahankan. Para

wisatawan berkunjung untuk melihat pertunjukan dan pergelaran seni budaya daerah bahkan ada pula yang ingin mempelajarinya. Sarana dan media promosi kepariwisataan baik di dalam maupun di luar negeri, serta atraksi seni budaya yang merupakan elemen penting dalam pengembangan pariwisata telah dilakukan, namun belum dapat mengoptimalkan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharan sarana objek wisata wisata yang telah ada. Hal ini terjadi karena masyarakat masih belum secara langsung memperoleh manfaat dari pengembangan sektor pariwisata dan ini disebabkan kurangnya informasi nilai-nilai penting yang terkandung dalam upaya pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan even, atraksi dan pargelaran seni. Ditambah lagi aktor penting dalam pelestarian seni budaya daerah adalah para pelaku seni masih rendah intensitas dan frekuensi partisipasinya. Aktor lain yang juga memegang peranan penting adalah para pelaku usaha kreatif pariwisata yang didominasi generasi muda usia yang mulai tumbuh namun disisi lain dukungan sarana kegiatan apresiasi berkesenian dan berkreativitas masih belum didukung dengan sarana gedung kesenian yang memadai. Lokasi yang selama ini dijadikan tempat melakukan atraksi pagelaran seni Budaya yang rutin dilakukan setiap akhir pekan merupakan ruang terbuka di salah satu kawasan situs cagar budaya peninggalan Kerajaan Aceh.

Bukan hanya belum didukung sarana gedung kesenian para pelaku seni dan usaha kreatif pariwisata belum memiliki dokumen kajian seni yang dapat menjadi acuan dan peta kondi kesenian daerah. Hal ini sangat penting mengingat kebudayaan merupakan faktor terpenting untuk mengembangkan sektor pariwisata yang terukur dari adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yaitu 61 persen lebih tertarik pada Kebudayaan, dibandingkan dengan yang tertarik pada keindahan pemandangan alam flora dan fauna, yaitu 32,8 persen dan sisanya 5,37 persen pada hal-hal lain.

Kota Banda Aceh adalah daerah yang memiliki berbagai bangunan , makam, gedung sekolah, rumah yang memiliki nilai sejarah dan budaya mengingat usianya yang telah lanjut mulai dari masa Kerajaan Aceh sampai dengan masa dashyatnya musibah Tsunami di tahun 2004. Nilai sejarah budaya yang ingin

diselamatkan, mulai dari kawasan bertipologi sosial budaya seperti Kawasan Gampong Jawa dan Gampong Pande yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar budaya yang mendesak untuk dikendalikan karena terkait dengan sejarah Kesultanan Aceh, dan Kawasan Peunayong yang masih memiliki arsitektur bangunan bercirikan arsitektur Cina/Tionghoa serta masih bertahanya sistem dan nilai-nilai budaya masyarakat Cina/Tionghoa. Ditambah lagi adanya kawasan yang menjadi kawasan penyangga yang berfungsi untuk pengamanan sebaran situs yang belum tergali dan menjaga kelayakan pandang seperti di Kawasan Dalam Kerajaan Darud Dunia dan kawasan Uleelheue yang terkait erat dengan peninggalan tsunami.

Fasilitas pendukung yang seyogyanya dimiliki oleh sebuah objek wisata seperti antara lain fasilitas peribadatan, parkir, warung, MCK, pelayanan kesehatan terdekat, keamanan, escape road, escape building, pusat informasi, jaringan telekomunikasi, hotel/losmen/cottage, rute kendaraan umum, perusahaan travel, SAR, peralatan mitigasi bencana, tempat pembuangan sampah, dan permainan anak. Dari sejumlah objek wisata yang dimiliki Kota Banda Aceh belum semuanya memiliki fasilitas pendukung sebagaimana seharusnya. Jika sebagian sudah memiliki sarana tersebut masih perlu didukung dengan kegiatan fasilitasi berupa penyuluhan, bimbingan organisasi, dan dokumentasi untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek dan fasilitas yang ada.

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting dalam pengembangan pariwisata seni budaya dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sarana prasarana pariwisata terutama dalam pendokumentasian dan promosi. Namun jika pengetahuan dan keterampilan kerja sumber daya manusia bidang seni dan pariwisata masih rendah, khususnya di daerah yang memiliki situs cagar budaya dan objek wisata, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM tersebut terutama di internal instansi pembina dan lokasi objek wisata yang memiliki kelompok-kelompok sadar wisata.

Pengembangan dan peningkatan kuantitas serta kualitas fasilitas situs cagar budaya dan objek daya tarik wisata yang tetap harus dilakukan dengan memperbanyak event-event wisata, atraksi seni budaya dan optimalisasi pemasaran. Namun langkah utama dari kegiatan pengembangan tersebut adalah dokumen Rencana pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan seni budaya daerah yang didukung dan disinergikan dengan hasil pemetaan kondisi Seni Budaya daerah dan target segmen pasar dan kebutuhan wisatawan hasil analisis pemasaran agar optimalisasi pariwisata seni budaya dapat berkembang. Pengembangan kebudayaan memang dibutuhkan oleh masyarakat sedangkan pariwisata sesungguhnya memberi dukungan terhadap pengembangan kebudayaan dan mendorong munculnya kreativitas pada masyarakat khususnya generasi muda. Generasi mudalah yang nantinyadapat mengagumi dan menjaga serta menjadi penerus budaya daerahnya.

Pengembangan kebudayaan melalui penggalian kebudayaan itu sendiri menimbulkan pemahaman dan kesadaran akan kebudayaan dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri serta sadar berbudaya. Informasi dan kajian yang mendukung bahwa pariwisata bukan menjadikan seni budaya sebagai modal bagi pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu tahapan yang tidak dapat diabaikan dalam tahapan pengembangan pariwisata seni budaya. Sosialisasi informasi mengenai kepariwisataan pada kenyataannya telah memperkuat proses konservasi, reformasi dan penciptaan kembali berbagai tradisi daerah perlu dilakukan secara terus menerus melalui berbagai kegiatan agar Banda Aceh dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Asia Tenggara.

4.3.10 Kapasitas Perempuan Dan Perlindungan Anak Yang Belum Optimal

Perempuan sebagai anggota masyarakat memiliki kemampuan yang tinggi dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki sebagai warga kota. Potensi dan kemampuan tersebut perlu dioptimalkan. Saat ini keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif masih rendah sehingga masih perlu

ditingkatkan secara lintas sektoral dan diberi peran yang luas dalam berbagai bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, sehingga perempuan dapat ikut serta berkontribusi untuk pengembangan kemajuan masyarakat.

Anak sebagai generasi penerus harus mendapat perlindungan yang maksimal dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Anak-anak sebagai bagian dari generasi muda perlu dipersiapkan menjadi generasi yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berakhlak muliah, beriman, dan siap untuk mengambil estafet pembangunan.

4.3.11 Peran generasi muda dalam pembangunan belum optimal

Pemuda memiliki kemampuan dan kreativitas yang tinggi sebagai agen perubahan sosial dan benteng pertahanan masyarakat. Karena itu pemuda harus dapat berperan aktif sebagai kekuatan untuk mempercepat pembangunan kota dan menjaga tata nilai dan tata kehidupan masyarakat kota. Untuk mencapainya masih dibutuhkannya penguatan peran pemuda dalam perubahan masyarakat, pembinaan peran pemuda sebagai kontrol sosial, memberikan kesempatan pada pemuda untuk menyampaikan ide, pemikiran dan aktivitas yang bermanfaat untuk pembangunan Kota Banda Aceh, dan membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi genarasi muda kota yang khas.

4.4 Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan yang mengemuka, maka diperoleh beberapa isu strategis sebagai hasil dari penilaian, yang diperkirakan dapat memberi manfaat dan pengaruh dalam kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Masih terjadinya pendangkalan aqidah.

Pendangkalan aqidah menjadi isu strategis di Kota Banda Aceh, disebabkan oleh Kota Banda Aceh sebagai sebuah kota yang terbuka dengan penduduk yang heterogen, sangat mudah untuk masuk berbagai aliran keagamaan, apalagi dengan peran ekonomi global

yang tiada batas. Pendangkalan aqidah pernah merebak di Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu yang melibatkan banyak generasi muda Kota Banda Aceh, yaitu terjadinya pergeseran nilai-niai agama pada aliran tertentu. Isu ini telah menjadi ranah publik.

2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam melayani masyarakat

Kapasitas aparatur yang belum optimal tercermin dari belum maksimalnya pelayanan yang diberikan, sehingga memberikan kulitas yang rendah bagi masyarakat. Seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu, masih banyaknya penduduk yang belum dapat melanjutkan pendidikan dan kesehatan bayi yang masih rendah. Rendahnya kapasitas ini dapat mendorong pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

3. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Tingginya angka kemiskinan dan pengguran telah menjadi fenomena umum di negera sedang berkembang. Untuk Kota Banda Aceh, indikasi ini ditunjukkan oleh hampi 10 persen penduduk Kota Banda Aceh miskin dan hampir 9 persen penduduk di dalam kelompok pengangguran terbuka.

4. Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai

Indikasi ini juga ditunjukkan seringnya terjadi kemacetan karena panjang jalan per kendaraan yang semakin pendek. Indikasi lain adalah keluhan masyarakat yang terus menerus terjadi karena kekurangan lokasi parkir.

5. Belum optimalnya kualitas pendidikan

Indikasi ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingakt partisipasi masyarakat di dalam melanjutkan pendidikan, serta rendahnya tingkat rata-rata lama bersekolah penduduk. Belum lagi adanya indikasi keluhan masyarakat dengan masih banyaknya lulusan pendidikan menengah atas yang belum dapat diterima di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ternama.

6. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan

Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat pada masih tingginya AKB bayi, serta masih tingginya rasio penduduk terhadap dokter, dan tingginya rasio posyandu terhadap bayi. Tingginya rasio tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan.

7. Belum optimalnya pemanfaatan fungsi pasar

Ini merupakan indikasi yang ditunjukkan oleh belum tertibnya pedagang di dalam memanfaatkan pasar sebagai tempat melakukan transaksi dagangannya. Masih banyak penduduk yang lebih suka berjualan di badan jalan pasar atau di emperan-emperan toko.

8. Kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana

Kurangnya kesiapan menghadapi bencana dapat diindikasikan oleh banyaknya penduduk yang panik ketika terjadi suatu bencana, seperti adanya gempa. Bahkan, tanpa ada informasi apapun, masyarakat langsung mengambil sikap menurut yang mereka perkirakan, tanpa mempersiapkan apapun yang harus dipenuhi bila bencana itu benar adanya.

9. Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum proporsional

Partisipasi perempuan di dalam lembaga politik, baik eksekuti maupun legislatif masih tergolong rendah. Hal ini sebagai mana ditunjukkan di dalam Bab II. Rendahnya partisipasi perempuan ini hanya bila ditinjau dari keterlibatan mereka secara aktif di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikasi ini dapat terjadi karena para perempuan terikat dengan keluarga atau indikasi-indikasi lain.

BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah : **Banda Aceh Model Kota Madani.** Kota Madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Di samping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.

5.2 Misi

Upaya untuk mencapai visi dapat ditempuh dengan beberapa misi berikut :

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah	
Tujuan: 1. Meluruskan kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Hadits 2. Membangun kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat 3. Menciptakan masyarakat yang cerdas secara intelektual 4. Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqoh (ZIS)	Sasaran: 1. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat 2. Terciptanya ketentraman dan kenyamanan masyarakat 3. Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang syari'at Islam 4. Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel
Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	

Tujuan:	Sasaran:
1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan	1. Meningkatnya profesionalisame aparatur pemeriksa dan terciptanya transparansi birokrasi,
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan publik	2. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang memiliki Kompetensi, Kompetitif, Amanah, Profesional dan Bertanggung Jawab,
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	3. Terwujudnya Aparatur yang Disiplin dan Berintegritas
4. Mengembangkan dan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK)	4. Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-Goverment
5. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang baik	5. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, responsif, Akuntabel, efektif dan Efisien serta partisipatif

Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

Tujuan:	Sasaran:
1. Meningkatkan usaha ekonomi kecil dan menengah	1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi
2. Meningkatkan peluang kesempatan kerja	2. Meningkatnya kesempatan bagi pencari kerja
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3. Meningkatnya kesejhateraan masyarakat
4. Meningkatkan sosialisasi dan informasi peluang investasi daerah.	4. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh
5. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan/non perizinan penanaman modal	5. Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha
6. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha	6. Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi
7. Mempersiapkan qanun, perwal dan RUPM penanaman modal	7. Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal
8. Meningkatkan produksi hasil tangkap nelayan	8. Meningkatnya hasil tangkapan nelayan
9. Meningkatkan pemanfaatan fungsi lahan pekarangan	9. Meningkatnya ketahanan pangan
10. Meningkatkan daya serap tenaga kerja di sektor	10. Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat

perikanan, pertanian dan peternakan 11. Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan pedagang dan konsumen 12. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil 13. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha 14. Meningkatkan penerimaan ZIS dari pelaku usaha ekonomi	11. Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar 12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pelaku usaha 13. Meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat 14. Meningkatnya jumlah penerimaan ZIS dari masyarakat
Misi 4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat dan Sejahtera, Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya	
Tujuan: 1. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima, terjangkau dan bermutu 2. Menata sistem pendidikan yang berbasis Islami 3. Melibatkan masyarakat dan tokoh adat dalam melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya dan adat-istiadat 4. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 5. Meningkatkan budaya baca masyarakat.	**Sasaran:** 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. 2. Terciptanya program pendidikan diniyah pada sekolah dasar dan menengah 3. Tersedianya sarana dan prasarana budaya dan adat-istiadat Aceh dalam pengembangan bakat dan minat pelaku seni dan budaya 4. Tercapainya kualitas pendidikan sesuai SNP 5. Terciptanya masyarakat yang mampu mengakses informasi dan pengetahuan secara cepat dan mudah
Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami	
Tujuan: 1. Menciptakan infrastruktur pariwisata yang Islami 2. Meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda	**Sasaran:** 1. Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata islami 2. Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif 3. Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan

Aceh guna mendukung kegiatan kepariwisataan	tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa 4. Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK 5. Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yang memadai 6. Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, semua sampah dibuangdalam wadah yang tersedia 7. Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari 8. Seluruh gampong mengikuti program retribusi persampahan 9. Terlaksananya pembuangan sampah yang tidak dapat diolah di TPA Gp. Jawa ke TPA regional Blang Bintang 10. Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengolah dan mendaur ulang sampah 11. Terwujudnya BLUD perbengkelan Pemko 12. Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana 13. Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran 14. Pengembangan destinasi pariwisata 15. Penataan situs-situs dan kota pusaka 16. Meningkatkan promosi pariwisata 17. Terwujudnya kawasan dan bangunan bersejarah 18. Tersedianya sarana dan prasarana pementasan seni budaya 19. Meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau 20. Meningkatnya derajat keindahan dan keteduhan

	Kota Banda Aceh 21. Peningkatan luasan RTH
Misi 6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak	
Tujuan: 1. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam ranah publik 2. Meningkatkan kepedulian tehadap perempuan dan perlindungan anak 3. Menguatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Mengwujudkan pencapaian program MDG's dalam bidang gender dan Perlindungan anak	**Sasaran:** 1. Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik publik sebagai warga kota madani 2. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak-perempuan dan perlindungan anak 3. Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Terwujudnya pencapaian program MDG's kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak
Misi 7. Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota	
Tujuan: 1. Membina generasi muda menjadi aset yang dapat berperan dalam pembangunan kota 2. Mendorong kreativitas dan jiwa interpreneurship bagi generasi muda	**Sasaran:** 1. Terwujudnya generasi muda yang mempunyai ide-ide dan pemikiran kreatif dalam membangun Kota 2. Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 bertujuan untuk mewujudkan **Banda Aceh model kota madani**. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran RPJMD akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 disajikan dalam Tabel.

Tabel 6.1

Strategi dan arah Kebijakan Kota Banda Aceh

Misi I : Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syari'at Islam Secara Kaffah

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meluruskan kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Hadits	1.1	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat	- Mengoptimalkan peran masyarakat, ulama dan umara untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah.	- Meningkatkan wawasan keilmuan agama Islam melalui pendidikan, kajian slam dan dakwah kepada masyarakat
					- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tua, pendidik, ulama, dan masyarakat, kepada anak-anak dan remaja

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Membangun kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat	4.1	Terciptanya ketentraman dan kenyamanan masyarakat	- Peningkatan fungsi perangkat hukum dan partisipasi masyarakat sebagai alat kontrol penegakan syariat Islam.	- Meningkat-kan fungsi petugas penegak hukum dan pemberdayaa n masyarakat dalam penegakan syariat Islam
3	Menciptakan masyarakat yang cerdas secara intelektual	5.1	Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang syari'at Islam	- Mengoptimal kan pemahaman dan pengamalan tata cara kehidupan yang berlandas-kan syariat Islam	- Meningkat-kan pemahaman tentang syariat Islam dalam tata kehidupan masyarakat
4	Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqoh (ZIS)	6.1	Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel	- Menyampai-kan informasi data pengumpu-lan ZIS kepada publik	- Meningkat-kan kepercayaan kepada masyarakat terhadap proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS
				- Perlu audit keuangan ZIS	- Melakukan Audit terhadap pengelolaan ZIS
				- Melakukan pendataan jumlah fakir miskin	- Menyalurkan dana ZIS sesuai dengan peruntukan-nya

Misi II : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkat-kan kualitas pembinaan dan pengawasan	1.1	Meningkatnya profesionalisa me aparatur pemeriksa dan terciptanya transparansi birokrasi	- Mengoptima lkan kualitas aparatur pengawas	- Meningkatkan profesionalis-me aparatur pengawas
2	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan publik	2.1	Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab	- Meningkat-kan SDM aparatur pemerintah yang profesionalis me	- Meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan prima
3	Peningkatan dsiplin aparatur	3.1	Terwujudnya aparatur yang disiplin dan berintegritas	- Mempertega s penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS	- Peningkatan kedispilinan PNS dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban
4	Mengembang kan dan meningkat-kan pengelolaan administrasi pemerinta-han berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	4.1	Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-goverment	- Menerapkan sistem pelayanan publik yang berbasis TIK	- Pengembangan sistem TIK secara terpadu dan terintegrasi
5	Menciptakan tata kelola pemerinta-han yang baik	5.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif	- Meningkatk an kinerja aparatur pemerintaha n yang berkualitas dan bertanggung jawab	- Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah dalam peningkatan pelayanan

Misi III : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan usaha ekonomi kecil dan menengah	1	Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan modal usaha	Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan
2	Meningkatkan peluang kesempatan kerja	2	Meningkatnya kesempatan bagi pencari kerja	Terciptanya lapangan usaha bagi pencari kerja	Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya kesejhateraan masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat	- Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank - Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social - Menggoordinasikan rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan - Memfasilitasi pendapatan dan kekayaan gampong
4	Meningkatkan sosialisasi dan informasi peluang investasi daerah.	4	Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh	Peningkatan kerjasama dengan investor	- Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah - Mengoptimalkan system data base perizinan dan non perizinan - Meningkatkan system informasi dan data investasi secara on line
5	Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan/non perizinan	5	Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha	Peningkatan jumlah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan	- Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	penanaman modal				- Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan penanaman modal
6	Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha	6	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi	Peningkatan kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha	Membentuk forum kemitraan pelaku usaha
7	Mempersiapkan qanun, perwal dan RUPM penanaman modal	7	Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal	Pembuatan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal	Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat
8	Meningkatkan produksi hasil tangkap nelayan	8	Meningkatnya hasil tangkapan nelayan	Peningkatan produksi hasil tangkap nelayan	Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan
9	Meningkatkan pemanfaatan fungsi lahan pekarangan	9	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan	Menyediakan bibit unggul dan memfungsikan produktifitas lahan
10	Meningkatkan daya serap tenaga kerja di sektor perikanan, pertanian dan peternakan	10	Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat	Peningkatan peluang kerja di sektor perikanan	Penyediaan lapangan kerja di sektor perikanan, pertanian dan peternakan
11	Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan pedagang dan konsumen	11	Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar	Menata pedagang kaki lima	Pengoptimalan fungsi pasar
12	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil	12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pelaku usaha	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pelaku usaha	Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan
13	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha	13	Meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat	Peningkatan program pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan
14	Meningkatkan penerimaan ZIS dari pelaku usaha ekonomi	14	Meningkatnya jumlah penerimaan ZIS dari masyarakat	Mencari peluang potensi-potensi penerimaan Zis	Meningkatkan sosialisasi tentang pemahaman zakat mal

Misi IV : Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas, Sehat dan Sejahtera, yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan pelayanan kesehatan prima, terjangkau dan bermutu	1.1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas	- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan	- Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah
				- Membangun jejaring yang terkoneksi Unit Pelayanan Kesehatan ke Dinkes (dasar dan rujukan)	- Penerapan e-health secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan swasta
				- Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai standar dan JCI (Joint Community International	- Mutu pelayanan kesehatan yang terstandari-sasi ISO/ JCI.
				- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka implementasi, pengawasan dan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan gampong dalam rangka mewujudkan desa siaga.	- Menjadikan semua gampong menjadi desa siaga
				- Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan	- Menumbuh-kan kesadaran masyarakat dalam rangka preventif dan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					promotif terhadap penyakit DBD
2	Menata sistem pendidikan yang Islami	2.1	Terciptanya program pendidikan diniyah pada sekolah dasar dan menengah	- Penyusunan kurikulum pendidikan Islami	- Mendorong perkemba-ngan sekolah dan madrasah yang melaksana-kan pendidikan Islami
				- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembanga n sekolah, madrasah dan diniyah	- Mendorong perkembanga n sekolah diniyah
				- Membuat Perwal/qanun tentang pendidikan diniyah yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	- Meningkatkan manajemen pendidikan islami dan diniyah
3		3.1	Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya dan pariwisata daerah. -	Terkelolanya keragaman budaya daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata. Pembinaan dan pelestarian nilai budaya dan adat istiadat daerah.	- Peningkatan produktivitas dan kualitas pelaku seni dan pelestarian budaya daerah.
4	Meningkatka n kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	4.1	Tercapainya kualitas pendidikan sesuai SNP	- Memfasilitasi guru/ pendidik dalam peningkatan kompetensi sesuai SNP.	- Peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan informal.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				- Menambah jumlah sekolah asrama (*Boarding School*)	- Menyiapkan lulusan yg bermutu, cerdas, terampil, Islami dan mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional
				- Melengkapi alat-alat laboratorium, perpustakaan, buku dan media pembelajaran lainnya dalam menunjang semangat siswa.	- Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran siswa
5	Meningkatkan budaya baca dan pengelolaan arsip daerah	5.1	Terciptanya minat dan budaya baca masyarakat.	- Meningkatkan akses perpustakaan bagi masyarakat.	- Peningkatan pelayanan perpustakaan.
			Peningkatan pengelolaan arsip daerah	Meningkatkan manajemen arsip	Penataan arsip daerah

Misi V : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Yang Islami

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami	1.1	Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata islami	- Pendataan kebutuhan dan peningkatan infrastruktur yang terintegrasi	- Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai akses pengembangan ekonomi dan wisata

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			- Pengadaan sumur resapan di Kota Banda Aceh	- Tersedianya sumur resapan di Kota Banda Aceh (Sesuai Juknis DAK)
			- Pembangunan IPAL medis di Puskesmas dalam Kota Banda Aceh	- Tersedianya sarana pengolahan limbah cair medis di puskesmas dalam Kota Banda Aceh (Sesuai Juknis DAK)
			- Pengadaan sarana dan prasarana persampahan	- Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Banda Aceh (Sesuai Juknis DAK)
			- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi lingkungan	- Tersedianya informasi kualitas lingkungan di Kota Banda Aceh
			- Melakukan analisa tingkat pencemaran air, meliputi air permukaan dan air tanah	- Tersedianya data kualitas air di Kota Banda Aceh Aceh
			- Melakukan analisa tingkat pencemaran udara	- Tersedianya data kualitas udara di Kota Banda Aceh Aceh
		1.2 Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi,	- Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi	- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif	dan TIK	- Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
			- Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
			- Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan
			- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
			- Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
			- Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan
			- Rehabilatasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu linas
			- Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
			- Pengadaan perlengkapan TIK
			- Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				- Pembangunan sarana/prasarana angkutan massal
				- Pembangunan Gedung Media Center dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
				- Pembangunan sarana/prasarana parkir diluar badan jalan
	1.3	Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	- Peningkatan sarana, prasarana transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	- Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
				- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
				- Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal/pelabuhan
				- Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
				- Penataan Tempat-tempat Pemberhentian/perparkiran Kenderaan pada Badan Jalan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
				- Pengadaan Marka Jalan
				- Pengadaan Pengamanan dan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
				- Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
				- Pengadaan pengamanan dan penertiban juru parkir
				- Pembangunan Traffic Light
				- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardril)
				- Pengumpulan dan analisis data base pelayanan perparkiran
	1.4	Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK	- Perwujudan fasilitas dan SDM kepemerintahan yang berbasisi TIK	- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi
				- Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
				- Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				dan informatika
				- Pengkajian dan penelitian bidang Informasi
				- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
				- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pembangunan Daerah
				- Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat)
				- Pelatihan SDM Bidang Kominfo
				- Pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
				- Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
				- Penyediaan pusat data base
				- Pembangunan jaringan TIK
		1.5 Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah	- Melakukan penambahan jumlah armada pengangkutan yang	- Penambahan pick up dan becak sampah serta peremajaan truk sampah

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		yang memadai	mampu menjangkau lorong-lorong sempit serta melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengumpulan sampah	yang sudah tua
				- Evaluasi rute dan efektivitas system kerja
	1.6	Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, semua sampah dibuangdalam wadah yang tersedia	- Penyediaan wadah sampah yang memadai serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus	- Pengadaan tong sampah dan kontainer sampah dan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam penyediaan wadah sampah
	1.7	Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari	- Melakukan pemeliharaan dengan baik terhadap lampu jalan dan penambahan lampu di lokasi yang masih kurang memadai serta menambah jumlah lampu hias di jalan-jalan, taman-taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya	- Pemeliharaan rutin, meteranisasi, penambahan jumlah lampu jalan, pengadaan lampu hias dan penyediaan sarana operasional pemeliharaan
	1.8	Seluruh gampong mengikuti program retribusi	- Melakukan perluasan pelayanan pengangkutan sampah	- Secara bertahap menambah jumlah gampong yang

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			persampahan	secara "door to door" hingga ke seluruh gampong serta mengoptimalkan penagihan retribusi sampah melalui kerjasama dengan pihak gampong	mengikuti program retribusi sampah 2013 : 51 gampong 2014 : 55 gampong 2015 : 59 gampong 2016 : 63 gampong 2017 : 67 gampong
		1.9	Terlaksananya pembuangan sampah yang tidak dapat diolah di TPA Gp. Jawa ke TPA regional Blang Bintang	- Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara maksimal di TPA dan hanya sisa yang tidak bisa diolah dikirim ke TPA Blang Bintang	- Mengoptimal-kan fungsi transfer station Gp. Jawa dan menyediakan fasiltas pengolahan dan pengangkutan sampah yang memadai
		1.10	Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengolah dan mendaur ulang sampah	- Meningkatkan penyuluhan di sekolah dan gampong serta membantu penyediaan peralatan/sarana penunjang pengolahan sampah	- Pengembangan dan perluasan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pelaksanaan 3R khususnya pembuatan pupuk kompos dan pemanfaatan kembali sampah
		1.11	Terwujudnya BLUD perbengkelan Pemko	- Meningktkan kemampuan pengelolaan bengkel dengan meningkatkan kapasitas	- Menjadi bengkel rujukan pemko untuk memperbaiki semua jenis kendaraan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			tenaga pengelola serat mekanik yang bersertifikasi	dinas milik pemko
	1.12	Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana	- Pembangunan pos pengamat pantai di kawasan Ulee Lheue	- Tersedianya pos pemantau bencana di kawasan pariwisata Ulee Lheue,
			- Pembangunan escape building di kecamatan Syiah Kuala, Kuta Alam, Kuta Raja, dan Jaya Baru	- Tersedianya sarana evakuasi bencana tsunami
			- Pengadaan rambu penunjuk arah evakuasi kecamatan Jaya Baru, Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam dan Syiah Kuala	- Tersedianya rambu penunjuk arah evakuasi bencana di Kota Banda Aceh
	1.13	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	- Pengadaan mobil tangga, mobil suplai, hydrant dalam Kota Banda Aceh	- Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran
	1.14	Pengembangan destinasi pariwisata	- Perencanaan, penataan dan DED	- Pembebasan lahan kawasan wisata Ulee Lheue, Gp. Pande dan Kr. Aceh
				- Studi pengembangan kawasan wisata pantai

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Syiah Kuala, Alue Naga dan Gampong Jawa
				- DED pengembangan kawasan wisata pantai Syiah Kuala, Alue Naga dan Gampong Jawa
				- Pembebasan lahan untuk kawasan wisata pantai Syiah Kuala, Alue Naga dan Gampong Jawa
	1.15	Penataan situs-situs dan kota pusaka		- Pemeliharaan situs-situs dan kota pusaka
	1.16	Meningkatkan promosi pariwisata		- Promosi wisata dalam dan luar negeri
	1.17	Terwujudnya kawasan dan bangunan bersejarah		- Pembangunan pusat informasi wisata
	1.18	Tersedianya sarana dan prasarana pementasan seni budaya		- Pemetaan kawasan dan bangunan bersejarah
				- Pembebasan lahan gedung pementasan seni
				- Pembangunan sarana dan prasarana wisata Ulee Lheue
				- Pembangunan sarana dan prasarana wisata Krueng Aceh

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					- Pembangunan sarana dan prasarana wisata Gampong Pande
					- Pembangunan sarana dan prasarana wisata Syiah Kuala, Alue Naga, Gampong Jawa
2	Meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh guna mendukung kegiatan kepariwisataan	2.1	Meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau	- Pengadaan taman rekreasi di Kota Banda Aceh	- Tersedianya taman rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan di Kota Banda Aceh (Sesuai Juknis DAK)
		2.2	Meningkatnya derajat keindahan dan keteduhan Kota Banda Aceh	- Melakukan pemeliharaan terhadap RTH, menambah taman baru dan menambah jumlah pohon penghijauan	- Peningkatan penataan RTH yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan RTH seluas 20% dari wilayah Kota Banda Aceh serta mampu menciptakan kondisi kota yang asri indah dan nyaman
		2.3	Peningkatan luasan RTH	- Pengembangan luas Kawasan RTH	- Meningkatkan jumlah RTH sebagai Paru-paru Kota

Misi VI : Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik Dan Perlindungan Anak

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kapasitas perempuan dalam ranah publik	1.1	Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik publik sebagai warga kota madani	- Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	- Peningkatan pemberda-yaan perempuan dalam pembangu-nan
				- Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang bahaya dan dampak negatif narkoba dan melengkapi sarana dan prasarana rehabilitasi pengguna narkoba	- Peningkatan kepahaman masyarakat dan penurunan korban penyalahgun aan narkoba di lingkungan masyarakat dan remaja
2	Meningkatkan kepedulian tehadap perempuan dan anak	2.1	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku kebijakan terhadap hak-hak-perempuan dan anak	- Meningkatkan kualitas perempuan melalui sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif	- Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
3	Menguatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3.1	Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Meningkatkan peran kelembagaan pengarusutamaa n gender dan perlindungan anak	- Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengarusuta maan gender dan perlindungan anak
4	Mengwujudka n pencapaian program MDG's dalam bidang gender dan perlindungan anak	4.1	Terwujudnya pencapaian program MDG's kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak	- Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mengurangi angka kematian bayi	- Pencapaian Program MDG's dalam perencanaan pembangu-nan

Misi VII : Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Membina generasi muda menjadi aset yang dapat berperan dalam pembangunan kota	1.1	Terciptanya generasi muda yang cerdas, ber-etika dan berintegritas.	- Meningkatkan peranan generasi muda sebagai wadah penyaluran aspirasi dan kontrol sosial.	- Peningkatan peran generasi muda yang berjiwa sosial dan mampu berinteraksi dengan masyarakat
2	Mendorong kreativitas dan jiwa interpreneurship bagi generasi muda	3.1	Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja	- Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	- Meningkatnya peran generasi Muda dalam bidang kewirausahaan dan kecakapan hidup.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

7.1 Kebijakan Umum Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan syariat Islam melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.
   - Meningkatkan wawasan keilmuan agama Islam dan amal kebajikan melalui pendidikan, kajian dan dakwah untuk masyarakat terutama kepada anak-anak dan para remaja.
   - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui peran orang tua, tokoh-tokoh ulama, pendidik dan masyarakat, terutama kepada para remaja dan generasi muda
   - Meningkatkan intensifikasi penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran perda/qanun dalam rangka peningkatan ketertiban dan penegakan syariat islam
   - Meningkatkan penyebaran informasi keagamaan yang jelas dalam rangka menghambat penyebaran aliran sesat dan pengaruh globalisasi

- Meningkatkan adat istiadat yang menunjang pelaksanaan syariat Islam
- Meningkatkan kegiatan pengajaran Al-Qur'an dalam keluarga dan masyarakat
- Meningkatkan pemahaman tentang norma hukum, syariat Islam, tata tertib, hubungan sosial melalui sosialisasi hukum, norma adat dan norma sosial
- Tersedianya legal drafting qanun dan peraturan perundangan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan masyarakat
- Membina serta mengarahkan dan mendidik masyarakat untuk menggunakan/ mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban
- Meningkatkan manajemen pendidikan Islami dan diniyah

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
   - Peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan pelatihan
   - Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas, terampil, Islami dan mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional
   - Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
   - Intensifikasi sumber daya kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
   - Penerapan e-health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah
   - Pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   - Mutu pelayanan kesehatan yang terstandarisasi/ISO, JCI

3. Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah.
   - Seluruh potensi sosial budaya, wisata, peninggalan sejarah dan tsunami dikelola dan dipromosikan secara profesional serta dijadikan referensi untuk kreasi inovatif tanpa menghilangkan ciri-ciri keacehan
   - Seluruh pengelolaan SDA dilaksanakan dengan sistem yang menjamin keberlanjutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar
   - Seluruh potensi investasi dan informasi pasar dapat diakses secara online dan terintegrasi antar SKPD
   - Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan
   - Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan
   - Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
   - Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan dan sentra pelatihan produksinya serta pendampingan kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pembiayaan komoditas unggulannya;
   - Setiap komoditas unggulan menerapkan standar mutu, desain dan kemasan yang kompetitif serta pasar dimanca negara
   - Setiap kecamatan/gampong memiliki industri rumah tangga dan pasar yang mampu menjamin pemasaran produk unggulan wilayahnya serta ketersediaan sembako (bahan pokok) dan input produksi dengan harga terjangkau;
   - Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK
   - Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank
   - Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan

- Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan
- Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan
- Pengoptimalan fungsi pasar
- Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang sesuai standar.
   - Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai akses pengembangan ekonomi dan wisata
   - Seluruh lokasi objek wisata, kawasan komersial memiliki sarana ibadah, pusat informasi, air bersih, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan transportasi;
   - Pembangunan prasarana transportasi dan drainase kota;
   - Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Banda Aceh
   - Tersedianya sistem mitigasi bencana yang efektif
   - Tersedianya sarana pengolahan limbah cair medis di puskesmas dalam Kota Banda Aceh
   - Peningkatan penataan RTH yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan RTH seluas 20% dari wilayah Kota Banda Aceh
   - Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

6. Mengoptimalkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang.
   - Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung program pemberdayaan perempuan

- Meningkatkan akses perempuan dan anak terhadap arus informasi
- Meningkatkan kualitas perempuan melalui sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
- Kaderisasi perempuan potensial di parpol
- Menyediakan sarana dan prasarana yang responsive gender
- Peningkatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja
- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- Peningkatan kapasitas perempuan diperdesaan dan menciptakan kemandirian perekonomian perdesaan
- Percepatan dan perluasan pendidikan tentang keadilan gender pada pendidikan formal dan non formal
- Menurunnya tingkat pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan remaja
- Tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai

7.2 Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017, adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam
2. Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi
3. Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan
4. Pendidikan, pemuda dan olahraga
5. Kesehatan
6. Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup
7. Pariwisata, seni dan budaya
8. Pengarusutamaan gender (PUG)

Misi I : Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.	Mengoptimalkan peran masyarakat, ulama dan umara untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah.	Meningkatkan wawasan keilmuan agama Islam melalui pendidikan, kajian slam dan dakwah kepada masyarakat.	Meningkatnya pembinaan Syariat Islam secara maksimal	11 x Kajian Pejabat Sosialisasi Mobile Talk show di TV , Radio Tabloid 2 edisi	Kajian Pejabat tiap bulan, Sosialisasi Mobile Talk show Tabloid 12 edisi tiap tahun	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Syariat Islam	DSI dan MPU
		Mengoptimalkan hubungan yang harmonis antara ulama dan umara untuk meminimalisir pengaruh buruk globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta aliran atau faham terselubung/ sesat	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tua, pendidik, ulama, dan masyarakat, kepada anak-anak dan remaja.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri faham/isme yang menyesatkan	masih berkem-bangnya 2 aliran sesat di Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh bebas dari aliran sesat	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Syariat Islam	DSI dan MPU

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya ketaqwaan individu.	Menyelenggarakan kajian tentang ilmu tauhid, fiqih dan akhlak melalui kajian majelis ta'lim di mesjid-mesjid atau meunasah, balee seumeubeut dan lembaga pendidikan.	Meningkatkan peran individu dan masyarakat dalam mendalami ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.	Meningkatnya aqidah masyarakat	- Pengajian Rutin gampong 1 x sebulan.	Pengajian rutin mingguan untuk remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Syariat Islam	DSI, MPU dan MAA
3	Meningkatnya kualitas dan produktivitas hidup masyarakat.	Membina tata kehidupan masyarakat sehari-hari melalui dakwah dan syiar Islam dengan menggunakan media masa dan bimbingan kepada keluarga.	Meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam dan bimbingan keluarga yang sakinah.	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengamalan dan pelaksanaan syariat islam.	90 gampong	90 gampong	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Syariat Islam	DSI dan MPU
4	Terciptanya ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan fungsi perangkat hukum dan partisipasi masyarakat sebagai alat kontrol penegakan syariat Islam	Meningkatkan fungsi petugas penegak hukum dan pemberdayaan masyarakat dalam penegakan syariat Islam	Meningkatnya ketertiban umum dan kepastian hukum dalam masyarakat	40%	80%	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Satpol PP dan WH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang syari'at Islam	Mengoptimalkan pemahaman dan pengamalan tata cara kehidupan yang berlandaskan syariat Islam	Meningkatkan pemahaman tentang syariat Islam dalam tata kehidupan masyarakat	Meningkatnya kegiatan tausyiah dan ceramah-ceramah agama	4 x per bulan	48 x per tahun	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Syariat Islam	DSI dan MPU
6	Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel	Menyampaikan informasi data pengumpulan ZIS kepada publik	Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS	Meningkatnya manajemen pengelolaan ZIS	25%	100%	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Syariat Islam	Baitul Mal
		Perlu audit keuangan ZIS	Melakukan Audit terhadap pengelolaan ZIS						
		Melakukan pendataan jumlah fakir miskin	Menyalurkan dana ZIS sesuai dengan peruntukannya						

Misi II : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemeriksa dan terciptanya transparansi birokrasi	1	Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pengawas	Meningkatnya Jumlah Aparatur pengawas yg sudah mengikuti pelatihan	29% (12 org)	70% (30 org)	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Urusan Wajib	Inspektorat dan BKPP
2	Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab	1	Meningkatkan SDM aparatur pemerintah yang profesionalime	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang telah menamatkan S1 dan S2	S1 = 3.237 S2 = 183	S1 = 4.000 S2 = 200	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Urusan Wajib	KPPTSP, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, DPKAD, Setwan, Setdakota, BKPP, KesbangPolinmas, Kecamatan
3	Terwujudnya aparatur yang disiplin dan berintegritas	1	Mempertegas penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Menurunnya jumlah PNS yang Indisipliner	15%	5%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Urusan Wajib	Semua SKPD
4	Terciptanya pemerintahan yang berbasise-goverment		Menerapkan sistem pelayanan publik yang berbasis TIK	Meningkatnya Jumlah kantor pelayanan yang berbasis TIK	5 SKPK	10 SKPK	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Urusan Wajib	KPPTSP, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, DPKAD, Setwan,

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Setdakota, BKPP, KesbangPolinmas, Kecamatan
5	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggungjawab	Meningkatnya Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	75%	95%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Urusan Wajib	KPPTSP, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, DPKAD, Setwan, Setdakota, BKPP, KesbangPolinmas, Kecamatan
6	Terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien	Memangkas proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit	Meningkatnya Jumlah Regulasi yang ditetapkan untuk memperpendek/ menagkas jalur birokrasi	5 Regulasi dari 5 SKPK Pelayanan Publik	10 Regulasi dari 10 SKPK Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Urusan Wajib	KPPTSP, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, DPKAD, Setwan, Setdakota, BKPP, KesbangPolinmas, Kecamatan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Terbentuknya Program Pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat	Membina hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif	Meningkatnya Jumlah Dokumen MOU yang disepakati tepat waktu	Lokal ; 1 Dokumen MOU Inter nasional 10 Dokumen MOU	Lokal ; 5 Dokumen MOU Inter nasional 15 Dokumen MOU	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Urusan Wajib	KPPTSP, BAPPEDA, Setwan, Setdakota,

Misi III : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi	**Strategi :** Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan modal usaha **Arah Kebijakan:** Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan	Meningkatnya jumlah IKM yang mampu menjamin pemasaran komoditi	80 IKM	180 IKM	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Perindus-trian	Perindagkop dan UKM

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatnya jumlah industry kecil dan menengah yang menunjang one ville one product	35 IKM	125 IKM		Perindus-trian	Perindagkop dan UKM
			Tersedianya profil serta tertatanya industry kecil (packing & lebeling)	10 perajin	70 perajin		Perindus-trian	Perindagkop dan UKM
			Terlaksananya pembangunan pasar	13 pasar	15 pasar		Perdaga-ngan	Perindagkop dan UKM
			Berkembangnya keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	80 koperasi	160 koperasi		Perindus-trian	Perindagkop dan UKM
			Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	-	120 koperasi		Koperasi	Perindagkop dan UKM
			Berkembangnya usaha kecil menengah dengan fasilitasi melalui perbankan	70 UKM	150 UKM		Perindus-trian	Perindagkop dan UKM

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Terlaksananya pendampingan terhadap Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan	20 kel + 9 kelompok PUAP	80 kel + 70 kelompok PUAP			DKPP
2	Meningkatnya kesempatan Kerja bagi pencari kerja	**Strategi :** Terciptanya lapangan usaha bagi pencari kerja **Arah Kebijakan :** Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK	Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan bagi pencari kerja	30%	80%		Ketenaga-kerjaan	Dinsos-naker
			Meningkatnya peluang kerja bagi pencari kerja	22%	40%		Ketenaga-kerjaan	Dinsos-naker
			Meningkatnya iklim ketenagakerjaan di perusahaan yang kondusif	5%	30%		Ketenaga-kerjaan	Dinsos-naker
			Meningkatnya jumlah tenaga fungsional pada bidang ketenagakerjaan	4 org	10 org		Ketenaga-kerjaan	Dinsos-naker

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatnya tertib administrasi ketenagakerjaan di perusahaan	2%	10%		Ketenaga-kerjaan	Dinsos-naker
			Terlaksananya pembangunan pasar	13 pasar	15 pasar		Perdaga-ngan	Perindagkop dan UKM
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Strategi : Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat Arah kebijakan : 1. Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank	Terfasilitasinya pembinaan BUMG, UMKM, TTG.	2.036 UMKM & 8 UTTG	4.000 UMKM & 18 UTTG		Kesejah-teraan masyara-kat	BPM
		2. Pemberian bantuan Usaha Ekonomi produktif (UEP) dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial	6%	50%		Sosial	Dinsosnaker
			Meningkatnya pelayanan potensi sosial masyarakat	25 orsos	13 orsos		Sosial	Dinsosnaker
			Tersedianya buku profil dinas	0	1 paket		Sosial	Dinsosnaker

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Mengkoordinasikan rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan	Terkoordinasinya perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan	belum optimalnya pengawasan terhadap penyaluran bantuan	9 kec		Kesejahteraan masyarakat	BPM
			Meningkatnya pelayanan panti sosial	18%	100%		Sosial	Dinsosnaker
			Tertanganinya keluarga korban bencana	40%	80%		Sosial	Dinsosnaker
			Meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh jaminan sosial	12.6%	60%		Sosial	Dinsosnaker
			Menurunnya Penyakit Menular Ternak/Hewan	20%	75%		Peternakan	DKPP
			Terciptanya SDM yang menguasai Teknologi	0 %	55 %		Peternakan	DKPP
			Tersedianya sarana dan prasarana RPH dan Pasar Hewan	0 %	75%		Peternakan	DKPP
			Terlaksananya daging yang hygine dan halal	0 %	65%		Peternakan	DKPP

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatnya Pendapatan Usaha Agribisnis petani	9 kel	80 kel		Pertanian	DKPP
			Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan pangan	30 desa	9 kec		Pertanian	DKPP
			Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian	0	9 kec		Pertanian	DKPP
			Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	0	6 kec		Pertanian	DKPP
			Tersedianya Sumber Daya Hutan	0	55 %		Kehutanan	DKPP
		4.Memfasilitasi pendapatan dan kekayaan gampong	Terfasilitasinya pendapatan dan kekayaan gampong	belum terfasilitasi-nya pendapatan dan kekayaan gampong	terfasilitasinya pendapatan dan kekayaan pada 90 gampong		Kesejahte-raan masyarakat	BPM

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Banda Aceh	**Strategi :** Peningkatan Kerjasama dengan Investor **Arah Kebijakan :** 1.Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah	Meningkatnya keikutsertaan dalam pameran pelayanan publik	1 kali	5 kali		Investasi	KPPTSP
		2.Mengoptimalkan system data base perizinan dan non perizinan	Meningkatnya pelayanan system informasi	52 jenis	69 jenis		Perizinan dan non perizinan	KPPTSP
		3.Meningkatkan sistim informasi dan data investasi secara on line	Meningkatnya pelayanan system informasi dan data investasi	8 jenis	17 jenis		Investasi	KPPTSP
			Tersedianya data base dan profil KUKM yang akurat	-	50 buku		Industri	Perindagkop dan UKM
			Tersedianya data monitoring bidang pertanian	0	5 buku		Pertanian	DKPP
			Tersedianya data base dinas	0	5 buku		Pertanian	DKPP
5	Meningkatnya jumlah perizinan bagi pelaku usaha	**Strategi :** Peningkatan jumlah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan.	Meningkatnya Pelayanan dibidang perizinan	20%	100%		Perizinan	KPPTSP

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Arah Kebihjakan: 1.Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan						
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan penanaman modal	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal	8 jenis izin penanaman modal	17 jenis izin penanaman modal		Perizinan	KPPTSP
6	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam bidang ekonomi	**Strategi :** Peningkatan kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha **Arah kebijakan :** Membentuk forum kemitraan pelaku usaha	Terpromosinya UMKM pada pameran dan factory outlet serta terdistribusinya bahan pokok dengan harga yang stabil	140 UMKM dan 4 bahan pokok	140 UMKM dan 1 FO dan 4 bahan pokok		Perdaga-ngan	Perindagkop dan UKM
7	Tersedianya Qanun, Perwal dan RUPM Penanaman Modal	**Strategi :** Pembuatan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal **Arah Kebijakan :** Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal	1 qanun, 1 perwal	1 qanun, 2 perwal, 1 RUPM		Investasi	KPPTSP
8	Meningkatnya hasil tangkapan	**Strategi :** Peningkatan produksi hasil tangkap nelayan	Terlaksananya pembinaan pada Kelompok Masyarakat Pesisir	15 Kel	60 kel		Kelautan	DKPP

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	nelayan	**Arah Kebijakan :** Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan						
			Tersedianya sarana pendukung untuk pembudidaya ikan	10 kel	40 kel		Perikanan	DKPP
			Berkembangnya usaha perikanan rakyat	30%	70%		Perikanan	DKPP
9	Meningkatnya peluang kerja bagi masyarakat	**Strategi :** Peningkatan peluang kerja di sektor perikanan **Arah Kebijakan : Penyediaan** lapangan kerja di sektor perikanan	Berkembangnya usaha perikanan rakyat	30%	70%		Perikanan	DKPP
10	Meningkatnya ketertiban dan keamanan pasar	**Strategi :** Menata pedagang kaki lima **Arah kebijakan :** Pengoptimalan fungsi pasar	Tertatanya pedagang kaki lima dan pedagang asongan	10 pasar	12 pasar		Perdagangan	Perindagkop dan UKM
			Adanya pelayanan pasar yang optimal	13 pasar	13 pasar		Perdagangan	Perindagkop dan UKM
11	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil	**Strategi :** Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pelaku usaha	Tertanggulaninya teknologi modern dalam kegiatan	140 Perajin border dan tenun	150 Perajin border		Industri	Perindagkop dan UKM

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pelaku usaha	**Arah Kebijakan :** Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan	perindustrian		dan tenun			
12	Meningkatnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat	**Strategi :** Peningkatan program pemberdayaan masyarakat **Arah kebijakan :** Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan	Terselenggaranya kegiatan lomba cipta menu 3B dan serba ikan	0	2 kegiatan		Perikanan	DKPP
			Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani dan nelayan (Penas XIV-Malang Jatim)	0	80 petani		Pertanian	DKPP
			Meningkatnya Keterampilan penyuluh (Balai Diklat Penyuluh Penyuluh Jambi dan BLPP SAREE)	0	40 orang		Pertanian	DKPP
13	Meningkatnya jumlah penerimaan ZIS dari masyarakat	**Strategi :** Mencari peluang potensi-potensi penerimaan Zis **Arah kebijakan :** Meningkatkan sosialisasi tentang pemahaman zakat mal	Tercapainya pembinaan dan pengembangan syariat islam	90 gampong	90 gampong			BAITUL MAL

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Tercapainya optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah	0	15 orang			BAITUL MAL
			Tersedianya penelitian dan pengembangan syariat islam	0	90%			BAITUL MAL
			Tercapainya penyemarakan syariat islam	90 gpg	90 gpg			BAITUL MAL
			Terlaksananya usaha dakwah generasi muda dan kader dakwah	90 gpg	90 gpg			BAITUL MAL

Misi IV : Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya.

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan.	Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah	Tercapainya Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah	0%	70%	Kesehatan	Kesehatan	Dinkes, RSUD Meuraxa
		Membangun jejaring yang terkoneksi Unit Pelayanan Kesehatan ke Dinkes (dasar dan rujukan)	Penerapan E-Health secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan swasta	Tersedianya jejaring yang terkoneksi ke unit pelayanan kesehatan dari dasar dan rujukan	0%	30%	Kesehatan	Kesehatan	Dinkes

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai standar dan JCI (Joint Community International.	Mutu pelayanan kesehatan yang terstandarisasi ISO/ JCI	Terlaksananya pelayanan kesehatan yang terstandarisasi sesuai dengan ISO/JCI	1 puskesmas	11 puskesmas	Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
		Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka implementasi, pengawasan dan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan gampong dalam rangka mewujudkan desa siaga.	Menjadikan semua gampong menjadi desa siaga.	Meningkatnya cakupan desa siaga aktif	82%	100%	Kesehatan	Kesehatan	Dinkes, RSUD Meuraxa
		Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam rangka preventif dan promotif terhadap penyakit DBD.	Menurunnya angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD)	0,1%	0,06%	Kesehatan	Kesehatan	Dinkes, RSUD Meuraxa

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terbentuknya POKJA dan POKJANAL DBD serta adanya kader jumantik di tiap desa	20%	100%	Kesehatan	Kesehatan	Dinkes, RSUD Meuraxa
2	Terciptanya program pendidikan diniyah pada sekolah dasar dan menengah.	Penyusunan kurikulum pendidikan Islami.	Mendorong perkembangan sekolah dan madrasah yang melaksanakan pendidikan Islami.	Terwujudnya kurikulum pendidikan yang berbasis islami	50%	100%	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	Disdikpora dan MPD
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah, madrasah dan diniyah.	Mendorong perkembangan sekolah diniyah	Terwujudnya pendidikan diniyah pada semua jenjang pendidikan	30%	100%	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	Disdikpora
		Membuat Perwal/qanun tentang pendidikan diniyah yg terintegrasi dengan kurikulum nasional.	Meningkatkan manajemen pendidikan islami dan diniyah.	Terwujudnya proses pembelajaran yang berahlakul karimah	0	100% (1 paket)	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	Disdikpora dan MPD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Tercapainya kualitas pendidikan sesuai SNP.	Memfasilitasi guru/ pendidik dalam peningkatan kompetensi sesuai SNP.	Peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan informal.	Tersedinya guru-guru yang kompeten dan sesuai kualifikasi SNP	30%	100%	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	Disdikpora, MPD
		Menambah jumlah sekolah asrama (*Boarding School*)	Menyiapkan lulusan yg bermutu, cerdas, terampil, Islami dan mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional	Meningkatnya tingkat kelulusan siswa sekolah dasar dan menengah 100% dan nilai rata-rata sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	99,63%	100%	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	Disdikpora

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Melengkapi alat-alat laboratorium, perpustakaan, buku dan media pembelajaran lainnya dalam menunjang semangat siswa.	Pemenuhan kelengkapan saranadan prasarana penunjang pembelajaran siswa		75%	100%	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	Disdikpora, Kantor Arsip dan Pustaka
4	Terkelolanya keragaman budaya daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan budaya dan pariwisata.	Pembinaan dan pelestarian nilai budaya dan adat istiadat daerah.	Peningkatan produktivitas dan kualitas pelaku seni dan pelestarian budaya daerah.				Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan	Disbudpar
5	Terciptanya minat dan budaya baca masyarakat.	Meningkatkan akses perpustakaan bagi masyarakat.	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Tersedianya perpustakaan keliling dan buku berkualitas.	75%	95%	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Arsip dan Pustaka	Kantor Arsip dan Pustaka
6	Peningkatan pengelolaan arsip daerah	Meningkatkan manajemen arsip	Penataan arsip daerah	Terciptanya dokumen arsip SKPD	65%	85%	Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Arsip dan Pustaka	Kantor Arsip dan Pustaka

Misi V : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami	- Pendataan kebutuhan dan peningkatan infrastruktur yang terintegrasi	Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan air bersih yang baik serta jaringan/saluran pembuangan limbah yang ramah lingkungan	54%	63%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	PU	PU, Dishubkominfo, DK3, Kantor LH
		- Melakukan analisis tingkat pencemaran air, meliputi air permukaan dan air tanah	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	20%	56%		Lingkungan Hidup	
		- Melakukan analisa tingkat pencemaran udara		50%	91,65%			
		- Pengadaan sumur resapan di Kota Banda Aceh	Meningkatnya kualitas lingkungan	13%	78%			
		- Pembangunan IPAL medis di Puskesmas dalam Kota Banda Aceh		17%	56%			
		- Pengadaan sarana dan prasarana		5%	26%			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		persampahan						
2	Tersedianya pembangunan infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif	- Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi dan TIK	Meningkatnya jumlah infrastruktur transportasi, teknologi, informasi dan komunikasi yang handal, akurat dan repesentatif	30%	60%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Perhubungan	PU, Dishubkominfo, BPBD, Bag. Adm. Pembangunan
3	Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	- Peningkatan sarana, prasarana transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	50%	80%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup		
4	Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK	- Perwujudan fasilitas dan SDM kepemerintahan yang berbasisi TIK	Terwujudnya kepemerintahan yang berbasis TIK	2%	15%	Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yang memadai	- Melakukan penambahan jumlah armada pengangkutan yang mampu menjangkau lorong-lorong sempit serta melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengumpulan sampah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah	151 unit	359 unit	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	DK3, Kantor LH
6	Terlaksananya pembuangan sisa-sisa sampah yang tidak dapat diolah ke TPA regional Blang Bintang	- Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara maksimal di TPA dan hanya sisa yang tidak bisa diolah dikirim ke TPA Blang Bintang	Meningkatnya jumlah sampah yang dikirim ke TPA Blang Bintang	0%	50%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup		
7	Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih dimana semua sampah ditempatkan dengan baik dalam wadah	- Penyediaan wadah sampah yang memadai serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus	Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam penyediaan wadah sampah yang layak	5%	15%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Seluruh gampong mengikuti program retribusi persampahan	- Melakukan perluasan pelayanan pengangkutan sampah secara "door to door" hingga ke seluruh gampong serta mengoptimalkan penagihan retribusi sampah melalui kerjasama dengan pihak desa	Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam membayar retribusi sampah	8.000 rumah	18.000 rumah	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup		
9	Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengolah dan mendaur ulang sampah	- Meningkatkan penyuluhan di sekolah dan gampong serta membantu penyediaan peralatan/sarana penunjang pengolahan sampah	Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam mendaur ulang sampah	426 rumah	1426 rumah	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup		
10	Meningkatnya derajat keindahan dan keteduhan Kota Banda Aceh	- Melakukan pemeliharaan terhadap RTH, menambah taman baru dan menambah jumlah pohon penghijauan	Meningkatnya keindahan dan luasan RTH	12%	12,5%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Meningkatnya keindahan, kenyamanan dan keamanan di jalan-jalan umum, taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya pada malam hari.	- Melakukan pemeliharaan dengan baik terhadap lampu jalan dan penambahan lampu di lokasi yang masih kurang memadai serta menambah jumlah lampu hias di jalan-jalan, taman-taman kota dan fasilitas/sarana publik lainnya	Berfungsinya fasilitas penerangan jalan umum dan fasilitas/sarana publik lainnya	75%	90%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup		
12	Terwujudnya BLUD perbengkelan Pemko	- Meningktkan kemampuan pengelolaan bengkel dengan meningkatkan kapasitas tenaga pengelola serat mekanik yang bersertifikasi	Meningkatnya jumlah kendaraan dinas Pemko yang terpelihara	0%	100%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup		
13	Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana	- Pembangunan pos pengamat pantai di kawasan Ulee Lheue	Tersedianya pos pemantauan di pinggir pantai	0	1 unit	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Sosial	PU, Dishubkominfo, BPBD
		- Pembangunan escape building di Kecamatan Syiah	Tersedianya prasarana evakuasi	4 unit	8 unit			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kuala, Kuta Alam, Kuta Raja, dan Jaya Baru						
14	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	- Pengadaan mobil tangga, mobil suplai, hydrant dalam Kota Banda Aceh	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	13 unit	19 unit	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup		PU, Dishubkominfo, BPBD
15	Pengembangan destinasi pariwisata	- Perencanaan, penataan dan DED	Tersedianya Sarana pendukung pada objek-objek wisata dan terwujudnya kawasan situs/bangunan cagar budaya	20%	98%	Pariwisata, seni dan budaya	Kebudayaan	PU, Bag. Adm. Pembangunan, Disbudpar
16	Penataan situs-situs dan kota pusaka			5%	90%	Pariwisata, seni dan budaya		
17	Terwujudnya kawasan dan bangunan bersejarah			5%	95%	Pariwisata, seni dan budaya		
18	Meningkatkan promosi pariwisata		Tersebarnya informasi pariwisata	60%	90%	Pariwisata, seni dan budaya		
19	Tersedianya sarana dan prasarana pementasan seni budaya		Tersedianya tempat pagelaran seni dan pameran	0%	100%	Pariwisata, seni dan budaya		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Meningkatnya jumlah RTH yang indah, bersih dan hijau	- Pengadaan taman rekreasi di Kota Banda Aceh	Meningkatnya jumlah taman rekreasi untuk tempat bermain dan pendidikan yang terbangun			Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	PU, DK3, Kantor LH
21	Peningkatan luasan RTH	- Pengembangan luas kawasan RTH	Tersedianya RTH minimum 30%	12%	12,5%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	PU	PU, DK3, Kantor LH

Misi VI : Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik sebagai warga kota madani	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan penguatan kelembagaan PUG	4 kali keg. 129 org	16 kali keg. 4 lokasi 2965 org	Pengarusutamaan gender (PUG)	Urusan Wajib	PPKB
2	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pemangku kebijakan terhadap hak-hakperempuan dan anak	Meningkatkan kualitas perempuan melalui sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif	Meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif, dan legislatif	Eksekutif : 9% Legeslatif : 3%	Eksekutif : 9% Legeslatif : 10%	- Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak - Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Urusan Wajib	PPKB
3	Meningkatnya peran kelembangaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan peran kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatnyajumlah lembaga perempuan (Balee Inong)	16	19	- Program Perlindungan Anak - Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan - Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Urusan Wajib	PPKB

No.	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Terwujudnya pencapaian program MDG's kesetaraan gender dan menurunya angka kematian anak	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mengurangi angka kematian bayi	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	2%	0,5%	- Program Keluarga Berencana - Program Pelayanan Kontrasepsi	Urusan Wajib	PPKB

Misi VII : Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terciptanya generasi muda yang cerdas, ber-etika dan berintegritas.	Meningkatkan peranan generasi muda sebagai wadah penyaluran aspirasi dan kontrol sosial.	Peningkatan peran generasi muda yang berjiwa sosial dan mampu berinteraksi dengan masyarakat.	Meningkatnya generasi muda trampil dan memiliki keahlian.	0%	60%	Pendidikan, pemuda dan olah raga	Pendidikan	Disdikpora
2	Terciptanya generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.	Meningkatnya peran generasi Muda dalam bidangkewirausahaan dan kecakapan hidup.	Meningkatnya generasi muda trampil dan mandiri.	10%	20%	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan	Disdikpora

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dari program prioritas Kota Banda Aceh diterjemahkan menjadi menjadi program dan kegiatan 47 SKPD. Disajikan pula pencapain target indikator kerja pada tahun 2017 yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kerja pada tahun 2012.

Secara ringkas rekapitulasi SKPD dan pendanaan selam lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1
Rekapitulasi SKPD dan Pendanaan
Tahun 2013 - 2017

NO	SKPD	2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	Dinas Pendidikan	48,246,781,455	50,659,120,528	52,906,188,955	58,187,807,850	64,251,254,652	274,251,153,441
2	Dinas Kesehatan	11,902,799,291	13,902,799,291	13,746,227,521	15,149,350,273	16,272,985,300	70,974,161,675
3	RSUD Meuraxa	30,340,594,796	31,857,624,536	39,167,500,241	37,990,037,633	41,627,820,013	180,983,577,218
4	Dinas Pekerjaan Umum	57,165,433,825	62,881,977,208	70,370,174,928	78,607,192,421	87,667,911,663	356,692,690,046
5	Bappeda	3,023,225,602	3,648,810,350	4,075,211,385	4,317,732,524	4,514,173,276	19,579,153,137
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7,277,992,170	8,205,791,000	9,870,588,000	10,491,256,000	11,040,018,750	46,885,645,920
7	Kantor Lingkungan Hidup	2,012,248,590	2,789,309,920	2,928,775,416	3,175,214,186	3,328,974,895	14,234,523,007
8	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	37,367,985,341	41,538,613,953	46,349,213,878	50,984,134,722	56,082,548,508	232,322,496,403
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,251,028,170	2,481,817,500	2,228,780,987	2,340,275,548	2,457,049,321	11,758,951,526
10	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	2,418,869,262	2,714,337,860	3,405,279,979	3,331,124,190	3,609,286,650	15,478,897,941
11	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	4,169,481,600	5,269,481,600	5,532,955,680	5,809,603,466	6,100,083,637	26,881,605,983
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,213,147,239	4,943,924,600	5,438,317,060	5,982,148,766	6,580,363,643	27,157,901,307
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10,137,816,741	11,151,598,415	15,054,657,860	17,312,856,539	14,542,799,493	68,199,729,048
14	Badan kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	931,880,200	3,592,652,604	964,055,656	983,336,769	1,003,003,504	7,474,928,732

NO	SKPD	2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
15	Satpol PP & WH	4,664,311,691	6,798,497,860	7,219,824,196	5,698,283,166	6,169,080,732	30,549,997,645
16	Sekretariat DPRK	30,204,157,700	31,110,282,431	32,938,925,000	25,343,325,000	25,843,325,000	145,440,015,131
17	Bagian Umum	16,562,906,925	17,391,052,271	18,267,054,885	19,173,635,128	20,140,992,556	91,535,641,765
18	Bagian Adm. Pembangunan	1,766,903,000	1,575,191,400	1,595,830,605	1,680,406,177	1,909,527,980	8,527,859,162
19	Bagian Humas	2,610,032,300	3,233,385,000	2,984,588,750	3,123,140,213	3,271,802,848	15,222,949,111
20	Bagian Hukum	653,154,250	1,237,360,600	1,113,501,656	1,174,063,261	1,237,716,118	5,415,795,884
21	Bag. Tata Pemerintahan	11,828,315,997	9,926,921,156	14,579,347,269	40,226,591,515	57,722,839,195	134,284,015,132
22	Bagian Organisasi	714,970,000	833,044,550	859,419,664	932,228,078	1,024,877,516	4,364,539,808
23	Bagian Keistimewaan	3,478,159,000	3,092,528,000	4,198,949,035	4,418,991,220	4,651,045,680	19,839,672,935
24	Bagian Adm. Perekonomian	192,992,605	103,960,489	210,967,758	221,516,146	232,591,953	962,028,951
25	DPKAD	8,147,819,950	6,633,826,500	6,958,847,500	6,873,147,250	7,014,371,600	35,628,012,800
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh	3,545,338,772	3,872,533,369	4,043,998,704	4,223,594,080	4,411,717,133	20,097,182,058
27	Inspektorat	1,452,611,000	1,732,772,000	2,086,319,200	2,239,281,120	2,412,189,232	9,923,172,552
28	Kecamatan Kuta Alam	2,011,989,415	2,072,349,097	2,175,966,552	2,284,764,880	2,399,003,124	10,944,073,068
29	Kecamatan Baiturrahman	1,845,448,900	1,900,812,367	2,231,987,000	2,343,586,350	2,460,765,668	10,782,600,285
30	Kecamatan Meuraxa	2,390,760,701	2,438,575,915	2,560,504,711	2,688,529,946	2,822,956,444	12,901,327,717
31	Kecamatan Syiah Kuala	1,972,144,000	1,796,458,400	4,653,444,747	1,980,595,386	2,079,625,155	12,482,267,687
32	Kecamatan Banda Raya	1,728,177,050	3,292,471,850	3,343,218,950	2,479,040,845	2,721,944,929	13,564,853,624
33	Kecamatan Kuta Raja	1,235,430,000	1,270,862,000	1,334,405,100	4,401,125,355	1,471,181,623	9,713,004,078
34	Kecamatan Jaya Baru	1,540,033,825	1,576,822,712	1,655,663,848	1,738,447,040	4,825,369,392	11,336,336,816
35	Kecamatan Lueng Bata	1,503,494,500	1,533,564,390	1,564,235,678	1,595,520,391	1,627,430,799	7,824,245,758
36	Kecamatan Ulee Kareng	1,574,832,700	1,653,574,300	1,736,253,000	1,823,065,700	1,914,219,000	8,701,944,700
37	KPPTSP	668,419,000	820,681,000	855,273,200	947,295,100	989,118,220	4,280,786,520
38	Badan Pemberdayaan Masyarakat	4,383,696,100	5,102,900,000	5,174,350,000	5,336,600,000	5,186,550,000	25,184,096,100
39	Perpustakaan dan Kearsipan	496,318,100	649,500,000	680,250,000	712,200,000	833,500,000	3,371,768,100
40	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian	5,948,088,796	6,245,493,236	6,557,767,898	6,885,656,292	7,229,939,107	32,866,945,329
41	Disperindagkop dan UKM	7,533,173,724	10,760,800,000	11,060,800,000	11,260,800,000	11,460,800,000	52,076,373,724
42	Dinas Syariat Islam	6,854,383,970	7,694,814,459	8,239,994,600	8,537,664,480	8,967,552,879	40,294,410,388
43	MPU	562,842,425	671,183,055	728,052,383	821,142,246	976,103,670	3,759,323,779
44	MAA	1,279,464,500	1,135,408,585	1,059,486,500	1,108,709,750	1,157,933,000	5,741,002,335
45	MPD	521,202,475	544,612,719	598,193,991	659,133,389	723,966,728	3,047,109,302
46	Baitul Mal	14,996,495,897	16,273,750,000	18,878,600,000	19,871,000,000	21,473,100,000	91,492,945,897
	TOTAL	**366,327,353,550**	**400,613,849,075**	**444,183,949,924**	**487,465,150,391**	**536,441,410,585**	**2,235,031,713,525**

Untuk lebih jelasnya secara lebih rinci dapat dilihat Tabel 8.2.

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran tentang prestasi daerah yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Kinerja daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran pembangunan daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapatmenggambarkan tingkat pencapaian kinerja daerah, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja daerah secara riil.

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Banda Aceh

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Pertumbuhan PDRB (%)	6,2	6,5	6,7	6,8	6,9	7	
	Laju inflasi (%)	2,32	3,45	3,65	4,05	4,2	4,5	
	PDRB per kapita (Ribu Rp)	14.18	14.601	15.19	15,95	16.91	18.09	
	Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan	8,99	8,58	8,20	7,90	7,60	7,30	
	PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Sosial							
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6%	10%	20%	30%	40%	50%	
	Tersedianya sarana prasarana pelayanan panti sosial	18%	36%	45%	63%	81%	100%	
	Tersedianya panti rehabilitasi social yang memiliki sarana prasarana pelayanan social yang memadai	0%	8%	76%	84%	92%	100%	
	Jumlah panti rehabilitasi	-	-	1	-	-	-	
	Jumlah orsos yang mendapatkan bantuan sarana prasarana social	25	13	13	13	13	13	
	Bantuan sosial bagi korban bencana	60%	75%	75%	75%	75%	75%	
	Jaminan sosial bagi penyandang	12,6%	20%	30%	40%	50%	60%	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	masalah kesejahteraan sosial							
	TAGANA yang mendapatkan peningkatan kapasitas kemampuan	0 org	36 org	36 org	36 org	36 org	36 org	
	Besaran penyandang cacat yang memperoleh pelatihan ketrampilan	17%	30%	50%	70%	80%	100%	
	Jumlah penyandang cacat yang dilatih	16	15	15	15	15	15	
	Badan Pemberdayaan Masyarakat							
	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)		17,5%	16,6%	16%	15,4%	15%	80,5%
	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG)		20%	20%	20%	20%	20%	100%
	Fasilitasi Pendapatan Kekayaan Gampong		20%	20%	20%	20%	20%	100%
	Ketenagakerjaan							
	Jumlah Instruktur BLK	0	1	1		1	1	
	Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan	2	1		1			
	Jumlah Mediator	1		1			1	
	Jumlah Pengantar kerja	2			1	1		
	Keselamatan dan perlindungan	2%	10%	20%	30%	40%	50%	
	Besaran pemeriksaan perusahaan	6%	45%	45%	45%	45%	45%	
	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	60%	80%	80%	80%	80%	80%	
	Perselisihan buruh dan pengusaha	90%	95%	95%	95%	95%	95%	
	Pencari kerja yang ditempatkan	22%	25%	30%	35%	40%	40%	
	Jumlah Pencari kerja yang dilatih	40	60	60	80	100	100	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20%	40%	50%	70%	80%	80%	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	40%	40%	50%	70%	80%	80%	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	50%	50%	50%	70%	80%	80%	
	Koperasi Usaha kecil dan menengah							
	Persentase koperasi aktif (%)	57	62	67	72	77	82	
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	90						
	Jumlah BPR/LKM UKM	27	30	33	36	39	42	
	Usaha mikro dan kecil	5801	250	300	400	450	500	
	KPPTSP							
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	41	109	125	161	185	212	833
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)							
	- PMDN (Juta)	669.321.954	1.092.500.000	1.256.375.000	1.444.831.250	1.661.555.957	1.900.789.328	8.025.373.489
	- PMA (Ribuan Rupiah)							
	Lama proses perizinan	1 - 7 hari	1 - 7 hari	1 - 7 hari	1 - 7 hari	1 - 7 hari	1 – 5 hari	3 hari
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah							
	- Pajak	2	2	3	3	3	3	3
	- Retribusi	3	3	5	5	5	5	5
	Jumlah qanun yang mendukung iklim usaha	18	19	19	20	20	22	22
	Pelayanan Urusan Pilihan							
	Pertanian							
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,4	4,6	4,8	4,9	4,9	5	5
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	2,02	2,00	1,95	1,90	1,87	1,85	
	Cakupan bina kelompok petani	90	95	99	105	109	112	112

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelautan dan Perikanan							
	Produksi perikanan	10	10.2	10.4	10.6	10.8	20.8	20.8
	Konsumsi ikan	8.892.000	8.911.500	8.931.000	8.950.000	8.970.000	9.165.000	9.165.000
	Cakupan bina kelompok nelayan	15	30	45	60	80	100	100
	Produksi perikanan kelompok nelayan	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4000
	Perdagangan							
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	22,73%	23,41%	24,35%	25,57%	27,10%	28,86%	
	Pasar							
	Cakupan Pasar	13	0	1	0	1	0	
	Perindustrian							
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	1,95%	2,01%	2,09%	2,21%	2,36%	2,55%	
	Pertumbuhan industri	2,2	9,3	6,5	12,1	4,1	10	
	Cakupan bina kelompok pengrajin	33	16,6	25	25	25	83	
	Baitul Mal							
	Presentase Muzakki (masyarakat) yang membayar ZIS (500 orang : 8000 orang x 100%)	6.25	18.75	31.25	50	68.75	100	100
	Bag. Adm. Ekonomi							
	Informasi kebutuhan pangan daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
	Informasi perusahaan daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
	Informasi kerjasama investasi	-	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
	Informasi potensi daerah	-	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
	Informasi pengembangan ekonomi masyarakat	Aplikasi	Aplikasi	-	-	-	Aplikasi	
	Prasarana Jalan							
	Proporsi Panjang jalan dalam Kondisi baik (SPM:	59.39%	0.08%	0.15%	0.22%	0.34%	0.45%	60.63%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100% 2014)							
	Persentase Aksesibilitas jalan yang menghubungkan Pusat Kegiatan (SPM: 100% 2014)	42.35%	0.26%	0.30%	0.33%	0.36%	0.39%	43.99%
	Sanitasi							
	Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi	90,59 %	1%	1%	1%	1%	1%	95,59%
	Rasio Rumah Layak Huni	90,59 %	1%	1%	1%	1%	1%	95,59%
	Rasio Pelayanan Sistem Air Limbah Skala Kawasan (SPM: 5% 2014)	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,8%
	Persampahan							
	Cakupan pelayanan (persentase penduduk terlayani)	82%	1%	1%	1%	1%	1%	87%
	Persentase sampah terangkut	78%	1%	0%	1%	1%	1%	82%
	Rasio TPS per satuan penduduk	1 : 4.230	1 : 4.360	1 : 4.490	1 : 4.625	1 : 4.765	1 : 4.900	1 : 4.900
	Perumahan							
	Rasio Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	1,5%
	Air Bersih							
	Rasio Penduduk yang berakses air bersih	79,90%	1%	1%	1%	1%	1%	84,90%
	Drainase							
	Persentase drainase dalam kondisi baik	60.00%	0.54%	0.57%	0.60%	0.63%	0.66%	62.98%
	Bangunan Gedung							
	Pembangunan Gedung Kantor Camat	70.50%	2%	2%	2%	2%	2%	81%
	Pembangunan Gedung BKOW	35%	20%	25%	20%	0%	0%	100%
	Pembangunan Gedung BKPP	20%	30%	30%	20%	0%	0%	100%
	Penataan Gapura Desa/Batas Kota	50%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
	Penataan Ruang							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketaatan terhadap RTRW	53.57%	54.40%	55.22%	56.05%	56.88%	57.70%	57.70%
	Luas wilayah produktif	52.08%	51.67%	52.49%	52.90%	53.31%	53.72%	54.13%
	Luas wilayah Industri	2.46%	2.46%	2.46%	2.46%	2.46%	2.46%	2.46%
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	60.10%						
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH							
	Pencegahan pencemaran air melalui pengelolaan lingkungan hidup pada berbagai jenis usaha/kegiatan (SPM: 100% 2013)	20%	4%	8%	8%	8%	8%	56%
	Pecegahan pencemaran udara pada sumber emisi tidak bergerak (SPM: 100% 2013)	50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	92%
	Pelayanan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup (SPM: 100% 2013)	0%	50%	10%	5%	5%	10%	80%
	Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa (SPM: 100% 2013)	0%	8%	8%	8%	8%	8%	40%
	Penanggulangan Bencana							
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	50%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (SPM: 75% 2015)	30%	30%	15%	10%	15%		100%
	Persentase ketersediaan infrastruktur mitigasi bencana (SPM: 80% 2017)	25%		15%	15%	15%	15%	85%
	Perhubungan							
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4.70	4.69	4.49	4.40	4.32	4.25	4.25

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rasio izin trayek	0.14%	0.13%	0,12%	0,11%	o,10	0,09%	0,09%
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum							
	- Orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Barang (ton)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis							
	- Pelabuhan ASDP	1	-	-	-	-	-	1
	- Terminal bis	2	-	-	-	-	-	2
	Jumlah Halte	36	1	1	1	1	1	41 halte
	Jumlah Rambu	1.717 unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	2.717 unit
	Jumlah Marka	57.938 M'	10.000 M'	10.000 M'	10.000 M'	10.000 M'	10.000 M'	62.939 M'
	Jumlah Traffic Light	17 titk	0	1 titk	1titik	0	0	19 titik
	Persentase uji kir angkutan umum							
	- Mobil penumpang umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	- Mobil bus	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	- Mobil barang	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Komunikasi dan Informasi							
	Rasio Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Tk. Kecamatan	0%	10%	10%	10%	10%	50%	50%
	Pelaksanaan Diseminasi Inf. & Pendistribusian Inf Nasional, melalui :							
	- Media massa	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)
	- Media online (website)	76 kali	100 kali/tahun	100 kali/tahun	100 kali/tahun	100 kali/tahun	100 kali/tahun	500 kali/5 tahun

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Media tradisional pertunjukan rakyat	2 kali/12 bulan	4 kali/12 bulan	4 kali/12 bulan	4 kali/12 bulan	4 kali/12 bulan	4 kali/12 bulan	20 kali/60 bulan
	- Media interpersonal		3 kali/ tahun	3 kali/ tahun	3 kali/ tahun	3 kali/ tahun	3 kali/ tahun	15 kali/ 5 tahun
	- Media luar ruang	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	12 bln (100 %)	60 bln (100 %)
	Operasional layanan LPSE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Teknik Informasi komunikasi (TIK)/MIMS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Layanan pengaduan masyarakat/SMS Gate Way	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sarana dan Prasarana Pariwisata							
	Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran	5%	0%	45%	50%	0%	0%	100%
	Sarana pendukung pada objek-objek wisata	15%	5%	20%	20%	20%	20%	100%
	Revitalisasi kawasan situs/bangunan cagar budaya	5%	0%	25%	25%	20%	25%	100%
	Sarana informasi pariwisata	25%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan Sosial							
	Pendidikan							
	Angka melek huruf	99,06%	99,20	99,30	99,40	99,60	99,80	100%
	Angka rata-rata lama sekolah	6,14	6,10	6,08	6,06	6,04	6,02	6,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	114,99	114,99	114,99	114,99	114,99	114,99	95%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	84,29	84,35	84,40	84,60	84,80	90	90%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	72,17	74,30	76,80	78,90	80,20	83,90	85%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	100%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	100%
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) SD	100	100	100	100	100	100	100%
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) SMP	99,40	99,60	99,70	99,80	99,10	100	100%
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) SMA	99.63	99,70	99,75	99.8	99.9	100	100%
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Pendidikan							
	Pendidikan Dasar							
	Angka partisipasi sekolah							
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	100%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	100%
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SD/MI	206	206	206	206	206	206	100%
	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTs	292	292	292	292	292	292	100%
	Rasio terhadap murid							
	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI)	19	20	22	24	26	28	28 (100%)
	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	12	13	14	15	16	17	18 (100%)

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan menengah							
	Angka partisipasi sekolah	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	100
	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	75	0	0	0	0	0	75
	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0	0	0	1	1	1	3
	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	46	0	0	0	0	0	46
	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	1	0	0	1	0	1	3
	Kesehatan							
	Angka Kematian Bayi	4/1000	3/1000	3/1000	2/1000	2/1000	1/1000	1/1000
	Rasio posyandu per satuan balita	0.1875	0.180555556	0.166666667	0.152777778	0.138888889	0.125	0.125
	Rasio Status Gizi buruk Balita	0.013	0.012	0.01	0.008	0.006	0.005	0.005
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	01:22.2	01:22.2	01:22.2	01:22.2	01:22.2	01:22.2	01:22.2
	Rasio Pustu, Polindes/poskesdes per desa	66,7%	67,6%	68,8%	70%	71,1%	72,2%	72,2%
	Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk	01:40.8	01:40.8	01:40.8	01:40.8	01:40.8	01:40.8	01:40.8
	Rasio Jumlah Tenaga Medis per penduduk	01:03.3	01:03.2	01:03.0	01:02.8	01:02.6	1.777777778	1.777777778
	Angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD)	0,1%	0,1%	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%	0,06%
	Rasio pencatatan dan pelaporan data kesehatan yang sudah terkoneksi melalui internet.	0	14%	47%	64%	77%	100%	100%
	Rumah Sakit Meuraxa							
	Sarana dan Prasarana	152	160	172	192	212	224	224
	Jumlah Tenaga Medis	11	15	17	20	25	30	30
	Dokter Spesialis Konsultan	0	1	2	3	4	4	4
	Jumlah Tenaga Paramedis	190	230	230	230	230	230	230

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ruangan Rawat Inap dan Pelayanan	8	9	10	10	11	11	11
	Sistem informasi Rumah Sakit (Billing System)	0	1	1	1	1	1	1
	Perpustakaan dan Arsip							
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip	7	3	4	4	4	4	26
	Sosialisasi kearsipan	0	0	10	10	10	10	40
	Pelayanan perpustakaan keliling	15%	20%	26%	32%	40%	46%	57%
	Koleksi buku pustaka	19.416	21.946	24.746	27.546	30.346	33.146	35.946
	Jumlah pengunjung perpustakaan	6.061	7.311	8.561	9.811	11.061	12.311	13.561
	Penyediaan bantuan perpustakaan gampong	21	30	40	50	60	70	80
	Pembinaan dan pembentukan perpustakaan gampong	37	40	45	56	60	65	72
	Peningkatan minat baca di kalangan pelajar	25%	32%	38%	43%	50%	53%	60%
	WISATA							
	JUMLAH PENYELENGGARAAN PERISTIWA DAN PEMBERDAYAAN SENI BUDAYA :							
	- Pelaksanaan Atraksi Budaya Mingguan	85	85	85	85	85	85	85/263
	- Pelaksanaan Event Seni Budaya/ Lomba/Atraksi Wisata/Pameran	24	7	8	9	10	11	69/232
	- Pelaksanaan Seminar/Workshop/Pelatihan	15	18	19	20	21	22	115/18
	PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN SITUS CAGAR BUDAYA	-	-	5	2	2	2	Nov-20

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BUDAYA DAERAH	-	3 Naskah (Pengelolaan kekayaan Budaya Daerah, Seni Tari, Rupa,& Musik)	1 Naskah (Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah)	-	-	-	4 Naskah
	Pelayanan Urusan Pilihan							
	Pariwisata							
	STATISTIK KEPARIWISATAAN							
	Naskah Laporan	1 cetakan	1 cetakan	1 cetakan	1 analisis	1 analisis	1 analisis	1 analisis
				1 laporan	1 cetakan	1 cetakan	1 cetakan	1 cetakan
					1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	MEDIA PROMOSI							
	CETAK							
	Leaflet	10.000 eks	1	1	1	1	1	5
			(2 bhs)	(2 bhs)	(2 bhs)	(2 bhs)	(2 bhs)	(2 bhs)
	Brosur	-	3	4	4	4	4	19
	Guide Book	6.500 eks	100	-	640	-	640	1.38
	Poster	1.750 eks	-	-	-	500	-	1
	Culinary Directory	4.200 eks	3.000 eks	2.000 lbr	-	1	2	8
	Tourism Map	13.500 eks	4.000 lbr	3.500 lbr	3.500 lbr	3.500 lbr	3.500 lbr	18
	Heritage Map	-	-	-	-	-	-	-
	Sticker	14.000 eks	200 lbr scotchlight	200 lbr	200 lbr	200 lbr	200 lbr	1
				scotchlight	scotchlight	scotchlight	scotchlight	
	Kalender Even	8.000 eks	1.000 lbr	1.000 lbr	1.000 lbr	1.000 lbr	1.000 lbr	5.000 lbr
	Paper Bag	4.000 eks	-	--	-	-	-	
	Heritage Book	1.500 eks	-	-	-			
	Buku Tamu	-	20 eks	11 bh	15 bh	15 bh	15 bh	76 bh
	Postcard	-	200 lbr	-	-	-	-	200 lbr
	Stiker Branding Bis Pariwisata	2 bus	-	-	-	-	-	2 bus
	ELEKTRONIK							
	Film Dokumenter	2 bh	1	-	-	-	-	1
	Video Iklan	1 bh	-	1	1	1	1	4
	Website	1 bh	1	1	1	1	1	5

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OUTDOOR							
	Baliho	44	11	50	50	50	50	211
	Banner	100	-	-	-	-	-	100
	Spanduk	100	-	17 lbr	17 lbr	17 lbr	17 lbr	168
	PELAKSANAAN PROMOSI							
	Pameran Dalam Negeri	11	2	2	2	2	2	10
	Pameran Luar Negeri	5	1	1	1	1	1	5
	SDM SEKTOR BUDAYA DAN PARIWISATA							
	TENAGA PRAMUWISATA	75 org		20				95
	BIDANG KESENIAN	-	-	-	2	2	2	4-Aug
	KELOMPOK SADAR WISATA	121 Org	121 Org (4 KEL)	121 Org (4 KEL)	162 org	162 org	162 org	283 0rg
		(4 KEL)			(5 kel)	(5 kel)	(5 kel)	(5 kel)
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBJEK WISATA RAWAN PELANGGARAN NILAI DAN NORMA LOKAL	-	-	1	1	1	1	1-May
	Majelis Pendidikan Daerah							
	Monitoring dan Evaluasi Mutu Pendidikan terhadap SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK	129	136	140	147	155	162	167
	Sosialisasi Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK	3	4	4	4	4	4	20
	Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK	129	136	140	147	155	162	167
	Sosialisasi konsep pendidikan Islami untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK	3	4	4	4	4	4	20
	Memberi pertimbangan kepada kepala	4	4	4	4	4	4	20

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	daerah dan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga terhadap mutu pendidikan SD/MI.							
	Menampung aspirasi masyarakat (sekolah) serta peran Mediasi (sekolah)	20	15	12	10	10	10	10
	Musyawarah besar MPD dan pemilihan anggota MPD yang baru	0	100%	-	-	-	-	100%
	Bagian Keistimewaan							
	KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN							
	MTQ tingkat Kota	329	-	350	-	405	-	405
	MTQ tingkat Propinsi	44	44	-	45	-	45	45
	Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) Tingkat Kota Banda Aceh	1.3	1350	1400	1450	1500	1500	1500
	Festival Qasidah Rebana	9	9	9	9	9	9	9
	KPA-PAI	9	9	9	9	9	9	9
	Majelis Adat Aceh							
	- Perlombaan Dalail Khairat	9	9	9	9	9	9	9 kec.
	- Pembinaan dan Perlombaan Zikir Aceh	9	9	9	9	9	9	9 kec.
	- Peningkatan kapasitas lembaga adat	9	9	9	9	9	9	9 kec.
	- Pembinaan Majelis Adat Kecamatan	0	9	-	-	-	-	9 kec.
	- Perlombaan Seumapa	0	20	40	60	80	90	90 gpg
	- Sosialisasi dan pelatihan reusam gampong	0	9	9	9	9	9	9 kec.
	- Sosialisasi Adat Peusijuek	0	20	40	60	80	90	90 gpg

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Majelis Permusyawaratan Ulama							
	Kegiatan MPU :							
	- Peserta Rapat Kerja Ulama	70 org	70	70	70	70	70	70 org
	- Peserta Muzakarah Ulama	40 org	70	70	70	70	70	70 org
	- Peserta Pelatihan Kader Ulama	40 org	45	45	45	45	45	90 org
	- Penerbitan Buletin MPU	0	200 eks	200 eks	200 eks	200 eks	200 eks	1000 eks
	- Pengajian Muslimat MPU	11x	11x	11x	11x	11x	11x	100%
	- Lokakarya Ulama Dayah	-	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org	100%
	- Penerbitan Buku Mengenai Fatwa Kontemporer	-	100 eks	100 eks	100 eks	100 eks	100 eks	500 eks
	- Rasio pemberian pertimbangan saran dan pendapat	13%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Satuan Polisi Pamong Praja							
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,06	6,06	7	8	9	10	100%
	Persentase Qanun yang ditangani	24%	30%	45%	53%	65%	75%	75%
	Presentase Penanganan Pelanggaran Qanun	71.77%	75%	78%	80%	85%	90%	90%
	Inspektorat							
	Persentase jumlah Obrik yang diperiksa dengan total Obrik	46%	75%	80%	81%	85%	90%	90%
	Persentase jumlah pegawai dan tingkat kompetensi	47%	50%	60%	70%	75%	80%	100%
	Persentase jumlah penyelesaian TL dengan rekomendasi BPK	88,24%	88,50%	90%	91%	92%	92%	92%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase jumlah penyelesaian TL dengan rekomendasi BPKP	100%	90%	90%	90%	90%	92%	92%
	Persentase jumlah penyelesaian TL dengan rekomendasi Inspektorat Aceh	92%	92%	92%	92%	92,5%	93%	93%
	Persentase jumlah penyelesaian TL dengan rekomendasi Inspektorat Kota Banda Aceh	93,81	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Persentase jumlah SKPD yang masuk dalam wilayah bebas korupsi dibandingkan total SKPD	0	12,8%	25,64%	38,5%	51,3%	64,1%	64,1%
	Baitul Mal							
	Pembinaan baitul mal gampong	0	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	100%
	Sosialisasi zakat	0	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	100%
	Pendataan, monitoring dan evaluasi penyaluran zakat produktif	0	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	100%
	Pengadaan sistem penerimaan zakat dan NPWZ Baitul Mal Kota Banda Aceh	0	1 paket	1 paket	-	-	-	100%
	Pendataan dan penyaluran calon penerima ZIS	0	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	100%
	Penyaluran ZIS	0	90%	90%	90%	90%	90%	100%
	Pendataan calon muzakki	0	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	90 gpg	100%
	Rekruitmen tenaga profesional pengumpul ZIS	0	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	25 org
	Monitoring dan evaluasi tenaga professional pengumpul ZIS	0	9 org	9 org	9 org	9 org	9 org	100%
	Sosialiasi, optimalisasi penerima ZIS	0	15 org	15 org	15 org	15 org	15 org	100%
	DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
	Kependudukan							
	Rasio Cakupan Kepemilikan KTP	99.27%	99.28%	99.29%	99.30%	99.31%	99.32%	99.32%
	Rasio Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	35.00%	40.00%	44.00%	48.00%	52.00%	55.00%	55.00%
	Pemberdayaan Perempuan							
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak							
	Advocasi dan Fasilitas PUG bagi perempuan	25%	25%	30%	35%	75%	75%	75%
	Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	25%	25%	30%	35%	40%	40%	40%
	Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	25%	25%	30%	35%	75%	75%	75%
	Program Kualitas Hidup dan Kualitas Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian & Pelaporan Pembangunan							
	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan							
	Peningkatan indeks Pembangunan Gender (IPG)	63.88%	63.88%	64.35%	66.75%	68.50%	69.25%	69.25%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tercapainya persentase pemenuhan hak-hak perempuan untuk peningkatan kesejahteraan pend. Sosial, ekonomi dan lingkungan hidup	10%	-	10.00%	17.50%	23.50%	27.75%	27.75%
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan							
	Tercapainya persentase pemenuhan hak-hak perempuan untuk peningkatan kesejatreaan	15%	15%	18.25%	22.50%	26.75%	30.00%	30.00%
	Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan							
	Pelayanan indeks pemberdayaan Gender (GEM)	61.79%	61.79%	62.50%	63.75%	64.50%	65.25%	65.25%
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga							
	Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I	51.03%	51.03%	50.16%	49.33%	48.55%	47.81%	47.81%
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS bagi perempuan							
	Proporsi jumlah perempuan usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS	10%	10%	12%	14%	16%	18%	18%
	Proporsi jumlah Perempuan yang memiliki pengetahuan tentang Penyakit Menular Seksual (PMS)	32%	32%	34%	35%	37%	39%	39%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rasio pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai Laki-laki di lembaga pemerintah	65,90%	65,90%	65,90%	65,90%	65,90%	65,90%	65,90%
	Partisipasi pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibandingkan dengan pekerja perempuan	25,65%	35,65%	45,65%	55,65%	65,65%	75,65%	75,65%
	Rasio perempuan dalam jabatan eselon II di exekutif	8%	9%	10%	11%	12%	13%	13%
	Rasio perempuan di Legislatif	3,3%	3,3%	20%	20%	20%	20%	20%
	Rasio KDRT	0.090%	-	0.098%	0.103%	0.110%	0.115%	0.115%
	Penanganan KDRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,48%	0,45%	0,40%	0,35%	0,33%	0,30%	0,30%
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,1 anak org/kel	3,1 anak org/kel	3,1 anak org/kel	3,1 anak org/kel	3,1 anak org/kel	2,6 anak org/kel	2,6 anak org/kel
	Rasio akseptor KB	19.23%	49901	56901	64901	79901	84901	84901
	Rasio Jumlah PLKB Perwilayah Kerja	1:7	1:6	1:5	1:4	1:3	1:3	1:3
	Cakupan peserta KB aktif	70.41%	70.41%	72.31%	74.41%	76.51%	80.41%	80.41%
	Persentase kesehatan ibu dan anak	27%	27%	28%	31%	33%	35%	35%
	Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100
	Ketertiban umum							
	Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk	50	45	40	35	30	25	25
	Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan	180	190	200	210	220	230	230
	Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Jumlah kasus Narkoba	80	60	40	20	10	0,0	0,0
	Jumlah kasus Pembunuhan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah Kejahatan Seksual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah kasus Penganiayaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah kasus Pencurian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah kasus Penipuan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Angka kriminalitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah demonstrasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah Ormas, OKP	70	70	70	70	70	70	70
	Jumlah LSM	15	15	15	15	15	15	15
	Pemerintahan Umum							
	Rasio Penetapan Qanun	45,94%	50%	65%	75%	85%	100%	100%
	Regulasi Pemerintahan Mukim dan Gampong	4	5	6	7	8	8	8
	Rasio jumlah tapal batas gampong	16,7%	27,8%	42,2%	58,8%	77,8%	100%	100%

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan kota yang memuat visi, misi, dan program Walikota Banda Aceh serta merupakan kesinambungan dari RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2007–2012. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan menuju "**Banda Aceh Model Kota Madani"**.

Pada dasarnya, RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 ini menjabarkan rencana strategis yang berkaitan erat dengan penetapan arah perkembangan kota lima tahun mendatang sebagai landasan untuk menentukan apa yang hendak dicapai, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang diperlukan agar tujuan tercapai sesuai dengan visi dan misi walikota terpilih.

10.1. Pedoman Transisi

Mengingat masa jabatan Walikota Banda Aceh akan berakhir pada tahun 2017 maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengantisipasi kekosongan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama di bawah kepemimpinan walikota periode berikutnya. Oleh karena itu, RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2018. Dengan demikian, maka RKPK tahun 2018 merupakan RKPK masa transisi dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD walikota dan wakil walikota terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program walikota merupakan acuan bagi setiap kepala SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Kota Banda Aceh setiap tahunnya yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Banda Aceh;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan kota, Walikota Banda Aceh dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh;
3. Lembaga eksekutif dan legislatif Kota Banda Aceh serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban dan diharapkan berperan serta dalam melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012–2017 dengan sebaik-baiknya;
4. Walikota Banda Aceh dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
5. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017;
6. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, oleh karena itu seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, dengan berpedoman pada

RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala SKPD serta di sahkan oleh walikota;

7. Bagi SKPD yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Qanun RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra SKPD Kota Banda Aceh;
9. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
    - Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPK oleh Bappeda, yang diikuti secara bersamaan dengan penyusunan Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD;
    - Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Awal RKPK melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Gampong (desa), Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kota serta penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRK sesuai pembagian daerah pemilihan;
    - Rancangan Akhir RKPK disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Kota dengan mengacu kepada hasil forum SKPD;
    - Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPK Banda Aceh merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK), utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
    - Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) harus berpedoman kepada Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja;

10. Untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 dilaksananakan oleh masing-masing SKPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Banda Aceh;
11. Penyusunan organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD 2012-2017 dan membagi atau memisahkan secara jelas tanggungjawab perangkat daerah antara sebagai regulator dengan sebagai operator, artinya tidak diperkenankan saat perangkat daerah mempunyai peran ganda sebagai regulator sekaligus operator karena fungsi evaluasi dan pengawasannya menjadi tumpang tindih serta dijalankan oleh SDM yang mempunyai kompetensi;
12. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali Pemerintah Kota Banda Aceh dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPRK Banda Aceh untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BAB XI
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 merupakan arahan dan pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Aceh selama lima tahun mendatang. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 diharapkan memberikan dorongan kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk merealisasikan Banda Aceh Model Kota Madani.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang RPJMD sebagai perwujudan visi dan misi walikota sangat ditentukan oleh adanya dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, komitmen dan dukungan DPRK Banda Aceh, kemitraan dengan pihak swasta, serta terjalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi, serta dukungan seluruh masyarakat.

WALIKOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

NO	SKPD	2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	Dinas Pendidikan	48,246,781,455	50,659,120,528	52,906,188,955	58,187,807,850	64,251,254,652	274,251,153,441
2	Dinas Kesehatan	11,902,799,291	13,902,799,291	13,746,227,521	15,149,350,273	16,272,985,300	70,974,161,675
3	RSUD Meuraxa	30,340,594,796	31,857,624,536	39,167,500,241	37,990,037,633	41,627,820,013	180,983,577,218
4	Dinas Pekerjaan Umum	57,165,433,825	62,881,977,208	70,370,174,928	78,607,192,421	87,667,911,663	356,692,690,046
5	Bappeda	3,023,225,602	3,648,810,350	4,075,211,385	4,317,732,524	4,514,173,276	19,579,153,137
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7,277,992,170	8,205,791,000	9,870,588,000	10,491,256,000	11,040,018,750	46,885,645,920
7	Kantor Lingkungan Hidup	2,012,248,590	2,789,309,920	2,928,775,416	3,175,214,186	3,328,974,895	14,234,523,007
8	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	37,367,985,341	41,538,613,953	46,349,213,878	50,984,134,722	56,082,548,508	232,322,496,403
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,251,028,170	2,481,817,500	2,228,780,987	2,340,275,548	2,457,049,321	11,758,951,526
10	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	2,418,869,262	2,714,337,860	3,405,279,979	3,331,124,190	3,609,286,650	15,478,897,941
11	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	4,169,481,600	5,269,481,600	5,532,955,680	5,809,603,466	6,100,083,637	26,881,605,983
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,213,147,239	4,943,924,600	5,438,317,060	5,982,148,766	6,580,363,643	27,157,901,307
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10,137,816,741	11,151,598,415	15,054,657,860	17,312,856,539	14,542,799,493	68,199,729,048
14	Badan kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	931,880,200	3,592,652,604	964,055,656	983,336,769	1,003,003,504	7,474,928,732
15	Satpol PP & WH	4,664,311,691	6,798,497,860	7,219,824,196	5,698,283,166	6,169,080,732	30,549,997,645
16	Sekretariat DPRK	30,204,157,700	31,110,282,431	32,938,925,000	25,343,325,000	25,843,325,000	145,440,015,131
17	Bagian Umum	16,562,906,925	17,391,052,271	18,267,054,885	19,173,635,128	20,140,992,556	91,535,641,765
18	Bagian Adm. Pembangunan	1,766,903,000	1,575,191,400	1,595,830,605	1,680,406,177	1,909,527,980	8,527,859,162
19	Bagian Humas	2,610,032,300	3,233,385,000	2,984,588,750	3,123,140,213	3,271,802,848	15,222,949,111
20	Bagian Hukum	653,154,250	1,237,360,600	1,113,501,656	1,174,063,261	1,237,716,118	5,415,795,884
21	Bag. Tata Pemerintahan	11,828,315,997	9,926,921,156	14,579,347,269	40,226,591,515	57,722,839,195	134,284,015,132
22	Bagian Organisasi	714,970,000	833,044,550	859,419,664	932,228,078	1,024,877,516	4,364,539,808
23	Bagian Keistimewaan	3,478,159,000	3,092,528,000	4,198,949,035	4,418,991,220	4,651,045,680	19,839,672,935
24	Bagian Adm. Perekonomian	192,992,605	103,960,489	210,967,758	221,516,146	232,591,953	962,028,951
25	DPKAD	8,147,819,950	6,633,826,500	6,958,847,500	6,873,147,250	7,014,371,600	35,628,012,800
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh	3,545,338,772	3,872,533,369	4,043,998,704	4,223,594,080	4,411,717,133	20,097,182,058
27	Inspektorat	1,452,611,000	1,732,772,000	2,086,319,200	2,239,281,120	2,412,189,232	9,923,172,552
28	Kecamatan Kuta Alam	2,011,989,415	2,072,349,097	2,175,966,552	2,284,764,880	2,399,003,124	10,944,073,068
29	Kecamatan Baiturrahman	1,845,448,900	1,900,812,367	2,231,987,000	2,343,586,350	2,460,765,668	10,782,600,285
30	Kecamatan Meuraxa	2,390,760,701	2,438,575,915	2,560,504,711	2,688,529,946	2,822,956,444	12,901,327,717
31	Kecamatan Syiah Kuala	1,972,144,000	1,796,458,400	4,653,444,747	1,980,595,386	2,079,625,155	12,482,267,687
32	Kecamatan Banda Raya	1,728,177,050	3,292,471,850	3,343,218,950	2,479,040,845	2,721,944,929	13,564,853,624
33	Kecamatan Kuta Raja	1,235,430,000	1,270,862,000	1,334,405,100	4,401,125,355	1,471,181,623	9,713,004,078
34	Kecamatan Jaya Baru	1,540,033,825	1,576,822,712	1,655,663,848	1,738,447,040	4,825,369,392	11,336,336,816

NO	SKPD	2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
35	Kecamatan Lueng Bata	1,503,494,500	1,533,564,390	1,564,235,678	1,595,520,391	1,627,430,799	7,824,245,758
36	Kecamatan Ulee Kareng	1,574,832,700	1,653,574,300	1,736,253,000	1,823,065,700	1,914,219,000	8,701,944,700
37	KPPTSP	668,419,000	820,681,000	855,273,200	947,295,100	989,118,220	4,280,786,520
38	Badan Pemberdayaan Masyarakat	4,383,696,100	5,102,900,000	5,174,350,000	5,336,600,000	5,186,550,000	25,184,096,100
39	Perpustakaan dan Kearsipan	496,318,100	649,500,000	680,250,000	712,200,000	833,500,000	3,371,768,100
40	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian	5,948,088,796	6,245,493,236	6,557,767,898	6,885,656,292	7,229,939,107	32,866,945,329
41	Disperindagkop dan UKM	7,533,173,724	10,760,800,000	11,060,800,000	11,260,800,000	11,460,800,000	52,076,373,724
42	Dinas Syariat Islam	6,854,383,970	7,694,814,459	8,239,994,600	8,537,664,480	8,967,552,879	40,294,410,388
43	MPU	562,842,425	671,183,055	728,052,383	821,142,246	976,103,670	3,759,323,779
44	MAA	1,279,464,500	1,135,408,585	1,059,486,500	1,108,709,750	1,157,933,000	5,741,002,335
45	MPD	521,202,475	544,612,719	598,193,991	659,133,389	723,966,728	3,047,109,302
46	Baitul Mal	14,996,495,897	16,273,750,000	18,878,600,000	19,871,000,000	21,473,100,000	91,492,945,897
	TOTAL	**366,327,353,550**	**400,613,849,075**	**444,183,949,924**	**487,465,150,391**	**536,441,410,585**	**2,235,031,713,525**